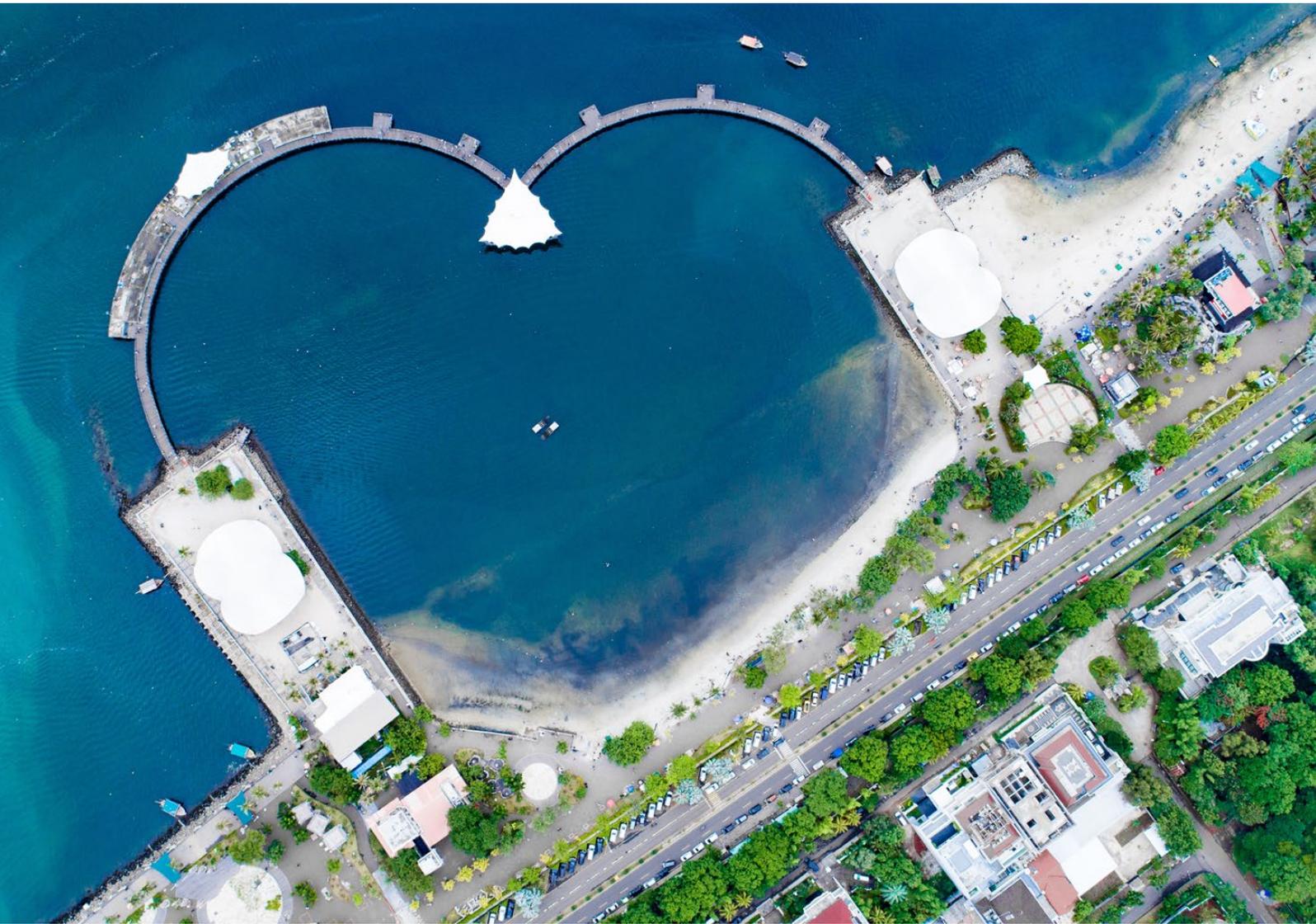


# Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta

Mei 2024





# LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI DKI JAKARTA

---

Mei 2024

Kantor Perwakilan Bank Indonesia  
Provinsi DKI Jakarta

# Visi, Misi & Nilai Strategis Bank Indonesia

## Visi

“Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara *emerging markets* untuk Indonesia Maju”

## Misi

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang andal, serta peran internasional yang proaktif.

## Nilai-nilai Strategis Organisasi

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah :



Kejujuran dan integritas  
(*trust and integrity*)



Profesionalisme  
(*professionalism*)



Keunggulan  
(*excellence*)



Mengutamakan  
kepentingan umum  
(*public interest*)



Koordinasi dan kerjasama tim  
(*coordination and teamwork*)  
yang belandaskan keluhuran  
nilai-nilai agama (religi).



# Visi & Misi

## Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

### Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional

### Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

# Kata Pengantar

Kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya buku Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta edisi Mei 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta ini diterbitkan rutin secara triwulanan, dimana pada edisi Mei 2024 ini menganalisis dan mengevaluasi kondisi perekonomian DKI Jakarta, khususnya pada triwulan I 2024, triwulan II 2024 serta prospek keseluruhan tahun 2024.

Pada triwulan I 2024, perekonomian DKI Jakarta tetap tumbuh tinggi sebesar 4,78% (yoy), meskipun sedikit melambat jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 4,85% (yoy). Perekonomian Jakarta yang tetap tumbuh tinggi didukung oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, dan Konsumsi LNPR yang meningkat seiring dengan berlangsungnya momen HBKN Idulfetri dan Pemilu 2024. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi Jakarta yang lebih tinggi tertahan pertumbuhan ekspor yang melambat di tengah peningkatan impor. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Jakarta ditopang oleh peningkatan kinerja LU Konstruksi, LU Infokom, LU Jasa Perusahaan, dan LU Akmamin. Hal ini sejalan dengan masih berlanjutnya berbagai proyek strategis Pemerintah maupun swasta di Jakarta hingga banyaknya penyelenggaraan event dan MICE didukung pula oleh tingginya pengeluaran Masyarakat pada komponen hotel dan restoran.

Ke depan, perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh tinggi dalam kisaran 4,8%-5,6%, yang utamanya didukung oleh solidnya permintaan domestik. Adapun inflasi diperkirakan terkendali dalam rentang sasaran yang lebih rendah 2,5 ± 1%. Perkembangan tersebut seiring cuaca yang lebih kondusif dan sinergi pengendalian inflasi TPID, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada berbagai pihak, antara lain BPS Provinsi DKI Jakarta, SKPD Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, kalangan pelaku usaha, narasumber dalam berbagai *Focus Group Discussion* dan pihak-pihak lainnya, atas perolehan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan buku ini. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi sumber referensi bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi Jakarta, dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Masukan dan saran dari berbagai pihak juga kami harapkan untuk dapat meningkatkan kualitas laporan ini. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya dan melindungi kita dalam berkarya.

Jakarta, Juni 2024  
Kepala Perwakilan  
Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

ttd.

**Arlyana Abubakar**  
Direktur Eksekutif



# Daftar Isi

Visi Misi Bank Indonesia	III
Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	VI
Daftar Tabel	VIII
Daftar Gambar	IX
Daftar Grafik	X
Ringkasan Eksekutif	XIV
Tabel Indikator	XVIII
Tim Penyusun	101

<b>Bab I</b>	
<b>Perekonomian Global &amp; Nasional</b>	<b>1</b>
A. Perekonomian Global	3
B. Perekonomian Nasional	3
C. Bauran Kebijakan Bank Indonesia	6

<b>Bab II</b>	
<b>Ekonomi Makro Regional</b>	<b>7</b>
A. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024	9
B. <i>Tracking</i> Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2024	18

<b>BOKS 1</b>	
Penguatan Pariwisata Jakarta menuju Kota Global: Wisata Urban	23



<b>Bab III</b>	
<b>Keuangan Pemerintah</b>	<b>27</b>
A. Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi DKI Jakarta 2023	29
B. Realisasi Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	29
C. Belanja Daerah APBD	31
D. Pembiayaan Daerah APBD	32
E. Realisasi Pendapatan dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga di DKI Jakarta	32

<b>Bab IV</b>	
<b>Inflasi</b>	<b>37</b>
A. Kinerja Inflasi Provinsi Triwulan I 2024	39
B. <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan II 2024	42
C. Program Pengendalian Inflasi Triwulan I 2024	44
<b>BOKS 2</b>	
Sinergi Pengendalian Inflasi Aglomerasi Jabodetabekjur	47



## Bab V

### Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

	<b>51</b>
a. Perkembangan Kinerja Bank Umum	<b>53</b>
B. Perkembangan Kinerja Sektor Korporasi	<b>58</b>
C. Perkembangan Kinerja Sektor Rumah Tangga	<b>63</b>
D. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	<b>66</b>
E. Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Lainnya	<b>68</b>

## Bab VI

### Sistem Pembayaran

	<b>69</b>
A. Kondisi Umum	<b>71</b>
B. Perkembangan Sistem Pembayaran di Provinsi DKI Jakarta	<b>71</b>
C. Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran	<b>74</b>

## BOKS 3

Digitalisasi Sistem Pembayaran Sektor Transportasi Jakarta	<b>77</b>
--	-----------

## Bab VII

### Ketenagakerjaan & Kesejahteraan

	<b>81</b>
A. Ketenagakerjaan	<b>83</b>
B. Kemiskinan	<b>86</b>
C. Indeks Ketimpangan Gender	<b>89</b>
D. Upah Tenaga Kerja	<b>90</b>

## Bab VIII

### Prospek Perekonomian

	<b>91</b>
A. Prospek Perekonomian Global dan Nasional	<b>93</b>
B. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Jakarta	<b>95</b>

# Daftar Tabel

<b>Tabel 1.1</b>	Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (% , yoy)	<b>3</b>
<b>Tabel 1.2</b>	Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Pengeluaran	<b>4</b>
<b>Tabel 1.3</b>	Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Lapangan Usaha	<b>4</b>
<b>Tabel B1.1</b>	Lokasi Wisata <i>Urban</i> di DKI Jakarta	<b>23</b>
<b>Tabel 3.1</b>	Perkembangan Pagu APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta	<b>34</b>
<b>Tabel 3.2</b>	Rincian Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Triwulan I 2024	<b>35</b>
<b>Tabel 3.3</b>	Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta	<b>36</b>
<b>Tabel 3.4</b>	Rincian Realisasi APBN di DKI Jakarta Triwulan I 2024	<b>36</b>
<b>Tabel B2.1</b>	Volatilitas Inflasi Jabodetabek 2020 – 2023	<b>48</b>
<b>Tabel 5.1</b>	Perkembangan Kinerja Bank Umum di Provinsi DKI Jakarta	<b>53</b>
<b>Tabel 5.2</b>	Tabel Rasio Keuangan Korporasi Nonkeuangan	<b>60</b>
<b>Tabel 5.3</b>	Kredit Korporasi menurut sektor ekonomi	<b>61</b>
<b>Tabel 6.1</b>	Perkembangan Transaksi Uang Kartal	<b>71</b>
<b>Tabel 6.2</b>	Persebaran KUPVA BB	<b>74</b>
<b>Tabel 6.3</b>	Perkembangan Transaksi PJP LR	<b>75</b>
<b>Tabel 7.1</b>	Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	<b>83</b>
<b>Tabel 7.2</b>	Perkembangan Status Pekerjaan Utama	<b>84</b>
<b>Tabel 8.1</b>	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen (yoy))	<b>93</b>
<b>Tabel 8.2</b>	Proyeksi PDB Nasional	<b>95</b>
<b>Tabel 8.3</b>	Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta 2024	<b>100</b>

# Daftar Gambar

<b>Gambar 1.1</b>	Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan I 2024 (% yoy)	4
<b>Gambar 1.2</b>	Peta Inflasi Daerah Bulan Mei 2024 (% yoy)	5
<b>Gambar B3.1</b>	Posisi TomTom <i>Traffic Index</i> Jakarta	77
<b>Gambar B3.2</b>	Waktu Tempuh Perjalanan di Jakarta Berdasarkan Jam Operasional	78
<b>Gambar B3.3</b>	Total Waktu dan Produksi Emisi Mengendara di Jakarta 2023	78
<b>Gambar B3.4</b>	Skema Perluasan Elektronifikasi Integrasi Pembayaran Transportasi Jakarta (EIPTJ)	79
<b>Gambar B3.5</b>	Skema <i>Mobility as a Service, First Mile-Last Mile</i>	79
<b>Gambar B3.6</b>	<i>Urban Mobility Readiness Index</i> Jakarta	80

# Daftar Grafik

Grafik 1.1	Inflasi Global	3	Grafik 2.26	Perkembangan Konsumsi Listrik Industri	15
Grafik 1.2	Aliran Modal ke Negara Berkembang	3	Grafik 2.27	Perkembangan Nilai Impor Bahan Baku	15
Grafik 1.3	Indeks Keyakinan Konsumen	5	Grafik 2.28	Perkembangan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan	15
Grafik 1.4	<i>Purchasing Manager's Index</i> (PMI) Manufaktur	5	Grafik 2.29	Pertumbuhan Produksi Mobil	15
Grafik 2.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional	9	Grafik 2.30	Pertumbuhan Penyaluran Kredit di Sektor Industri	16
Grafik 2.2	Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Komponen Pengeluaran	9	Grafik 2.31	Pertumbuhan Kredit, DPK, dan Kondisi Dunia Usaha Jasa Keuangan di DKI Jakarta	16
Grafik 2.3	Perkembangan IKK, IKE, dan IEK DKI Jakarta	10	Grafik 2.32	Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	16
Grafik 2.4	Perkembangan Indeks Penjualan Eceran (IPE)	10	Grafik 2.33	Perkembangan Kegiatan Usaha LU Konstruksi	16
Grafik 2.5	Penyaluran Kredit Konsumsi RT di DKI Jakarta	10	Grafik 2.34	Pertumbuhan LU Infokom	17
Grafik 2.6	Penjualan <i>E-commerce</i> di DKI Jakarta	10	Grafik 2.35	Pertumbuhan LU Jasa Perusahaan dan LU Akmamin	17
Grafik 2.7	Pertumbuhan Belanja Utama Kementerian/Lembaga (APBN) di Jakarta	11	Grafik 2.36	Pertumbuhan LU Transportasi dan Pergudangan	17
Grafik 2.8	Pertumbuhan Belanja Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (APBD)	11	Grafik 2.37	Perkembangan IKK, IEK, dan IKE Berdasarkan Hasil Survei Konsumen	18
Grafik 2.9	Perkembangan Impor Barang Modal di DKI Jakarta	11	Grafik 2.38	Perkembangan IPE Berdasarkan Hasil Survei Penjualan Eceran	18
Grafik 2.10	Perkembangan Impor Besi dan Baja di DKI Jakarta	11	Grafik 2.39	Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi RT	19
Grafik 2.11	Pertumbuhan Net Ekspor Total DKI Jakarta	11	Grafik 2.40	Perkembangan Penjualan Mobil di Jakarta	19
Grafik 2.12	Neraca Perdagangan Luar Negeri DKI Jakarta	11	Grafik 2.41	Perkembangan Investasi Kegiatan Usaha (SKDU)	19
Grafik 2.13	Perkembangan Ekspor Luar Negeri Barang	12	Grafik 2.42	Perkembangan Kredit Investasi Korporasi	19
Grafik 2.14	Perkembangan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	12	Grafik 2.43	Perkembangan Ekspor Mobil CBU	20
Grafik 2.15	Perkembangan Impor berdasarkan Jenisnya	12	Grafik 2.44	Perkembangan Aktivitas Muat Tanjung Priok	20
Grafik 2.16	Aktivitas Bongkar di Pelabuhan Tanjung Priok	12	Grafik 2.45	Perkembangan Ekspor Komoditas Unggulan di Jakarta	20
Grafik 2.17	Perkembangan Pertumbuhan Lima LU Utama	13	Grafik 2.46	Perkembangan Kedatangan Penumpang Internasional ke Jakarta	20
Grafik 2.20	Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Berdasarkan Lapangan Usaha	13	Grafik 2.47	Perkembangan Keberangkatan Penumpang Internasional dari Jakarta	20
Grafik 2.18	Perkembangan Pertumbuhan LU Jasa Perusahaan, LU Penyediaan Akmamin, dan LU Transgud	13	Grafik 2.48	Perkembangan Nilai Impor Mobil (Otomotif)	21
Grafik 2.19	Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta Triwulan I 2024	13	Grafik 2.49	Perkembangan Kegiatan Usaha LU Perdagangan	21
Grafik 2.21	Pertumbuhan LU Perdagangan dan Konsumsi RT	14	Grafik 2.50	Indeks Total Penjualan Eceran	21
Grafik 2.22	Perkembangan Survei Penjualan Eceran	14	Grafik 2.51	Perkembangan Kegiatan Usaha LU Industri Pengolahan	21
Grafik 2.23	Perkembangan Penjualan Produk Melalui <i>e-commerce</i> di Jakarta	14	Grafik 2.52	Perkembangan Kegiatan Usaha LU Industri Pengolahan	22
Grafik 2.24	Perkembangan Penyaluran Kredit LU Perdagangan	14	Grafik 2.53	Realisasi Pengadaan Semen Jakarta	22
Grafik 2.25	Perkembangan Penjualan Mobil di Jakarta	15			

# Daftar Grafik

Grafik 2.54	Perkembangan Kegiatan Usaha LU Jasa Keuangan	22	Grafik 4.5	Perkembangan Harga Cabai Merah	40
Grafik 2.55	Perkembangan Penyaluran Kredit di Jakarta	22	Grafik 4.6	Perkembangan Harga Telur Ayam Ras	40
Grafik B1.1	Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara	24	Grafik 4.7	Perkembangan Stok Telur Ayam Ras	40
Grafik B1.2	Asal Negara Wisatawan Mancanegara	24	Grafik 4.8	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Kondisi Ekonomi (IKE)	41
Grafik B1.3	Perkembangan Harga Properti Residensial Jabodetabek	24	Grafik 4.9	Inflasi Kelompok Pengeluaran April 2024	42
Grafik B1.4	Perkembangan Penyaluran KPR di Jakarta	24	Grafik 4.10	Perkembangan Harga Cabai Merah	42
Grafik B1.5	Perkembangan Harga Properti Residensial Jabodetabek	25	Grafik 4.11	Perkembangan Harga Beras	42
Grafik B1.6	Perkembangan Penyaluran KPR di Jakarta	25	Grafik 4.14	Inflasi Tahunan Kelompok Pengeluaran	43
Grafik 3.1	Realisasi Kumulatif Pendapatan Daerah	29	Grafik 4.12	Perkembangan Harga Cabai Rawit	43
Grafik 3.2	Perkembangan Capaian PAD dan Transfer DKI Jakarta Tw I 2024	29	Grafik 4.13	Perkembangan Harga Telur Ayam Ras	43
Grafik 3.3	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah	29	Grafik 4.15	Inflasi Gabungan Provinsi di Jawa	44
Grafik 3.4	Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Transfer	30	Grafik 4.16	Inflasi Jakarta dan Nasional	44
Grafik 3.5	Pertumbuhan Komponen PAD	30	Grafik B2.1	Perkembangan Harga Beras	47
Grafik 3.6	Pangsa Realisasi Pendapatan Komponen Pajak Daerah Tw IV 2023	30	Grafik B2.2	Perkembangan Stok Beras	48
Grafik 3.7	Perkembangan BBN-KB, BBKB, LU Perdagangan, dan Penjualan Mobil	30	Grafik B2.3	Sumber Pasokan dan Distribusi Komoditas Beras Jakarta (Sumber: PT Food Station Tjipinang Jaya)	48
Grafik 3.8	Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor	30	Grafik B2.4	Volatilitas Harga Komoditas Pangan (Sumber: PIHPS, rerata seluruh jenis/kualitas. Periode 3 bulan terakhir)	49
Grafik 3.9	Realisasi Kumulatif Belanja Daerah	31	Grafik 5.1	Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank	53
Grafik 3.10	Perkembangan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal	31	Grafik 5.2	Pertumbuhan DPK Jakarta	54
Grafik 3.11	Pertumbuhan Belanja Daerah dan Komponen Utamanya	31	Grafik 5.3	Komposisi DPK Jakarta	54
Grafik 3.12	Pertumbuhan Belanja Hibah dan Belanja Subsidi	31	Grafik 5.4	Komposisi Pemilik DPK Jakarta	54
Grafik 3.13	Realisasi Kumulatif Total Belanja APBN di DKI Jakarta	32	Grafik 5.5	Perkembangan DPK Spasial Jakarta	54
Grafik 3.14	Realisasi Total Belanja K/L di DKI Jakarta	32	Grafik 5.6	Kontribusi DPK Jakarta terhadap DPK Nasional	54
Grafik 3.15	Perkembangan Belanja Barang dan Pegawai (APBN dan APBD)	33	Grafik 5.7	Pertumbuhan DPK Jakarta dan Nasional	55
Grafik 3.16	Perkembangan Belanja Modal (APBN dan APBD)	33	Grafik 5.8	Pertumbuhan Kredit Jakarta	55
Grafik 4.1	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	39	Grafik 5.9	Komposisi Kredit Jakarta Berdasarkan Penggunaan	55
Grafik 4.2	Sumbangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	39	Grafik 5.10	Komposisi Kredit Berdasarkan Kepemilikan	56
Grafik 4.3	Perkembangan Harga Beras	40	Grafik 5.11	Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kepemilikan	56
Grafik 4.4	Perkembangan Harga Daging Ayam Ras	40	Grafik 5.12	Pertumbuhan Kredit Sektoral	56
			Grafik 5.13	Sebaran Kredit di Provinsi DKI Jakarta	56
			Grafik 5.14	Perkembangan LDR Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek	56

# Daftar Grafik

Grafik 5.15	Perkembangan NPL DKI Jakarta	57	Grafik 5.43	Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga	64
Grafik 5.16	Perkembangan LaR DKI Jakarta	57	Grafik 5.44	Komposisi Kredit Konsumsi Rumah Tangga	65
Grafik 5.17	NPL di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan	57	Grafik 5.45	NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga	65
Grafik 5.18	Perbandingan NPL di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional	57	Grafik 5.46	Pertumbuhan DPK Rumah Tangga	65
Grafik 5.19	Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama	58	Grafik 5.47	Pertumbuhan DPK per jenis Simpanan	65
Grafik 5.20	Pertumbuhan Volume Ekspor ke Negara Tujuan Utama DKI Jakarta	58	Grafik 5.48	Komposisi DPK	66
Grafik 5.21	Pertumbuhan Volume Ekspor Industri DKI Jakarta	58	Grafik 5.49	Komposisi DPK Rumah Tangga	66
Grafik 5.22	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Unggulan DKI Jakarta	59	Grafik 5.50	Pertumbuhan Kredit UMKM di Jakarta	66
Grafik 5.23	Perkembangan Realisasi SKDU sektor Unggulan DKI Jakarta	59	Grafik 5.51	Porsi Kredit UMKM di Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan	66
Grafik 5.24	Penjualan Korporasi DKI Jakarta	60	Grafik 5.52	UMKM Berdasarkan Skala Usaha	66
Grafik 5.25	Profitabilitas Korporasi DKI Jakarta	60	Grafik 5.53	Porsi Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi	67
Grafik 5.26	Likuiditas Korporasi DKI Jakarta	60	Grafik 5.54	Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Utama	67
Grafik 5.27	Produktivitas Korporasi DKI Jakarta	60	Grafik 5.55	NPL Kredit UMKM	67
Grafik 5.28	Kemampuan Membayar Korporasi DKI Jakarta	61	Grafik 5.56	NPL Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha	67
Grafik 5.29	Pertumbuhan kredit Korporasi	61	Grafik 6.1	Perkembangan <i>Inflow</i> , <i>Outflow</i> , dan <i>Net Flow</i> Uang Kartal	71
Grafik 5.30	Penyaluran Kredit pada Sektor Utama Korporasi	62	Grafik 6.2	<i>Inflow</i> , <i>Outflow</i> , dan <i>Net Flow</i> per Pecahan	71
Grafik 5.31	NPL pada Sektor Korporasi	62	Grafik 6.3	Perkembangan Temuan Uang yang Diragukan Keasliannya	72
Grafik 5.32	Perkembangan DPK Korporasi	62	Grafik 6.4	Perkembangan Nilai Transaksi RTGS	72
Grafik 5.33	Pertumbuhan Komponen DPK Korporasi	62	Grafik 6.5	Perkembangan Volume Transaksi RTGS	72
Grafik 5.34	Komposisi DPK Korporasi	62	Grafik 6.6	Perkembangan Nilai Transaksi SKNBI	72
Grafik 5.35	Indeks Harga Saham Gabungan BEI	63	Grafik 6.7	Perkembangan Volume Transaksi SKNBI	72
Grafik 5.36	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen dan Konsumsi RT	63	Grafik 6.8	Perkembangan Nilai Transaksi Kartu Kredit dan Debet serta Jumlah Mesin ATM	73
Grafik 5.37	Perkembangan Indeks Ketersediaan Lap.Kerja, Penghasilan Konsumen, dan Konsumsi Barang Tahan Lama	63	Grafik 6.9	Perkembangan Jumlah Kartu Kredit, Debet dan ATM	73
Grafik 5.38	Perkembangan Kredit Rumah Tangga	64	Grafik 6.10	Perkembangan Transaksi <i>E-commerce</i> Berdasarkan Metode Pembayaran	73
Grafik 5.39	Perkembangan Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga	64	Grafik 6.11	Pangsa Transaksi <i>E-commerce</i> Berdasarkan Metode Pembayaran	73
Grafik 5.40	Komposisi Kredit RT dan Non RT	64	Grafik 6.12	Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS	73
Grafik 5.41	Komposisi Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga	64	Grafik 6.13	Pangsa <i>Merchant</i> QRIS	74
Grafik 5.42	NPL Kredit Rumah Tangga	64	Grafik 6.14	Perkembangan Transaksi KUPVA BB	74
			Grafik 6.15	<i>Market Share</i> Valuta Asing	74

# Daftar Grafik

Grafik B3.1	Perkembangan Penumpang Angkutan Umum Jakarta (juta)	80	Grafik 7.25	Distribusi Pendapatan DKI Jakarta	88
Grafik 7.1	Pertumbuhan Jumlah Orang Bekerja dan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta	83	Grafik 7.26	IPM Jakarta dan Nasional	88
Grafik 7.2	Persentase Penyerapan Suplai Tenaga Kerja	83	Grafik 7.27	Pertumbuhan IPM DKI Jakarta	88
Grafik 7.3	Proporsi Penduduk Bekerja Berdasarkan Jam Kerja	84	Grafik 7.28	IPM Kabupaten/Kota di DKI Jakarta	89
Grafik 7.4	Proporsi dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan	84	Grafik 7.29	IKG Jakarta dan Nasional	89
Grafik 7.5	Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	84	Grafik 7.30	IKG DKI Jakarta Menurut Kab/Kota	89
Grafik 7.6	Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan	84	Grafik 7.31	IKG Menurut Provinsi	90
Grafik 7.7	Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta (Rp/TK/Tahun)	85	Grafik 7.33	UMP Provinsi di Indonesia	90
Grafik 7.8	Produktivitas TK Regional Provinsi DKI Jakarta (Rp/TK/Tahun)	85	Grafik 7.32	Perkembangan UMP DKI Jakarta	90
Grafik 7.9	Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha	85	Grafik 8.1	Laju Inflasi Negara-Negara di Dunia	93
Grafik 7.10	Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja	85	Grafik 8.2	Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral di Dunia	93
Grafik 7.11	Indeks Kondisi Ekonomi, Penghasilan, dan Ketersediaan Lapangan Kerja	85	Grafik 8.3	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2024	96
Grafik 7.12	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta	86	Grafik 8.4	Perkembangan Pagu APBD DKI Jakarta 2024	98
Grafik 7.13	Tingkat Kemiskinan Jakarta dan Nasional	86	Grafik 8.5	Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta 2024	98
Grafik 7.14	Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta	86	Grafik 8.6	Proyeksi Inflasi DKI Jakarta 2024	98
Grafik 7.15	Garis Kemiskinan DKI Jakarta	86			
Grafik 7.16	Pertumbuhan Garis Kemiskinan dan Inflasi IHK Jakarta	86			
Grafik 7.17	Pertumbuhan Garis Kemiskinan dan Komponennya	86			
Grafik 7.18	Pertumbuhan Garis Kemiskinan Makanan dan Inflasi Subkelompok Makanan	87			
Grafik 7.19	Porsi Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan	87			
Grafik 7.20	Tingkat Kemiskinan Provinsi di Jawa	87			
Grafik 7.21	Garis Kemiskinan Provinsi di Jawa	87			
Grafik 7.22	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	87			
Grafik 7.23	Indeks Kondisi Ekonomi, Penghasilan, dan Ketersediaan Lapangan Kerja	87			
Grafik 7.24	Rasio Gini Jakarta dan Nasional	88			

# Ringkasan Eksekutif

Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, prospek ekonomi dunia diperkirakan masih tumbuh positif sebesar 3,1% pada tahun 2024. Masih solidnya prospek ekonomi dunia bersumber dari tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang ditopang utamanya oleh kuatnya permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga diperkirakan terjadi di kawasan Eropa dan ASEAN-5, walaupun pertumbuhan lebih lanjut diperkirakan tertahan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa kawasan akibat berlanjutnya ketidakpastian penurunan *fed fund rate* dan ketegangan geopolitik yang menyebabkan banyak investor global lebih berhati-hati.

Pada level nasional, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah konstelasi ekonomi global yang terus menunjukkan ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 5,11% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional ini terutama didukung oleh solidnya permintaan domestik yang bersumber dari peningkatan konsumsi swasta maupun pemerintah sebagai dampak positif pelaksanaan Pemilu 2024 dan hari libur nasional. Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Mei 2024 tercatat mengalami penurunan dari 3,00% (yoy) menjadi 2,84% (yoy). Penurunan tekanan inflasi ini utamanya bersumber dari inflasi inti dan inflasi *administered prices* (AP) yang rendah serta inflasi *volatile food* (VF) yang juga mengalami penurunan. Perkembangan inflasi yang tetap terjaga tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter serta sinergi erat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran 2,5±1% pada tahun 2024.

Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2024 tetap tumbuh kuat sebesar 4,78% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,85%, yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang tetap kuat ditopang oleh meningkatnya konsumsi Rumah Tangga (RT), konsumsi Pemerintah dan konsumsi lembaga non-profit rumah tangga (LNPR). Konsumsi RT tumbuh meningkat yang terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi pada kelompok hotel dan restoran serta kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya. Selanjutnya, konsumsi Pemerintah juga tumbuh lebih baik yang terutama didorong oleh meningkatnya belanja pegawai sejalan dengan kenaikan gaji ASN dan penyaluran THR yang lebih awal serta meningkatnya belanja barang dan jasa untuk mendukung aktivitas pemilu. Meningkatnya aktivitas pemilu dan lembaga keagamaan serta organisasi masyarakat pada bulan Ramadhan juga turut mendorong kenaikan pertumbuhan konsumsi LNPR pada triwulan I 2024. Di sisi lain, ekspor dan investasi tumbuh melambat. Perlambatan ekspor terutama disebabkan oleh kontraksi pada ekspor barang, sementara tertahannya kinerja investasi dipengaruhi oleh *wait and see* investor pada periode pemilu sebagaimana pola historisnya. Sementara itu, pertumbuhan impor mengalami peningkatan, terutama peningkatan impor jasa yang didorong oleh meningkatnya *outbound tourism*.

Dari sisi sektoral atau lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama ditopang oleh meningkatnya kinerja beberapa LU utama Jakarta seperti LU perdagangan, LU konstruksi, dan LU infokom. Sementara itu, LU utama lainnya seperti LU industri pengolahan tumbuh negatif yang terutama dipengaruhi oleh melambatnya kinerja ekspor. LU jasa keuangan juga tumbuh lebih rendah sejalan dengan melambatnya kinerja jasa penunjang keuangan.

# Ringkasan Eksekutif

Memasuki triwulan II 2024, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan didorong oleh meningkatnya konsumsi RT sejalan dengan tingginya permintaan pada HBKN Idulfitri, HBKN Iduladha, serta berlangsungnya *long weekend* dan berbagai *event* pada triwulan II 2024. Peningkatan juga didorong oleh meningkatnya konsumsi Pemerintah sejalan dengan kenaikan belanja pegawai untuk gaji ke-13 serta kenaikan belanja bansos untuk HBKN Idulfitri. Kinerja investasi juga diperkirakan meningkat sejalan dengan masih masuknya investasi untuk proyek strategis Pemerintah dan swasta yang bersifat multitanah. Di sisi lain, kinerja LNPRT diperkirakan melambat namun masih tetap tumbuh tinggi. Hal ini disebabkan oleh berakhirnya pemilu di tengah meningkatnya aktivitas ormas keagamaan dalam rangka HBKN Idulfitri.

Dari sisi fiskal, pada triwulan I 2024, capaian realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar 13,03% dari pagu APBD 2024, dimana capaian tersebut tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2023 yang sebesar 23,00% dari pagu. Tidak hanya bersumber dari peningkatan pagu dibandingkan tahun sebelumnya, capaian realisasi yang lebih rendah pada periode laporan juga disebabkan oleh capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang lebih rendah. Capaian realisasi Belanja Daerah juga tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan triwulan sama tahun sebelumnya, yakni 10,70% dari pagu pada triwulan laporan. Pencapaian realisasi belanja yang lebih rendah disebabkan oleh komponen Belanja Operasi dan Belanja Modal yang berkontraksi.

Berdasarkan rilis data oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, kinerja APBN di wilayah DKI Jakarta pada triwulan I 2024 menunjukkan tren positif, hal ini didorong oleh peningkatan kinerja Belanja di tengah kinerja Pendapatan yang termoderasi. Kinerja Pendapatan yang termoderasi disebabkan oleh pendapatan dari perpajakan yang melambat. Pada triwulan laporan, kinerja PPN, PPh Migas, dan PPh-Nonmigas berkontraksi. Kendati demikian, peningkatan penerimaan bagian laba BUMN yang tumbuh signifikan menahan penurunan Pendapatan K/L di Jakarta. Dari sisi Belanja K/L, pada triwulan I 2024 terdapat realisasi sebesar Rp 181,52 triliun atau sebesar 21,70% dari pagu dan tumbuh 29,90% (yoy). Capaian ini didorong oleh peningkatan pada seluruh komponen Belanja K/L di Jakarta.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 2,18% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,28% (yoy). Capaian inflasi ini juga lebih rendah jika dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 3,05% (yoy). Relatif terkendalinya inflasi tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi pangan sebagai hasil sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan I 2024 diantaranya beras, daging ayam ras, cabai merah, emas perhiasan, dan tomat. Memasuki triwulan II 2024, perkembangan inflasi Jakarta pada Mei 2024 tercatat mengalami penurunan dengan inflasi sebesar 2,08% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang inflasi sebesar 2,11% (yoy). Ke depan, inflasi IHK Jakarta diperkirakan akan tetap terkendali di dalam sasaran 2,5±1% pada 2024.

# Ringkasan Eksekutif

Intermediasi perbankan meningkat dengan didukung ketahanan yang tetap terjaga. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit meningkat ditopang oleh kondisi likuiditas perbankan yang memadai seiring peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), penguatan strategi *funding* dari sumber pendanaan lainnya serta implementasi berbagai pelonggaran kebijakan makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan. Sejalan dengan itu, risiko kredit terjaga rendah, sehingga mendorong perbankan tetap dapat menerapkan standar penyaluran kredit yang longgar.

Dari sisi permintaan, kredit korporasi meningkat seiring dengan membaiknya kinerja korporasi. Tingkat profitabilitas korporasi non keuangan mengalami kenaikan sejalan dengan meningkatnya penjualan. Dengan demikian, kemampuan membayar korporasi non keuangan tetap terjaga tercermin dari rendahnya rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loans*) kredit korporasi.

Sejalan dengan perbaikan kinerja sektor korporasi nonkeuangan, kinerja sektor rumah tangga pada triwulan I 2024 juga tetap terjaga baik. Kondisi ini tercermin dari kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Ekspektasi Konsumen dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit sektor rumah tangga tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja sektor UMKM juga terus membaik sejalan dengan peningkatan daya beli dan mobilitas masyarakat. Kredit UMKM meningkat didorong oleh kenaikan permintaan kredit dari UMKM skala menengah di tengah tetap kuatnya permintaan kredit dari UMKM skala mikro dan kecil. KPwBI Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai program untuk mendukung perbaikan produktivitas serta peningkatan kapasitas UMKM baik dari sisi SDM maupun pengembangan usaha.

Perkembangan nilai transaksi sistem pembayaran pada triwulan I 2024 mengonfirmasi masih kuatnya pertumbuhan ekonomi Jakarta. Hal ini terindikasi dari arus kas yang mencatat *net outflow* dan transaksi nontunai BI-RTGS yang tumbuh meningkat. Selain itu, tren transaksi digital semakin berkembang, seiring peningkatan transaksi QRIS. Sementara transaksi kartu kredit dan kartu debit menurun. Dari sisi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), nilai transaksi jual dan beli valuta asing (dalam Rupiah) Penyelenggara KUPVA BB meningkat sebesar 38% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 26% (yoy); seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan. Dari sisi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR), terdapat kenaikan transaksi *incoming* (dari luar negeri ke DKI Jakarta) dan domestik (di wilayah DKI Jakarta). Sedangkan transaksi *outgoing* (dari DKI Jakarta ke luar negeri) mengalami penurunan.

Seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi, serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode Februari 2024 mengalami kenaikan, diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Berdasarkan status pekerjaan utama, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dari sisi sektoral, peningkatan serapan tenaga kerja terutama terjadi LU Perdagangan Besar dan Eceran Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, LU Jasa Lainnya.

# Ringkasan Eksekutif

Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta mengalami penurunan menjadi sebesar 4,44% pada Maret 2023, menurun dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 4,69%. Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada Maret 2023 berada pada level 9,36%. Menurunnya tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian DKI Jakarta dan pengurangan jumlah pengangguran. Selain itu, gencarnya program bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi turut berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta tahun 2024 diperkirakan tetap kuat pada kisaran 4,8-5,6% (yoy) sejalan dengan masih kuatnya optimisme konsumen, semakin tingginya aktivitas MICE dan event di Jakarta, berlangsungnya pemilu, serta berlanjutnya pembangunan proyek strategis. Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi Jakarta pada 2024 didorong oleh membaiknya konsumsi rumah tangga seiring dengan terjaganya daya beli serta meningkatnya aktivitas MICE dan event; membaiknya konsumsi Pemerintah sejalan dengan perbaikan postur APBN dan APBD, serta meningkatnya kinerja investasi sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek strategis Pemerintah. Di sisi lain, kinerja ekspor diperkirakan masih akan tertahan sejalan dengan meluasnya tensi geopolitik dan pembatasan kuota ekspor di beberapa negara. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada 2024 akan ditopang oleh pertumbuhan positif 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Namun demikian, beberapa risiko yang perlu dicermati yang dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu tertahannya perekonomian global, meluasnya tensi geopolitik, dan keberlanjutan *stance* moneter ketat AS (*higher for longer*).

Inflasi DKI Jakarta pada 2024 diperkirakan akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi yang semakin rendah sebesar 2,5±1% (yoy). Perkiraan tersebut terutama didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif pasca berlangsungnya El Nino pada 2023, serta didukung oleh penguatan program pengendalian inflasi utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

# Tabel Indikator

INDIKATOR	2020					2021					2022					2023					2024
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I
<b>Ekonomi Makro Regional</b>																					
<b>Produk Domestik Regional Bruto (% , yoy)</b>	5,03	-8,35	-3,93	-2,18	-2,39	-1,94	10,92	2,42	3,63	3,56	4,61	5,61	5,93	4,85	5,25	4,95	5,13	4,93	4,85	4,96	4,78
Berdasarkan Lapangan Usaha:																					
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,74	0,14	0,53	0,56	0,49	-0,34	6,26	3,25	7,33	4,12	-0,16	3,11	4,38	2,60	2,51	0,07	-10,87	-5,85	1,32	-3,94	9,19
2 Pertambangan dan Penggalian	-5,60	-8,07	-1,66	-10,38	-6,43	-6,38	-2,15	-9,77	2,73	-4,06	0,45	-5,07	-7,78	-9,34	-5,42	-8,16	-23,33	-12,67	-6,63	-12,75	-11,43
3 Industri Pengolahan	-1,51	-20,52	-12,08	-7,64	-10,36	-0,96	25,28	11,93	11,15	11,06	9,64	6,83	4,95	2,66	5,95	1,58	1,18	2,13	2,54	1,86	-0,53
4 Pengadaan Listrik dan Gas	5,69	-12,73	-16,97	-16,88	-10,95	-6,88	-8,63	-18,61	-30,59	-16,30	-13,27	2,83	-0,20	3,67	-2,38	-7,69	-6,29	-5,19	-10,34	-7,20	-15,17
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,08	-6,21	-0,34	-5,07	-2,68	2,77	10,07	1,33	2,53	4,07	-0,35	-0,65	0,93	2,11	0,51	5,36	4,37	5,06	8,68	6,33	5,22
6 Konstruksi	2,41	-9,79	-6,37	-8,33	-5,55	-5,33	5,34	-1,40	2,53	0,09	0,75	4,80	3,36	-1,81	1,69	0,11	2,36	3,01	4,53	2,50	6,27
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,18	-13,52	-9,73	-6,72	-7,04	-1,08	13,93	3,64	6,38	5,46	6,87	8,25	9,65	6,41	7,78	5,70	4,67	3,99	3,78	4,52	5,46
8 Transportasi dan Pergudangan	7,30	-23,73	-8,57	-5,24	-7,63	-0,48	41,45	7,78	9,55	12,77	3,46	1,47	11,82	11,92	7,19	17,43	18,05	13,96	7,76	14,05	6,48
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,20	-34,96	-18,43	-15,42	-16,21	-10,44	45,24	6,78	7,12	8,99	6,14	6,29	13,63	11,26	9,31	8,27	10,49	11,59	8,40	9,69	9,56
10 Informasi dan Komunikasi	9,09	12,63	11,21	11,20	11,05	7,84	2,52	2,70	5,74	4,65	6,17	7,14	6,09	8,39	6,96	7,65	8,26	8,42	5,57	7,45	6,38
11 Jasa keuangan dan Asuransi	15,79	0,81	-4,51	5,56	4,38	-7,32	9,90	4,88	-5,01	0,13	0,57	2,54	-1,01	3,02	1,28	6,04	0,61	4,69	10,24	5,39	2,02
12 Real Estate	3,84	-0,34	1,85	0,96	1,57	0,38	3,79	0,53	2,44	1,77	2,51	2,36	2,45	0,85	2,04	0,92	1,01	0,68	0,37	0,74	1,31
13 Jasa Perusahaan	3,87	-7,27	-2,63	-2,08	-2,07	-4,57	4,48	-1,99	1,62	-0,21	3,91	5,53	7,27	6,63	5,84	6,77	8,18	6,06	5,03	6,49	6,56
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	0,53	-16,83	-1,77	-2,00	-5,79	-1,22	1,32	-7,00	-4,52	-2,82	-4,01	0,59	5,56	6,25	2,01	0,22	1,72	-1,92	0,02	0,04	14,16
15 Jasa Pendidikan	7,51	1,10	3,28	-0,86	2,64	0,01	3,66	-1,76	1,51	0,82	0,10	-0,52	0,76	-0,76	-0,11	0,33	5,55	-0,79	-0,19	1,20	3,69
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,13	9,65	31,21	27,49	19,85	14,92	14,02	1,90	4,01	8,10	14,73	15,66	6,51	1,53	9,28	1,44	6,07	6,59	9,27	5,85	9,09
17 Jasa Lainnya	5,46	-10,34	-4,56	-6,56	-4,08	-9,59	5,32	-5,14	2,82	-1,90	13,10	15,02	18,28	14,77	15,27	13,16	14,20	11,82	7,55	11,60	3,45
Berdasarkan Permintaan:																					
1 Konsumsi																					
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,93	-5,36	-5,36	-2,90	-2,23	-1,58	8,22	4,34	3,58	3,54	4,09	5,12	7,62	5,74	5,64	4,18	5,26	5,49	5,23	5,05	5,25
b. Pengeluaran Konsumsi LNPR	-5,42	-7,68	-1,37	-1,50	-4,06	-4,62	2,24	0,56	2,19	0,10	5,99	6,03	6,68	6,28	6,25	7,95	9,53	6,27	15,43	9,84	19,70
c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,03	-8,19	45,70	20,02	14,05	21,54	22,13	6,77	-2,04	9,82	-15,90	-9,79	-9,93	-4,48	-9,41	1,79	6,06	-16,18	-5,04	-3,86	30,30
3 PMTB	1,64	-10,36	-8,92	-10,04	-6,98	-6,75	5,48	1,22	5,10	1,05	4,85	5,71	6,37	1,23	4,48	1,32	4,22	4,38	5,17	3,89	4,36
4 Perubahan Inventori	119,49	366,96	-91,82	-420,76	-1377,85	-123,36	-87,76	79,74	-93,80	-101,72	268,06	-36,83	3,34	72,67	1028,62	-277,9	372,5	209,14	44,75	-8,82	-75,78
5 Ekspor	9,30	-15,38	-20,94	-11,54	-9,70	-10,27	23,31	19,82	19,32	11,36	8,54	10,96	17,60	13,19	12,60	11,89	8,93	5,93	4,46	7,67	3,23
6 Impor	4,38	-16,60	-17,59	-13,05	-10,88	-5,71	22,84	18,61	17,54	12,45	5,63	6,52	13,73	7,87	8,48	7,01	8,19	2,96	3,16	5,25	6,30
<b>Ekspor</b>																					
- Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	2,593	1,813	2,671	2,786	9,862	2,760	2,716	2,871	2,995	11,341	2,938	2,657	2,934	2,940	11,470	2,799	2,475	2,813	2,899	10,986	2,694
- Volume Ekspor Non Migas (ribu ton)	836	586	829	861	3,112	802	916	856	981	3,555	779	716	901	924	3,320	849	764	809	922	3,344	820
<b>Impor</b>																					
- Nilai Impor Non Migas (USD Juta)	13,819	11,668	10,433	12,024	47,944	14,186	15,513	16,135	18,367	64,201	18,922	18,608	20,187	19,295	77,012	18,439	17,926	18,703	17,868	72,936	16,409
- Volume Impor Non Migas (ribu ton)	7,791	6,669	6,411	6,948	27,819	7,592	7,612	7,649	8,107	30,960	8,218	8,142	8,134	8,271	32,765	8,345	7,831	8,378	8,925	33,479	8,269
Indeks Harga Konsumen	105,19	105,53	105,39	105,96	105,96	106,36	106,60	106,59	107,58	107,58	108,49	109,67	111,50	112,11	112,11	112,83	113,18	113,76	114,67	114,67	104,81
Laju Inflasi Tahunan (% , yoy)	3,21	2,18	1,76	1,59	1,59	1,11	1,01	1,14	1,53	1,53	2,00	2,88	4,61	4,21	4,21	3,69	3,20	2,08	2,28	2,28	2,18

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia

# Tabel Indikator

INDIKATOR	2020					2021					2022					2023					2024
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I
<b>Perbankan</b>																					
Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)	3.139	3.111	3.352	3.359	3.359	3.454	3.505	3.667	3.864	3.864	3.849	3.887	3.910	4.321	4.321	4.211	4.234	4.235	4.461	4.461	4.539
Kredit Lokasi Proyek (Rp Triliun)	1.903	1.811	1.763	1.723	1.723	1.704	1.750	1.805	1.751	1.751	1.784	1.949	1.965	2.006	2.006	2.010	2.103	2.193	2.324	2.324	2.401
- Modal Kerja	1.049	1.006	961	929	929	908	954	971	967	967	990	1.110	1.105	1.120	1.120	1.130	1.186	1.236	1.315	1.315	1.353
- Investasi	627	585	590	585	585	590	588	624	570	570	578	615	621	645	645	640	672	703	749	749	783
- Konsumsi	227	219	212	210	210	207	208	211	214	214	216	224	238	241	241	240	244	253	260	260	265
Pertumbuhan Kredit Lokasi Proyek (% yoy)	8,9	-1,5	-3,0	-7,1	-7,1	-10,4	-3,4	2,4	1,6	1,6	4,7	11,4	8,8	14,6	14,6	12,7	8,0	11,6	15,8%	15,8%	19,41
- Modal Kerja	7,2	-3,0	-5,9	-8,5	-8,5	-13,5	-5,2	1,0	4,1	4,1	9,1	16,3	13,9	15,7	15,7	14,2	6,9	11,9	17,5%	17,5%	19,63
- Investasi	16,5	1,6	1,7	-4,1	-4,1	-5,9	0,4	5,8	-2,6	-2,6	-1,9	4,6	-0,4	13,3	13,3	10,7	9,3	13,2	16,0%	16,0%	22,33
- Konsumsi	-1,8	-2,6	-5,0	-8,6	-8,6	-8,7	-5,3	-0,8	2,2	2,2	4,4	7,6	13,0	12,5	12,5	11,0	9,2	6,2	7,8%	7,8%	10,61
Kredit UMKM Lokasi Proyek (Rp Triliun)	159	149	147	144	144	141	140	148	139	139	139	143	140	144	144	140	144	146	150	150	149
Loan to Deposit Ratio Lokasi Proyek (%)	60,60	58,23	52,60	51,30	51,30	49,35	49,93	49,24	45,32	45,32	46,36	50,13	50,25	46,42	46,42	47,75	50,18	50,46	49,68	49,68	52,90
NPL Gross Lokasi Proyek (%)	1,90	2,27	2,48	2,44	2,44	2,40	2,32	2,19	1,97	1,97	1,94	1,70	1,62	1,42	1,42	1,37	1,41	1,45	1,33	1,33	1,34
<b>Sistem Pembayaran</b>																					
- Volume Total Kartu Kredit (juta)	13,72	11,35	10,60	13,26	13,26	12,89	12,47	12,85	15,50	15,50	21,80	16,82	17,56	18,43	18,43	19,07	18,51	19,42	20,88	20,88	20,53
- Nominal Total Kartu Kredit (Rp triliun)	11,75	9,32	8,97	11,34	11,34	11,41	10,61	10,56	13,42	13,42	18,58	15,55	16,94	20,11	20,11	21,10	19,94	19,26	21,20	21,20	19,99
- Nominal Transaksi E-Commerce (Rp Triliun)	15,27	12,07	14,74	18,34	60,42	18,80	20,16	21,76	22,42	83,15	22,20	23,12	25,27	28,48	82,23	21,55	20,59	22,86	24,45	89,46	22,21
- Jumlah Merchant QRIS (Juta)	0,67	0,74	0,88	1,03	1,03	1,17	1,30	1,64	3,16	3,16	3,42	3,60	3,90	4,28	4,28	4,52	4,63	5,03	5,16	5,16	5,28
- Volume Transaksi UE (Juta)	884	619	774	816	3.093	705	814	735	949	3.203	1.049	1.151	1.391	1.587	2.978	1.631	1.972	2.136	2.311	8.050	2.513
Nominal Transaksi UE (Rp Triliun)	30	27	31	37	124	32	38	40	54	164	56	67	90	97	187	103	127	136	151	518	165

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia

## BAB 1

# PEREKONOMIAN GLOBAL & NASIONAL

Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, prospek ekonomi dunia diperkirakan masih tumbuh positif sebesar 3,1% pada tahun 2024. Masih solidnya prospek ekonomi dunia bersumber dari tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang ditopang utamanya oleh kuatnya permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga diperkirakan terjadi di kawasan eropa dan ASEAN-5, walaupun pertumbuhan lebih lanjut diperkirakan tertahan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa kawasan akibat berlanjutnya ketidakpastian penurunan *fed fund rate* dan ketegangan geopolitik yang menyebabkan banyak investor global lebih berhati-hati.

Pada level nasional, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah konstelasi ekonomi global yang terus menunjukkan ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 5,11% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional ini terutama didukung oleh solidnya permintaan domestik yang bersumber dari peningkatan konsumsi swasta maupun pemerintah sebagai dampak positif pelaksanaan Pemilu 2023 dan hari libur nasional. Di sisi harga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Mei 2024 tercatat mengalami penurunan dari 3,00% (yoy) menjadi 2,84% (yoy). Penurunan tekanan inflasi ini disumbang terutama oleh penurunan inflasi *Volatile Food* dan inflasi *Administered Prices*. Perkembangan inflasi yang tetap terjaga tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter serta sinergi erat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran  $2,5\pm 1\%$  pada tahun 2024



**Pertumbuhan  
Ekonomi Nasional (yoy)**



**5,11%**  
Triwulan I 2024

**5,04%**  
Triwulan IV 2023

**Inflasi  
IHK Nasional (yoy)**



**3,05%**  
Triwulan I 2024

**2,61%**  
Triwulan IV 2023

**Capital Adequacy Ratio  
(CAR)**  
Perbankan Nasional

**25,96%**  
Triwulan I 2024

**BI 7-Days  
Reverse Repo Rate**

**6,25%**  
Mei 2024

## A. PEREKONOMIAN GLOBAL<sup>1</sup>

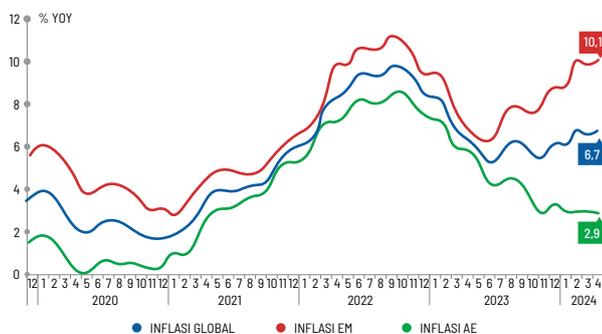
Di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan akan tetap tumbuh positif di tahun 2024. Ekonomi global diprakirakan tumbuh sebesar 3,1% (yoy) pada tahun 2024 relatif sama dengan tahun sebelumnya. Proyeksi positif ekonomi dunia diprakirakan bersumber dari pertumbuhan ekonomi AS yang diprakirakan akan tetap tumbuh kuat dan juga lebih tingginya pertumbuhan ekonomi di kawasan eropa. Namun pertumbuhan lebih lanjut tertahan oleh perlambatan ekonomi di kawasan lain antara lain Tiongkok, India, dan Jepang. Solidnya ekonomi AS utamanya ditopang oleh perbaikan permintaan domestik, termasuk kebijakan fiskal akomodatif dan juga kenaikan ekspor. Di sisi lain, Inflasi AS tercatat masih tinggi sehingga ketidakpastian kemungkinan penurunan Fed Funds Rate (FFR) akan terus berlanjut.

Selain itu, berlanjutnya ketegangan geopolitik membuat proyeksi ekonomi pada beberapa kawasan mengalami perlambatan dan juga dapat mengganggu rantai pasokan yang akhirnya berujung kepada kenaikan laju inflasi global. Kedepan, resiko terkait arah penurunan FFR dan dinamika ketegangan geopolitik juga mendorong kenaikan

Tabel 1.1 Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (% , yoy)

NEGARA	2019	2020	2021	2022	2024	2024*
Dunia	2,8	-2,8	6,3	3,5	3,1	3,1
Negara Maju	1,7	-4,2	5,6	2,6	1,6	1,7
Amerika Serikat	2,3	-2,8	5,9	1,9	2,5	2,5
Kawasan Euro	1,6	-6,1	5,6	3,4	0,5	0,8
Jepang	-0,4	-4,2	2,2	1,0	1,9	0,9
Negara Berkembang	3,6	-1,8	6,9	4,1	4,2	4,1
Tiongkok	6,0	2,2	8,4	3,0	5,2	4,7
India (Fiscal Year for CF)	4,8	-6,6	8,3	6,8	7,7	6,6
ASEAN-5	4,3	-4,4	4,0	5,5	4,4	4,7
Amerika Latin	0,2	-7,0	7,4	4,2	2,5	2,1
Negara Berkembang Eropa	2,5	-1,6	7,3	1,2	2,7	2,7
Timur Tengah & Asia Tengah	1,6	2,6	4,3	5,5	2,0	3,1

Sumber: IMF WEO, Consensus Forecast  
\*Proyeksi Bank Indonesia



Sumber: Bloomberg dan IMF, diolah

Grafik 1.1 Inflasi Global

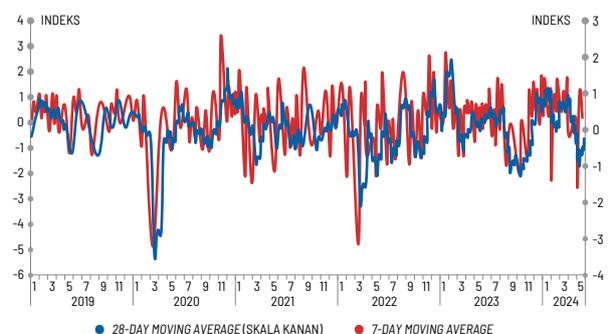
ketidakpastian pasar keuangan global karena investor cenderung akan lebih hati-hati dalam mengalokasikan investasinya. Oleh karenanya kondisi ini memerlukan respons kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global tersebut terhadap perekonomian di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

## B. PEREKONOMIAN NASIONAL<sup>2</sup>

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan pada periode tingginya ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 tercatat 5,11% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Perkembangan ini didukung oleh permintaan domestik. Konsumsi swasta dan Pemerintah membaik didorong oleh dampak positif pelaksanaan Pemilu 2024 dan hari libur nasional terkait dengan Hari Besar Keagamaan Nasional. Investasi tumbuh baik, terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Sementara itu, ekspor melambat sejalan dengan masih lemahnya permintaan dari mitra dagang utama. Kinerja pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 juga didukung oleh peningkatan pertumbuhan di Lapangan Usaha (LU) yang terkait mobilitas, seperti LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta LU Informasi dan Komunikasi.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi meningkat di sebagian besar wilayah. Perkembangan terkini menunjukkan kegiatan ekonomi pada triwulan II 2024 tetap baik, sebagaimana tecermin pada kinerja positif sejumlah indikator konsumsi rumah tangga dan investasi, seperti Indeks Keyakinan Konsumen dan *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2024 masih tetap terkendali dan terjaga dalam sasaran 2,5% ± 1%. Inflasi IHK Mei 2024 tercatat mengalami penurunan dari 3,00% (yoy) pada bulan April 2024 menjadi 2,84% (yoy). Perkembangan inflasi di bulan Mei 2024 utamanya dipengaruhi oleh deflasi pada kelompok *Volatile Food* (VF) dan *Administered Price* (AP) di tengah inflasi kelompok *Core*/Inti. Deflasi



Sumber: IIF, diolah. Data s.d. 26 Januari 2024

Grafik 1.2 Aliran Modal ke Negara Berkembang

1 Asesmen lengkap dapat dilihat pada Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2024 dan Tinjauan Kebijakan Moneter Mei 2024

2 Asesmen lengkap dapat dilihat pada Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2024 dan Tinjauan Kebijakan Moneter Mei 2024

**Tabel 1.2** Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Pengeluaran

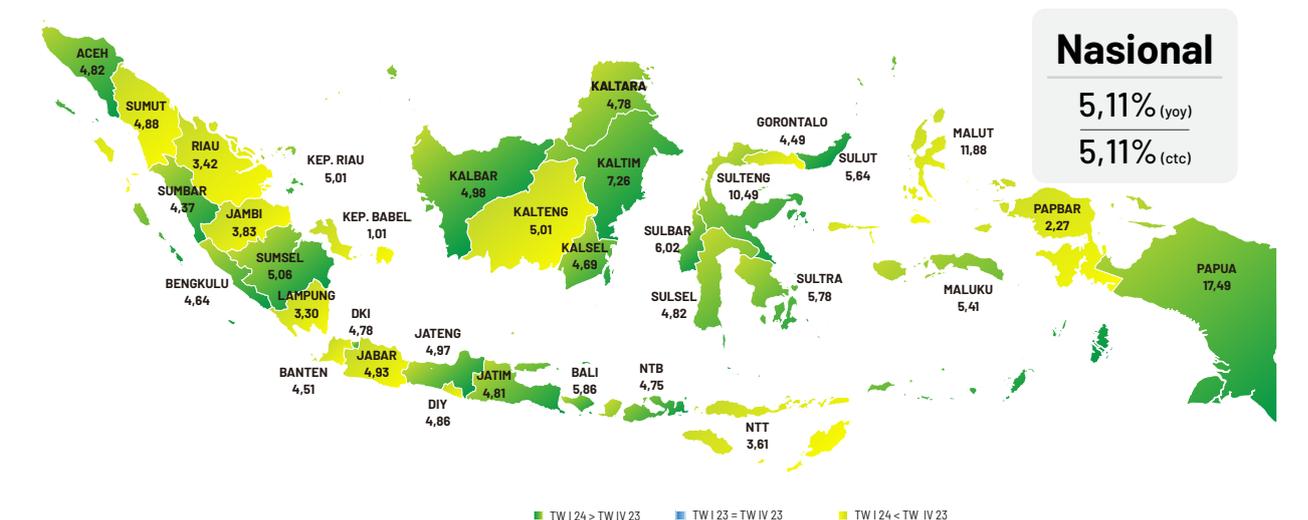
KOMODITAS	2019	2020	2021	2022				2022	2023				2023	2024
				I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Konsumsi Rumah Tangga	5,04	-2,63	2,01	4,35	5,52	5,40	4,50	4,94	4,53	5,22	5,05	4,47	4,82	4,91
Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	10,62	-4,21	1,62	5,91	5,03	5,99	5,72	5,66	6,16	8,59	6,18	18,11	9,83	24,29
Konsumsi Pemerintah	3,27	2,12	4,25	-6,60	-4,61	-2,50	-4,72	-4,47	3,31	10,47	-3,93	2,81	2,95	19,90
Investasi (PMTDB)	4,45	-4,96	3,80	4,08	3,09	4,98	3,33	3,87	2,11	4,63	5,77	5,02	4,40	3,79
Investasi Bangunan	5,37	-3,78	2,32	2,58	0,92	0,07	0,11	0,91	0,08	3,32	6,31	6,42	4,04	5,46
Investasi Nonbangunan	1,83	-8,44	8,42	8,63	9,71	19,32	12,11	12,53	7,93	8,30	4,45	1,60	5,34	-0,64
Ekspor	-0,48	-8,42	17,99	14,40	16,32	19,09	14,95	16,23	11,74	-2,91	-3,91	1,64	1,32	0,50
Impor	-7,13	-17,60	24,86	16,06	13,06	25,73	6,49	15,00	4,15	-3,23	-6,75	-0,15	-1,65	1,77
<b>PDB</b>	<b>5,02</b>	<b>-2,07</b>	<b>3,70</b>	<b>5,02</b>	<b>5,46</b>	<b>5,73</b>	<b>5,01</b>	<b>5,31</b>	<b>5,04</b>	<b>5,17</b>	<b>4,94</b>	<b>5,04</b>	<b>5,04</b>	<b>5,11</b>

Sumber: BPS, diolah

**Tabel 1.3** Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Lapangan Usaha

KOMODITAS	2019	2020	2021	2022				2022	2023				2023	2024
				I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,61	1,77	1,87	1,16	1,68	1,95	4,51	2,25	0,43	2,02	1,49	1,12	1,30	-3,54
Pertambangan dan Penggalian	1,22	-1,95	4,00	3,82	4,01	3,22	6,46	4,38	4,92	5,01	6,95	7,46	6,12	9,31
Industri Pengolahan	3,80	-2,93	3,39	5,07	4,01	4,83	5,64	4,89	4,43	4,88	5,19	4,07	4,64	4,13
Pengadaan Listrik dan Gas	4,04	-2,34	5,55	7,04	9,33	8,05	2,31	6,61	2,67	3,15	5,06	8,68	4,91	5,35
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,83	4,94	4,97	1,35	4,46	4,26	2,84	3,23	5,69	4,78	4,49	4,66	4,90	4,44
Konstruksi	5,76	-3,26	2,81	4,83	1,02	0,63	1,61	2,01	0,32	5,23	6,39	7,68	4,91	7,59
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,60	-3,79	4,63	5,73	4,43	5,37	6,55	5,52	4,92	5,25	5,10	4,09	4,85	4,58
Transportasi dan Pergudangan	6,38	-15,05	3,24	15,79	21,27	25,80	16,99	19,87	15,93	15,28	14,74	10,33	13,96	8,65
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,79	-10,26	3,89	6,58	9,80	17,83	13,81	11,97	11,55	9,89	10,94	7,89	10,01	9,39
Informasi dan Komunikasi	9,42	10,61	6,82	7,15	8,06	6,95	8,75	7,74	7,13	8,02	8,51	6,74	7,59	8,39
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,61	3,25	1,56	1,64	1,50	0,87	3,76	1,93	4,48	2,88	5,24	6,56	4,77	3,91
Real Estat	5,76	2,32	2,78	3,78	2,16	0,63	0,39	1,72	0,37	0,96	2,21	2,18	1,43	2,54
Jasa Perusahaan	10,25	-5,44	0,73	5,96	7,92	10,79	10,42	8,77	6,37	9,59	9,37	7,62	8,24	9,63
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,66	-0,03	-0,33	-1,29	-1,52	12,48	1,78	2,52	2,09	8,15	-6,24	1,61	1,50	18,88
Jasa Pendidikan	6,30	2,61	0,11	-1,41	-1,06	4,46	0,42	0,59	1,02	5,43	-2,07	2,63	1,78	7,34
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,66	11,56	10,45	4,52	6,50	-1,71	2,47	2,74	4,77	8,27	2,91	3,09	4,66	11,64
Jasa lainnya	10,57	-4,10	2,12	8,25	9,26	9,13	11,14	9,47	8,90	11,89	11,14	10,15	10,52	8,92
<b>PDB</b>	<b>5,02</b>	<b>-2,07</b>	<b>3,70</b>	<b>5,02</b>	<b>5,46</b>	<b>5,73</b>	<b>5,01</b>	<b>5,31</b>	<b>5,04</b>	<b>5,17</b>	<b>4,94</b>	<b>5,04</b>	<b>5,05</b>	<b>5,11</b>

Sumber: BPS, diolah



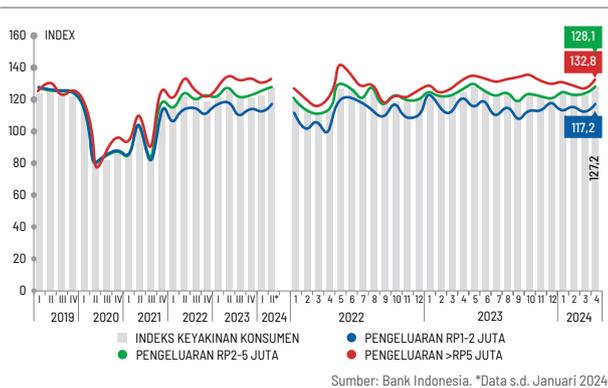
Sumber: BPS, diolah

Gambar 1.1 Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan I 2024 (% , yoy)

pada kelompok VF utamanya disumbang oleh deflasi komoditas beras dan cabai rawit yang lebih dalam serta, inflasi cabai merah yang lebih rendah. Sementara itu, deflasi pada kelompok AP seiring dengan deflasi pada komoditas angkutan antar kota dan tarif kereta api seiring normalisasi permintaan pasca HBKN Idulfitri. Di sisi lain, inflasi pada kelompok Core/Inti utamanya masih didorong oleh kenaikan harga komoditas global.

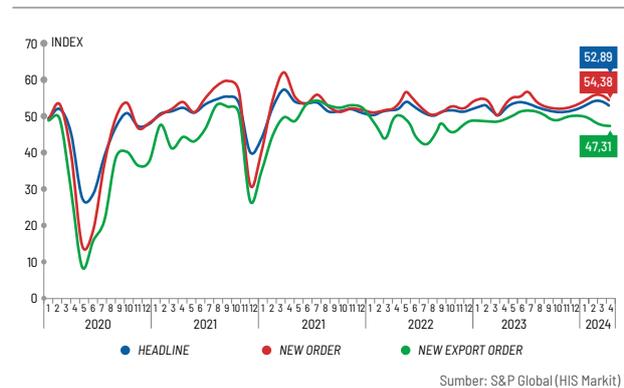
Secara spasial, sebagian besar daerah mengalami penurunan inflasi pada Mei 2024. Inflasi terendah tercatat di Kepulauan Bangka Belitung (1,25%, yoy), Sulawesi Barat (1,25%, yoy), dan Papua Barat Daya (1,87%, yoy) utamanya disebabkan deflasi pada komoditas aneka ikan dan minyak goreng. Sementara itu, inflasi tertinggi terdapat di Papua Tengah (5,39%, yoy), Gorontalo (4,91%, yoy), dan Papua Barat (4,56%, yoy) didorong oleh inflasi komoditas beras, bawang putih, dan bawang merah.

Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga. Ketahanan perbankan tecermin dari likuiditas yang memadai, risiko kredit yang rendah, dan permodalan yang kuat. Likuiditas perbankan yang tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi sebesar 25,62%. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) masih tinggi sebesar 25,96% pada Maret 2024, sementara rasio kredit bermasalah perbankan (*Non-Performing Loan/NPL*) tercatat rendah sebesar 2,25% (bruto) dan 0,77% (neto). Ketahanan perbankan yang kuat juga didukung oleh kemampuan membayar korporasi yang baik. Hasil *stress-test* Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan dan korporasi tetap kuat dalam menghadapi tekanan ketidakpastian pasar keuangan global, termasuk risiko dari eksposur Utang Luar Negeri (ULN) institusi keuangan dan korporasi yang terjaga, didukung oleh strategi pengelolaannya yang baik. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.



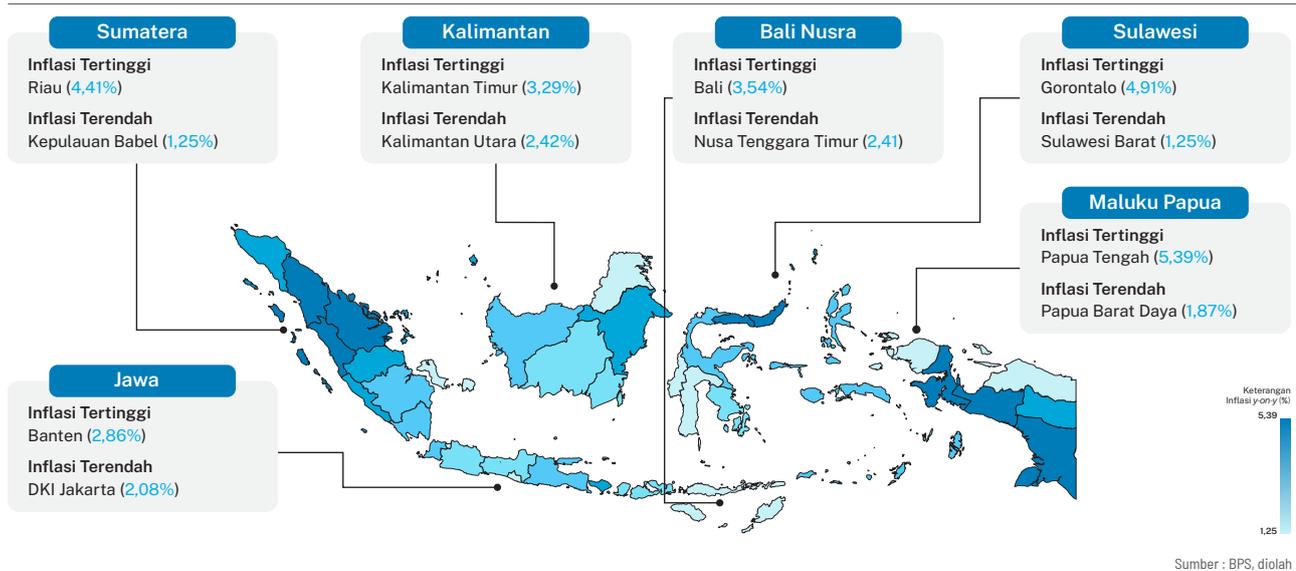
Sumber: Bank Indonesia. \*Data s.d. Januari 2024

Grafik 1.3 Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: S&P Global (HIS Markit)

Grafik 1.4 Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur



Sumber: BPS, diolah

Gambar 1.2 Peta Inflasi Daerah Bulan Mei 2024 (% yoy)

Kinerja transaksi sistem pembayaran tetap tumbuh kuat. Pada April 2024, transaksi BI-RTGS meningkat 18,65% (yoy) mencapai Rp13.112,22 triliun. Transaksi BI-FAST tumbuh 56,70% (yoy) sehingga mencapai Rp612,90 triliun. Nominal transaksi digital banking tercatat Rp5.340,92 triliun atau tumbuh sebesar 19,08% (yoy) dan nominal transaksi Uang Elektronik (UE) meningkat 33,99% (yoy) sehingga mencapai Rp90,44 triliun. Nominal transaksi QRIS tumbuh 194,06% (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 48,90 juta dan jumlah merchant 31,86 juta. Sementara itu, nominal transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM/D turun sebesar 12,49% (yoy) mencapai Rp619,19 triliun. Nominal kartu kredit masih meningkat 11,67% (yoy) mencapai Rp34,39 triliun. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) meningkat 2,64% (yoy) sehingga menjadi Rp1.058,23 triliun. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) terjaga dengan baik, aman, dan andal yang didukung oleh kondisi likuiditas dan operasional yang memadai. Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan ekosistem EKD terus meluas, didorong oleh integrasi pelaku industri yang memanfaatkan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dalam meningkatkan kualitas layanan digital kepada masyarakat. Selain itu, Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil).

### C. BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Mei 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 5,50%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 7,00%. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter *pro-stability*, yaitu sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran  $2,5 \pm 1\%$  pada 2024 dan 2025, termasuk efektivitas dalam menjaga aliran masuk modal asing dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap *pro-growth* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

Untuk memastikan stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran melalui:

1. Penguatan strategi operasi moneter *pro-market* untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, melalui:
  - a. Penguatan struktur suku bunga di pasar uang Rupiah untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.
  - b. Optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).
2. Peningkatan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi *spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
3. Penguatan strategi transaksi *term-repo* SBN dan *swap* valas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan;
4. Pendalaman kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus pendalaman suku bunga kredit berdasarkan sektor ekonomi (Lampiran); dan
5. Penguatan sinergi perluasan akseptasi digital bersama pelaku industri sistem pembayaran dalam rangka peningkatan akuisisi *merchant* QRIS di seluruh kategori UMKM melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan berbagai program promosi, dan kampanye penggunaan QRIS, antara lain QRIS Jelajah Indonesia.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memitigasi dampak risiko masih tingginya ketidakpastian global. Untuk pengendalian inflasi, koordinasi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) ditempuh melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha.

## BAB 2

# EKONOMI MAKRO REGIONAL

Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2024 tetap tumbuh kuat sebesar 4,78% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,85%, yoy).

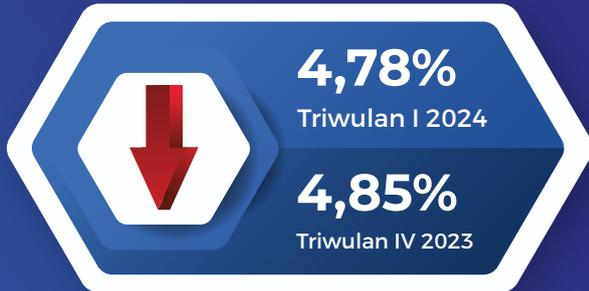
Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2024 tetap tumbuh kuat sebesar 4,78% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,85%, yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang tetap kuat ditopang oleh meningkatnya konsumsi Rumah Tangga (RT), konsumsi Pemerintah dan konsumsi lembaga non-profit rumah tangga (LNPR). Konsumsi RT tumbuh meningkat yang terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi pada kelompok hotel dan restoran serta kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya. Selanjutnya, konsumsi Pemerintah juga tumbuh lebih baik yang terutama didorong oleh meningkatnya belanja pegawai sejalan dengan kenaikan gaji ASN dan penyaluran THR yang lebih awal serta meningkatnya belanja barang dan jasa untuk mendukung aktivitas pemilu. Meningkatnya aktivitas pemilu dan lembaga keagamaan serta organisasi masyarakat pada bulan Ramadhan juga turut mendorong kenaikan pertumbuhan konsumsi LNPR pada triwulan I 2024. Di sisi lain, ekspor dan investasi tumbuh melambat. Perlambatan ekspor terutama disebabkan oleh kontraksi pada ekspor barang, sementara tertahannya kinerja investasi dipengaruhi oleh *wait and see* investor pada periode pemilu sebagaimana pola historisnya. Sementara itu, pertumbuhan impor mengalami peningkatan, terutama peningkatan impor jasa yang didorong oleh meningkatnya *outbond tourism*.

Dari sisi sektoral atau lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama ditopang oleh meningkatnya kinerja beberapa LU utama Jakarta seperti LU perdagangan, LU konstruksi, dan LU infokom. Sementara itu, LU utama lainnya seperti LU industri pengolahan tumbuh negatif yang terutama dipengaruhi oleh melambatnya kinerja ekspor. LU jasa keuangan juga tumbuh lebih rendah sejalan dengan melambatnya kinerja jasa penunjang keuangan.

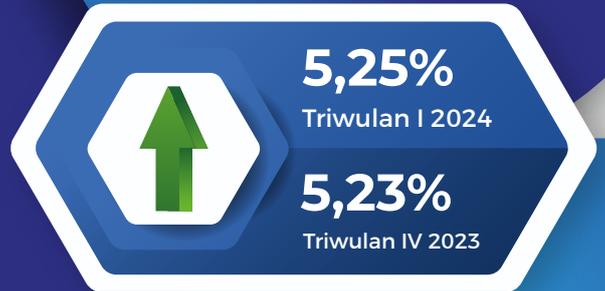
Memasuki triwulan II 2024, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan didorong oleh meningkatnya konsumsi RT sejalan dengan tingginya permintaan pada HBKN Idulfitri, HBKN Idul Adha, serta berlangsungnya *long weekend* dan berbagai *event* pada triwulan II 2024. Peningkatan juga didorong oleh meningkatnya konsumsi Pemerintah sejalan dengan kenaikan belanja pegawai untuk gaji ke-13 serta kenaikan belanja bansos untuk HBKN Idulfitri. Kinerja investasi juga diperkirakan meningkat sejalan dengan masih masuknya investasi untuk proyek strategis Pemerintah dan swasta yang bersifat multitalun. Di sisi lain, kinerja LNPR diperkirakan melambat namun masih tetap tumbuh tinggi. Hal ini disebabkan oleh berakhirnya pemilu di tengah meningkatnya aktivitas ormas keagamaan dalam rangka HBKN Idulfitri.



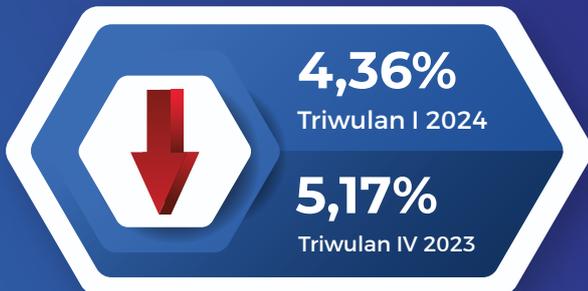
**Pertumbuhan Ekonomi  
DKI Jakarta (yoy)**



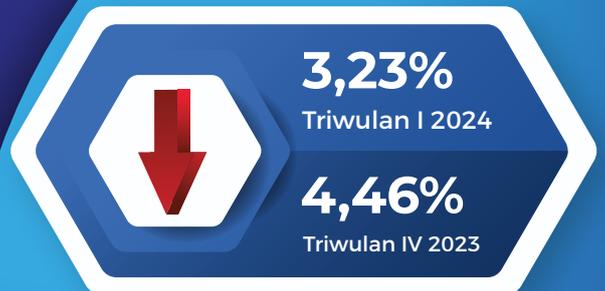
**Pertumbuhan Konsumsi  
Rumah Tangga (yoy)**



**Pertumbuhan  
Investasi (yoy)**



**Pertumbuhan  
Ekspor (yoy)**



## A. PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I 2024

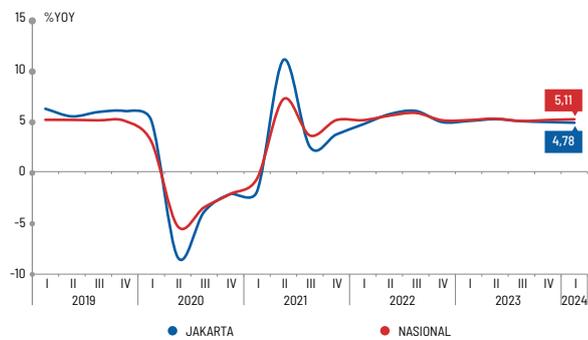
Perekonomian Jakarta tetap kuat pada triwulan I 2024, dengan pertumbuhan sebesar 4,78% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,85%, yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang tetap kuat ditopang oleh meningkatnya konsumsi RT, konsumsi Pemerintah, dan konsumsi LNPRT. Di sisi lain, ekspor dan investasi tumbuh melambat. Adapun impor tumbuh meningkat sehingga turut menjadi penahan pertumbuhan. Sementara itu, dari sisi Lapangan Usaha (LU) utama, pertumbuhan terutama ditopang oleh meningkatnya kinerja LU perdagangan, LU konstruksi, dan LU infokom. Namun, LU utama lainnya seperti industri pengolahan dan jasa keuangan tumbuh lebih rendah. Meskipun tetap tumbuh kuat, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan I 2024 masih lebih rendah dibandingkan perekonomian nasional yang tumbuh mencapai 5,11% (yoy) (Grafik 2.1).

### Komponen Pengeluaran (Permintaan)

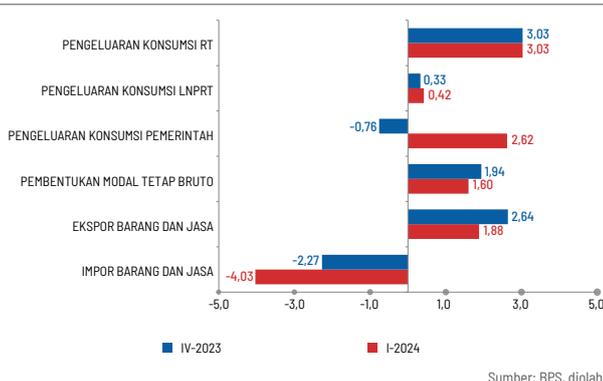
Dari sisi pengeluaran, perekonomian DKI Jakarta yang masih tumbuh kuat pada triwulan I 2024 terutama ditopang oleh meningkatnya konsumsi RT, konsumsi Pemerintah dan konsumsi LNPRT. Konsumsi Rumah Tangga (RT) yang memiliki pangsa terbesar dibandingkan komponen lainnya, yaitu sebesar 57,90%, melanjutkan pertumbuhan positif sebesar 5,25% (yoy), meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (5,23%, yoy). Konsumsi RT memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian DKI Jakarta triwulan I 2024, yakni 3,03% (Grafik 2.2). Konsumsi Pemerintah dengan pangsa sebesar 10,74%

bahkan tumbuh tinggi pada triwulan I 2024 mencapai 30,30% (yoy), dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi 5,04% (yoy) sehingga memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Jakarta pada triwulan I 2024 yaitu sebesar 2,62%. Adapun konsumsi Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), kinerjanya tercatat tumbuh sebesar 19,70% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (15,43%, yoy) dan memberikan kontribusi sebesar 0,42% terhadap perekonomian DKI Jakarta. Dengan pangsa sebesar 36,43%, Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi tercatat tumbuh sebesar 4,36% (yoy) pada triwulan I 2024 dan berkontribusi sebesar 1,60%. Meskipun masih tumbuh positif, kinerja PMTB tersebut melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,17% (yoy).

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor tercatat masih tumbuh positif pada triwulan I 2024, meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Kinerja ekspor tercatat tumbuh melambat dari 4,46% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi 3,23% (yoy). Adapun Ekspor memiliki pangsa sebesar 57,23% dan menyumbang 1,88% terhadap perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2024. Lebih lanjut, kinerja Impor pada triwulan I 2024 tumbuh signifikan mencapai 6,30% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (3,16%, yoy), sehingga memberikan kontribusi sebesar -4,03% terhadap perekonomian DKI Jakarta. Secara keseluruhan, komponen Net Ekspor mencatatkan defisit dengan kontribusi sebesar -2,15% terhadap perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2024 seiring dengan kenaikan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor.



Sumber: BPS, diolah  
Grafik 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional



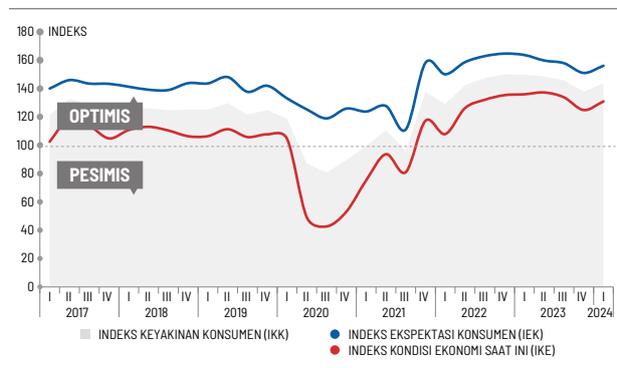
Sumber: BPS, diolah  
Grafik 2.2 Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Komponen Pengeluaran

### Konsumsi Rumah Tangga (RT)

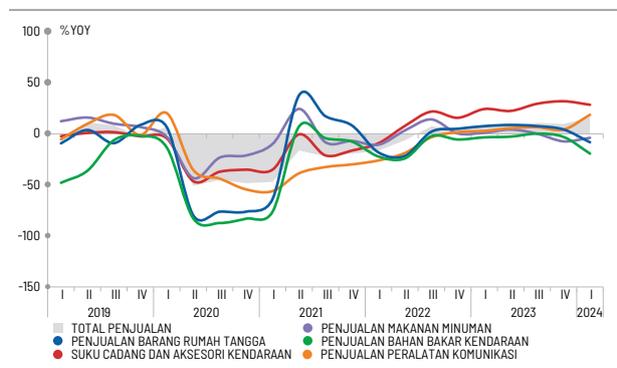
Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Pada triwulan I 2024, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,25% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,23% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar yaitu 3,03% terhadap perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2024 (Grafik 2.2). Meningkatnya pertumbuhan konsumsi RT terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi pada kelompok hotel dan restoran serta kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya sejalan dengan berlangsungnya bulan Ramadan dan penyelenggaraan MICE dan event di DKI Jakarta. Selain itu, meningkatnya konsumsi rumah tangga juga ditopang oleh penyaluran THR yang lebih awal. Meningkatnya pertumbuhan pada konsumsi RT juga tercermin dari beberapa indikator antara lain indeks keyakinan konsumen (IKK) dan indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE). Berdasarkan hasil survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia, IKK pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 141,86, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (137,75). Adapun IKE pada triwulan I 2024 juga tercatat lebih tinggi yaitu sebesar 129,52 dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 124,64 (Grafik 2.3). Lebih tingginya IKE pada triwulan I 2024 terutama bersumber dari kenaikan indeks penghasilan konsumen dan indeks konsumsi barang-barang tahan lama. Meningkatnya konsumsi RT juga tercermin dari Indeks Penjualan Eceran (IPE) yang meningkat dari 9,58% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi 16,10% (yoy) pada

triwulan I 2024 yang terutama didorong oleh meningkatnya penjualan pada sandang, peralatan komunikasi, serta suku cadang dan aksesoris kendaraan (Grafik 2.4).

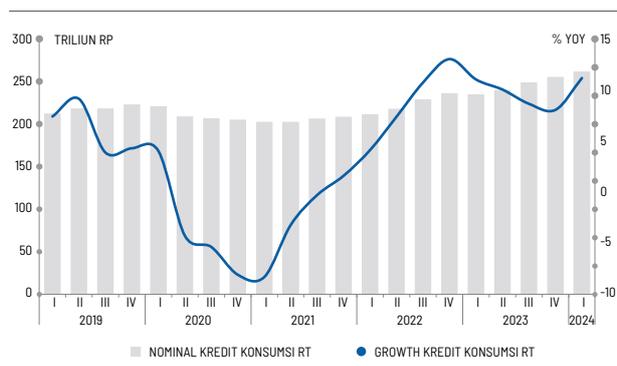
Selain itu, konsumsi rumah tangga yang tumbuh meningkat juga tercermin dari penyaluran kredit konsumsi RT dan penjualan produk melalui *e-commerce*. Penyaluran kredit RT pada triwulan I 2024 naik dari 8,19% (yoy) menjadi 11,33% (yoy) (Grafik 2.5). Sementara itu, penjualan produk melalui *e-commerce* pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh 9,83% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh negatif 0,42% (yoy). Tingginya penjualan produk melalui *e-commerce* terutama didorong oleh penjualan produk *fashion*, makanan dan minuman, personal care dan kosmetik, serta penjualan produk perlengkapan rumah tangga dan kantor (Grafik 2.6).



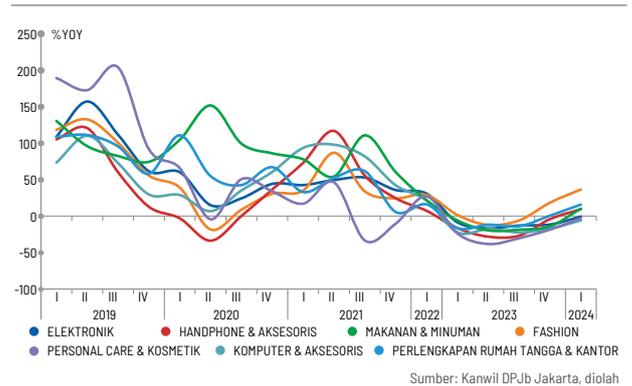
Grafik 2.3 Perkembangan IKK, IKE, dan IEK DKI Jakarta



Grafik 2.4 Perkembangan Indeks Penjualan Eceran (IPE)



Grafik 2.5 Penyaluran Kredit Konsumsi RT di DKI Jakarta



Grafik 2.6 Penjualan E-commerce di DKI Jakarta

### Konsumsi LNPRT

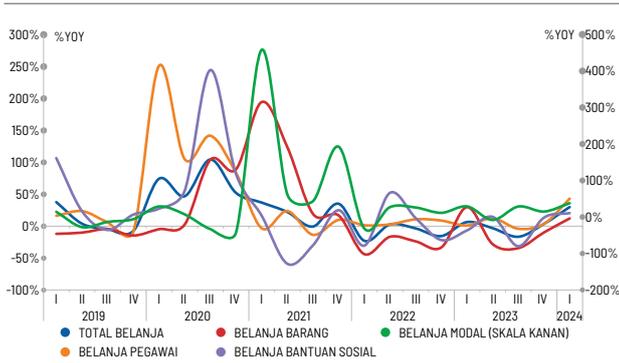
**Konsumsi LNPRT tumbuh tinggi pada triwulan I 2024**, mencapai 19,70% (yoy) dari triwulan lalu yang tumbuh 15,43% (yoy). Capaian tersebut tercermin dari tingginya pertumbuhan konsumsi listrik kategori sosial di DKI Jakarta, yaitu sebesar 6,97% (yoy). Kinerja konsumsi LNPRT yang tumbuh tinggi tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas partai politik untuk mendukung pemilu serta meningkatnya aktivitas lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat pada bulan Ramadan.

### Konsumsi Pemerintah

**Selanjutnya, konsumsi Pemerintah tumbuh signifikan pada triwulan I 2024**, yaitu mencapai 30,30% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 5,04% (yoy). Dengan pangsa sebesar 10,74%, Konsumsi Pemerintah memberikan kontribusi sebesar 2,62% terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan I 2024 (Grafik 2.2). Tingginya pertumbuhan pada konsumsi Pemerintah terutama didorong oleh meningkatnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang bersumber dari APBN. Belanja pegawai pada triwulan I 2024 meningkat sebesar 43,29% (yoy) atau menyerap 29,40% dari pagu didorong oleh peningkatan gaji ASN dan penyaluran THR yang lebih awal. Sementara itu, belanja barang dan jasa meningkat sebesar 12,18% (yoy) atau menyerap 15,57% dari pagu untuk mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 (Grafik 2.7). Secara total, belanja Pemerintah Pusat melalui APBN juga meningkat 17,54% (yoy) atau menyerap 20,57% dari pagu APBN 2024. Dari sisi belanja APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, realisasi total belanja pada triwulan I 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 13,25% (yoy) atau menyerap 10,70% dari pagu APBD 2024. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan belanja barang dan jasa serta belanja modal masing-masing sebesar 33,93% (yoy) dan 32,69% (yoy) (Grafik 2.8).

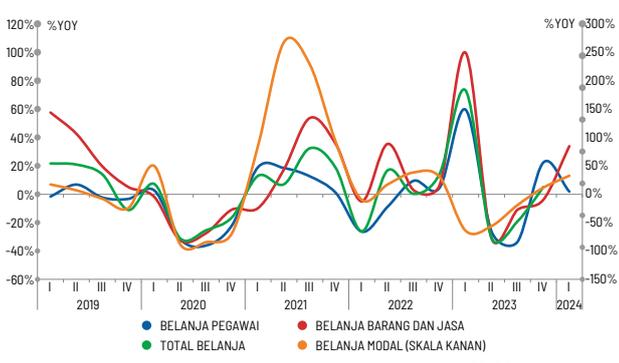
### Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

**Di sisi lain, pertumbuhan investasi Jakarta pada triwulan I 2024 tertahan**, menjadi sebesar 4,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17% (yoy). Perlambatan terutama disebabkan oleh kontraksi pada investasi nonbangunan dipengaruhi oleh *wait and see* investor pada periode pemilu sebagaimana pola historisnya. Di sisi lain, investasi bangunan masih



Sumber: Kanwil DPJb Jakarta, diolah

**Grafik 2.7** Pertumbuhan Belanja Utama Kementerian/Lembaga (APBN) di Jakarta



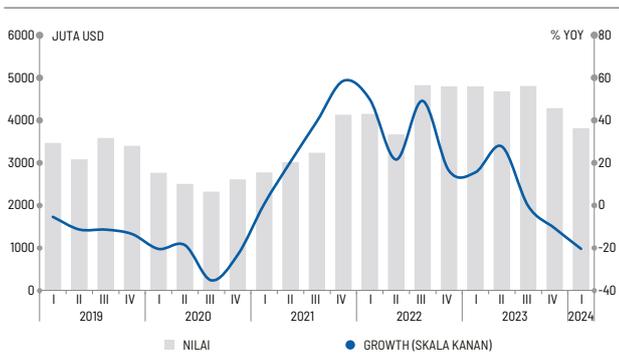
Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

**Grafik 2.8** Pertumbuhan Belanja Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (APBD)

tumbuh positif yang terutama didorong oleh masih berlangsungnya pembangunan proyek strategis multitanah Pemerintah, seperti MRT, LRT, dan jalan tol. Kondisi ini tercermin dari belanja modal Pemerintah melalui APBN yang meningkat sebesar 38,00% atau menyerap 13,40% dari pagu APBN 2024. Melambatnya kinerja investasi juga tercermin dari impor barang modal yang mengalami kontraksi lebih dalam dari -10,75% (yoy) menjadi -20,44% (yoy) pada triwulan I 2024 (Grafik 2.9). Impor besi dan baja juga mengalami kontraksi yang lebih dalam yaitu dari -13,02% (yoy) menjadi -20,70% (yoy) (Grafik 2.10).

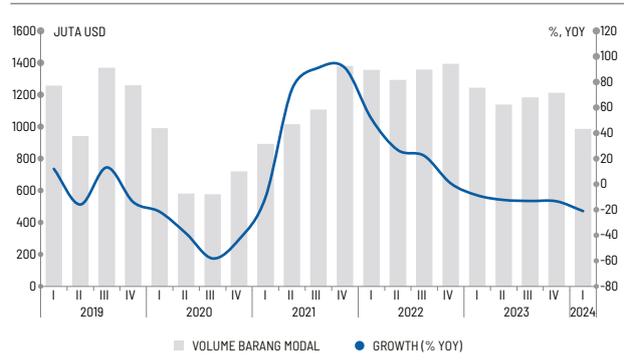
### Net Ekspor

Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2024 masih ditopang oleh kinerja pertumbuhan yang positif dari ekspor dan impor, di tengah perlambatan ekonomi global dan permintaan domestik yang meningkat secara gradual. Pada triwulan I 2024, total ekspor dan impor DKI



Sumber: BI, diolah

**Grafik 2.9** Perkembangan Impor Barang Modal di DKI Jakarta

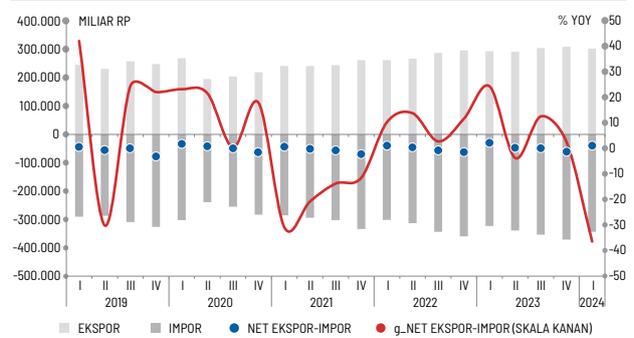


Sumber: BI, diolah

**Grafik 2.10** Perkembangan Impor Besi dan Baja di DKI Jakarta

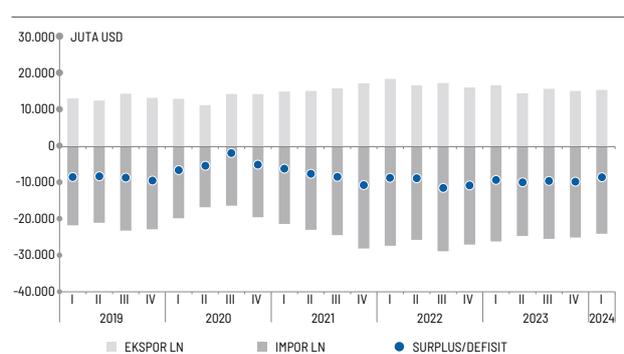
Jakarta masih mencatat pertumbuhan yang tinggi, meskipun kinerja ekspor melambat dan kinerja impor lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun secara keseluruhan net ekspor DKI Jakarta tercatat defisit, namun dengan defisit yang lebih rendah dibandingkan triwulan lalu.

Net ekspor DKI Jakarta mencatatkan defisit sebesar Rp40,65 triliun pada triwulan I 2024, lebih rendah dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp61,22 triliun. Kinerja tersebut mencatatkan pertumbuhan net ekspor sebesar -36,40% (yoy) (Grafik 2.11). Dari sisi neraca perdagangan luar negeri, DKI Jakarta mencatatkan defisit net ekspor, yakni sebesar sebesar USD8,38 miliar pada triwulan I 2024. Defisit tersebut lebih rendah dibandingkan defisit neraca perdagangan pada triwulan sebelumnya yang sebesar USD9,62 miliar (Grafik 2.12). Jika dibandingkan dengan periode sama



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 2.11** Pertumbuhan Net Ekspor Total DKI Jakarta



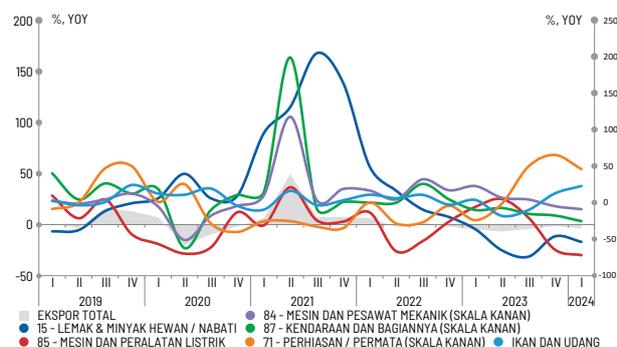
Sumber: BPS, diolah

**Grafik 2.12** Neraca Perdagangan Luar Negeri DKI Jakarta

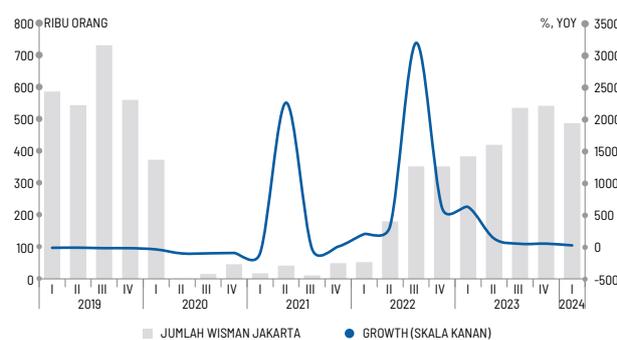
tahun sebelumnya, ekspor luar negeri melalui DKI Jakarta tercatat mengalami kontraksi yang lebih dalam yaitu sebesar 7,42% (yoy) pada triwulan IV 2023 dibandingkan kinerja pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang juga mengalami kontraksi sebesar 5,94% (yoy). Sama halnya dengan kinerja ekspor, kinerja impor luar negeri juga mengalami kontraksi lebih dalam menjadi sebesar 7,95% (yoy), jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga mencatat kontraksi sebesar 7,15% (yoy).

## Ekspor

**Melambatnya kinerja ekspor menjadi salah satu faktor penahan pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan I 2024.** Pertumbuhan ekspor tercatat sebesar 3,23% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (4,46%, yoy) sehingga memberikan kontribusi sebesar 1,88% terhadap perekonomian Jakarta (Grafik 2.2). Melambatnya kinerja ekspor terutama disebabkan oleh penurunan pada ekspor barang yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global, meningkatnya tensi geopolitik terutama di jalur distribusi ekspor (Laut Merah), adanya permasalahan kualitas dan keamanan produk ekspor, serta pembatasan ekspor di beberapa negara tujuan ekspor. Berdasarkan komoditasnya, penurunan pada kinerja ekspor barang utamanya dipengaruhi oleh penurunan ekspor mesin dan peralatan listrik, kendaraan dan bagiannya, serta lemak dan minyak hewan/nabati. (Grafik 2.13). Ekspor mesin dan peralatan listrik pada triwulan I 2024 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 29,88% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga mengalami kontraksi 24,48% (yoy). Adapun kendaraan dan bagiannya juga mengalami kontraksi 25,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan



Grafik 2.13 Perkembangan Ekspor Luar Negeri Barang



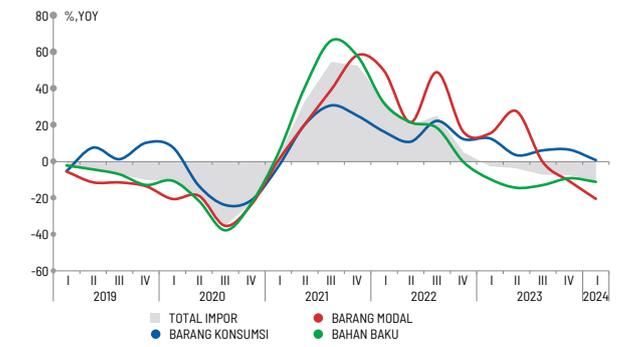
Grafik 2.14 Perkembangan Wisatawan Mancanegara (Wisman)

triwulan lalu yang juga tumbuh negatif 17,40% (yoy). Sementara itu, ekspor lemak dan minyak hewan/nabati juga mengalami kontraksi 16,78% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan lalu yang juga tumbuh negatif 11,45% (yoy).

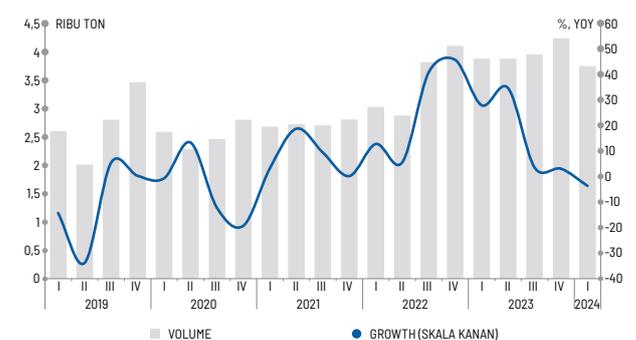
Dari sisi ekspor jasa, kinerja ekspor jasa pada triwulan I 2024 juga tumbuh melambat yang tercermin dari menurunnya kedatangan wisatawan mancanegara ke Jakarta. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Jakarta pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 26,76% (yoy), melambat jika dibandingkan triwulan lalu yang tumbuh 53,74% (yoy) (Grafik 2.14).

## Impor

**Berbeda dengan pertumbuhan ekspor yang melambat, kinerja impor tumbuh meningkat pada triwulan I 2024 sehingga turut menjadi penahan pertumbuhan.** Impor pada triwulan I 2024 tumbuh 6,30% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (3,16%, yoy). Meningkatnya impor ditengarai bersumber dari perdagangan antardaerah sehubungan pemenuhan untuk kebutuhan pemilu dan HBKN Ramadan-Idulfitri. Selain itu, meningkatnya impor jasa (masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri) sejalan dengan berlangsungnya berbagai event di luar negeri (a.l konser musik) juga diperkirakan menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya impor. Di sisi lain, impor barang khususnya yang berasal dari luar negeri (LN) mengalami kontraksi. Berdasarkan jenisnya, kontraksi pada impor barang LN bersumber dari seluruh komponen impor baik barang modal, konsumsi dan bahan baku (Grafik 2.15). Berdasarkan komoditasnya, pertumbuhan negatif pada impor



Grafik 2.15 Perkembangan Impor berdasarkan Jenisnya



Grafik 2.16 Aktivitas Bongkar di Pelabuhan Tanjung Priok

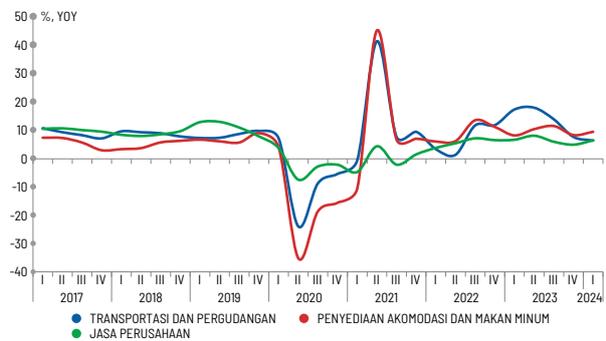
barang LN terutama bersumber dari impor kendaraan dan bagiannya, besi dan baja, serta mesin dan peralatan listrik. Kontraksi pada impor barang LN juga tercermin dari aktivitas bongkar di Pelabuhan Tanjung Priok pada triwulan I 2024 yang juga tumbuh negatif sebesar 3,48% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 3,27% (yoy) (Grafik 2.16).

### Komponen Lapangan Usaha (Penawaran)

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Jakarta yang melambat disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada LU Industri Pengolahan serta pertumbuhan LU Jasa Keuangan yang melambat. Adapun, kedua LU tersebut termasuk dalam LU utama Jakarta. Kontraksi yang terjadi pada LU Industri Pengolahan seiring dengan perlambatan kinerja ekspor. Selanjutnya, kinerja Jasa Keuangan yang melambat disebabkan oleh perlambatan kinerja jasa penunjang keuangan serta jasa keuangan lainnya. Di sisi lain, tiga LU utama Jakarta lainnya yakni LU Perdagangan, LU Konstruksi, dan LU Infokom mengalami akselerasi pertumbuhan pada triwulan I 2024 (Grafik 2.17). Peningkatan kinerja LU Perdagangan seiring dengan kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang juga meningkat. Lebih lanjut, kinerja LU Konstruksi yang meningkat sejalan dengan masih berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta di wilayah Jakarta. LU Infokom juga mencatatkan peningkatan kinerja ditopang oleh peningkatan penggunaan paket data dan internet serta peningkatan jumlah penonton bioskop, sejalan pula

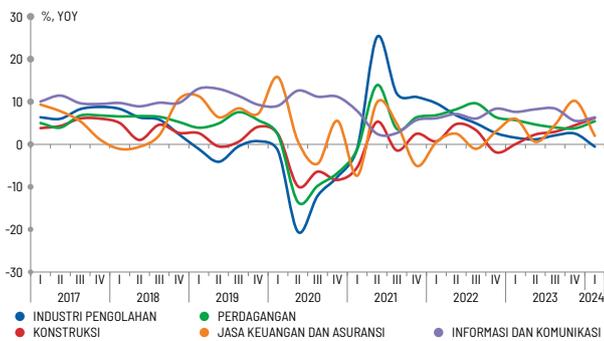
dengan peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga. Adapun, pada triwulan I 2024, LU Perdagangan memegang pangsa tertinggi sebesar 17,91% terhadap PDRB LU Jakarta. Selanjutnya, Industri Pengolahan, Jasa Keuangan, Konstruksi, dan Infokom masing-masing memegang pangsa sebesar 11,63%, 11,17%, 10,74%, dan 9,34%.

Jika melihat dari sisi kontribusinya, pada triwulan berjalan, LU Infokom, Perdagangan, Konstruksi, Jasa Keuangan, dan Industri Pengolahan masing-masing memberikan kontribusi sebesar 0,87%, 0,86%, 0,65%, 0,23%, dan -0,06% (Grafik 2.20). LU Jasa Perusahaan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan juga turut memberikan kontribusi yang cukup besar yakni masing-masing sebesar 0,54, 0,45%, dan 0,26%.



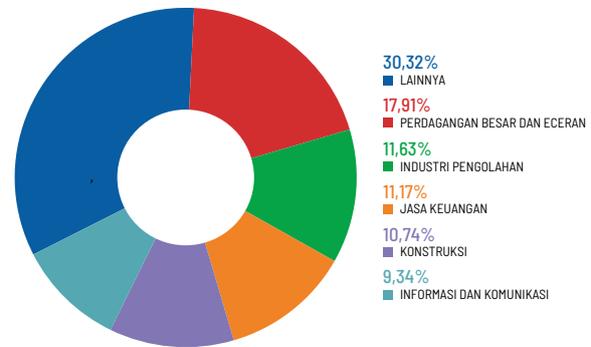
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.18 Perkembangan Pertumbuhan LU Jasa Perusahaan, LU Penyediaan Akomamin, dan LU Transgud



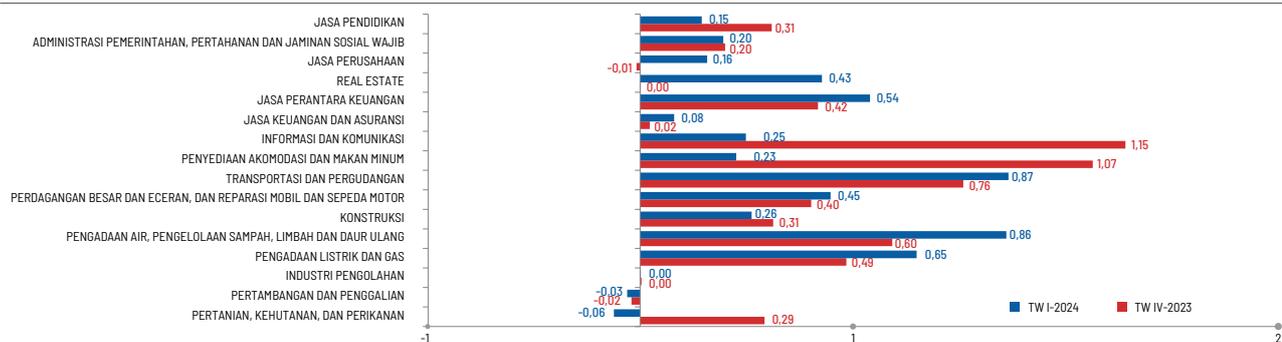
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.17 Perkembangan Pertumbuhan Lima LU Utama



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.19 Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta Triwulan I 2024



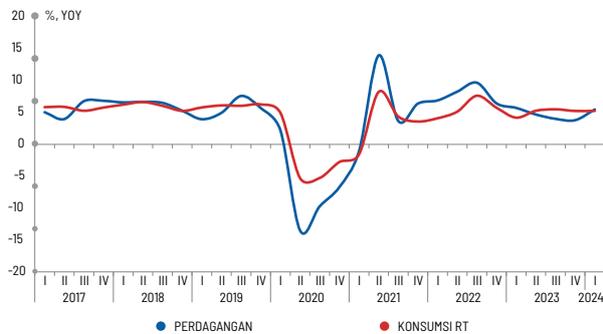
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.20 Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Berdasarkan Lapangan Usaha

## Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

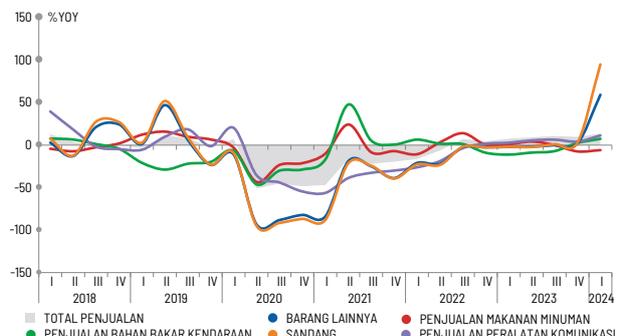
Setelah mengalami perlambatan kinerja pada triwulan IV 2023, LU Perdagangan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,46% (yoy) pada triwulan I 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (3,78%, yoy). Peningkatan kinerja LU Perdagangan sejalan dengan kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang juga meningkat (Grafik 2.21). Peningkatan kinerja LU Perdagangan tercermin dari perkembangan Indeks Survei Penjualan Eceran yang pada triwulan I 2024 sebesar 172,04, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 159,83 atau tumbuh 13,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 9,58% (yoy) (Grafik 2.22). Peningkatan Indeks SPE ini utamanya didorong oleh penjualan Sandang yang pada triwulan I 2024 tumbuh signifikan sebesar 94,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (2,77%, yoy). Pertumbuhan penjualan Sandang seiring dengan periode menjelang HBKN Idulfitri yang akan berlangsung pada bulan April 2024. Selanjutnya, peningkatan indeks SPE juga seiring dengan meningkatnya penjualan Barang Lainnya serta Peralatan Komunikasi yang masing-masing tumbuh sebesar 59,22% (yoy) dan 11,32% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 2,18% (yoy) dan 4,13% (yoy).

Peningkatan kinerja LU Perdagangan kemudian juga tercermin dari penjualan produk melalui *e-commerce* di Jakarta yang pada triwulan



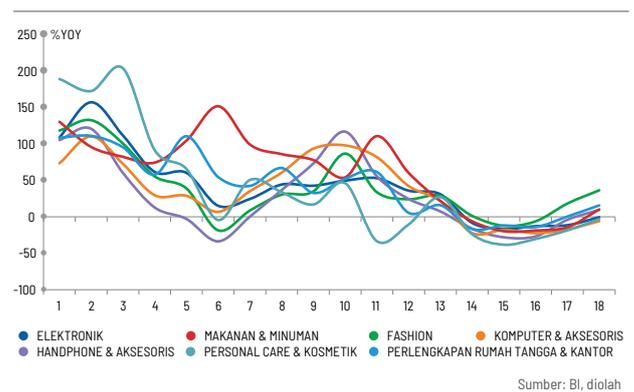
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.21 Pertumbuhan LU Perdagangan dan Konsumsi RT



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.22 Perkembangan Survei Penjualan Eceran



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.23 Perkembangan Penjualan Produk Melalui *e-commerce* di Jakarta

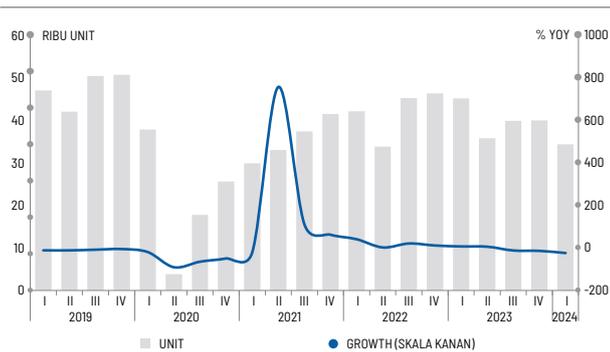
I 2024 tumbuh 9,38% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,48% (yoy) (Grafik 2.23). Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya penjualan pada hampir seluruh komponen, utamanya penjualan produk Fashion dan Perengkapan Rumah Tangga yang tumbuh masing-masing sebesar 36,47% (yoy) dan 26,15% (yoy) seiring momen menjelang HBKN Idulfitri 2024 selain itu, penjualan produk fashion yang meningkat juga diperkirakan sejalan dengan *massive*-nya penyelenggaraan kampanye dan berlangsungnya Pemilu 2024 di Jakarta. Dari sisi penjualan domestik korporasi sebagaimana hasil *liaison* KPw BI Provinsi DKI Jakarta, nilai kegiatan dunia usaha perdagangan meningkat pada triwulan I 2024, lebih baik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Lebih lanjut, peningkatan kinerja LU Perdagangan juga tercermin dari penyaluran kredit LU Perdagangan yang pada triwulan I 2024 tercatat sebesar Rp 301,75 triliun atau tumbuh 21,80% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,17% (yoy) (Grafik 2.24). Kendati demikian, di tengah peningkatan kinerja LU Perdagangan, pertumbuhan penjualan mobil di Jakarta pada triwulan I 2024 kembali terkontraksi 34,81% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 23,92% (yoy) (Grafik 2.25). Berdasarkan hasil dari FGD maupun informasi lainnya yang didapatkan, penjualan mobil yang kembali terkontraksi seiring dengan peningkatan penjualan mobil bekas serta penurunan waktu kerja pada periode Ramadan dan menjelang momen HBKN Idulfitri 2024.



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.24 Perkembangan Penyaluran Kredit LU Perdagangan

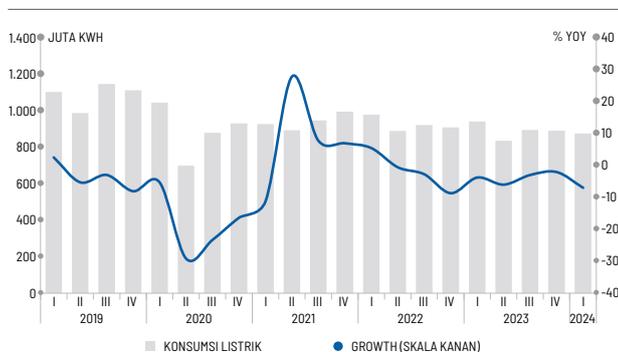


Sumber: GAIKINDO, diolah

Grafik 2.25 Perkembangan Penjualan Mobil di Jakarta

### Lapangan Usaha Industri Pengolahan

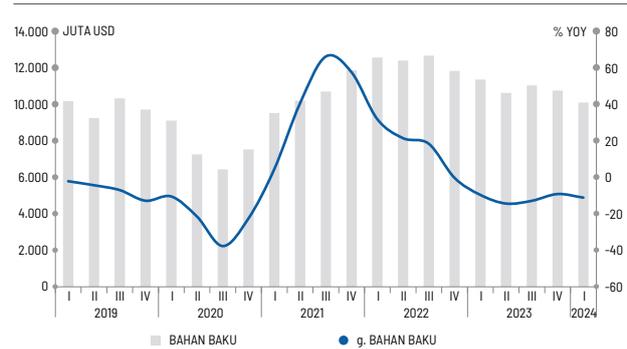
Pada triwulan I 2024, LU Industri Pengolahan berkontraksi 0,53% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,54% (yoy), dan menjadi penahan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta. Perlambatan kinerja Industri Pengolahan utamanya dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang juga melambat. Adapun, berdasarkan jenis industrinya, kontraksi pada Industri Pengolahan bersumber dari penurunan kinerja pada sub Industri Otomotif, Industri Tekstil, Industri Logam, serta Industri Mesin-mesin dan Peralatan. Kinerja Industri Pengolahan yang berkontraksi tercermin dari konsumsi listrik industri yang pada triwulan I 2024 sebesar 875,79 GWh atau berkontraksi 6,96% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 2,00% (yoy) (Grafik 2.26). Selanjutnya, perlambatan kinerja Industri Pengolahan kemudian juga tercermin dari nilai impor bahan baku yang pada triwulan I 2024 kembali berkontraksi 11,12% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 9,14% (yoy) (Grafik 2.27). Perkembangan kegiatan usaha Industri Pengolahan pada triwulan I 2024 juga tercatat sebesar -0,84% SBT seiring dengan kontraksi yang terjadi pada Industri Pengolahan, berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 13,75% SBT (Grafik 2.28).



Sumber: PLN, diolah

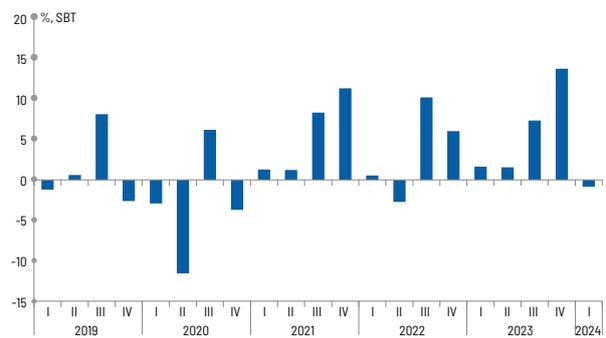
Grafik 2.26 Perkembangan Konsumsi Listrik Industri

Produksi mobil pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 294,82 ribu unit atau kembali berkontraksi 24,84% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 17,87% (yoy) (Grafik 2.29). Perlambatan kinerja produksi mobil di Jakarta juga seiring dengan jumlah waktu kerja yang lebih pendek pada triwulan I 2024 seiring periode Ramadan serta banyaknya cuti bersama. Lebih lanjut, berkontraksinya produksi mobil di Jakarta juga sejalan dengan penjualan mobil yang berkontraksi. Kendati demikian, di tengah



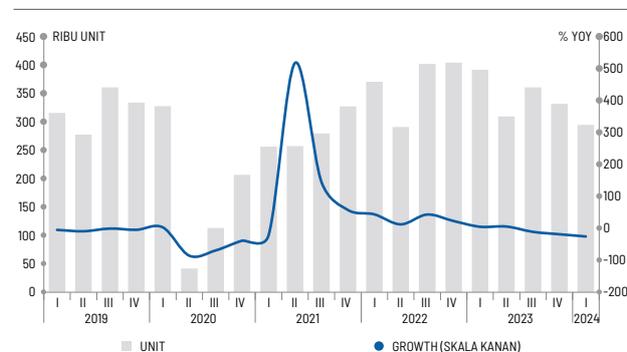
Sumber: BPS, BI, diolah

Grafik 2.27 Perkembangan Nilai Impor Bahan Baku



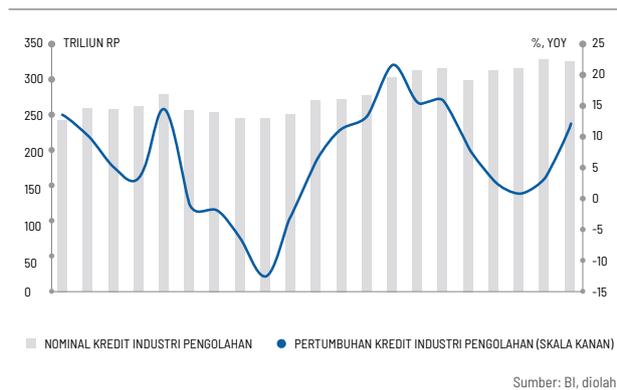
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.28 Perkembangan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan



Sumber: Gaikindo, diolah

Grafik 2.29 Pertumbuhan Produksi Mobil

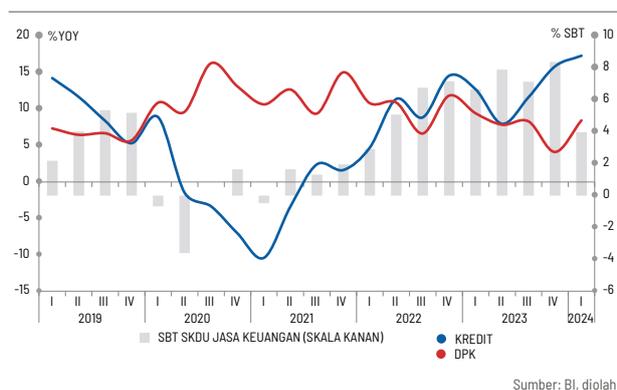


Grafik 2.30 Pertumbuhan Penyaluran Kredit di Sektor Industri

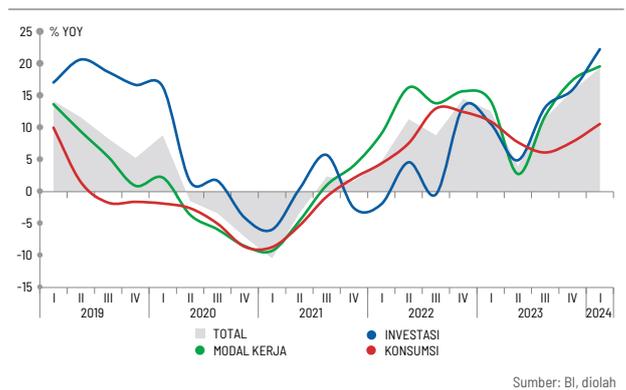
perlambatan kinerja Industri Pengolahan, penyaluran kredit industri pada triwulan I 2024 tercatat sebesar Rp 326,26 triliun atau tumbuh 6,09% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,46% (yoy) (Grafik 2.30).

### Lapangan Usaha Jasa Keuangan

Pada triwulan I 2024, LU Jasa Keuangan mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,02% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang cukup tinggi mencapai 10,24% (yoy). Perlambatan kinerja LU Jasa Keuangan utamanya disebabkan oleh penurunan kinerja jasa penunjang keuangan, jasa keuangan lainnya, serta asuransi. Hal ini juga tercermin dari perkembangan kegiatan usaha Jasa Keuangan yang sebesar 3,98% SBT pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,38% SBT. Kendati demikian, penyaluran kredit di Jakarta pada triwulan I 2024 tercatat sebesar Rp 2.314 triliun atau tumbuh 17,29% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,83% (yoy). Lebih lanjut, DPK di Jakarta juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,44% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 4,12% (yoy) (Grafik 2.31). Adapun, peningkatan penyaluran kredit pada triwulan I 2024 didukung oleh seluruh komponennya, Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi (Grafik 2.32).



Grafik 2.31 Pertumbuhan Kredit, DPK, dan Kondisi Dunia Usaha Jasa Keuangan di DKI Jakarta

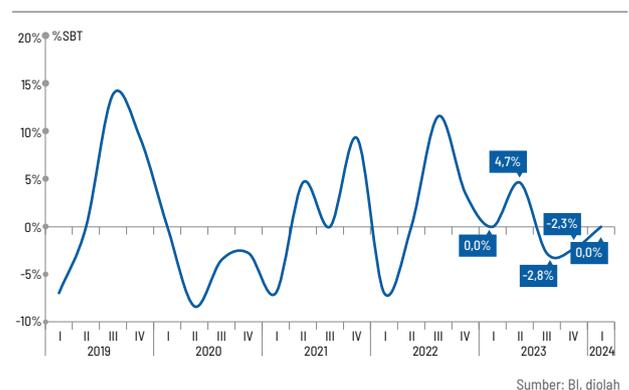


Grafik 2.32 Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

### Lapangan Usaha Konstruksi

Sejalan dengan masih terus berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis Pemerintah di Jakarta yang bersifat *multiyears* seperti MRT, Transit Oriented Development (TOD), LRT Jakarta, serta jalan tol JORR 2, LU Konstruksi mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,27% (yoy) pada triwulan I 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,53% (yoy). Peningkatan kinerja LU Konstruksi kemudian tercermin melalui nilai Survei Kegiatan Dunia Usaha LU Konstruksi yang sebesar 0,00% SBT, kembali ke dalam level positif setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 2,34% SBT (Grafik 2.33).

Berbagai proyek eksisting Pemerintah seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan juga proyek Pemerintah Daerah terus berlanjut pada triwulan I 2024. Pengerjaan proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Fase 2 paket CP201 (Stasiun Thamrin dan Monas) fase 2A MRT Jakarta berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan telah mencapai 75,83%. Pembangunan Stasiun Monas telah masuk ke tahap pekerjaan pengecoran *box jacking* segmen ke-3 dari total 5 segmen untuk *entrance* 1 Jalan Museum, penggalian tahap 2 untuk *entrance* 2 Jalan Silang Barat Daya, pengecoran tangga suar penyejuk (*cooling tower*), dan instalasi *metal ceiling*. Selain itu, dilakukan juga penyelesaian (*finishing*) lantai, pemasangan kaca loket, toilet, *metal roof* ruang generator, instalasi sistem HVAC, suplai air dan drainase, pekerjaan pemadam kebakaran dan elektrikal, serta instalasi eskalator beranda peron (*concourse*) ke peron (*platform*). Adapun, pada Stasiun Thamrin,



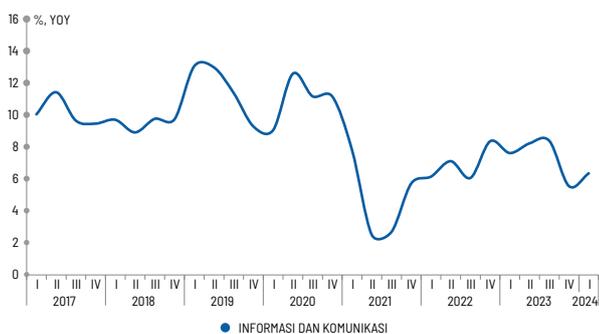
Grafik 2.33 Perkembangan Kegiatan Usaha LU Konstruksi

pekerjaan yang sedang dilakukan meliputi penyelesaian pengecoran lantai beranda peron (*concourse slab*) stasiun dan kolom, instalasi OTE Duct, pondasi *entrance 4*, suar penyejuk, dan *ventilation tower* di Thamrin 10, penggalian area kamaniti (*stabling yard*), instalasi dinding AAC di beranda peron dan pipa drainase di bawah peron, dan pemasangan *mock up* peralatan MEP. Lebih lanjut, progres konstruksi CP 202 (Harmoni – Sawah Besar – Mangga Besar) telah mencapai 29,38% dan untuk progres konstruksi CP203 (Glodok – Kota), pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal dan saat ini telah mencapai progres sebesar 51,45%.

Berdasarkan Building Construction Information (BCI) Asia, beberapa proyek konstruksi yang sedang berlangsung di Jakarta diantaranya New Priok Container Terminal (NPTC) 2 & 3 (Phase 1B) sejak Sept 2022 s.d. Agustus 2025, Benhil *Central - Hotel & Serviced Apartment* sejak 15 Maret 2022 s.d. Q2 2025, dan jalan Kamal-Teluk Naga-Rajeg *Toll road development*: SS Kosambi-SS Teluk Naga-SS Tanjung Pasir (Section 2) dan Kamal (JC Sedyatmo-SS Kosambi (Section 1) sejak Juni 2022 s.d. Juli/Des 2024. Selanjutnya, progres proyek pembangunan tanggul pantai atau *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) terus berlangsung. Pembangunan tanggul Muara Angke dengan target pengerjaan pada 2022 sampai 2028. Proyek pengerjaan 6 ruas jalan tol dalam kota (tahap I sesi B dan C, tahap II, dan tahap III) juga terus berlanjut serta proyek pembangunan kawasan TOD MRT juga terus berjalan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan (KBT Istora-Senayan, KBT Blok M-ASEAN, Park and Ride Lebak Bulus, Pelebaran Jalan Pati-Juanda, Pedestrianisasi Jalan Blora, Penataan Taman Kudus, dan KBT Dukuh Atas). Di Jakarta sendiri terdapat beberapa *on going project* dengan nilai tertinggi terdapat pada proyek pekerjaan rancang bangun Terminal Kalibaru tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok.

### Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi

Dengan andilnya yang sebesar 0,87% (yoy) terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan I 2024, LU Infokom mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,38% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,57% (yoy) (Grafik 2.34). Kembali meningkatnya pertumbuhan LU Infokom seiring dengan peningkatan penggunaan paket data dan internet serta



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.34 Pertumbuhan LU Infokom

semakin meningkatnya jumlah penonton bioskop yang sejalan pula dengan kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang meningkat.

### Lapangan Usaha Jasa Lainnya

Perlambatan kinerja perekonomian Jakarta lebih lanjut kemudian tertahan pula oleh kinerja positif dari LU Jasa Perusahaan serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. LU Jasa Perusahaan mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,56% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,03% (yoy). Kinerja LU Jasa Perusahaan yang meningkat seiring dengan maraknya penyelenggaraan MICE dan berbagai event di Jakarta pada triwulan I 2024. Lebih lanjut, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) mencatatkan pertumbuhan kinerja sebesar 9,56% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 8,40% (yoy) (Grafik 2.35). Peningkatan kinerja LU Akmamin sejalan dengan kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang juga meningkat pada kelompok hotel dan restoran.

Kendati demikian, LU Transportasi dan Pergudangan yang juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Jakarta, mengalami perlambatan kinerja dengan tumbuh 6,48% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 7,76% (yoy) (Grafik 2.36). Perlambatan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan utamanya berasal dari komponen transportasi barang yang juga sejalan dengan penurunan kinerja ekspor pada triwulan laporan.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.35 Pertumbuhan LU Jasa Perusahaan dan LU Akmamin



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.36 Pertumbuhan LU Transportasi dan Pergudangan

## B. TRACKING PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN II 2024

Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan II 2024 diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Peningkatan didorong oleh meningkatnya konsumsi RT sejalan dengan berlangsungnya HBKN Idulfitri, HBKN Idul Adha, banyaknya *long weekend* serta semakin masifnya pelaksanaan MICE dan event (a.l musik dan olahraga) di Jakarta. Konsumsi Pemerintah juga diperkirakan masih tetap tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan belanja bansos untuk HBKN Idulfitri serta belanja pegawai dengan adanya penyaluran gaji ke-13. Peningkatan juga didukung oleh meningkatnya kinerja investasi sejalan dengan masih masuknya investasi untuk proyek-proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta yang bersifat multitalah. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diperkirakan membaik didorong oleh pelaksanaan ekspor ke beberapa negara yang telah dilakukan setelah sebelumnya tertahan akibat adanya permasalahan kualitas dan keamanan serta pembatasan kuota ekspor. Di sisi lain, kinerja LNPRT diperkirakan melambat namun masih tetap tumbuh tinggi. Hal ini disebabkan oleh telah berakhirnya pelaksanaan pemilu di tengah meningkatnya aktivitas ormas agama dalam rangka HBKN Idulfitri.

Dari sisi LU utama, sejalan dengan sisi pengeluaran, LU Perdagangan dan LU industri pengolahan diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. LU jasa keuangan dan infokom juga diperkirakan tumbuh meningkat yang masing-masing didukung oleh tingginya penyaluran kredit perbankan serta meningkatnya penggunaan paket data dan internet pada HBKN Idulfitri. Sementara itu LU konstruksi diperkirakan tumbuh melambat disebabkan oleh waktu kerja yang lebih pendek pada periode bulan Ramadhan dan libur HBKN Idulfitri.

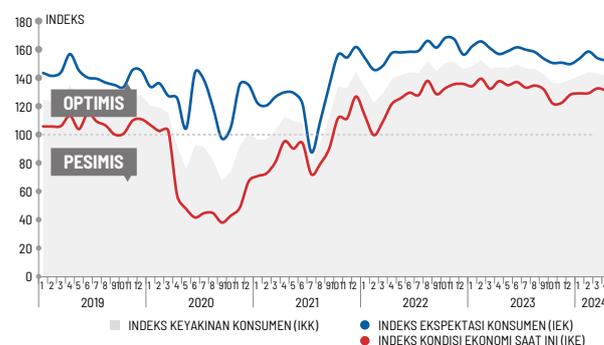
### Komponen Pengeluaran (Permintaan) Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh meningkat pada triwulan II 2024. Peningkatan terutama didorong oleh meningkatnya permintaan pada HBKN Idulfitri, berlangsungnya HBKN Idul Adha, banyaknya *long weekend* serta berlangsungnya berbagai event dan MICE di Jakarta (a.l Jakarta *Great Sale*). Peningkatan juga didukung oleh adanya gaji ke-13 yang rencananya akan disalurkan pada bulan Juni 2024. Prakiraan meningkatnya konsumsi RT tersebut terindikasi dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia. IKE pada triwulan II 2024 (April) tercatat sebesar 131,52, lebih tinggi dibandingkan IKE pada triwulan sebelumnya (130,73). Meningkatnya IKE terutama didorong oleh meningkatnya indeks penghasilan konsumen dan ketersediaan lapangan kerja. Adapun IEK untuk 6 bulan yang akan datang pada triwulan II 2024 (April) juga tercatat lebih tinggi yaitu

sebesar 152,67; didorong terutama oleh kenaikan indeks ekspektasi kegiatan usaha 6 (enam) bulan yang akan datang dari 156,76 pada triwulan I 2024 menjadi 157,43 pada April 2024 (Grafik 2.37). Kondisi tersebut sejalan dengan hasil SBT Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang memproyeksikan bahwa perkembangan kegiatan usaha pada triwulan II 2024 meningkat dari 8,3% menjadi 33,59% pada triwulan II 2024.

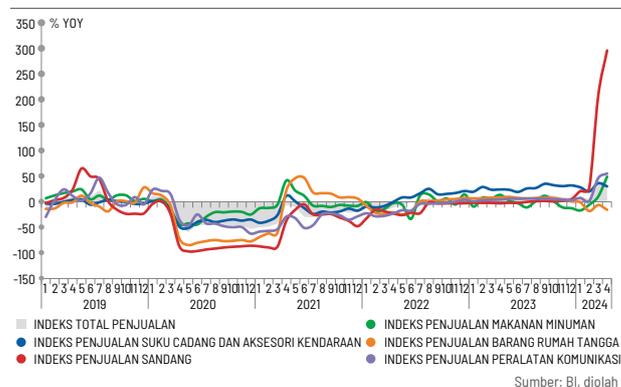
Hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga mengindikasikan kenaikan konsumsi RT pada triwulan II 2024. Indeks penjualan eceran (IPE) pada triwulan II 2024 (April) tercatat tumbuh 44,92% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 16,10% (yoy). Kondisi tersebut didorong terutama oleh peningkatan indeks penjualan sandang, makanan dan minuman, serta peralatan komunikasi (Grafik 2.38).

Prakiraan meningkatnya konsumsi RT juga terindikasi dari penyaluran kredit konsumsi RT pada triwulan II 2024 (April) yang tercatat sebesar Rp263,87 Triliun atau tumbuh 11,03% (yoy) (Grafik 2.39). Selain itu, prakiraan meningkatnya konsumsi RT juga didukung oleh membaiknya indikator penjualan mobil di Jakarta meski masih mengalami kontraksi. Penjualan mobil di Jakarta pada triwulan II 2024 (April) terkontraksi sebesar 17,54% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan I 2024 yang juga mengalami kontraksi sebesar 23,92% (yoy) (Grafik 2.40).



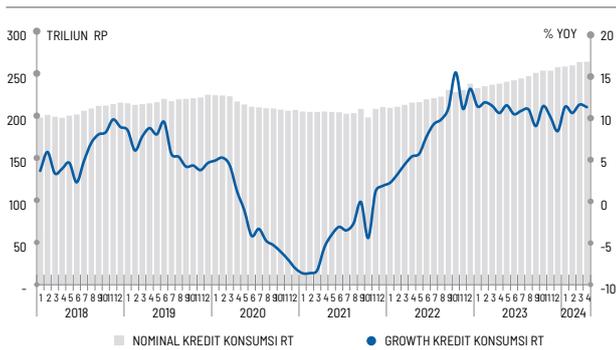
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.37 Perkembangan IKK, IEK, dan IKE Berdasarkan Hasil Survei Konsumen



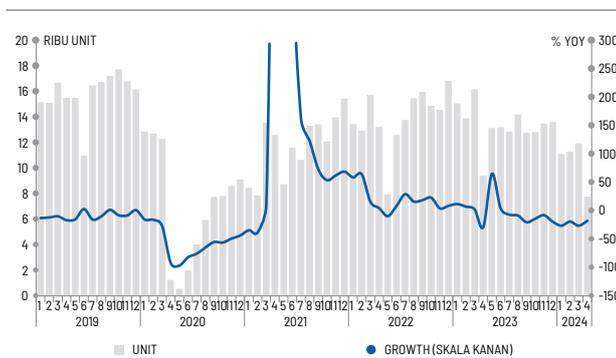
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.38 Perkembangan IPE Berdasarkan Hasil Survei Penjualan Eceran



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.39 Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi RT



Sumber: Gaikindo, diolah

Grafik 2.40 Perkembangan Penjualan Mobil di Jakarta

## Konsumsi Pemerintah

**Konsumsi Pemerintah juga diperkirakan masih tetap tumbuh tinggi pada triwulan II 2024, meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Pertumbuhan terutama didorong oleh kenaikan belanja bansos dalam rangka HBKN Idulfitri dan kenaikan belanja pegawai sejalan dengan penyaluran gaji ke-13. Meskipun demikian, konsumsi Pemerintah tumbuh melambat yang disebabkan oleh normalisasi kenaikan belanja pegawai pasca penyaluran THR yang lebih awal serta normalisasi belanja barang dan jasa pascaberlangsungnya pemilu. Kondisi tersebut terindikasi dari realisasi belanja APBD pada triwulan II 2024 (data s.d 17 Mei 2024) dengan penyerapan sebesar 20,65% dari pagu atau mengalami kontraksi 31,52% (yoy) yang terutama disebabkan oleh penurunan belanja pegawai. Indikasi melambatnya konsumsi Pemerintah juga tercermin dari realisasi belanja Pemerintah Pusat melalui APBN pada Tw II 2024 (data s.d 17 Mei 2024) tercatat sebesar 12,91% dari pagu atau mengalami kontraksi 30,95% (yoy) yang juga disebabkan oleh menurunnya belanja pegawai sebesar 37,26% (yoy).

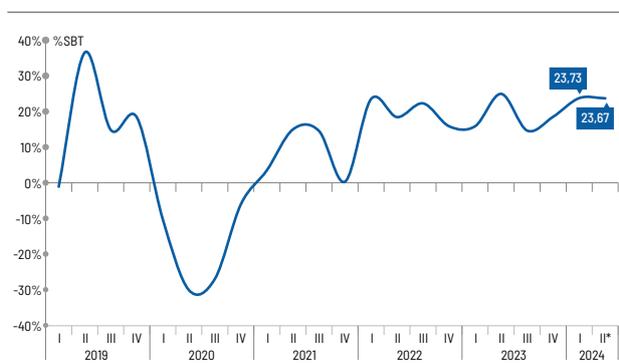
## Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

**Adapun kinerja PMTB pada triwulan II 2024 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.** Peningkatan terutama didorong oleh masih berlanjutnya investasi khususnya untuk proyek strategis multitanah Pemerintah (a.l MRT, LRT dan jalan tol JORR 2) dan swasta. Adanya pembangunan proyek baru yaitu PIK 2 yang masuk dalam proyek strategis nasional 2024 juga diperkirakan akan

mendorong masuknya PMTB ke Jakarta. Peningkatan PMTB tersebut salah satunya terindikasi dari perkembangan investasi kegiatan usaha pada Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) (Grafik 2.41). Berdasarkan hasil SKDU, perkembangan investasi kegiatan usaha pada Triwulan II 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 23,70%.

Meningkatnya PMTB pada triwulan II 2024 juga tercermin dari realisasi belanja modal khususnya yang melalui APBD. Belanja modal yang melalui APBD pada triwulan II 2024 tumbuh lebih baik meskipun masih mengalami kontraksi 4,64% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang juga mencatat pertumbuhan negatif 88,24% (yoy). Indikasi meningkatnya PMTB juga tercermin dari penyaluran kredit investasi korporasi pada April 2024 yang tumbuh mencapai 21,03% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 19,93% (yoy) (Grafik 2.42).

Selain itu meningkatnya PMTB juga didukung oleh berlanjutnya berbagai proyek strategis swasta yang juga sedang berlangsung di Jakarta yaitu Thamrin Nine - Autograph Tower 1 (Waldorf Astoria) & Luminary Tower 2 (Pan Pacific, Park Royal) & Leparc senilai 326,96 juta USD, New Priok Container Terminal (NPTC) 2 & 3 (Phase 1B) senilai 257,3 juta USD, Benhil Central - Hotel & Serviced Apartment senilai 115,38 juta USD, Mandiri IT Tower - Bumi Slipi Jakarta Barat senilai 57,42 juta USD, jalan Kamal-Teluk Naga-Rajeg Toll road development: SS Kosambi-SS Teluk Naga-SS Tanjung Pasir (Section 2) dan Kamal (JC Sedyatmo-SS Kosambi (Section 1) senilai 109,87 juta USD serta berbagai proyek *green investment* seperti *waste management*, infrastruktur EV, dan *green commercial/industrial zone*.



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.41 Perkembangan Investasi Kegiatan Usaha (SKDU)



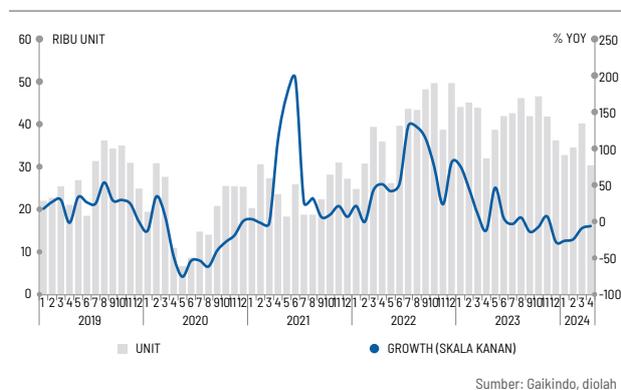
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.42 Perkembangan Kredit Investasi Korporasi

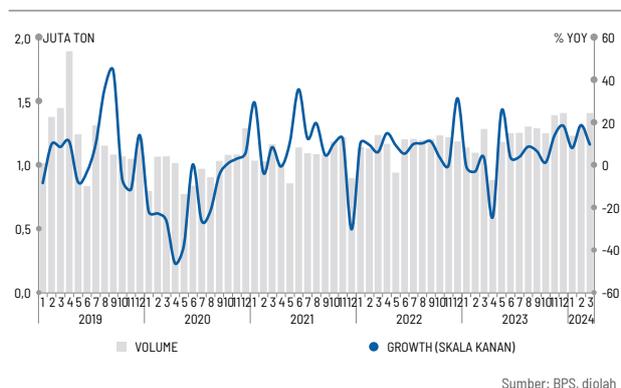
## Ekspor

Setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh melambat, kinerja ekspor pada triwulan II 2024 diperkirakan tumbuh lebih baik. Lebih baiknya kinerja ekspor didukung oleh perbaikan bertahap ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor Jakarta (a.l Meksiko, Uruguay, dan Equador) setelah pada triwulan sebelumnya memiliki permasalahan terkait kualitas dan keamanan serta pembatasan kuota ekspor. Kondisi ini terindikasi dari ekspor mobil CBU pada triwulan II 2024 (April) yang tercatat sebesar 30.527 unit atau mengalami kontraksi sebesar 5,31% (yoy), membaik secara bertahap dibandingkan Triwulan I 2024 yang juga mengalami kontraksi sebesar 19,18% (yoy) (Grafik 2.43). Perbaikan kinerja ekspor juga terindikasi dari aktivitas muat tanjung priok yang tumbuh lebih baik menjadi sebesar 12,19% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,29% (yoy) (Grafik 2.44). Selain itu, beberapa komoditas unggulan Jakarta seperti ikan dan udang, berbagai produk kimia, pakaian jadi bukan rajutan, barang-barang rajutan serta karet dan barang dari karet juga mengalami perbaikan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 23,06% (yoy); 2,51% (yoy); -3,53% (yoy); -0,36% (yoy); dan -3,87% (yoy) (Grafik 2.45).

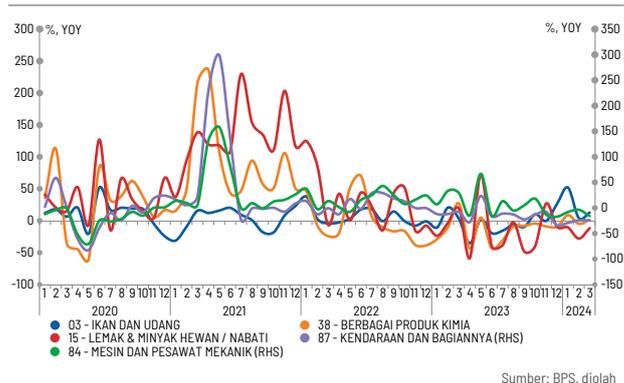
Perbaikan ekspor juga diperkirakan bersumber dari meningkatnya ekspor jasa yang terindikasi dari indikator kedatangan penumpang internasional ke CGK dan HLP pada Triwulan II 2024 (April) yang tercatat sebesar 669,03 ribu orang, atau tumbuh sebesar 37,07%



Grafik 2.43 Perkembangan Ekspor Mobil CBU



Grafik 2.44 Perkembangan Aktivitas Muat Tanjung Priok



Grafik 2.45 Perkembangan Ekspor Komoditas Unggulan di Jakarta

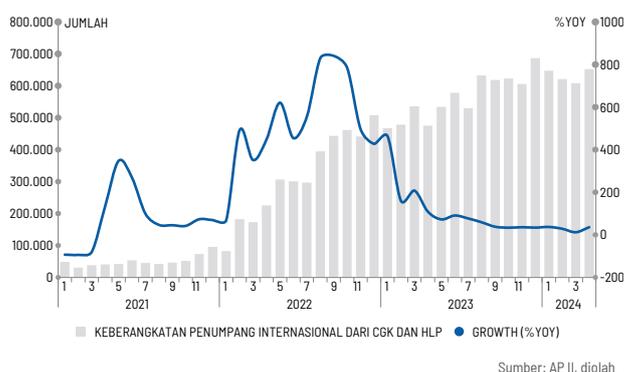


Grafik 2.46 Perkembangan Kedatangan Penumpang Internasional ke Jakarta

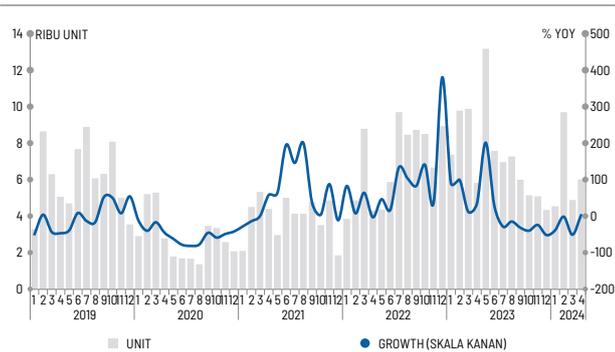
(yoy), lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 28,70% (yoy) (Grafik 2.46).

## Impor

Berbeda dengan kinerja ekspor, kinerja impor pada triwulan II 2024 diperkirakan tumbuh melambat. Perlambatan terutama dipengaruhi oleh normalisasi impor pasca kenaikan impor jasa di awal tahun yang didorong oleh banyaknya pelaksanaan event (konser musik) di luar negeri (LN). Normalisasi impor jasa terindikasi dari jumlah penumpang yang berangkat dari Jakarta ke Luar Negeri (LN) pada triwulan II 2024 (April) yang tumbuh lebih rendah menjadi sebesar 23,24% (yoy), jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2024 yang sebesar 26,61% (yoy) (Grafik 2.47). Di sisi lain, impor barang diperkirakan



Grafik 2.47 Perkembangan Keberangkatan Penumpang Internasional dari Jakarta



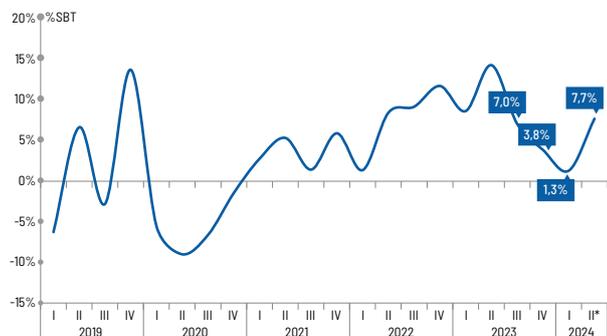
Sumber: Gaikindo, diolah

Grafik 2.48 Perkembangan Nilai Impor Mobil (Otomotif)

meningkat baik impor barang konsumsi, bahan baku, maupun barang modal sejalan dengan meningkatnya konsumsi RT dan investasi serta perbaikan ekspor. Kondisi ini salah satunya tercermin dari impor mobil CBU pada triwulan II 2024 (April) yang tercatat sebanyak 7.140 unit atau mengalami kontraksi 20,96% (yoy), lebih baik jika dibandingkan triwulan I 2024 yang juga mengalami kontraksi sebesar 39,45% (yoy) (Grafik 2.48).

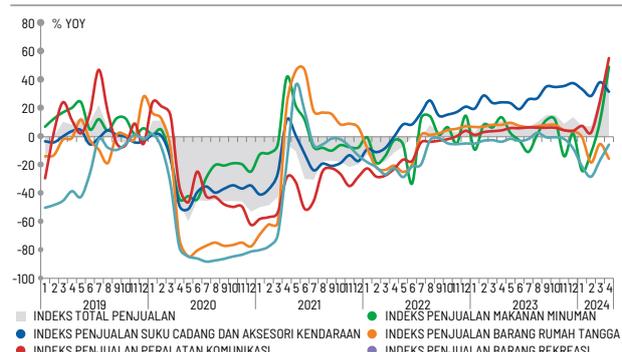
### Komponen Lapangan Usaha (Penawaran)

Kinerja LU Perdagangan pada triwulan II 2024 diperkirakan tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Optimisme ini sejalan dengan *demand* masyarakat yang tumbuh tinggi pada momen HBKN Idulfitri serta peningkatan penghasilan masyarakat seiring penyaluran gaji ke-13 ASN. Selain daripada HBKN Idulfitri, pada triwulan II 2024 juga banyak terdapat libur *long weekend* yang diperkirakan akan mendorong konsumsi masyarakat. Lebih lanjut, terdapat pula HBKN Idul Adha serta berlangsungnya berbagai *event* seperti rangkaian kegiatan HUT Jakarta ke 497, Jakarta Kreatif Festival 2024, hingga Jakarta Great Sale 2024. Optimisme kinerja LU Perdagangan ini tercermin pula dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha LU Perdagangan yang pada triwulan II 2024 diperkirakan sebesar 7,67% SBT, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,28% SBT (Grafik 2.49). Lebih lanjut, Indeks penjualan eceran (IPE) pada April 2024 tercatat sebesar 78,21, lebih tinggi jika dibandingkan rata-



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.49 Perkembangan Kegiatan Usaha LU Perdagangan



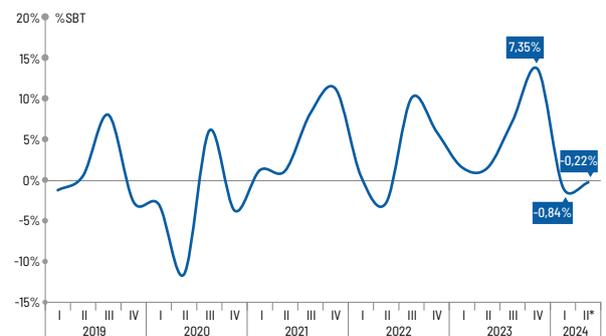
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.50 Indeks Total Penjualan Eceran

rata IPE pada Tw I'24 yang sebesar 57,34. Kondisi tersebut didorong oleh peningkatan pada penjualan peralatan komunikasi, makanan dan minuman, serta barang rekreasi seiring dengan banyaknya periode libur dan cuti bersama yang berlangsung (Grafik 2.50).

LU Industri Pengolahan pada triwulan II 2024 diperkirakan tumbuh positif setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi. Hal ini seiring dengan prakiraan peningkatan ekspor pada triwulan II 2024 didorong oleh mulai berlanjutnya kembali ekspor ke Meksiko dan beberapa negara tujuan lainnya setelah terselesaikannya uji keselamatan yang sempat menjadi penahan kinerja ekspor Industri Pengolahan. Prakiraan kinerja Industri Pengolahan yang lebih baik ini tercermin dari hasil Survei Kegiatan Usaha Industri Pengolahan yang pada triwulan II 2024 diperkirakan sebesar -0,22% SBT, membaik dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang sebesar -0,84% SBT (Grafik 2.51). Dari sisi penyaluran kredit, pada April 2024, penyaluran kredit Industri Pengolahan tumbuh sebesar 18,48% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada triwulan I 2024 yang sebesar 12,15% (yoy) (Grafik 2.52).

Selanjutnya, kinerja LU Konstruksi pada triwulan II 2024 diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Prakiraan ini seiring dengan banyaknya waktu libur (cuti bersama dan tanggal merah) yang menyebabkan lebih pendeknya waktu kerja. Prakiraan ini



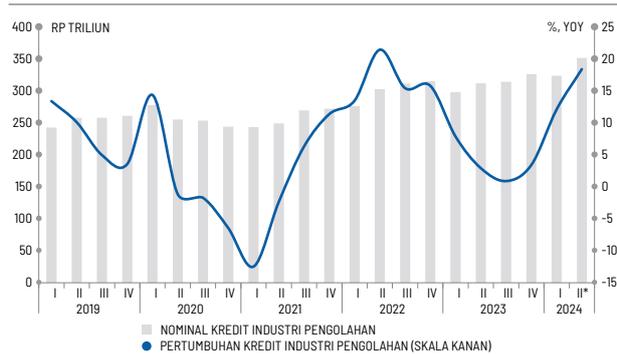
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.51 Perkembangan Kegiatan Usaha LU Industri Pengolahan

kemudian tercermin pula dari realisasi pengadaan semen di Jakarta yang pada bulan April 2024 sebesar 99,94 ribu ton atau terkontraksi 12,57% (yoy), lebih rendah dan berbalik arah jika dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi pengadaan semen di Jakarta pada triwulan I 2024 yang sebesar 3,29% (yoy) (Grafik 2.53).

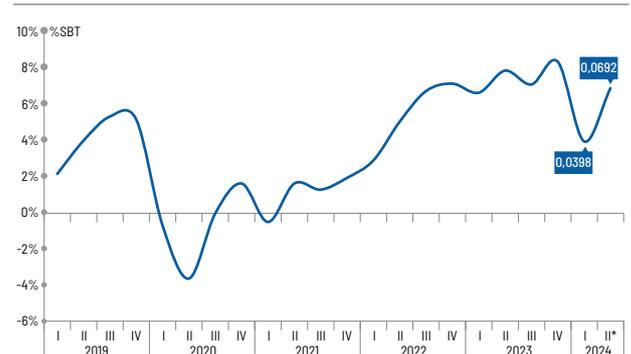
Lebih lanjut, kinerja LU Jasa Keuangan pada triwulan II 2024 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Prakiraan ini sejalan dengan peningkatan daya saing sektor jasa keuangan serta

penguatan infrastruktur pengaturan dan pengawasan terintegrasi di Jakarta. Optimisme ini kemudian tercermin dari perkembangan kegiatan usaha LU Jasa Keuangan yang pada triwulan II 2024 diperkirakan sebesar 6,92% SBT, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (3,98% SBT) (Grafik 2.54). Penyaluran kredit di Jakarta memasuki triwulan II 2024 juga terlihat mengalami peningkatan dan tumbuh sebesar 20,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit pada triwulan sebelumnya yang sebesar 19,41% (yoy) (Grafik 2.55).



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.52 Perkembangan Kegiatan Usaha LU Industri Pengolahan



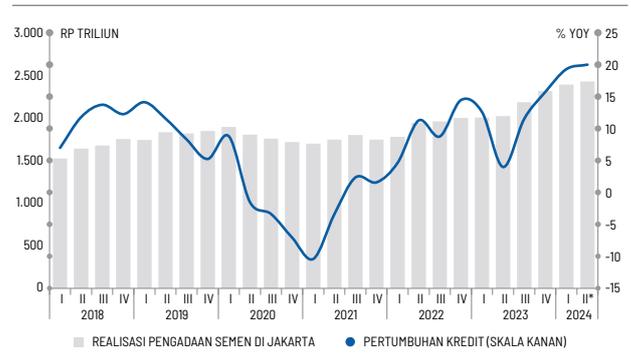
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.54 Perkembangan Kegiatan Usaha LU Jasa Keuangan



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 2.53 Realisasi Pengadaan Semen Jakarta



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.55 Perkembangan Penyaluran Kredit di Jakarta



**BOKS 1**

# Penguatan Pariwisata Jakarta menuju Kota Global: Wisata Urban

Sejalan dengan arah pengembangan Jakarta sebagai Kota Global berdaya saing, sektor pariwisata, khususnya wisata urban (*urban tourism*), menjadi salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan. Pengembangan wisata urban juga telah menjadi program utama Pemprov DKI Jakarta berdasarkan KepGub No. 588/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Urban. Wisata urban adalah sebuah aktivitas pariwisata yang bertempat di perkotaan dengan segala karakteristik perkotaan yang kental. Terdapat 9 (Sembilan) kategori pariwisata urban di Jakarta sesuai klasifikasi UNWTO yaitu

Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Belanja, Wisata Rekreasi, Wisata Kuliner, Wisata MICE (*Meetings, Incentives, Conference, Exhibitions*), Wisata Olahraga/kebugaran, Wisata Religi dan Ziarah, serta Wisata Alam.

Pengembangan wisata urban di Jakarta dilakukan sejalan dengan profil Jakarta sebagai kota metropolitan serta potensi pariwisata Jakarta yang memiliki sarana dan parasarana yang relatif lebih memadai dibandingkan provinsi lainnya antara lain seperti sistem transportasi

**Tabel B1.1** Lokasi Wisata Urban di DKI Jakarta

NO	JENIS WISATA URBAN	LOKASI PEMBANGUNAN DI JAKARTA
1	Sejarah	Monumen Nasional, Istana & Balai Kota, Kantor Pos, Museum Kesejarahan, Rumah si Pitun, Toko Merah, Kali Besar, Kota Tua
2	Budaya	Museum Wayang, Museum Nasional, Gedung Joang 45, Pencak Silat, Batik Encim
3	Belanja	Mall Senayan City, Sarinah, PosBloc, Mall Central Park, Pasar Mayestik, Thamrin City
4	Rekreasi	Waterboom PIK, Taman Margasatwa Ragunan, Dunia Fantasi, Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
5	Kuliner	Sabang, Chillax, Pantai Indah Kapuk
6	MICE	JIEXpo Kemayoran, JCC Senayan, Ancol, Hotel
7	Olahraga/kebugaran	Jetski Ancol, Golf PIK, Jakarta International Stadium, Hutan Kota GBK, Aquatic, Jakarta International Velodrome, Wisata Sepeda
8	Religi dan Ziarah	Kuil Shiva Mandhir, Makam Habib Cikini, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, Masjid Ramlie Mustofa
9	Alam	Tebet Eco Park, Kepulauan Seribu, Taman Menteng, Taman Wisata Alam Mangrove PIK

Sumber : Disparekraf DKI Jakarta

yang sudah terintegrasi, fasilitas keamanan dan keselamatan yang baik, serta fasilitas untuk disabilitas. Pengembangan pariwisata Jakarta yang berfokus pada pariwisata urban juga dilakukan dalam rangka mencapai target jumlah wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 1,87 juta dan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 34,18 juta pada 2024. Pada triwulan I 2024, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jakarta tercatat sebanyak 486,74 ribu wisman atau tumbuh sebesar 26,76% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 53,74% (yoy) (Grafik 1.1). Jumlah tersebut masih jauh dibandingkan target jumlah wisman yang sebesar 1,87 juta pada 2024. Berdasarkan asalnya, wisman yang berkunjung ke Jakarta didominasi oleh wisman yang berasal dari Tiongkok (25,89%), Malaysia (19,80%) dan Singapura (9,70%) (Grafik 1.2).

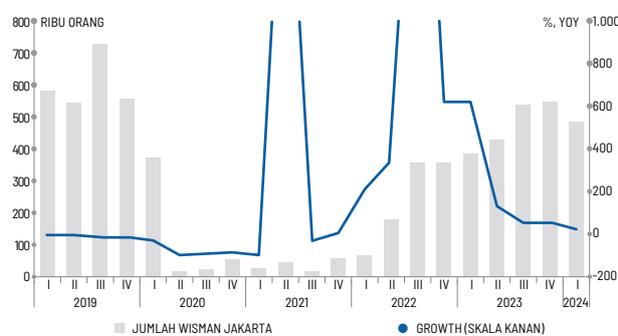
Lebih lanjut, rata-rata lama menginap (*length of stay*) wisatawan asing di Jakarta juga hanya berkisar 1,59 hari (Grafik 1.3), lebih rendah dibandingkan rata-rata lama menginap wisatawan asing di kota lainnya di dunia (berdasarkan survei Travelness 2023) yaitu selama 4,7 hari. Rata-rata lama menginap tersebut akan mempengaruhi besaran *spending* wisatawan asing yang kemudian akan mempengaruhi jumlah devisa.

Dari sisi wisatawan domestik (wisnus), jumlah perjalanan wisnus yang salah satunya tercermin dari jumlah perjalanan domestik yang menggunakan transportasi publik (MRT dan LRT) pada triwulan I

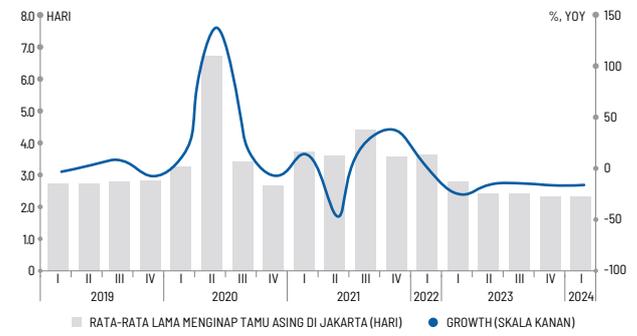
2024 tercatat sebanyak 42,32 ribu perjalanan atau tumbuh 1,29% (yoy) (Grafik 1.4). Jumlah tersebut masih jauh dari target pencapaian pergerakan wisnus yang sebanyak 34,18 juta pada 2024.

Pengembangan wisata urban juga dalam rangka mendukung penguatan Jakarta sebagai kota global. Dalam salah satu parameter kota global yaitu Global Power City Index (GPCI), Jakarta menduduki peringkat ke-42 untuk aspek *tourism/cultural interaction* dari 48 negara. Peringkat tersebut dapat dikatakan masih relatif rendah jika dibandingkan dengan kota negara-negara sekawasan di Asia yaitu Singapura, Bangkok, dan Kuala Lumpur.

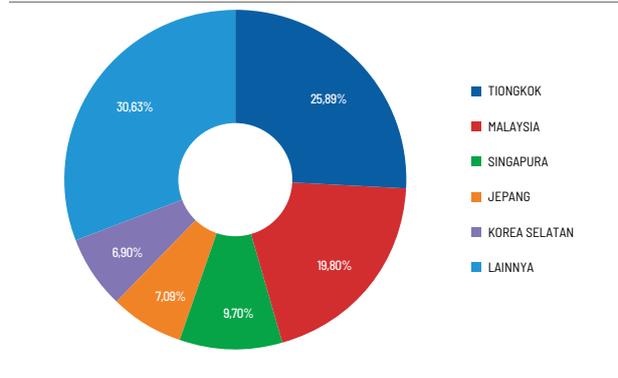
Beberapa lokasi wisata urban di Jakarta yang potensial untuk dikembangkan yaitu antara lain Ancol, Monas, Ragunan, Kota Tua dan TMII mengingat kelima lokasi tersebut memiliki daya tarik yang tinggi dan jumlah pengunjung tertinggi pada 2023 dibandingkan lokasi wisata urban lainnya di Jakarta. Selain itu, potensi lainnya berasal dari wisata MICE dan *event* dengan mempertimbangkan bahwa Jakarta merupakan pusat ekonomi dan bisnis serta Jakarta memiliki fasilitas penyelenggaraan MICE dan *event* yang relatif lebih memadai dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia seperti jumlah stadium, jumlah *hall*, dan jumlah hotel berbintang. Potensi besar penyelenggaraan MICE dan *event* di Jakarta juga tercermin dari jumlah penyelenggaraan MICE dan *event* yang terus meningkat (Grafik 1.5 dan 1.6).



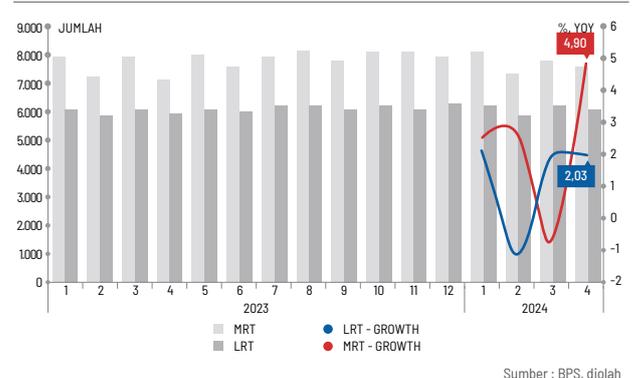
Grafik B1.1 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara



Grafik B1.3 Perkembangan Harga Properti Residensial Jabodetabek



Grafik B1.2 Asal Negara Wisatawan Mancanegara



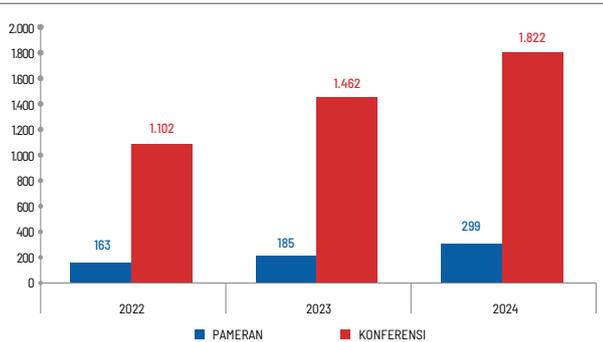
Grafik B1.4 Perkembangan Penyaluran KPR di Jakarta

**BOKS 1**

Penguatan Pariwisata Jakarta Menuju Kota Global : *Urban Tourism*

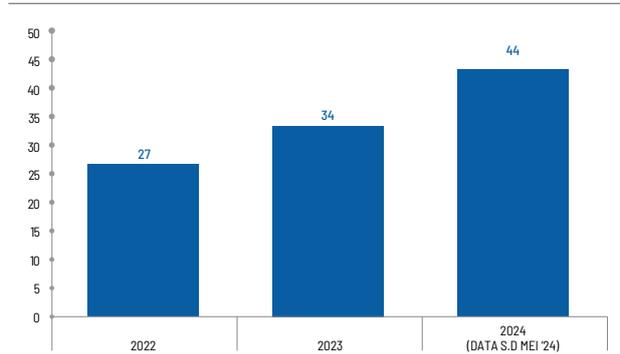
Dalam pengembangan wisata urban, salah satu upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta yaitu mengembangkan Jakarta *Tourist Pass*. Jakarta *Tourist Pass* merupakan kartu elektronik yang dapat digunakan sebagai kartu pembayaran untuk mengakses transportasi umum hingga destinasi wisata seperti museum, monas, ancol, dan ragunan. Selain mengembangkan Jakarta *Tourist Pass*, Pemprov DKI Jakarta juga mengembangkan aplikasi Jakarta *Tourist Pass-JakOnePay* yang memuat informasi wisata, destinasi wisata populer, serta kalender *event* yang dilaksanakan di Jakarta. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengembangan *one stop service* pada *website* Jakarta

Tourist Pass-JakOnePay untuk memudahkan wisatawan memesan tiket dan melakukan pembayaran yang tidak hanya digunakan untuk masuk ke destinasi wisata namun juga untuk mengikuti berbagai *event* yang diselenggarakan di Jakarta. Integrasi berbagai titik atraksi menjadi paket wisata perlu terus didorong sehingga memberikan daya tarik bagi turis dan memperlama waktu tinggal. Selain itu, pengembangan wisata urban melalui strategi 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas) dan 2P (Promosi dan Pelaku Usaha) juga terus dilakukan untuk mendorong wisatawan datang ke Jakarta serta memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global.



Sumber : dari segala sumber

Grafik B1.5 Perkembangan Harga Properti Residensial Jabodetabek



Sumber : dari segala sumber

Grafik B1.6 Perkembangan Penyaluran KPR di Jakarta



## BAB 3

# KEUANGAN PEMERINTAH

Dari sisi fiskal, pada triwulan I 2024, capaian realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar 13,03% dari pagu APBD 2024, dimana capaian tersebut tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2023 yang sebesar 23,00% dari pagu. Tidak hanya bersumber dari peningkatan pagu dibandingkan tahun sebelumnya, capaian realisasi yang lebih rendah pada periode laporan juga disebabkan oleh capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang lebih rendah. Capaian realisasi Belanja Daerah juga tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan triwulan sama tahun sebelumnya, yakni 10,70% dari pagu pada triwulan laporan. Pencapaian realisasi belanja yang lebih rendah disebabkan oleh komponen Belanja Operasi dan Belanja Modal yang berkontraksi.

Berdasarkan rilis data oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, kinerja APBN di wilayah DKI Jakarta pada triwulan I 2024 menunjukkan tren positif, hal ini didorong oleh peningkatan kinerja Belanja di tengah kinerja Pendapatan yang termoderasi. Kinerja Pendapatan yang termoderasi disebabkan oleh pendapatan dari perpajakan yang melambat. Pada triwulan laporan, kinerja PPN, PPh Migas, dan PPh-Nonmigas berkontraksi. Kendati demikian, peningkatan penerimaan bagian laba BUMN yang tumbuh signifikan menahan penurunan Pendapatan K/L di Jakarta. Dari sisi Belanja K/L, pada triwulan I 2024 terdapat realisasi sebesar Rp 181,52 triliun atau sebesar 21,70% dari pagu dan tumbuh 29,90% (yoy). Capaian ini didorong oleh peningkatan pada seluruh komponen Belanja K/L di Jakarta.



**Realisasi  
Pendapatan Daerah (yoy)**



**-41,90%**

Triwulan I 2024

**19,43%**

Triwulan IV 2023

**Realisasi Pendapatan  
Asli Daerah (yoy)**



**-31,67%**

Triwulan I 2024

**15,60%**

Triwulan IV 2023

**Realisasi  
Belanja Daerah (yoy)**



**-32,79%**

Triwulan I 2024

**16,76%**

Triwulan IV 2023

## A. GAMBARAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) PROVINSI DKI JAKARTA 2023

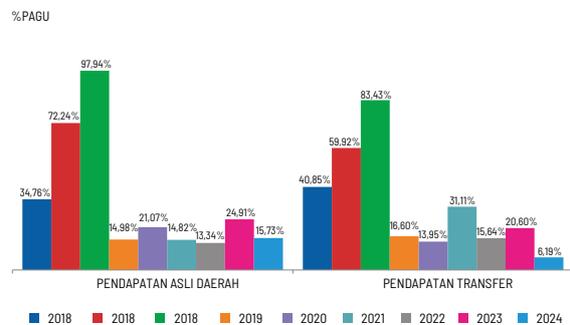
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2023. Peraturan ini telah menetapkan secara resmi besaran anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 sebesar Rp 81,71 triliun atau lebih tinggi 2,71% jika dibandingkan dengan pagu APBD-P 2023. Adapun, postur APBD 2024 DKI Jakarta terbagi seimbang antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam APBD 2024 juga kemudian menjadi gambaran bagi 6 (enam) program prioritas Pemprov pada tahun 2024 yang terbagi menjadi (i) Penanganan Banjir (Rp 2,89 triliun); (ii) Penanganan Kemacetan (Rp 6,97 triliun); (iii) Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi (Rp 1,57 triliun); (iv) Penanganan Kemiskinan (Rp 7,44 triliun); (v) Penanggulangan Stunting (Rp 1,75 triliun); dan (vi) Penguatan Nilai Demokrasi (Rp 1,14 triliun). Selain keenam program prioritas, APBD Provinsi DKI Jakarta juga dialokasikan untuk 7 (tujuh) urusan utama yang terbagi menjadi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan, sosial, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, dan UMKM.

## B. REALISASI PENDAPATAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Pada triwulan I 2024, capaian realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar 13,03% dari pagu APBD 2024, dimana capaian tersebut tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2023 yang sebesar 23,00% dari pagu (Grafik 3.1). Tidak hanya bersumber dari peningkatan pagu dibandingkan tahun sebelumnya, capaian realisasi yang lebih rendah pada periode laporan juga disebabkan oleh capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang masing-masing tercatat sebesar 15,73% dan 6,19% dari pagu, lebih rendah dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya (Grafik 3.2).

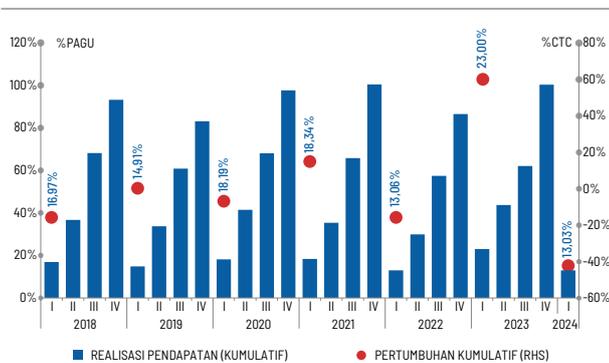
Pada triwulan I 2024, kinerja Pendapatan Daerah di DKI Jakarta terkontraksi. Secara nominal, realisasi Pendapatan Daerah pada periode laporan tercatat sebesar Rp 9,44 triliun atau terkontraksi 41,90% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya dan triwulan sama tahun sebelumnya yang masing-masing tumbuh 19,43% (yoy) dan 59,98% (yoy) (Tabel 3.xx). Penurunan realisasi Pendapatan Daerah disebabkan oleh realisasi Pendapatan Transfer yang sebesar Rp 1,19 triliun atau terkontraksi 71,29% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya dan triwulan sama tahun sebelumnya yang masing-masing tumbuh 38,08% (yoy) dan 54,74% (yoy) (Grafik 3.4). Adapun, Pendapatan Transfer memegang pangsa sebesar 12,67% terhadap Pendapatan Daerah pada triwulan laporan. Selanjutnya, dengan pangsa sebesar 87,33%, komponen PAD terkontraksi 31,67% (yoy) pada triwulan I 2024, berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh positif 15,60% (yoy) dan triwulan sama tahun sebelumnya sebesar 18,54% (yoy) (Grafik 3.4). Penurunan kinerja PAD disebabkan oleh kinerja Pajak dan Retribusi Daerah yang masing-masing terkontraksi 30,41% (yoy) dan 41,75% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 3.5). Sementara itu, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah belum mencatatkan realisasi pada triwulan laporan.

Sebagai komponen pendapatan dengan share sebesar 89,05% terhadap PAD, komponen Pajak Daerah pada triwulan I 2024 yang terkontraksi utamanya disebabkan oleh kinerja Pajak Kendaraan Motor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang



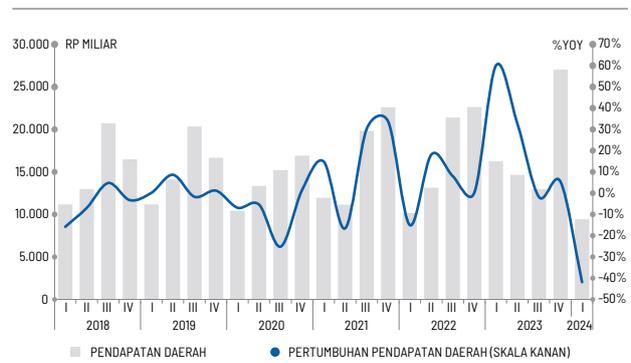
Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.2 Perkembangan Capaian PAD dan Transfer DKI Jakarta Tw I 2024



Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.1 Realisasi Kumulatif Pendapatan Daerah



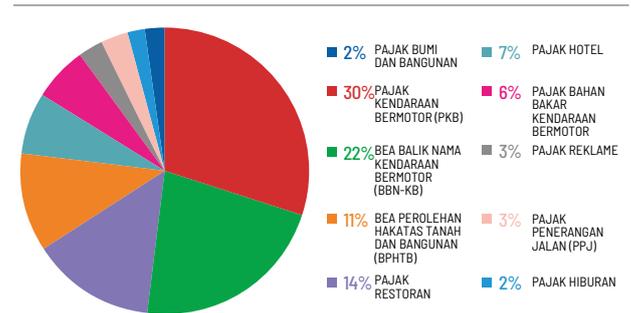
Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah

juga berkontraksi. Kedua komponen pajak tersebut masing-masing memiliki share sebesar 29,60% dan 21,96% terhadap Pajak Daerah (Grafik 3.6). Adapun, PKB berkontraksi 21,86% (yoy) dan BBN-KB berkontraksi 16,76% (yoy), masing-masing lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya (-5,53%, yoy dan -5,01%, yoy) (Grafik 3.7 dan Grafik 3.8). Hal ini disebabkan oleh kinerja penjualan kendaraan bermotor di Jakarta yang juga berkontraksi. Penjualan Mobil di Jakarta pada periode laporan berkontraksi 23,92% (yoy) sedangkan, penjualan motor di Jakarta berkontraksi 0,05% (yoy).

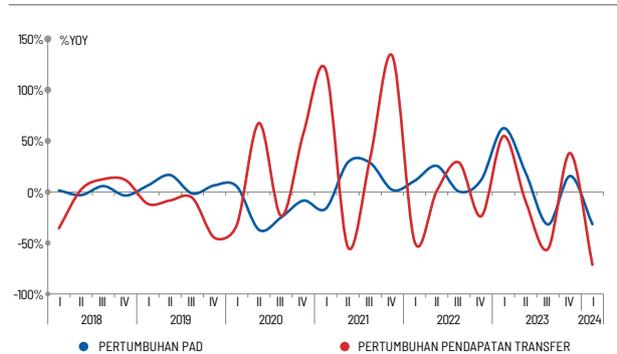
Selanjutnya, realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Reklame yang berkontraksi, juga turut menyebabkan perlambatan kinerja realisasi Pajak Daerah di Jakarta pada triwulan laporan. Masing-masing komponen pajak tersebut berkontraksi sebesar 24,08% (yoy), 39,17% (yoy), dan 39,98% (yoy), berbalik arah jika dibandingkan dengan kinerja pada triwulan sama tahun sebelumnya yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 86,05% (yoy), 16,06% (yoy), dan 74,59% (yoy) (Grafik 3.xx). Adapun, perlambatan kinerja realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, BPHTB, dan Pajak Reklame masing-masing disebabkan oleh penurunan penjualan BBM, perubahan objek pajak tidak kena pajak BPHTB, serta masih berlakunya insentif fiskal terhadap reklame.

Selain daripada kinerja Pajak Daerah yang melambat, realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada triwulan I 2024 juga berkontraksi 41,75% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya dan triwulan sama tahun sebelumnya yang masing-masing tumbuh 31,77% (yoy) dan 114,39% (yoy) (Tabel 3.xx). Hal ini terjadi seiring dengan penurunan pendapatan dari retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu, disebabkan oleh beberapa jenis komponen dari kedua retribusi tersebut yang dihapuskan berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).



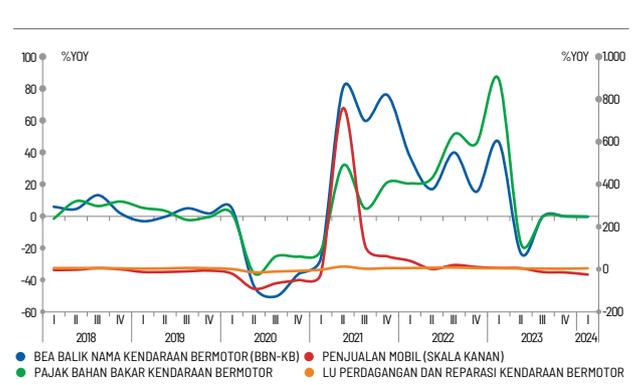
Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.6 Pangsa Realisasi Pendapatan Komponen Pajak Daerah Tw IV 2023



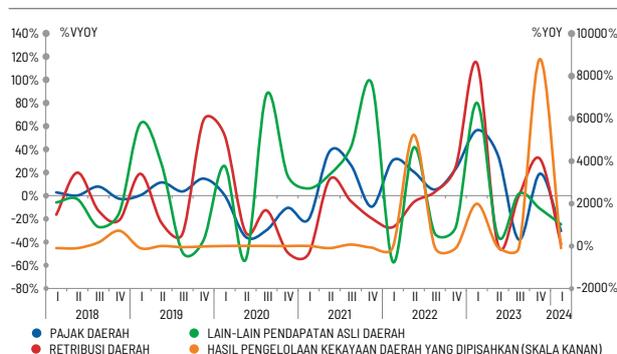
Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.4 Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Transfer



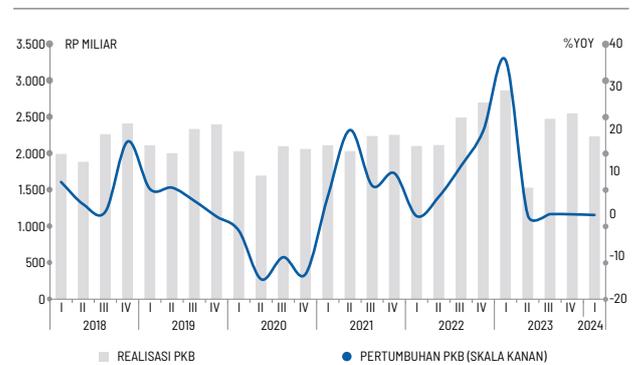
Sumber: BPKD DKI Jakarta, BPS, GAIKINDO, diolah

Grafik 3.7 Perkembangan BBN-KB, BBKB, LU Perdagangan, dan Penjualan Mobil



Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.5 Pertumbuhan Komponen PAD



Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.8 Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor

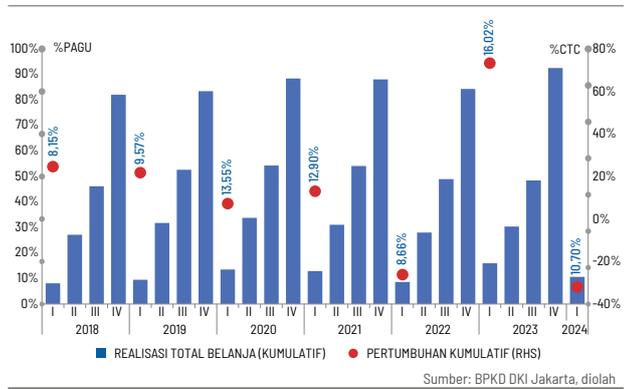
### C. BELANJA DAERAH APBD

Tidak hanya capaian realisasi Pendapatan Daerah, capaian realisasi Belanja Daerah juga tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan triwulan sama tahun sebelumnya, yakni 10,70% dari pagu pada triwulan laporan (Grafik 3.9). Pencapaian realisasi belanja yang lebih rendah disebabkan oleh komponen Belanja Operasi dan Belanja Modal (Grafik 3.10). Pada triwulan I 2024, realisasi Belanja Daerah berkontraksi 32,79% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya dan triwulan sama tahun sebelumnya yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,76% (yoy) dan 73,30% (yoy) (Grafik 3.9 dan Tabel 3.2).

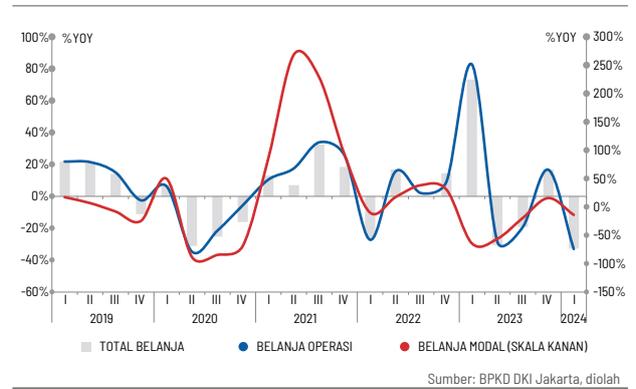
Sebagai komponen utama Belanja Daerah di DKI Jakarta, dengan pangsa sebesar 98,55% pada priode laporan, Belanja Operasi berkontraksi 33,01% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya dan triwulan sama tahun sebelumnya yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,70% (yoy) dan 82,74% (yoy) (Grafik 3.11). Lebih rendahnya capaian realisasi Belanja Operasi bersumber dari komponen Belanja Subsidi yang berkontraksi 49,75% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 8,84% (yoy) serta berbalik arah dari triwulan sama tahun sebelumnya yang tumbuh 115,97% (yoy) (Grafik 3.12). Adapun, hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Subsidi kepada BUMD seiring dengan proses verifikasi terhadap penerima subsidi yang masih berlangsung.

Lebih lanjut, komponen Belanja Hibah juga berkontraksi 96,87% (yoy) pada triwulan laporan, berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh tinggi sebesar 135,87% (yoy) (Grafik 3.12). Kinerja Belanja Hibah yang melambat ini disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia seiring belum adanya pengajuan hibah pada triwulan laporan.

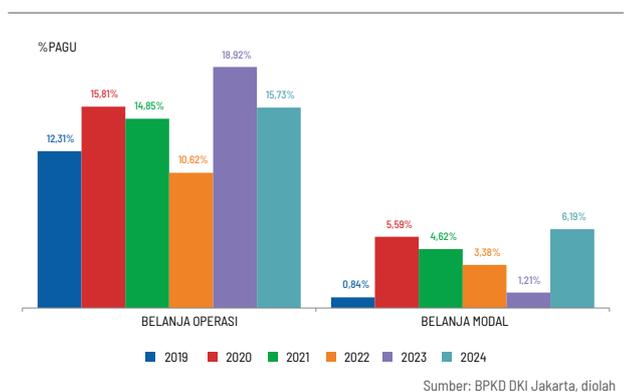
Lebih lanjut, capaian Belanja Daerah yang lebih rendah juga disebabkan oleh realisasi Belanja Modal yang berkontraksi 13,85% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,80% (yoy) (Grafik 3.11). Terkontraksinya capaian Belanja Modal pada triwulan laporan utamanya disebabkan oleh Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang berkontraksi 95,41% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 38,48% (yoy). Selain itu, Belanja Modal Peralatan dan Mesin juga berkontraksi 48,78% (yoy) pada triwulan laporan, berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 50,95% (yoy). Kendati demikian, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tumbuh signifikan sebesar 375,70% (yoy) seiring dengan berlanjutnya proyek pembangunan beberapa ruas jalan tol di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mencatatkan pertumbuhan 67,42% (yoy) pada triwulan laporan, berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 8,08% (yoy). Lebih lanjut, dari sisi Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer belum terdapat realisasi pada triwulan laporan.



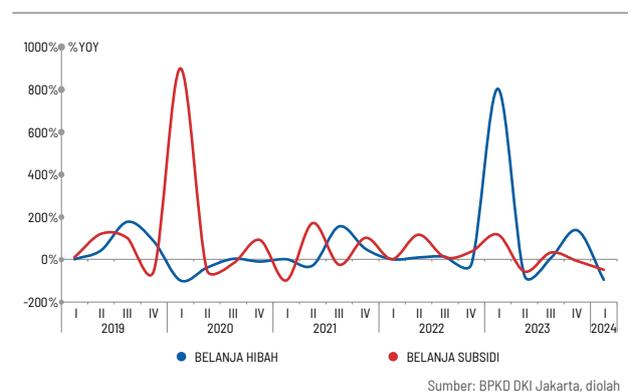
Grafik 3.9 Realisasi Kumulatif Belanja Daerah



Grafik 3.11 Pertumbuhan Belanja Daerah dan Komponen Utamanya



Grafik 3.10 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal



Grafik 3.12 Pertumbuhan Belanja Hibah dan Belanja Subsidi

## D. PEMBIAYAAN DAERAH APBD

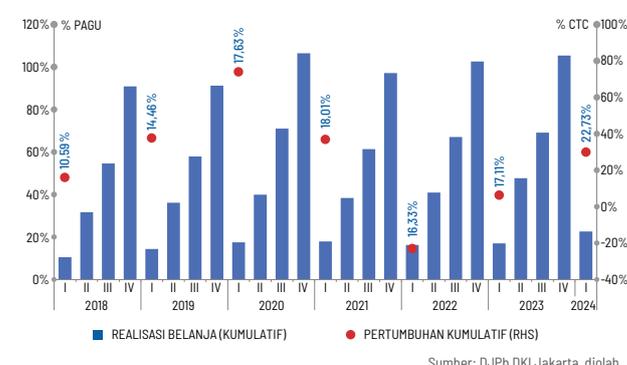
Capaian realisasi Penerimaan Pembiayaan pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 70,57% dari pagu, lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian triwulan sama tahun sebelumnya yang sebesar 96,68% dari pagu. Capaian realisasi yang lebih rendah utamanya disebabkan oleh nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai SILPA pada triwulan sama tahun sebelumnya. Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan, terdapat realisasi sebesar 4,86% dari pagu yang berasal dari pengeluaran Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp 200 miliar dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp 243,20 miliar (Tabel 3.2).

## E. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DI DKI JAKARTA

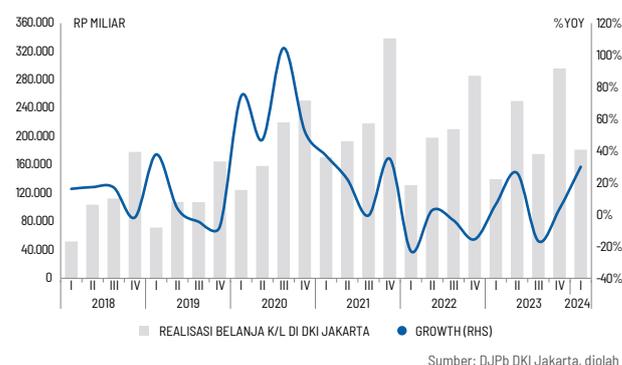
Berdasarkan rilis data oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, kinerja APBN di wilayah DKI Jakarta pada triwulan I 2024 menunjukkan tren positif, hal ini didorong oleh kinerja Belanja di tengah kinerja Pendapatan yang termoderasi. Hingga triwulan I 2024, terdapat realisasi komponen Pendapatan sebesar Rp 389,58 triliun atau sebesar 24,64% dari pagu APBN 2024. Kinerja Pendapatan yang termoderasi disebabkan oleh kinerja perpajakan yang melambat. Pada triwulan laporan, kinerja PPN, PPh Migas, dan PPh-Non Migas masing-masing terkontraksi sebesar 20,29% (yoy), 17,95% (yoy), dan 8,03% (yoy). Kinerja PPN yang terkontraksi seiring dengan perlambatan kinerja Wajib Pajak pada Industri Pengolahan dan Perdagangan sedangkan, kinerja PPh Migas yang terkontraksi disebabkan oleh harga komoditas seperti minyak bumi dan gas alam yang termoderasi. Kendati demikian, kinerja penerimaan PBB tumbuh tinggi sebesar 945,37% (yoy) seiring mulai masuknya pembayaran PBB migas yang nilainya cukup tinggi pada bulan Maret 2024. Dari sisi kinerja Bea dan Cukai, kinerja Bea Masuk yang terkontraksi 20,37% (yoy) juga menjadi salah satu penyebab melambatnya kinerja Pendapatan pada triwulan laporan. Hal ini disebabkan oleh penurunan aktivitas impor. Di sisi lain, kinerja Cukai dan Bea Keluar masing-masing mengalami peningkatan sebesar 19,57% (yoy) dan 975,69% (yoy) didorong oleh naiknya tarif cukai beberapa jenis BKC seperti rokok dan minuman beralkohol serta harga komoditas ekspor yang secara rata-rata mengalami kenaikan utamanya batu bara dan CPO. Penurunan Pendapatan yang lebih dalam kemudian tertahan oleh kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang pada triwulan laporan mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,57% (yoy). Hal ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan bagian laba BUMN yang sebesar Rp 42,89 triliun atau tumbuh tinggi sebesar 833,47% (yoy) seiring peningkatan setoran dividen BUMN perbankan dan nonperbankan.

Dari sisi Belanja K/L di Jakarta, pada triwulan I 2024 terdapat realisasi sebesar Rp 181,52 triliun atau sebesar 21,70% dari pagu (Grafik 3.13)

dan tumbuh 29,90% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya dan triwulan sama tahun sebelumnya yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,57% (yoy) dan 6,35% (yoy) (Grafik 3.14). Capaian ini didorong oleh peningkatan pada seluruh komponen pembentuknya. Realisasi Belanja Pegawai pada triwulan laporan sebesar 29,41% dari pagu atau mencatatkan pertumbuhan sebesar 43,29% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan triwulan sama tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 3,72% (yoy) dan 1,20% (yoy) (Grafik 3.15). Hal ini seiring dengan mulai disalurkan THR bagi ASN dan pensiunan serta meningkatnya Belanja Pegawai pada kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM di Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Belanja Modal tumbuh 37,99% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya dan triwulan sama tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 15,17% (yoy) dan 29,30% (yoy) (Grafik 3.16). Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp 43,01 triliun atau tumbuh 20,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (13,53%, yoy). Peningkatan Belanja Bantuan Sosial didorong oleh realisasi Jaminan Sosial dalam bentuk uang pada kegiatan Pembiayaan JKN/KIS di Kementerian Kesehatan, Perlindungan Sosial dalam bentuk uang pada kegiatan penyelenggaraan bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kementerian Sosial serta, Perlindungan Sosial dalam bentuk uang pada kegiatan penyelenggaraan bantuan sosial Program Sembako di Kementerian Sosial. Lebih lanjut, komponen Belanja Barang mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,17% (yoy)



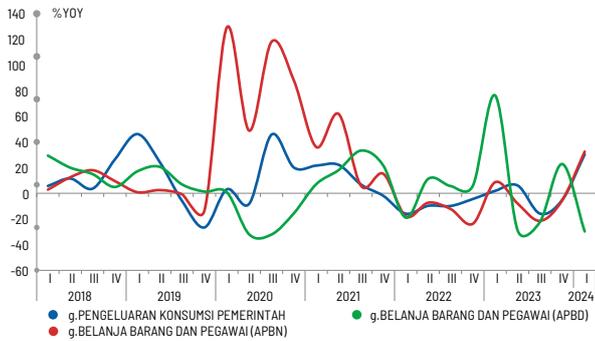
Grafik 3.13 Realisasi Kumulatif Total Belanja APBN di DKI Jakarta



Grafik 3.14 Realisasi Total Belanja K/L di DKI Jakarta

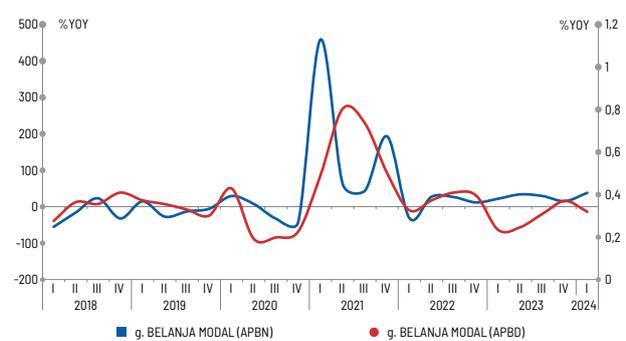
pada triwulan laporan, berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 9,78% (yoy). Dari sisi Belanja non K/L terdapat realisasi sebesar Rp 209,46 triliun atau 15,00% dari pagu dan tumbuh 13,82% (yoy). Hal ini seiring dengan realisasi Belanja Bendahara Umum Negara (BUN) yang salah satunya digunakan untuk Belanja Subsidi Elpiji pada

kegiatan Pengelolaan Subsidi Energi. Adapun, dari sisi Belanja Transfer ke Daerah (TKD), terdapat realisasi sebesar Rp 4,10 triliun atau 20,69% dari pagu. Hal ini seiring dengan peningkatan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik yang digunakan untuk penyaluran Dana BOS Pendidikan (BOSP).



Sumber: DJPb DKI Jakarta, BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.15 Perkembangan Belanja Barang dan Pegawai (APBN dan APBD)



Sumber: DJPb DKI Jakarta, BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.16 Perkembangan Belanja Modal (APBN dan APBD)

**Tabel 3.1** Perkembangan Pagu APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta

URAIAN	APBD-P 2021		APBD-P 2022		APBD 2023		APBD 2024	
	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy
<b>PENDAPATAN</b>	<b>65.209,11</b>	<b>13,93%</b>	<b>77.796,65</b>	<b>19,30%</b>	<b>70.662,94</b>	<b>-9,17%</b>	<b>72.446,38</b>	<b>2,52%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>45.182,09</b>	<b>18,63%</b>	<b>55.662,83</b>	<b>23,20%</b>	<b>48.442,04</b>	<b>-12,97%</b>	<b>52.398,08</b>	<b>8,17%</b>
Pajak Daerah	37.215,00	14,58%	45.700,00	22,80%	43.000,00	-5,91%	46.240,00	7,53%
Pajak Kendaraan Bermotor	8.800,00	10,00%	9.000,00	2,27%	9.416,56	4,63%	-	-100,00%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.700,00	27,03%	6.000,00	27,66%	6.643,61	10,73%	-	-100,00%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.000,00	5,26%	1.350,00	35,00%	1.680,81	24,50%	-	-100,00%
Pajak Hotel	800,00	18,52%	1.400,00	75,00%	1.900,35	35,74%	-	-100,00%
Pajak Restoran	2.000,00	8,11%	4.000,00	100,00%	3.947,26	-1,32%	-	-100,00%
Pajak Hiburan	70,00	-67,44%	750,00	971,43%	687,00	-8,40%	-	-100,00%
Pajak Reklame	875,00	12,90%	1.250,00	42,86%	974,34	-22,05%	-	-100,00%
Pajak Penerangan Jalan	750,00	-3,23%	1.300,00	73,33%	902,31	-30,59%	-	-100,00%
Pajak Air Tanah	50,00	-33,33%	75,00	50,00%	83,77	11,69%	-	-100,00%
Pajak Parkir	300,00	-7,69%	1.350,00	350,00%	477,11	-64,66%	-	-100,00%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.920,00	38,40%	8.195,00	18,42%	6.913,46	-15,64%	-	-100,00%
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	10.250,00	8,47%	10.250,00	0,00%	9.041,23	-11,79%	-	-100,00%
Pajak Rokok	700,00	1,45%	780,00	11,43%	855,30	9,65%	-	-100,00%
Retribusi Daerah	755,76	61,34%	806,88	6,76%	462,11	-42,73%	483,03	4,53%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	390,25	-53,79%	793,74	103,39%	545,87	-31,23%	823,00	50,77%
Lain-Lain PAD	6.821,08	58,88%	8.362,22	22,59%	4.434,07	-46,97%	4.852,05	9,43%
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>16.873,54</b>	<b>-1,43%</b>	<b>17.226,48</b>	<b>2,09%</b>	<b>20.224,32</b>	<b>17,40%</b>	<b>19.326,01</b>	<b>-4,44%</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>3.153,47</b>	<b>55,34%</b>	<b>4.907,21</b>	<b>55,61%</b>	<b>1.996,58</b>	<b>-59,31%</b>	<b>722,29</b>	<b>-63,82%</b>
<b>BELANJA</b>	<b>69.992,62</b>	<b>18,73%</b>	<b>76.972,17</b>	<b>9,97%</b>	<b>72.144,89</b>	<b>-6,27%</b>	<b>72.601,00</b>	<b>0,63%</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>57.799,91</b>	<b>17,57%</b>	<b>58.971,57</b>	<b>2,03%</b>	<b>60.383,69</b>	<b>2,39%</b>	<b>59.655,77</b>	<b>-1,21%</b>
Belanja Pegawai	19.486,42	2,61%	18.638,61	-4,35%	18.778,03	0,75%	20.065,59	6,86%
Belanja Barang dan Jasa	23.122,50	27,76%	25.070,95	8,43%	27.281,51	8,82%	27.309,65	0,10%
Belanja Bunga	168,20	121,32%	789,54	369,41%	258,00	-67,32%	256,00	-0,78%
Belanja Subsidi	5.371,15	19,12%	6.542,35	21,81%	5.908,31	-9,69%	5.603,71	-5,16%
Belanja Hibah	2.791,73	17,64%	2.814,87	0,83%	3.707,37	31,71%	3.306,33	-10,82%
Belanja Bantuan Sosial	6.859,90	34,15%	5.115,25	-25,43%	4.450,48	-13,00%	3.114,49	-30,02%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8.761,14</b>	<b>124,84%</b>	<b>10.800,99</b>	<b>23,28%</b>	<b>10.850,18</b>	<b>0,46%</b>	<b>11.554,91</b>	<b>6,50%</b>
Belanja Modal Tanah	1.822,55	31,00%	1.904,95	4,52%	837,73	-56,02%	496,57	-40,72%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.661,66	101,61%	2.020,82	21,61%	3.085,13	52,67%	2.215,61	-28,18%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.346,96	405,49%	2.054,54	-12,46%	2.556,81	24,45%	3.445,38	34,75%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.555,19	135,01%	4.659,21	82,34%	4.222,74	-9,37%	5.145,68	21,86%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	374,78	189,04%	161,48	-56,91%	147,78	-8,48%	117,37	-20,57%
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.043,97</b>	<b>-44,87%</b>	<b>6.714,84</b>	<b>120,60%</b>	<b>554,56</b>	<b>-91,74%</b>	<b>1.072,01</b>	<b>93,31%</b>
Belanja Tidak Terduga	3.043,97	-44,87%	6.714,84	120,60%	554,56	-91,74%	1.072,01	93,31%
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>387,60</b>	<b>4,37%</b>	<b>484,76</b>	<b>25,07%</b>	<b>356,45</b>	<b>-26,47%</b>	<b>318,31</b>	<b>-10,70%</b>
Belanja Bantuan Keuangan	387,60	4,37%	484,76	25,07%	356,45	-26,47%	318,31	-10,70%
<b>SURPLUS / (DEFISIT) = PENDAPATAN - BELANJA</b>	<b>(4.783,52)</b>		<b>824,48</b>		<b>(1.481,95)</b>		<b>(154,61)</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>								
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>14.681,13</b>	<b>138,08%</b>	<b>5.015,11</b>	<b>-65,84%</b>	<b>8.895,32</b>	<b>77,37%</b>	<b>9.270,19</b>	<b>4,21%</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5.165,70	329,05%	4.035,86	-21,87%	8.600,10	113,00%	3.859,86	-55,12%
Penerimaan Pinjaman Daerah	9.515,43	167,10%	979,25	-89,71%	295,22	-69,85%	5.410,33	1732,64%
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>9.897,62</b>	<b>122,42%</b>	<b>5.839,59</b>	<b>-41,00%</b>	<b>7.413,37</b>	<b>26,95%</b>	<b>9.115,58</b>	<b>22,96%</b>
Penyertaan Modal Daerah	9.663,97	118,82%	4.722,71	-51,13%	5.434,68	15,08%	7.253,91	33,47%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33,65	0,00%	1.034,58	2974,53%	1.802,67	74,24%	1.861,67	3,27%
Pemberian Pinjaman Daerah	200,00	0,00%	82,30	-58,85%	176,02	113,87%	-	-100,00%
<b>PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>79.890,24</b>		<b>82.811,76</b>	<b>3,66%</b>	<b>79.558,25</b>	<b>-3,93%</b>	<b>81.716,57</b>	<b>2,71%</b>
<b>BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>79.890,24</b>		<b>82.811,76</b>	<b>3,66%</b>	<b>79.558,25</b>	<b>-3,93%</b>	<b>81.716,57</b>	<b>2,71%</b>
<b>SILPA</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	

Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

**Tabel 3.2** Rincian Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Triwulan I 2024

URAIAN	REALISASI TRIWULAN I 2023			REALISASI TRIWULAN IV 2023			REALISASI TRIWULAN I 2024		
	Rp Miliar	% APBD-P	%yoy	Rp Miliar	% APBD-P	%yoy	Rp Miliar	% APBD-P	%yoy
<b>PENDAPATAN</b>	<b>16.249,40</b>	<b>21,85%</b>	<b>59,98%</b>	<b>27.032,49</b>	<b>38,26%</b>	<b>19,43%</b>	<b>9.440,32</b>	<b>13,03%</b>	<b>-41,90%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>12.065,37</b>	<b>22,86%</b>	<b>62,50%</b>	<b>14.619,29</b>	<b>30,18%</b>	<b>15,60%</b>	<b>8.244,28</b>	<b>15,73%</b>	<b>-31,67%</b>
Pajak Daerah	10.549,17	24,20%	56,53%	12.716,50	29,57%	19,02%	7.341,64	15,88%	-30,41%
Pajak Kendaraan Bermotor	2.698,51	23,35%	19,65%	9.416,56	26,56%	-5,53%	2.236,99	-21,86%	
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.762,83	22,67%	15,38%	6.643,61	26,79%	-5,01%	1.659,99	-16,76%	
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	434,03	21,89%	45,77%	1.680,81	31,44%	1,41%	417,43	-24,08%	
Pajak Hotel	489,25	21,43%	53,38%	1.900,35	37,54%	15,11%	485,16	-15,00%	
Pajak Restoran	985,96	14,92%	27,84%	3.947,26	26,68%	1,48%	1.005,99	-16,50%	
Pajak Hiburan	129,44	9,12%	263,58%	687,00	33,09%	53,37%	158,97	-16,95%	
Pajak Reklame	374,66	16,74%	27,93%	974,34	25,51%	-31,91%	219,26	-39,98%	
Pajak Penerangan Jalan	218,75	15,28%	10,77%	902,31	29,67%	8,52%	236,37	-15,37%	
Pajak Air Tanah	35,68	9,62%	110,88%	83,77	31,84%	-19,69%	22,40	1,73%	
Pajak Parkir	132,11	5,76%	37,94%	477,11	15,28%	-7,46%	96,26	-28,65%	
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.413,40	14,69%	11,27%	6.913,46	33,60%	1,64%	849,88	-39,17%	
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	717,37	3,13%	89,65%	9.041,23	6,95%	-6,02%	169,87	-73,28%	
Pajak Rokok	292,23	0,00%	-2,86%	855,30	38,93%	7,91%	-	-100,00%	
Retribusi Daerah	154,67	25,78%	114,39%	144,39	31,25%	31,77%	90,09	18,65%	-41,75%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	281,67	51,92%	1986,45%	115,29	21,12%	8793,43%	-	0,00%	-100,00%
Lain-Lain PAD	1.079,87	13,45%	80,03%	1.643,10	37,06%	-11,24%	812,56	16,75%	-24,75%
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>4.184,03</b>	<b>22,57%</b>	<b>54,74%</b>	<b>10.708,16</b>	<b>52,95%</b>	<b>38,08%</b>	<b>1.196,03</b>	<b>6,19%</b>	<b>-71,29%</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>18,79</b>	<b>0,60%</b>	<b>-53,23%</b>	<b>1.705,05</b>	<b>85,40%</b>	<b>-23,67%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>
<b>BELANJA</b>	<b>11.554,25</b>	<b>15,49%</b>	<b>73,30%</b>	<b>31.767,47</b>	<b>44,03%</b>	<b>16,76%</b>	<b>7.765,22</b>	<b>10,70%</b>	<b>-32,79%</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>11.423,47</b>	<b>19,15%</b>	<b>82,74%</b>	<b>24.508,50</b>	<b>40,59%</b>	<b>16,70%</b>	<b>7.652,56</b>	<b>12,83%</b>	<b>-33,01%</b>
Belanja Pegawai	5.723,11	31,24%	59,69%	5.541,81	29,51%	21,96%	3.701,21	18,45%	-35,33%
Belanja Barang dan Jasa	4.948,44	17,97%	99,89%	11.323,77	41,51%	23,59%	3.756,70	13,76%	-24,08%
Belanja Bunga	78,09	30,27%	14,59%	64,53	25,01%	-0,56%	51,46	20,10%	-34,11%
Belanja Subsidi	181,92	3,02%	115,97%	3.501,48	59,26%	-8,84%	91,42	1,63%	-49,75%
Belanja Hibah	354,31	11,96%	802,68%	1.808,73	48,79%	135,87%	11,10	0,34%	-96,87%
Belanja Bantuan Sosial	137,61	3,02%	0,00%	2.268,18	50,96%	-13,50%	40,67	1,31%	-70,44%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>130,78</b>	<b>0,95%</b>	<b>-64,13%</b>	<b>7.040,97</b>	<b>64,89%</b>	<b>15,80%</b>	<b>112,66</b>	<b>0,97%</b>	<b>-13,85%</b>
Belanja Modal Tanah	0,31	0,02%	-99,45%	349,23	41,69%	-36,71%	0,26	0,05%	-16,07%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101,32	3,15%	2528,97%	2.131,31	69,08%	50,95%	51,90	2,34%	-48,78%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,55	0,70%	-84,34%	1.498,55	58,61%	38,84%	1,26	0,04%	-95,41%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,43	0,03%	-98,88%	2.974,83	70,45%	1,10%	6,82	0,13%	375,70%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,17	0,08%	0,00%	87,05	58,91%	-8,08%	0,28	0,24%	67,42%
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>38,83%</b>	<b>0,00%</b>
Belanja Tidak Terduga	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Belanja Bantuan Keuangan	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
<b>PEMBIAYAAN</b>									
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>8.623,96</b>	<b>91,74%</b>	<b>-10,65%</b>	<b>292,00</b>	<b>3,28%</b>	<b>-</b>	<b>6.542,33</b>	<b>70,57%</b>	<b>-24,14%</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	8.623,96	108,10%	-10,65%	-	0,00%	0,00%	6.542,33	169,50%	-24,14%
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	0,00%	0,00%	-	98,91%	-	-	0,00%	0,00%
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>318,66</b>	<b>3,48%</b>	<b>1795,14%</b>	<b>5.001,59</b>	<b>67,47%</b>	<b>42,06%</b>	<b>443,20</b>	<b>4,86%</b>	<b>39,08%</b>
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	318,66	17,88%	1795,14%	4.273,87	78,64%	43,77%	243,20	13,06%	-23,68%
				727,72	40,37%	32,76%	200,00	2,76%	0,00%
<b>PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>24.873,36</b>			<b>27.324,49</b>			<b>15.982,65</b>	<b>19,56%</b>	<b>-35,74%</b>
<b>BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>11.872,91</b>			<b>36.769,05</b>			<b>8.208,42</b>	<b>10,04%</b>	<b>-30,86%</b>
<b>SILPA</b>	<b>13.000,45</b>			<b>(4.734,97)</b>			<b>7.774,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>-40,20%</b>

Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

**Tabel 3.3** Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta

KOMPONEN BELANJA	PAGU 2021		PAGU 2022		PAGU 2023		PAGU 2024	
	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy
Belanja Pegawai	234.229	0,39%	254.224	8,54%	264.318	3,97%	292.352	10,61%
Belanja Barang	397.230	37,02%	277.446	-30,15%	218.137	-21,38%	257.413	18,00%
Belanja Modal	139.814	41,98%	128.698	-7,95%	105.892	-17,72%	135.358	27,83%
Belanja Bantuan Sosial	176.191	-14,72%	144.225	-18,14%	142.601	-1,13%	151.459	6,21%
<b>Total</b>	<b>947.463</b>	<b>14,39%</b>	<b>804.594</b>	<b>-15,08%</b>	<b>730.949</b>	<b>-9,15%</b>	<b>836.582</b>	<b>14,45%</b>

Sumber: DJPb, BI, diolah

**Tabel 3.4** Rincian Realisasi APBN di DKI Jakarta Triwulan I 2024

KOMPONEN BELANJA	REALISASI TW I 2023			REALISASI TW IV 2023			REALISASI TW I 2024		
	Rp Miliar	% APBN	%yoy	Rp Miliar	% APBN	%yoy	Rp Miliar	% APBN	%yoy
Belanja Pegawai	59.437	22,49%	0,25%	53.098	20,64%	3,72%	85.970	29,41%	43,29%
Belanja Barang	31.760	14,56%	28,96%	95.934	39,71%	-9,78%	35.894	12,28%	12,17%
Belanja Modal	11.375	10,74%	21,89%	95.687	59,43%	15,17%	16.651	12,30%	37,99%
Belanja Bantuan Sosial	35.678	25,02%	-6,49%	51.187	32,65%	13,53%	43.011	28,40%	20,55%
<b>Total</b>	<b>180.165</b>	<b>24,65%</b>	<b>37,11%</b>	<b>295.906</b>	<b>36,24%</b>	<b>3,57%</b>	<b>181.525</b>	<b>21,70%</b>	<b>29,90%</b>

Sumber: DJPb, BI, diolah

## BAB 4

# INFLASI

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 2,18% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,28% (yoy). Capaian inflasi ini juga lebih rendah jika dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 3,05% (yoy). Relatif terkendalnya inflasi tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi pangan sebagai hasil sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan I 2024 diantaranya beras, daging ayam ras, cabai merah, emas perhiasan, dan tomat. Memasuki triwulan II 2024, perkembangan inflasi Jakarta pada Mei 2024 tercatat mengalami penurunan dengan inflasi sebesar 2,08% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang inflasi sebesar 2,11% (yoy). Ke depan, inflasi IHK Jakarta diperkirakan akan tetap terkendali di dalam sasaran  $2,5 \pm 1\%$  pada 2024.



Inflasi IHK  
DKI Jakarta (yoy)



**2,18%**  
Triwulan I 2024

**2,61%**  
Triwulan IV 2023

**0,37%**  
Maret 2024, mtm

Rata-rata  
Inflasi IHK (yoy)

**2,73%**  
Rerata Inflasi Tw I 2022-2024, yoy

Inflasi IHK  
DKI Jakarta (ytd)

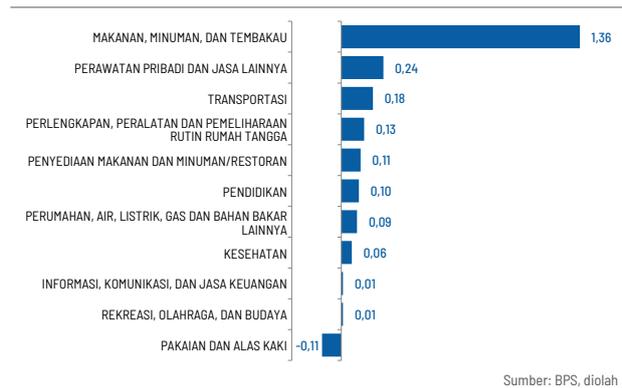
**0,63%**  
Maret 2024, ytd

## A. KINERJA INFLASI PROVINSI TRIWULAN I 2024

**Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan I 2024 tetap terkendali dalam sasaran target inflasi.** Inflasi IHK Jakarta pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 2,18% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya (2,28%, yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan tekanan inflasi masih terkendali dalam target sasaran 2,5±1% dengan tetap mendukung stabilitas ekonomi. Upaya pengendalian terus dilakukan agar tekanan inflasi tidak mengalami akselerasi lebih lanjut dan juga guna mengantisipasi dampak tekanan inflasi global. Hal ini tercermin dari efektifitas hasil sinergi dan koordinasi TPID melalui GNPIP dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Lebih lanjut, kondisi tersebut membuat tekanan inflasi Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional sebesar 3,05% (yoy).

Lebih rendahnya tekanan inflasi pada triwulan I 2024 bersumber dari penurunan tekanan inflasi pada beberapa kelompok pengeluaran seperti kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya di tengah kelompok lainnya yang mengalami kenaikan tekanan inflasi (Grafik 4.1). Kelompok dengan andil inflasi tertinggi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran serta kelompok pendidikan (Grafik 4.2). Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan I 2024 diantaranya beras, daging ayam ras, cabai merah, emas perhiasan dan tomat. Namun tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga pada komoditas bensin, sabun cair/cuci piring, celana dalam pria, bawang merah dan daster.

**Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau** menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi IHK Jakarta triwulan I 2024. Dengan sumbangan sekitar 1,36%, kelompok ini mencatat inflasi sebesar 7,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi pada triwulan

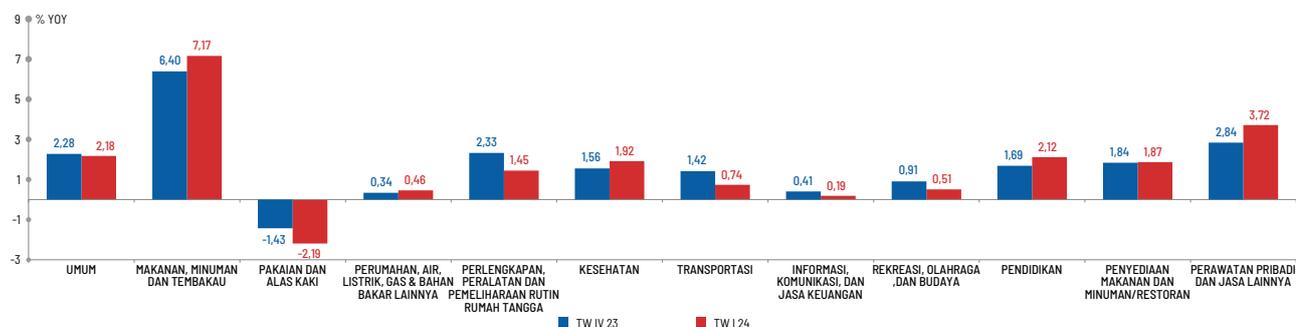


Sumber: BPS, diolah  
Grafik 4.2 Sumbangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

sebelumnya sebesar 6,40% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, beras, daging ayam ras, cabai merah, tomat, dan telur ayam ras berkontribusi besar dalam pembentukan inflasi IHK Jakarta dengan andil masing-masing sebesar 0,40%; 0,14%; 0,12%, dan 0,08%.

Berdasarkan pantauan Informasi Pangan Jakarta (IPJ), pada triwulan I 2024 rata-rata harga beras mencapai Rp14.791/kg atau mencatatkan perubahan harga sebesar 20,4% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 19,3% (yoy) (Grafik 4.3). Masih berlanjutnya kenaikan harga beras utamanya sebagai dampak penurunan hasil panen dari wilayah sentra produksi sebagai dampak fenomena el-nino. Selain itu, pembatasan ekspor dari beberapa negara mitra dagang serta belum optimalnya realisasi impor turut menjadi pendorong kenaikan harga beras. Kondisi ini tercermin dari perkembangan stok beras di PT Food Station dan Bulog dengan rata-rata sebanyak 65.499 ton/minggu pada triwulan I 2024, lebih rendah dari rata-rata stok triwulan sebelumnya yang sebesar 82.849 ton/minggu.

Untuk komoditas daging ayam ras, berdasarkan pantauan IPJ rata-rata harga komoditas tersebut pada triwulan I 2024 sebesar Rp40.590/kg, atau mencatatkan perubahan harga mencapai 4,9% (yoy), sedikit lebih tinggi dari perubahan harga pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,8% (yoy) (Grafik 4.4). Masih berlanjutnya inflasi pada komoditas daging ayam ras tersebut masih didorong oleh tingginya harga pakan dan *Day Old Chicken* (DOC). Sementara untuk



Sumber: BPS, diolah  
Grafik 4.1 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

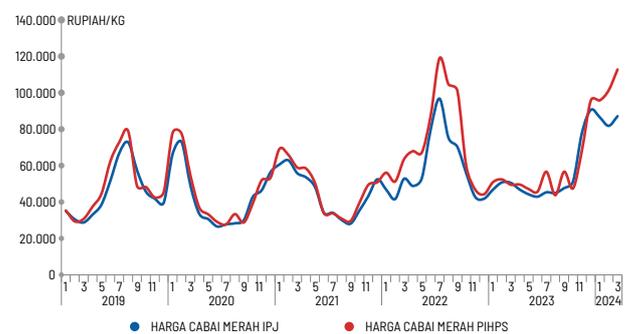
komoditas cabai merah, berdasarkan pantauan IPJ rata-rata harga komoditas tersebut pada triwulan I 2024 tercatat sebesar Rp85.145/kg, atau mencatatkan perubahan harga mencapai 72,5% (yoy), lebih tinggi dari perubahan harga pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 56,6% (yoy)(Grafik 4.5). Kenaikan harga cabai merah terutama didorong oleh peningkatan permintaan dalam rangka memasuki bulan Ramadhan di tengah pasokan dari wilayah sentra yang belum optimal.

Terakhir, untuk komoditas telur ayam ras, berdasarkan pantauan IPJ di triwulan I 2024 terlihat bahwa rerata harga telur ayam ras sebesar Rp 29.261/kg atau mencatatkan kenaikan harga sebesar 2,76% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tercatat mengalami koreksi harga -2,00% (yoy) (Grafik 4.6). Hal tersebut utamanya terjadi karena adanya peningkatan permintaan di tengah stok yang mengalami penurunan. Berdasarkan data stok BUMD Pangan DKI Jakarta, terlihat bahwa perkembangan rata-rata stok telur ayam pada triwulan I 2024 adalah 4 ton/minggu atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 6 ton/minggu (Grafik 4.7).

**Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya** menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan tingkat inflasi sebesar 3,72% (yoy) sehingga memberikan andil sebesar 0,24% terhadap inflasi IHK Jakarta. Perkembangan ini lebih tinggi dibandingkan tekanan inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 2,84% (yoy). Masih berlanjutnya

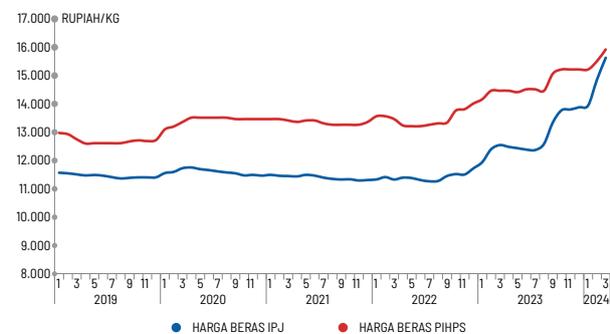
tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan, pasta gigi, dan popok bayi sekali pakai/diapers. Meningkatnya harga emas perhiasan sejalan dengan tren kenaikan harga emas global. Berdasarkan pantauan Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia, rata-rata harga emas perhiasan pada triwulan I 2024 sebesar Rp 897.777,29/gram, atau mencatatkan inflasi sebesar 14,09% (yoy). Sementara, kenaikan berbagai barang kebutuhan sehari-hari didorong oleh meningkatnya harga bahan baku dan biaya produksi.

Selanjutnya, inflasi IHK Jakarta pada triwulan I 2024 juga disumbang oleh **kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran** yang memberikan andil sebesar 0,18% terhadap inflasi IHK Jakarta.



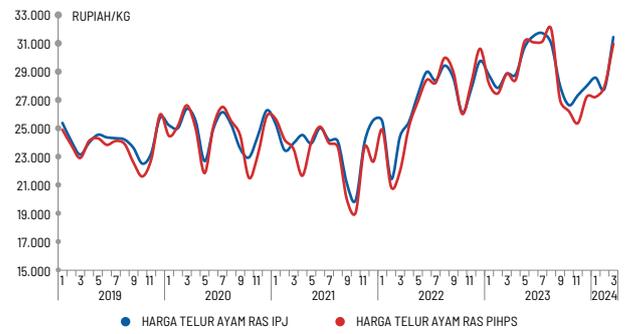
Sumber: IPJ, PIHPS, diolah

Grafik 4.5 Perkembangan Harga Cabai Merah



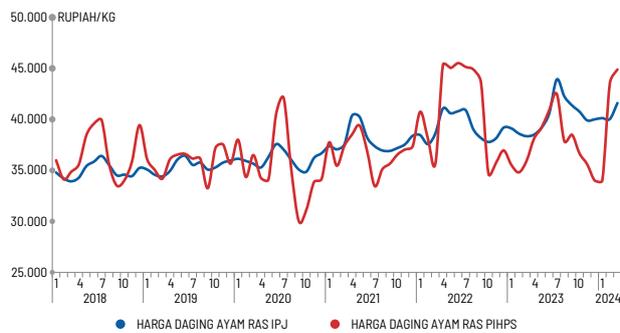
Sumber: IPJ, PIHPS, diolah

Grafik 4.3 Perkembangan Harga Beras



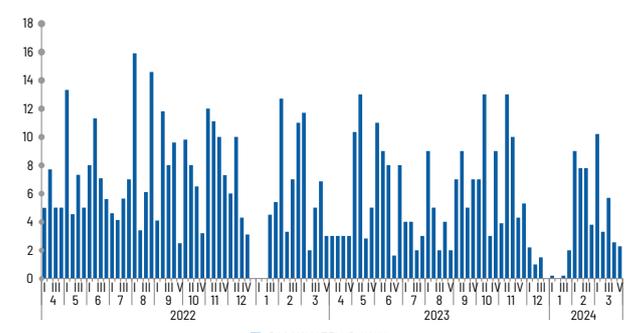
Sumber: IPJ, PIHPS, diolah

Grafik 4.6 Perkembangan Harga Telur Ayam Ras



Sumber: IPJ, PIHPS, diolah

Grafik 4.4 Perkembangan Harga Daging Ayam Ras



Sumber: BUMD DKI Jakarta diolah

Grafik 4.7 Perkembangan Stok Telur Ayam Ras

Kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 1,87% (yoy), lebih tinggi dibandingkan laju inflasi pada triwulan sebelumnya (1,84%; yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disumbang oleh kenaikan harga kue kering berminyak dan nasi dengan lauk yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,04% (yoy) dan 0,02% (yoy) terhadap inflasi triwulan I 2024. Peningkatan tekanan inflasi pada komoditas tersebut bersumber dari kenaikan permintaan seiring dengan masuknya periode bulan Ramadhan sebagaimana pola musimannya.

Inflasi IHK Jakarta pada triwulan I 2024 juga disumbang oleh **kelompok pendidikan** dengan andil sebesar 0,13%. Tekanan inflasi pada kelompok ini meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,69% (yoy) menjadi 2,12% (yoy) di triwulan I 2024. Penyumbang utama pada kelompok ini adalah terjadinya kenaikan harga bimbingan belajar, biaya sekolah menengah atas, dan biaya sekolah menengah pertama dan sekolah dasar yang masing-masing memiliki andil sebesar 0,04%, 0,03%, dan 0,02%. Kenaikan-kenaikan tersebut umumnya sejalan dengan masuknya periode semester genap pembelajaran dan rangkaian persiapan ujian sekolah yang akan dilaksanakan di bulan April 2024.

Pada triwulan I 2024 **kelompok transportasi** memberikan kontribusi terhadap inflasi IHK Jakarta sebesar 0,11%. Kelompok ini mengalami penurunan tekanan inflasi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,42% (yoy) menjadi 0,74% (yoy) pada triwulan I 2024. Komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah angkutan antar kota, angkutan udara dan tarif jalan tol dengan andil masing-masing sebesar 0,03%. Meredanya tekanan inflasi pada kelompok transportasi terjadi seiring dengan berlalunya musim liburan yang terjadi pada triwulan IV 2023.

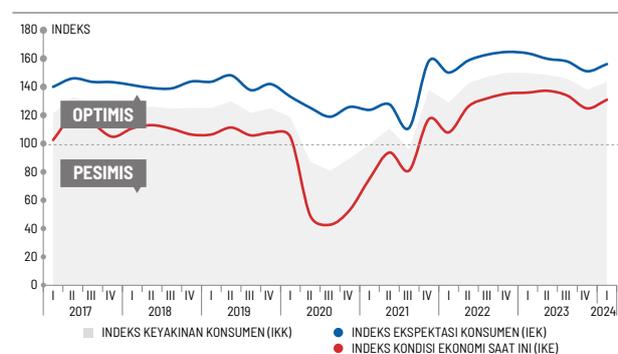
**Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya** tercatat memberikan kontribusi terhadap inflasi IHK Jakarta sebesar 0,10%. Kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 0,46% (yoy), lebih rendah dari inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,34% (yoy). Terjadinya inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari harga sewa rumah dan kontrak rumah yang masing masing tercatat naik 0,06% (yoy) dan 0,03% (yoy).

Inflasi IHK Jakarta pada triwulan I 2024 juga didorong oleh **kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga** dengan andil sebesar 0,09%. Adapun tekanan inflasi pada kelompok tersebut tercatat mereda dari triwulan sebelumnya sebesar 2,33% (yoy) menjadi 1,45% (yoy) pada triwulan I 2024. Adapun komoditas utama yang memberikan tekanan inflasi pada kelompok ini adalah asisten rumah tangga sebesar 0,05% (yoy).

Sementara itu, **kelompok kesehatan** tercatat memberikan andil sebesar 0,09% terhadap pembentukan inflasi IHK Jakarta pada triwulan I 2024. Laju inflasi pada kelompok ini tercatat mengalami peningkatan dari 1,56% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 1,92% (yoy). Selanjutnya, Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan masih menjadi penyumbang inflasi dengan andil sebesar 0,01% terhadap inflasi IHK triwulan I 2023 meski dengan tekanan yang menurun menjadi 0,19% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 0,41% (yoy). Lebih lanjut, **kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya** juga tercatat memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,01% terhadap inflasi IHK Jakarta pada triwulan I 2024, dengan tingkat inflasi 0,51% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,91% (yoy).

Adapun tekanan inflasi IHK Jakarta lebih lanjut tertahan oleh laju deflasi yang lebih dalam pada **kelompok pakaian dan alas kaki**. Dengan andil sebesar -0,11%, deflasi pada kelompok ini tercatat sebesar -2,19% (yoy) lebih dalam dibandingkan deflasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -1,43% (yoy). Lebih dalamnya deflasi yang terjadi utamanya bersumber dari deflasi pada komoditas celana dalam pria dan daster yang masing-masing memberikan andil sebesar -0,02% dan -0,01% terhadap pembentukan inflasi IHK Jakarta.

Terkendalnya inflasi pada triwulan I 2024 dipengaruhi oleh momentum pemulihan ekonomi yang didukung keyakinan dan ekspektasi masyarakat yang masih optimis terhadap kondisi ekonomi. Hal tersebut tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa indeks keyakinan konsumen (IKK), indeks ekspektasi konsumen (IEK) dan indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) berada diatas batas level optimis pada triwulan I 2024 dan mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 4.8). Pada triwulan I 2024, indeks keyakinan konsumen tercatat sebesar 143,3, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (137,7). Berdasarkan komponen pembentuknya, Indeks kondisi ekonomi saat ini pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 130,7 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (124,6). Lebih lanjut, indeks ekspektasi konsumen juga mengalami peningkatan dari 150,9 di triwulan sebelumnya menjadi 155,9 pada triwulan I 2024.



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

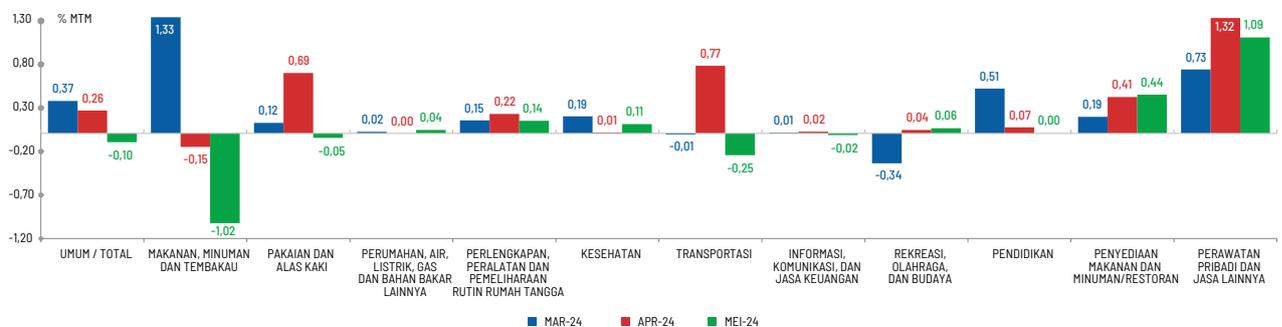
Grafik 4.8 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Kondisi Ekonomi (IKE)

## B. TRACKING INFLASI TRIWULAN II 2024

Pada awal triwulan II 2024, Jakarta mengalami deflasi. IHK Jakarta pada Mei 2024 terpantau mengalami deflasi sebesar 0,10% (mtm) berbalik arah dari bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,26% (mtm). Deflasi yang terjadi utamanya bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas beras seiring panen raya yang sedang berlangsung di beberapa wilayah sentra a.l. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Penurunan harga daging ayam ras seiring peningkatan pasokan dan penurunan harga pakan juga kemudian turut menyumbang deflasi pada kelompok ini. Selanjutnya, kelompok Transportasi juga mengalami deflasi pada Mei 2024 seiring normalisasi permintaan angkutan antar kota pasca momen HBKN Idulfitri. Kendati demikian, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya kembali mengalami inflasi dan menjadi penahan deflasi Jakarta lebih lanjut. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh kembali meningkatnya harga komoditas emas perhiasan yang sejalan pula dengan terus meningkatnya harga emas dunia (Grafik 4.9).

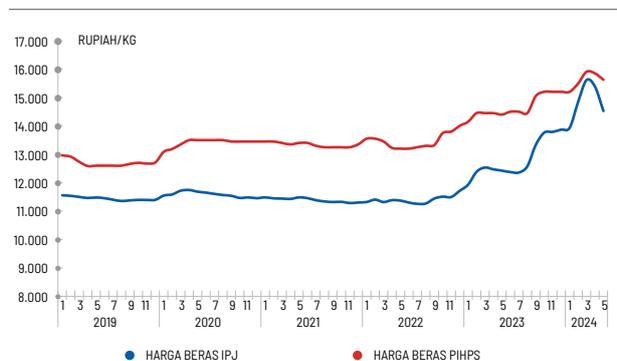
**Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau** menjadi penyumbang utama deflasi Jakarta pada Mei 2024. Dengan andil sebesar -0,20%, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami deflasi sebesar 1,02% (mtm), lebih dalam dari bulan sebelumnya yang mencatatkan deflasi sebesar 0,15% (mtm). Deflasi pada kelompok ini

utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas beras, daging ayam ras, udang basah, dan papaya. Adapun, ke empat komoditas tersebut mencatatkan andil terhadap inflasi Jakarta pada Mei 2024 masing-masing sebesar -0,09%, -0,07%, -0,02%, dan -0,01%. Kembali menurunnya harga komoditas beras utamanya disebabkan oleh panen raya yang sedang berlangsung di beberapa wilayah sentra seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sehingga meningkatkan pasokan. Hal ini kemudian tercermin dari kondisi pasokan beras di Jakarta yang pada bulan Mei 2024 secara rata-rata tercatat sebesar 126,17 ribu ton, meningkat tinggi dibandingkan pasokan pada bulan sebelumnya yang sebesar 82,96 ribu ton. Lebih lanjut, data dari Info Pangan Jakarta (IPJ) menunjukkan bahwa harga komoditas beras pada Mei 2024 tercatat sebesar Rp 14.513,-/kg, atau terkontraksi 5,58% (mtm) dari rata-rata harga pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp 15.381,-/kg (Grafik 4.10). Selanjutnya, komoditas daging ayam ras yang turut menjadi penyumbang deflasi pada Mei 2024 disebabkan oleh stabilnya pasokan serta harga pakan yang turun seiring dengan panen raya jagung sebagai pakan utama ayam ras yang sedang berlangsung. Penurunan harga daging ayam ras tercermin dari data IPJ bahwa rata-rata harga daging ayam ras pada Mei 2024 sebesar Rp 41.516,-/kg atau terkontraksi 3,06% (mtm) dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan harga rata-rata sebesar Rp 42.826,-/kg (Grafik 4.11). Komoditas udang basah dan papaya yang masing-masing mencatatkan deflasi sebesar 6,77% (mtm) dan 7,34% (mtm) juga turut menjadi penyumbang deflasi Jakarta seiring dengan stabilnya kondisi pasokan dan permintaan masyarakat.



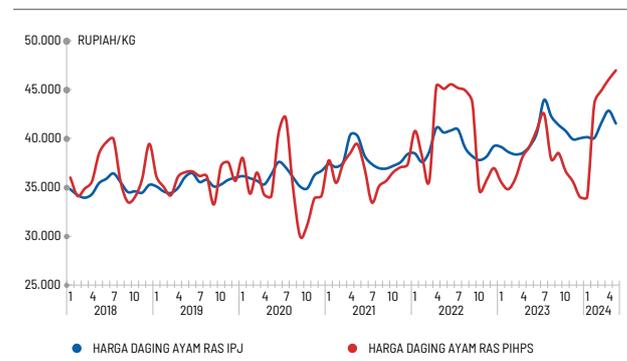
Sumber: BPS, diolah

Grafik 4.9 Inflasi Kelompok Pengeluaran Mei 2024



Sumber: IPJ, PIHPS, diolah

Grafik 4.10 Perkembangan Harga Beras



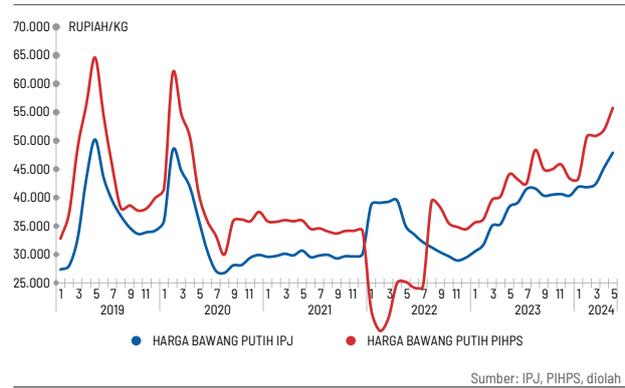
Sumber: IPJ, PIHPS, diolah

Grafik 4.11 Perkembangan Harga Daging Ayam Ras

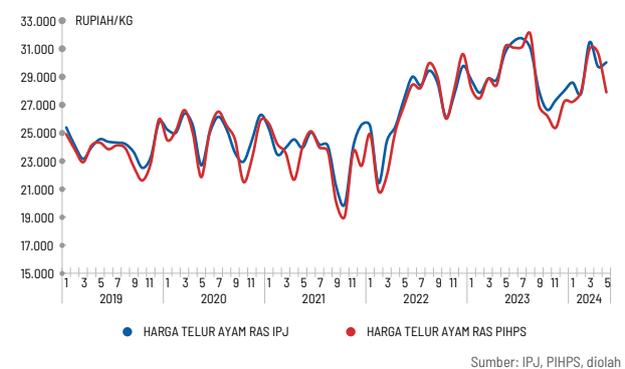
Kendati demikian, inflasi yang terjadi pada komoditas bawang putih dan telur ayam ras menjadi penahan deflasi lebih lanjut pada periode laporan. Komoditas bawang putih pada Mei 2024 memberikan andil 0,02% terhadap inflasi Jakarta. Hal ini seiring dengan tekanan pada nilai Rupiah yang kemudian berpengaruh pada nilai impor serta terjadinya keterlambatan distribusi. Inflasi pada komoditas bawang putih tercermin dari rata-rata harga IPJ bawang putih yang sebesar Rp 47.880,-/kg atau meningkat 5,69% (mtm) dari bulan sebelumnya yang tercatat Rp 45.301,-/kg (Grafik 4.12). Lebih lanjut, komoditas telur ayam ras memberikan andil sebesar 0,01% terhadap inflasi Jakarta. Inflasi pada komoditas telur ayam ras utamanya disebabkan oleh peningkatan *demand* masyarakat di tengah banyaknya peternak yang melakukan afkir dini pada ayam petelurnya. Hal ini kemudian tercermin dari harga telur ayam ras IPJ pada periode laporan yang tercatat sebesar Rp 30.001,-/kg, naik 0,97% (mtm) dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 29.175,-/kg (Grafik 4.13).

Selanjutnya, dengan andil sebesar -0,03% pada Mei 2024, kelompok **Transportasi** juga turut menjadi penyumbang utama deflasi Jakarta dan mencatatkan deflasi sebesar 0,25% (mtm). Deflasi yang terjadi pada kelompok transportasi disebabkan oleh penurunan tarif angkutan antar kota seiring dengan normalisasi permintaan masyarakat pasca momen HBKN Idulfitri.

Di sisi lain, kelompok **Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya** menjadi penahan deflasi Jakarta lebih lanjut dengan menyumbang inflasi sebesar 0,07% pada periode laporan. Kelompok ini mencatatkan inflasi sebesar 1,09% (mtm), hal ini disebabkan oleh kembali meningkatnya harga emas perhiasan seiring dengan harga emas dunia yang terus meningkat. Berdasarkan data SPH, harga emas perhiasan pada Mei 2024 sebesar Rp 1.049.357,-/gram atau mengalami peningkatan sebesar 1,47% (mtm) dibandingkan bulan sebelumnya dimana harga emas perhiasan tercatat sebesar Rp 1.034.188,-/gram. Lebih lanjut harga emas dunia berdasarkan data Bloomberg pada Mei 2024 mencatatkan peningkatan sebesar 17,52% (mtm), lebih tinggi dibandingkan peningkatan pada bulan sebelumnya yang sebesar 17,01% (mtm).



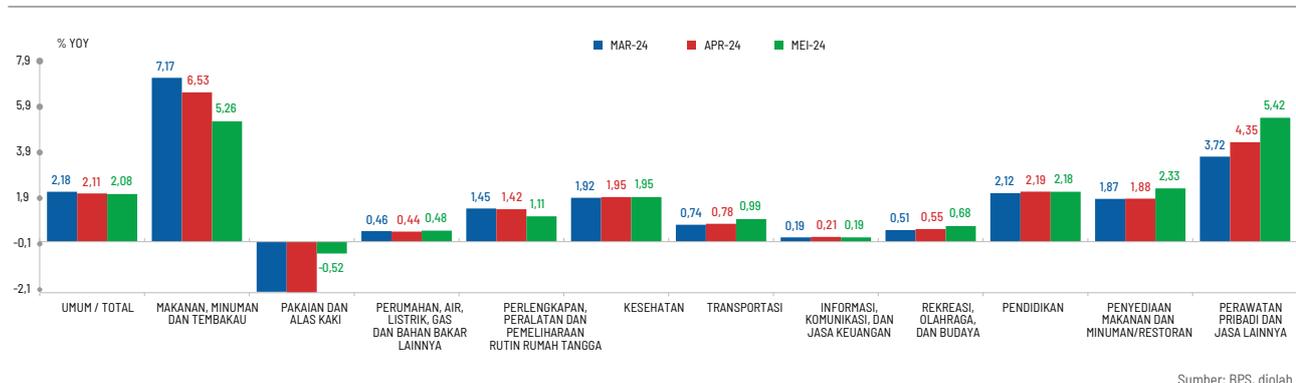
Grafik 4.12 Perkembangan Harga Bawang Putih



Grafik 4.13 Perkembangan Harga Telur Ayam Ras

Selanjutnya, dengan andil sebesar 0,04%, **kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran** mencatatkan inflasi sebesar 0,44% (mtm) dan turut menjadi penahan deflasi Jakarta lebih lanjut pada Mei 2024. Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh inflasi yang terjadi pada komoditas kue kering berminyak seiring dengan permintaan masyarakat yang meningkat.

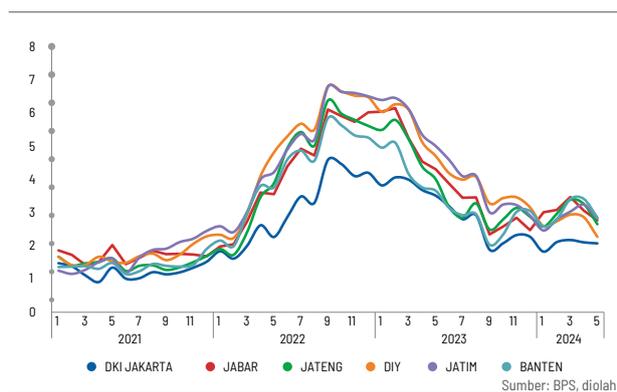
Secara tahunan, inflasi IHK Jakarta pada Mei 2024 terpantau menurun dan tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1%. IHK Jakarta pada Mei 2024 tercatat mengalami inflasi 2,08% (yoy) lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,11% (yoy) (Grafik 4.15).



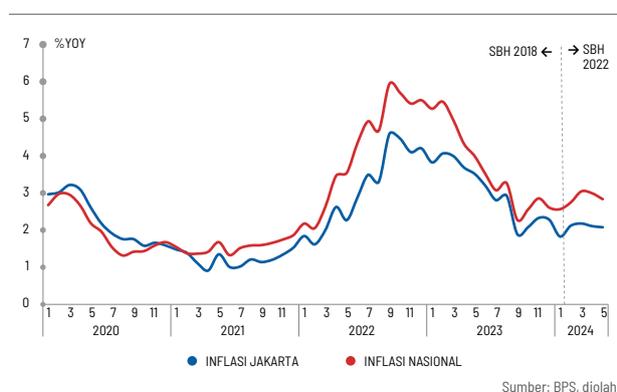
Grafik 4.14 Inflasi tahunan Kelompok Pengeluaran

Tekanan inflasi secara tahunan terutama bersumber dari inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan tingkat inflasi mencapai 5,26% (yoy) dan andil 1,00%, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan tingkat inflasi 5,42% (yoy) dan andil 0,35%, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan tingkat inflasi 2,33% (yoy) dan andil 0,23%. Inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau utamanya bersumber dari komoditas beras, bawang putih, serta Sigaret Kretek Mesin. Sementara inflasi tahunan pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya utamanya bersumber dari komoditas emas perhiasan seiring masih terus berlanjutnya kenaikan harga emas global. Terakhir, inflasi tahunan pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran utamanya bersumber dari komoditas kue kering, sop, dan bakso siap santap, mie, soto, ketoprak, hingga nasi dengan lauk dan kopi siap saji.

Berbagai perkembangan tersebut berdampak pada inflasi tahunan Jakarta pada Mei 2024 tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,84% (yoy), dan inflasi kota/kabupaten di Pulau Jawa (Grafik 4.15-4.16).



Grafik 4.15 Inflasi Gabungan Provinsi di Jawa



Grafik 4.16 Inflasi Jakarta dan Nasional

### C. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI TRIWULAN I 2024

Realisasi inflasi di Jakarta yang terkendali dalam rentang sasaran target inflasi tidak terlepas dari dukungan berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta. Program pengendalian inflasi TPID di Provinsi DKI Jakarta mengacu pada pedoman 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif yang juga tertuang pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 - 2024. Berbagai program pengendalian inflasi dilakukan TPID Provinsi DKI Jakarta dengan fokus penguatan untuk memastikan berbagai kebutuhan komoditas strategis masyarakat tetap tersedia cukup, dan mudah dijangkau baik dari sisi fisik komoditas, maupun dari sisi harga di tengah peningkatan permintaan masyarakat, risiko gangguan produksi tanaman pangan, dan kenaikan harga komoditas global.

Sebagai upaya merespons perkembangan inflasi pangan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta bersama dengan TPID dan TPIP melanjutkan implementasi GNPIP. GNPIP merupakan salah satu langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional. Kegiatan ini mencakup Perluasan Kerjasama Antar Daerah, Komitmen penyelenggaraan Operasi Pasar Murah daerah rentan gejala inflasi di wilayah Jawa, Fasilitasi Distribusi Pangan, maupun Implementasi Gerakan *urban farming* dan *digital farming*.

#### Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, TPID Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa upaya diantaranya:

- Program pangan bersubsidi yang berlangsung di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta sepanjang Triwulan I 2024 dengan penerima program yaitu masyarakat yang tergolong dalam kategori penerima manfaat pangan subsidi. Program ini merupakan kolaborasi dari Pemprov DKI Jakarta, BUMD Pangan DKI Jakarta serta para *stakeholder* yang terlibat. Adapun lokasi pengambilan pangan subsidi telah ditentukan oleh Dinas KPKP DKI Jakarta, yaitu diantaranya RPTRA, gerai kelurahan, kecamatan, serta seluruh gerai milik Perumda Pasar Jaya, Pasar Induk Beras Cipinang, dan gerai milik Perumda Dharma Jaya.
- Program pasar murah yang dilakukan secara rutin oleh BUMD pangan (PT. Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya) dengan menggunakan truk keliling ke seluruh wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta. Adapun komoditas yang rutin disediakan antara lain berupa beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu dan aneka daging.

- Program sembako murah merupakan salah satu program inisiatif Pemprov DKI Jakarta yang mulai berlangsung pada tahun 2024 dengan melibatkan berbagai instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Realisasi program sembako murah hingga Maret 2024 telah mencapai lebih dari 77 titik lokasi dengan lebih dari 77.000 paket sembako murah telah disalurkan.
- Dalam rangka menjaga ketersediaan stok pangan di DKI Jakarta, TPID DKI Jakarta yang diinisiasi oleh Perum Bulog Kanwil Jakarta dan Banten merespon gejolak harga beras melalui beberapa program, salah satunya program Bulog SIAGA (akSI Amankan harGA) di beberapa titik lokasi di 5 wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Program Siaga yang berlangsung sejak 20 Februari 2024-09 Maret 2024 dengan realisasi titik alokasi sebanyak 171 titik lokasi. Program pelaksanaan program tersebut diutamakan di pemukiman padat penduduk yang langsung menasar konsumen akhir seperti rumah susun (rusun), kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan lainnya. Program Bulog Siaga menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), beras premium dan komoditas pangan lainnya secara langsung kepada masyarakat.

### Ketersediaan Pasokan

Selanjutnya, beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan melalui pengamanan pasokan komoditas pangan, diantaranya:

- Realisasi beras program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) telah tersalurkan oleh BULOG Kanwil Jakarta Banten dari Januari hingga dengan Maret 2024 sebanyak 157.110 ton beras untuk Provinsi DKI Jakarta yaitu sebanyak dan khusus untuk Tahun 2024 target sebanyak 192.921.000 atau telah terealisasi sebesar 81,44%.
- KPw BI Jakarta bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BUMD Pangan Food Station (FS) menyelenggarakan Kegiatan Panen Bersama untuk mendukung penguatan pasokan beras di DKI Jakarta pada Selasa, 26 Maret 2024 di Kabupaten Indramayu.
- TPID DKI Jakarta juga senantiasa memperkuat pemenuhan pasokan beras Jakarta serta mendukung peningkatan kesejahteraan petani mitra melalui perluasan KAD dengan daerah surplus serta pendampingan petani, baik melalui skema budidaya (*on farm*) ataupun *standby buyer*. Adapun target peningkatan lahan KAD Jakarta pada tahun 2024 sebesar 25% (*on farm* 1.250 Ha dan *standby buyer* 12.500 Ha).

### Kelancaran Distribusi

Adapun upaya untuk mendorong kelancaran distribusi diantaranya adalah:

- TPID Provinsi DKI Jakarta masih terus melangsungkan kegiatan pasar murah yang menjangkau seluruh wilayah DKI Jakarta dari level Kelurahan hingga Rusun melalui kegiatan penjualan rutin

yang dilakukan oleh BUMD Pangan dengan menggunakan truk keliling di wilayah administratif Jakarta sepanjang Januari - Maret 2024.

- KPw BI Jakarta bersinergi dengan ketiga BUMD Pangan dalam fasilitasi distribusi pangan melalui penyewaan truk untuk distribusi penjualan pangan murah ke seluruh wilayah administratif Jakarta.
- Fasilitasi distribusi pangan untuk Pengiriman Perdana 15 Juta Kg beras premium untuk memenuhi pasokan di Retail Modern Area Jabodetabek, bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan *Food Station*.

### Komunikasi Efektif

Dalam hal komunikasi efektif, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TPID Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan koordinasi serta membangun persepsi positif masyarakat, diantaranya:

- Anggota TPID Provinsi DKI Jakarta masing-masing secara aktif mengkomunikasikan berbagai program pengendalian Inflasi melalui sosial media instansi masing-masing anggota TPID Provinsi DKI Jakarta
- Penguatan koordinasi TPID antara lain berupa: i) Rapat mingguan TPID Provinsi DKI setiap hari Kamis; ii) Rakornas bersama Kemendagri setiap hari Senin iii) TPID DKI Jakarta menyelenggarakan High Level Meeting TPID I tanggal 06 Maret 2024; iii) Kegiatan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah pada tanggal 27 Februari 2024; iv) Kegiatan Rapat Penguatan Sinergi Pengendalian Inflasi Daerah Semester I tahun 2024; v) Rakor Teknis Pra Rakorwil TPID Jabodetabek dalam Sinergi Pengendalian Inflasi Jelang HBKN Idul Fitri 2024; vi) Kegiatan *Capacity Building* TPID Provinsi DKI Jakarta; vii) Kegiatan kunjungan pasar ke Pasar Induk Kramat Jati;
- Sosialisasi secara masif menjelang HBKN Ramadan dan Idul Fitri melalui kanal berita serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui radio. ILM berisi ajakan untuk Belanja Bijak pada periode HBKN Ramadan dan Idul Fitri dengan *tagline* "Bijak Belanja, Berkah Ramadan Terjaga". ILM diisi oleh Kepala BI Jakarta beserta Kepala Dinas Ketahanan Pangan DKI Jakarta, dan telah disiarkan di jaringan radio Delta FM dengan jangkauan 8 kota, serta di berbagai kanal media sosial BI Jakarta.
- TPID DKI Jakarta memperkuat komunikasi pengendalian inflasi untuk mendukung program Belanja Bijak melalui dialog bersama HEBITREN.





## BOKS 2

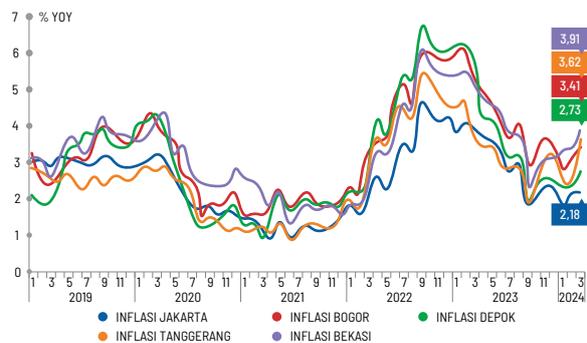
# Sinergi Pengendalian Inflasi Aglomerasi Jabodetabekjur

Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta oleh Presiden RI Joko Widodo pada 25 April 2024 yang lalu menjadi momentum penting bagi Jakarta dalam menentukan peran dan arah kebijakannya ke depan pasca-pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, termasuk perannya dalam kawasan aglomerasi. Kawasan aglomerasi tersebut mencakup 10 daerah, yakni Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Cianjur, yang kemudian disebut dengan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur. Kawasan ini akan berada di bawah kendali atau koordinasi Dewan Aglomerasi. Posisi Jakarta, dengan peranan besarnya terhadap perekonomian dan inflasi Nasional, akan semakin menguat dalam kawasan aglomerasi dengan adanya kewenangan khususnya sebagai Daerah Khusus Jakarta yang melaksanakan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan global. Selanjutnya, jika digabungkan dengan 10 daerah di atas, maka kawasan aglomerasi Jabodetabekjur memiliki peran yang krusial dalam perekonomian dan inflasi Nasional.

Berbicara tentang kawasan Jabodetabek, wilayah ini memiliki pangsa perekonomian yang besarnya mendekati 1/3 terhadap Nasional. Pangsa terhadap inflasi Nasional juga terhitung besar. Dari sisi inflasi, inflasi kota-kota di Jabodetabek pada Maret 2024 secara umum berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1%, kecuali Bekasi yang mencatatkan inflasi sebesar 3,91% (yoy) dan Tangerang sebesar 3,62%

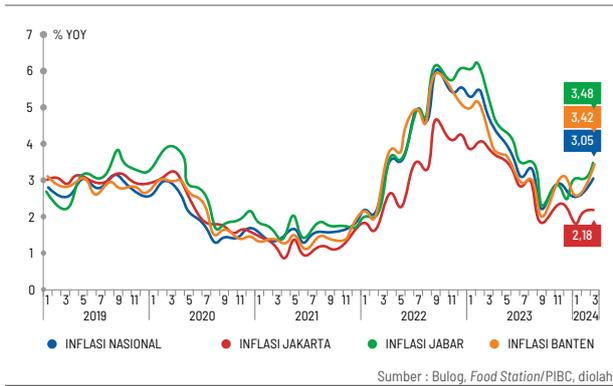
(yoy) (Gambar B.2.1). Berdasarkan lingkup provinsi, inflasi DKI Jakarta (2,18%, yoy) tercatat lebih rendah dibandingkan dengan Nasional (3,05%, yoy), sementara inflasi gabungan kota-kota di Jawa Barat dan Banten tercatat sedikit lebih tinggi, yakni sebesar 3,48% (yoy) dan 3,42% (yoy) (Gambar B.2.2). Perbedaan tingkat inflasi khususnya di Jabodetabekjur berpeluang untuk diselaraskan. Terdapat kesamaan komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di wilayah Jabodetabek, utamanya berasal dari kelompok bahan pangan, di antaranya beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras.

Jakarta memiliki keterkaitan wilayah yang tinggi dengan Bodetabek sebagai megapolitan. Jakarta menjadi hub distribusi dalam pemenuhan pasokan. Pasokan pangan strategis (misal: beras) Jakarta



Grafik B2.1 Perkembangan Harga Beras

Sumber : IPJ, diolah



Grafik B2.2 Perkembangan Stok Beras

didominasi oleh pengiriman dari wilayah Jawa Barat, yang kemudian akan didistribusikan kembali ke area Bodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga antar pulau (Gambar B.2.3). Dengan tingginya keterkaitan antar wilayah ini, kondisi inflasi bulanan Jabodetabek terpantau relatif stabil, dengan volatilitas inflasi yang paling rendah dicatat oleh Jakarta (Tabel B.2.1). Disparitas harga komoditas pangan Jabodetabek relatif rendah, tercermin dari beberapa komoditas yang relatif berada di rentang harga yang sama, seperti beras, cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras, sementara harga minyak goreng tercatat lebih bervariasi. Namun demikian, secara volatilitas, harga pangan Jakarta lebih stabil, terutama untuk komoditas beras, cabai merah, dan telur ayam ras.

Penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) kemudian menjadi kunci stabilitas harga di kawasan aglomerasi. Jakarta berperan penting karena hubungannya yang erat ke wilayah sekitar dalam hal pemenuhan pasokan dan distribusi. Saat ini, Jakarta telah menjalin Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah Jawa Barat dan Banten dalam bentuk *Business to Business* (B2B) antara BUMD pangan DKI Jakarta (PT Food Station Tjipinang Jaya dan Dharma Jaya) dengan pelaku usaha di Jawa Barat dan Banten. Bentuk mitra pemasok terdiri dari koperasi, gapoktan, ataupun korporasi (dalam bentuk PT atau CV). Adapun komoditas yang telah dikerjasamakan meliputi beras, telur ayam ras, daging ayam ras, dan daging sapi. Khusus untuk komoditas

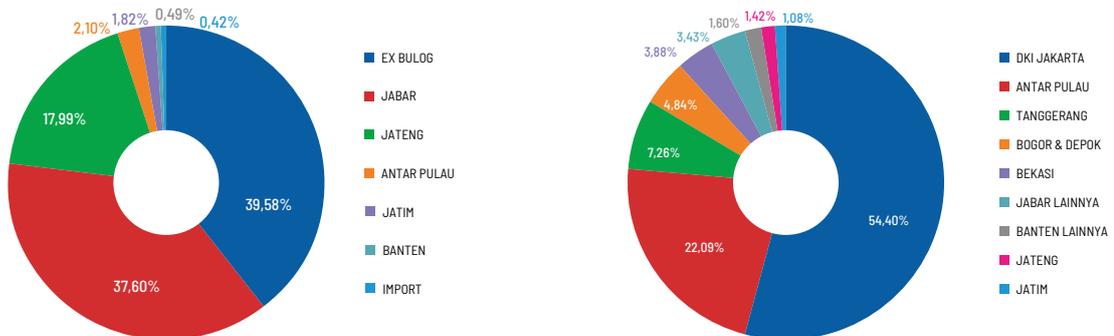
Tabel B2.1 Volatilitas Inflasi Jabodetabek 2020 – 2023

KOTA GLOBAL	Stdev
Jakarta	0,26
Bogor	0,31
Depok	0,29
Bekasi	0,29
Tangerang	0,30
Jabar	0,29
Banten	0,30

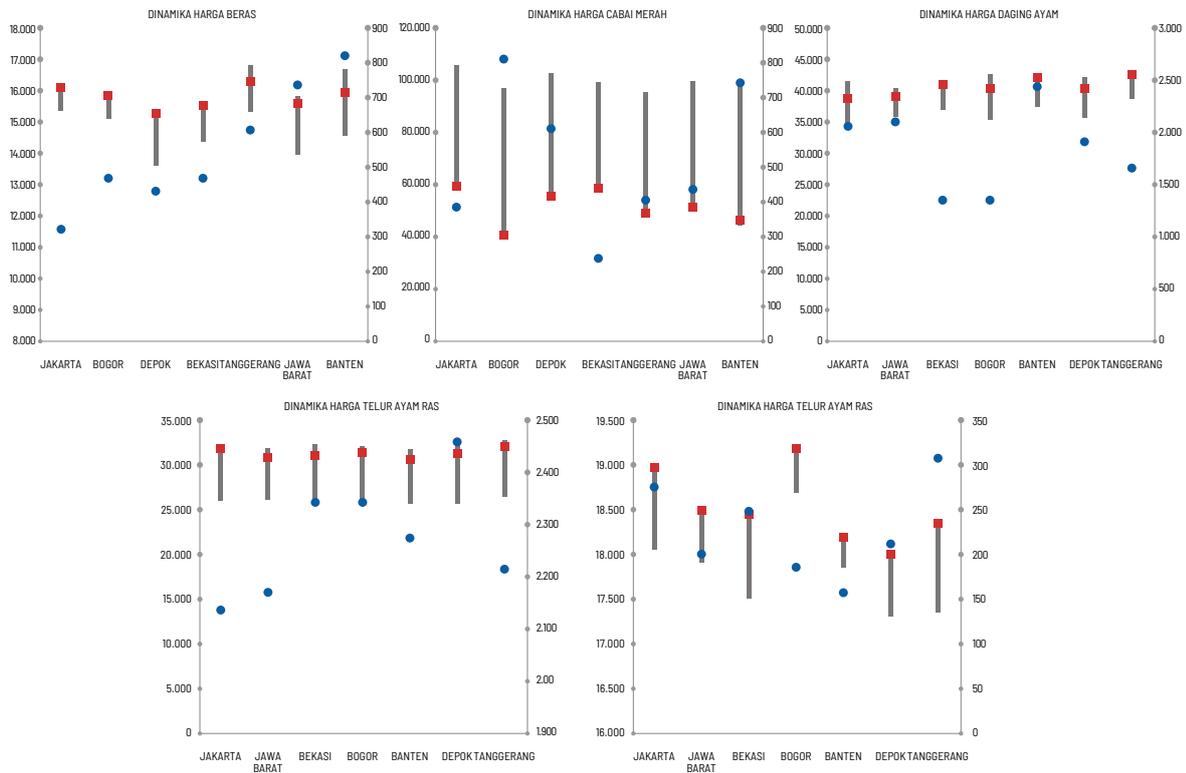
Sumber: BPS

beras, bentuk kemitraan yang dijalin antara PT Food Station Tjipinang Jaya dengan mitra juga turut mendukung peningkatan produktivitas petani mitra melalui penyediaan lahan, saprodi, tenaga kerja, hingga pemberian pendampingan dan pembinaan melalui skema bisnis budidaya (*on-farming*) ataupun pembeli siaga (*stanby buyer*).

Sinergi dan koordinasi antar wilayah menjadi kunci pengendalian inflasi daerah aglomerasi Jabodetabekjur. Pengendalian inflasi komoditas pangan di Jabodetabek saat ini telah didukung oleh digitalisasi dan sistem informasi harga dan stok, namun pemantauan masih dilakukan secara granular. DKI Jakarta secara khusus memiliki 1) Informasi Pangan Jakarta (IPJ) yang melakukan pemantauan harga dan 37 komoditas di 46 pasar yang tersebar di seluruh wilayah administratif Jakarta, 2) Pusat Informasi Beras Cipinang – Food Station yang memonitoring harga dan stok komoditas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, dan 3) Sistem Informasi Ketahanan Pangan yang melakukan monitoring harga 44 komoditas dan stok komoditas beras. Sementara itu, Jawa Barat juga memiliki sistem informasi serupa, yakni Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Sistem Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Simawaspagi). Begitu juga dengan Banten yang memiliki Sipagi Banten yang melakukan pengawasan harga 32 komoditas di 32 pasar. Ke depan, kawasan aglomerasi membutuhkan sistem informasi harga dan stok yang terintegrasi, termasuk yang menghubungkan seluruh data pasar induk yang berada di kawasan Jabodetabek.



Grafik B2.3 Sumber Pasokan dan Distribusi Komoditas Beras Jakarta (Sumber: PT Food Station Tjipinang Jaya)



Grafik B2.4 Volatilitas Harga Komoditas Pangan (Sumber: PIHPS, rerata seluruh jenis/kualitas. Periode 3 bulan terakhir)

Untuk mewujudkan inflasi daerah Jabodetabek yang terkendali dalam rentang sasaran, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu memperkuat koordinasi TPID lintas daerah. Sinergi *Quick-Win* yang dapat dilakukan, di antaranya melakukan sinergi pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah di wilayah Jabodetabek untuk menciptakan kestabilan harga yang lebih merata di seluruh daerah. Pemenuhan pasokan pangan di wilayah ini juga dapat didukung oleh penyelenggaraan kegiatan tanam dan/panen komoditas pangan utama penyumbang inflasi secara serempak di seluruh wilayah dengan mengintensifkan dan memasifkan pelaksanaan *urban farming*. Selain itu, wilayah Jabodetabek juga dapat melakukan pengawasan harga dan stok di Jabodetabek secara serempak dan terintegrasi, serta mendukung kelancaran distribusi pangan di wilayah Jabodetabek. Upaya pengendalian inflasi juga didukung oleh penguatan komunikasi ekspektasi melalui penguatan komunikasi program pengendalian inflasi serta Iklan Layanan Masyarakat di berbagai kanal mengenai Belanja Bijak dan Konsumsi Pangan Olahsan yang dilakukan oleh para pemimpin daerah secara serempak. Sementara itu, untuk jangka waktu pendek-menengah, wilayah Jabodetabek dapat melakukan penguatan

dan pertukaran data dan informasi harga dan pasokan bahan pangan di Jabodetabek serta merancang rantai pasok jaringan pasar induk yang solid. Kemudian, pemenuhan stok di wilayah Jabodetabek harus didukung oleh penguatan dan perluasan KAD melalui model bisnis budidaya (*on-farm*) dan *standby buyer* untuk mendukung pengendalian harga dan pasokan di daerah produsen dan konsumen. Wilayah Jabodetabek juga perlu melakukan penguatan hilirisasi untuk konsumsi produk olahan dan diversifikasi pangan, serta perluasan *urban farming* dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, keterlibatan masyarakat yang lebih luas, termasuk pesantren, yang disertai dengan bimbingan teknis. Koordinasi dalam pengendalian inflasi Jabodetabek oleh TPID lintas daerah juga perlu dilakukan secara regular, terutama saat periode peningkatan permintaan seperti HBKN.

Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah senantiasa bersinergi memperkuat upaya pengendalian inflasi yang lebih integratif, masif, dan berdampak untuk mendukung terjaganya inflasi Jabodetabek dalam rentang sasaran inflasi  $2,5 \pm 1\%$  pada tahun 2024.



## BAB 5

# PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

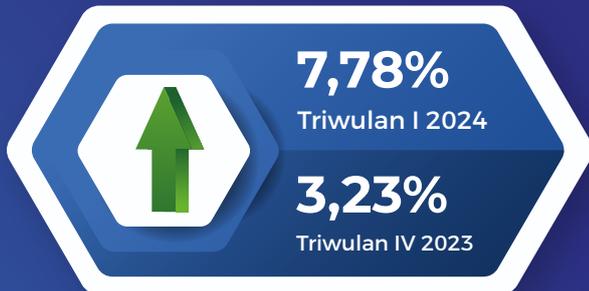
Intermediasi perbankan meningkat dengan didukung ketahanan yang tetap terjaga. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit meningkat ditopang oleh kondisi likuiditas perbankan yang memadai seiring peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), penguatan strategi funding dari sumber pendanaan lainnya serta implementasi berbagai pelonggaran kebijakan makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan. Sejalan dengan itu, risiko kredit terjaga rendah, sehingga mendorong perbankan tetap dapat menerapkan standar penyaluran kredit yang longgar.

Dari sisi permintaan, kredit korporasi meningkat seiring dengan membaiknya kinerja korporasi. Tingkat profitabilitas korporasi non keuangan mengalami kenaikan sejalan dengan meningkatnya penjualan. Dengan demikian, kemampuan membayar korporasi non keuangan tetap terjaga tercermin dari rendahnya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loans) kredit korporasi.

Sejalan dengan perbaikan kinerja sektor korporasi non keuangan, kinerja sektor rumah tangga pada triwulan I 2024 juga tetap terjaga baik. Kondisi ini tercermin dari kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Ekspektasi Konsumen dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit sektor rumah tangga tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja sektor UMKM juga terus membaik sejalan dengan peningkatan daya beli dan mobilitas masyarakat. Kredit UMKM meningkat didorong oleh kenaikan permintaan kredit dari UMKM skala menengah ditengah tetap kuatnya permintaan kredit dari UMKM skala mikro dan kecil. Namun demikian tetap perlu diperhatikan kehati-hatian terhadap tingkat kemampuan membayar UMKM. Hal ini dikarenakan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loans) UMKM cenderung meningkat seiring peningkatan nominal kreditnya, baik pada kredit modal kerja ataupun kredit investasi terutama pada kredit UMKM skala Mikro dan Kecil. KPwBI Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai program untuk mendukung perbaikan produktivitas serta peningkatan kapasitas UMKM baik dari sisi SDM maupun pengembangan usaha.



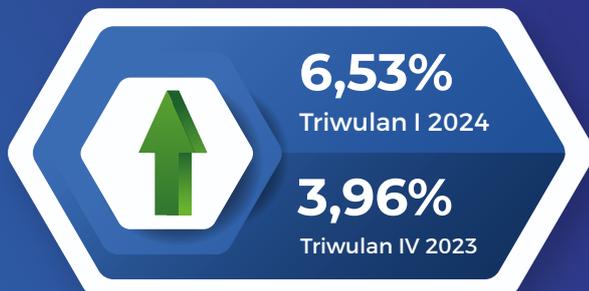
**Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (yoy)**



**Pertumbuhan Kredit (Lokasi Proyek), yoy**



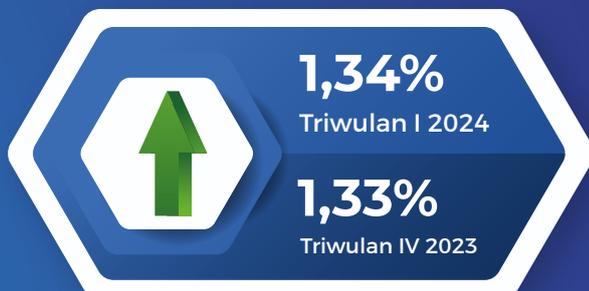
**Pertumbuhan Kredit UMKM, yoy**



**Loan-to-deposit Ratio (Lokasi Proyek), yoy**



**Non-Performing Loan (Lokasi Proyek), yoy**



## A. PERKEMBANGAN KINERJA BANK UMUM

Kinerja bank umum di Provinsi DKI Jakarta pada triwulan I 2024 terjaga baik. Intermediasi meningkat dengan risiko kredit yang rendah. Capaian ini tidak terlepas oleh dukungan konsistensi, inovasi dan sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia sebagai bagian bauran kebijakan nasional.

Sejak tahun 2023 Bank Indonesia secara konsisten menerapkan bauran kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) melalui kebijakan moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) melalui kebijakan makroprudensial serta juga didukung oleh kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, serta berbagai kebijakan struktural yang memperkuat fondasi ekonomi dan sistem keuangan. Bauran kebijakan tersebut mampu menjaga kapasitas perbankan untuk tetap berperan positif dalam pembiayaan perekonomian domestik di tengah masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.

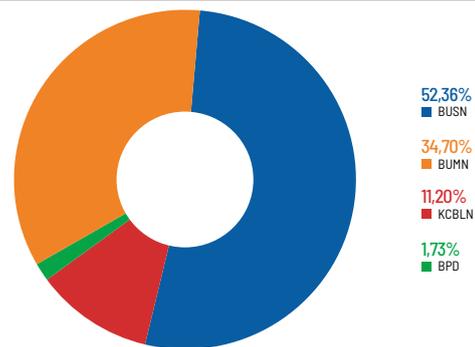
Kapasitas perbankan yang terjaga baik antara lain dapat dilihat dari kondisi kecukupan likuiditas perbankan dengan diiringi risiko kredit yang terjaga rendah jauh dibawah *threshold* 5%. Kapasitas perbankan diperkuat oleh berbagai pelanggaran kebijakan dan pemberlakuan Kebijakan insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebagai inovasi kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan. Kebijakan insentif makroprudensial mulai diberlakukan pada Oktober 2023 yang bertujuan mendorong penyaluran kredit kepada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit lebih tinggi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya pada sektor hilirisasi (minerba, pertanian, peternakan, dan perikanan), perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata, inklusif (termasuk UMKM, KUR, dan ultra mikro/UMi), serta ekonomi keuangan hijau. Perbankan yang melakukan penyaluran kredit kepada sektor-sektor tersebut akan mendapatkan insentif melalui pengurangan kewajiban giro bank di Bank Indonesia.

Kondisi likuiditas bank yang memadai serta ditopang kebijakan insentif likuiditas dapat meringankan bank dalam hal *cost of fund*. Lebih lanjut, dengan *cost of fund* lebih ringan bank berpeluang memberikan kredit/pembiayaan dengan suku bunga lebih murah sehingga mendorong pertumbuhan kredit.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kredit, total aset juga meningkat menjadi sebesar Rp7.721 triliun dengan pertumbuhan mencapai 7,20% (yoy) (Tabel 5.1). Jika dilihat berdasarkan kelompok bank, pangsa aset terbesar berada pada kelompok Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yaitu 52,36%, diikuti oleh kelompok Bank Umum Milik Negara (BUMN) 34,70%, Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN) 11,20%, dan Bank Pemerintah Daerah (BPD) 1,73% (Grafik 5.1).

### Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum

Kinerja penghimpunan DPK di DKI Jakarta membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2024, DPK tercatat tumbuh sebesar 7,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 3,23% (yoy) (Grafik 5.2). Peningkatan pertumbuhan DPK tersebut terjadi pada semua instrumen DPK dengan kontributor utama



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.1 Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank

Tabel 5.1 Perkembangan Kinerja Bank Umum di Provinsi DKI Jakarta

NO	KOMPONEN BELANJA	2021				2022				2023				2024
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
1	Total Asset	5.935	6.057	6.334	6.642	6.589	6.652	6.797	7.298	7.203	7.201	7.283	7.661	7.721
2	Dana Pihak Ketiga (DPK)	3.454	3.505	3.667	3.864	3.849	3.887	3.910	4.321	4.211	4.192	4.235	4.461	4.539
3	Kredit													
	- Lokasi Bank (LB)	2.539	2.607	2.639	2.686	2.713	2.941	2.991	3.065	3.073	3.202	3.305	3.493	3.580
	- Lokasi Proyek (LP)	1.704	1.750	1.805	1.751	1.784	1.949	1.965	2.006	2.011	2.104	2.193	2.324	2.401
4	Pertumbuhan :													
	- g_Aset (% , yoy)	6,39	9,83	9,14	12,32	11,01	9,83	7,31	9,89	9,32	8,25	7,16	4,96	7,20
	- g_DPK (% , yoy)	10,02	12,67	9,38	15,03	11,43	10,89	6,65	11,83	9,42	7,85	8,31	3,23	7,78
	- g_Kredit Lokasi Bank (% , yoy)	-10,28	-4,02	-1,00	4,36	6,85	12,78	13,34	14,11	13,26	8,89	10,52	13,98	16,51
	- g_Kredit Lokasi Proyek (% , yoy)	-10,41	-3,40	2,40	1,63	4,69	11,35	8,84	14,55	12,69	7,96	11,60	15,83	19,41
5	Intermediasi (tanpa SB)													
	-Lokasi Bank	73,51	74,39	71,96	69,51	70,48	75,66	76,48	70,92	72,96	76,39	78,04	78,31	78,87
	-Lokasi Proyek	49,35	49,93	49,24	45,32	46,36	50,13	50,25	46,42	47,75	50,18	51,78	52,09	52,90
6	Non performing loan (NPL)													
	- Lokasi Bank	3,01	3,17	3,06	2,93	2,86	2,57	2,48	2,13	2,13	2,14	2,08	1,81	1,83
	- Lokasi Proyek	2,40	2,32	2,19	1,97	1,94	1,70	1,82	1,42	1,37	1,41	1,45	1,33	1,34

Sumber: Bank Indonesia, diolah

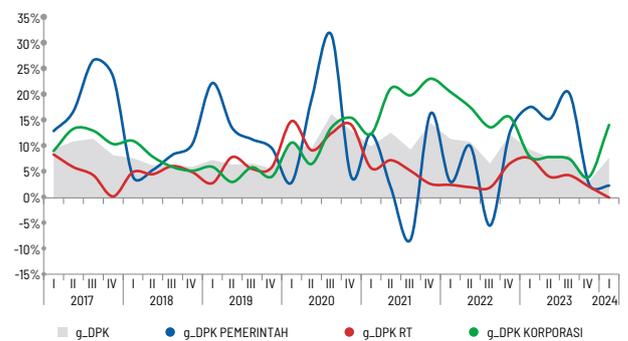
adalah Deposito dan Giro. Tabungan juga tercatat tumbuh positif setelah selama 3 (tiga) triwulan sebelumnya berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif. Sejalan dengan perkembangan tersebut, pada triwulan I 2024, pangsa Deposito tetap dominan mencapai sebesar 43,78% dari total DPK Jakarta, diikuti oleh Giro sebesar 39,95% dan Tabungan yaitu sebesar 16,27% (Grafik 5.3).

Berdasarkan pemiliknya, peningkatan pertumbuhan DPK ditopang oleh kenaikan signifikan DPK milik Korporasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya realisasi penyaluran kredit perbankan kepada debitur korporasi pada periode yang sama, baik Kredit Modal Kerja maupun Investasi. Sementara itu, DPK milik Pemerintah dan Rumah Tangga juga tetap tumbuh positif namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan DPK milik Pemerintah sejalan dengan meningkatnya penarikan simpanan pada Triwulan I 2024 untuk pembayaran THR yang sebagian direalisasikan pada Maret 2024 serta untuk penyaluran bansos dalam upaya menjaga daya beli dan mengendalikan harga pada periode Ramadhan dan jelang HBKN Idul Fitri. Adapun perlambatan DPK milik rumah tangga disinyalir dipengaruhi oleh kecenderungan penarikan DPK untuk kebutuhan konsumsi oleh masyarakat kelompok menengah bawah dan shifting simpanan kepada penempatan lain di luar DPK yang memberikan imbal hasil lebih tinggi oleh masyarakat kelompok menengah atas (Grafik 5.4).

Secara spasial, peningkatan DPK terjadi merata di semua wilayah. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Jakarta Timur namun lebih

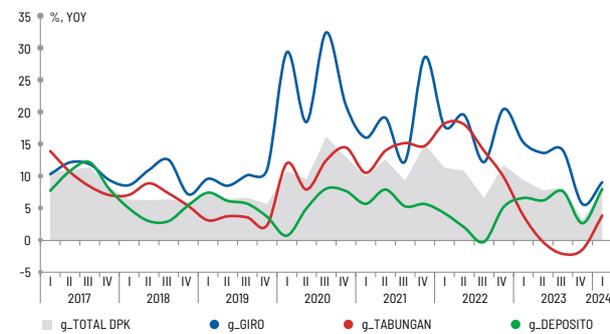
disebabkan oleh faktor *based effect* setelah selama 4 (empat) triwulan sebelumnya secara berturut-turut mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif. Jakarta Selatan masih tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan DPK di DKI Jakarta meskipun pada triwulan ini pertumbuhannya sedikit melambat. Hal ini dikarenakan pangsa DPK yang sangat besar di wilayah tersebut dibandingkan kota/kabupaten lainnya (Grafik 5.5).

Kenaikan pertumbuhan DPK Jakarta mendorong semakin dominannya pangsa DPK DKI Jakarta terhadap Nasional. Dengan kedudukannya sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis, pangsa DPK DKI Jakarta mencapai 52,77% terhadap DPK perbankan nasional pada triwulan I 2024 (Grafik 5.6). Pangsa DPK di DKI Jakarta selalu berada diatas



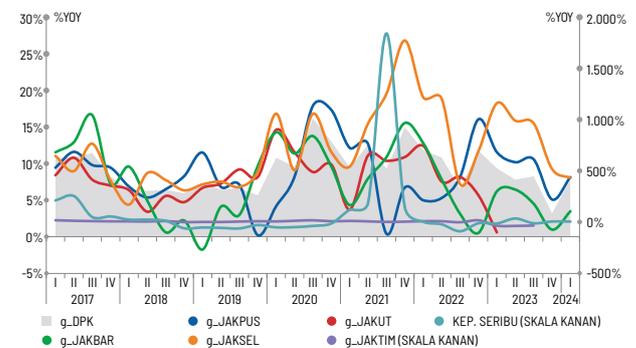
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.4 Komposisi Pemilik DPK Jakarta



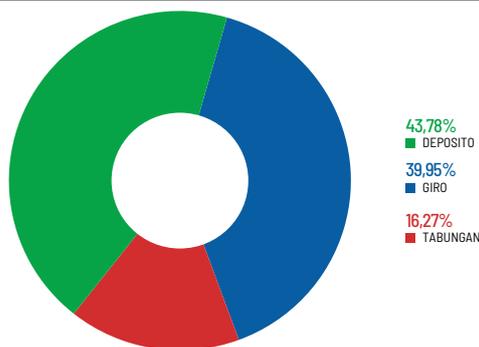
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.2 Pertumbuhan DPK Jakarta



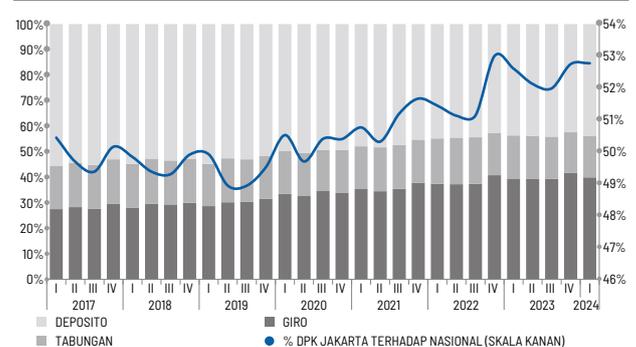
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5 Perkembangan DPK Spasial Jakarta



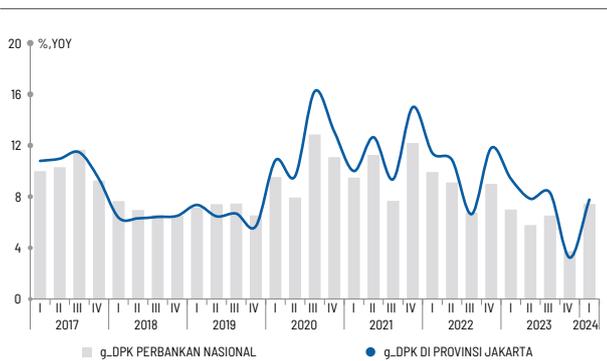
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.3 Komposisi DPK Jakarta



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.6 Kontribusi DPK Jakarta terhadap DPK Nasional



Sumber: Bank Indonesia, diolah

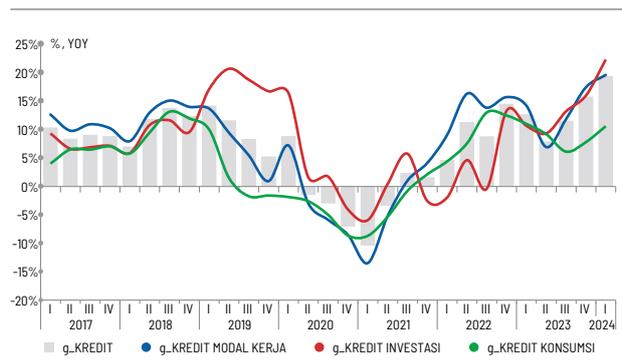
Grafik 5.7 Pertumbuhan DPK Jakarta dan Nasional

50% pangsa DPK nasional sejak triwulan III 2020 dengan kecenderungan meningkat. Hal tersebut menjadikan DKI Jakarta sebagai tumpuan penghimpunan dana perbankan secara nasional, terutama Deposito. Pertumbuhan DPK DKI Jakarta sangat dominan memengaruhi pertumbuhan DPK di nasional. Pertumbuhan DPK DKI Jakarta pada triwulan I 2024 adalah sebesar 7,78% (yoy) sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 7,44% (yoy) (Grafik 5.7). Besarnya sumber dana di DKI Jakarta menyebabkan banyak bank yang membuka kantor pusat ataupun kantor cabang di Jakarta.

### Perkembangan Kredit Bank Umum

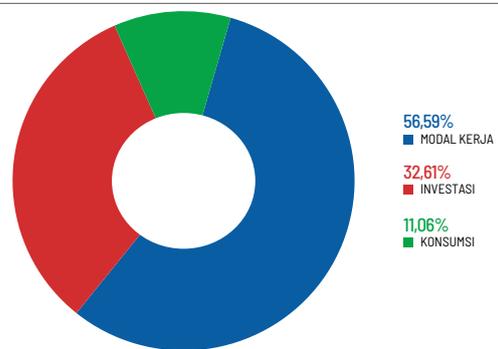
Pada triwulan I 2024, kredit bank umum di DKI Jakarta tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi bank dan lokasi proyek masing-masing tercatat sebesar 19,41% (yoy) dan 16,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 15,83% (yoy) dan 13,98% (yoy). Pertumbuhan kredit terutama didorong oleh kredit produktif yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI). Pada triwulan I 2024, KMK dan KI masing-masing tumbuh sebesar 19,63% (yoy) dan 22,33% (yoy), meningkat cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 17,46% (yoy) dan 15,99% (yoy). Kredit konsumsi juga mengalami kenaikan pertumbuhan meskipun tidak setinggi KMK dan KI (Grafik 5.8). Berdasarkan pangsaanya, KMK memiliki pangsa terbesar terhadap total kredit Provinsi DKI Jakarta yaitu 56,33%, diikuti oleh Kredit Investasi dan Konsumsi yaitu masing-masing sebesar 32,61% dan 11,06% (Grafik 5.9).

Kenaikan pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh mulai meningkatnya permintaan kredit dari dunia usaha sejalan dengan dukungan kapasitas pembiayaan dari perbankan yang memadai sebagai dampak penerapan bauran kebijakan Bank Indonesia. Pelonggaran dan penerapan kebijakan akomodatif terhadap berbagai instrumen kebijakan makprudensial seperti rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB), Rasio Intermediasi Makprudensial (RIM), Penyangga Likuiditas Makprudensial (PLM) dan penguatan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), serta inovasi Kebijakan insentif Likuiditas Makprudensial yang ditempuh secara konsisten dan inovatif mampu



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.8 Pertumbuhan Kredit Jakarta



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.9 Komposisi Kredit Jakarta Berdasarkan Penggunaan

membantu perbankan dalam mengendalikan risiko sehingga transmisi kenaikan suku bunga acuan terhadap suku bunga kredit dapat dilakukan secara terbatas pada suku bunga kredit baru<sup>1</sup>.

Fungsi intermediasi bank yang terjaga juga didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah maupun otoritas keuangan, baik di lingkup global maupun domestik. Sinergi tersebut sejalan dengan penguatan mandat dan kewenangan masing-masing lembaga serta mekanisme koordinasi yang telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Penguatan sinergi dengan otoritas di tingkat internasional antara lain ditunjukkan dengan ketekuaan Indonesia pada G20 2022 dan ASEAN 2023.

Kondisi pertumbuhan kredit yang membaik juga terkonfirmasi dari hasil survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan Maret 2024 yang menunjukkan bahwa permintaan pembiayaan dari korporasi dan penyaluran kredit baru oleh perbankan terindikasi meningkat pada triwulan I 2024.

Berdasarkan kelompok debitur, pada triwulan I 2024, penyaluran kredit kepada sektor korporasi masih mendominasi dengan pangsa mencapai 64,08% dari total kredit bank umum di DKI Jakarta, diikuti oleh kredit kepada sektor pemerintah sebesar 18,48% dan rumah tangga sebesar

<sup>1</sup> [Begini Dampak Kenaikan Bunga Acuan ke Kinerja Perbankan di Tanah Air \(kontan.co.id\)BI Rate Naik ke 6%](https://kontan.co.id/BI-Rate-Naik-ke-6%/)

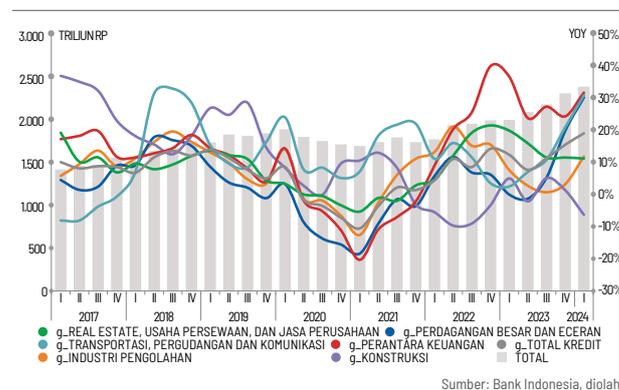
17,44% (Grafik 5.10). Sementara itu dilihat dari pertumbuhannya, pada triwulan I 2024, kredit kelompok Korporasi dan Pemerintah masing-masing masih tumbuh tinggi 14,12% (yoy) dan 14,17% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 10,69% (yoy). Kredit Rumah Tangga juga tumbuh tinggi sebesar 10,68% (yoy) meskipun melambat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 11,05% (yoy) (Grafik 5.11).

Secara sektoral, pertumbuhan kredit positif terjadi pada hampir semua sektor utama dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Perantara Jasa Keuangan, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, serta Perdagangan. Peningkatan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor utama tersebut secara umum sejalan dengan membaiknya kinerja pada masing-masing sektor usaha (Grafik 5.12).

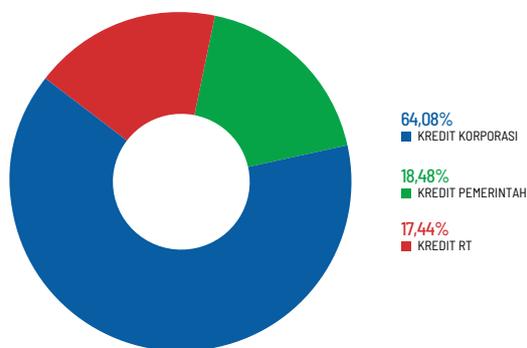
Secara spasial, penyaluran kredit perbankan terutama ditujukan ke Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat sebagai sentra perekonomian dan niaga. Pada triwulan I 2024, porsi kredit yang disalurkan kepada kedua daerah tersebut melebihi 50% dari total kredit bank umum DKI Jakarta, yaitu masing-masing dengan pangsa sebesar 37,21% dan 35,32% (Grafik 5.13).

Meningkatnya penyaluran kredit yang ditunjukkan oleh pertumbuhan positif kredit mengindikasikan terjadinya peningkatan aktivitas

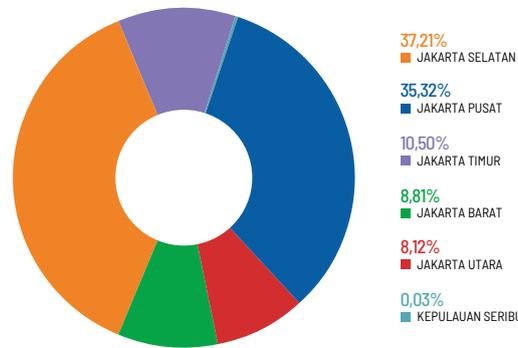
intermediasi perbankan. Pada triwulan I 2024, rasio intermediasi berdasarkan lokasi proyek dan lokasi bank masing-masing sebesar 52,90% dan 78,87%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 52,09% dan 78,31% (Grafik 5.14). Angka rasio intermediasi perbankan berdasarkan lokasi proyek yang relatif rendah mencerminkan bahwa DKI Jakarta cenderung sebagai daerah penghimpun dana. Namun demikian, dana yang terhimpun tidak diimbangi dengan jumlah kredit yang disalurkan karena sebagian kredit disalurkan ke luar DKI Jakarta termasuk BodeTABEK. Hal ini salah satu indikator eratnya hubungan ekonomi dan keuangan antara Jakarta dengan daerah sekitar Jakarta sebagai satu kawasan aglomerasi.



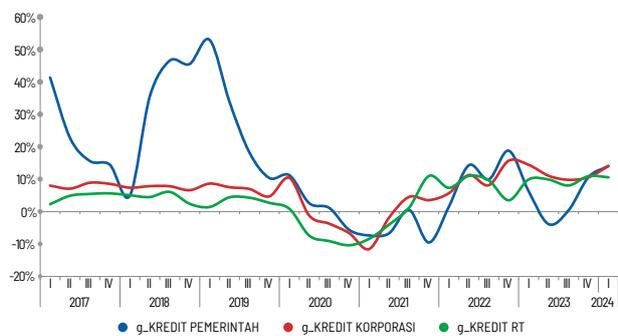
Grafik 5.12 Pertumbuhan Kredit Sektoral



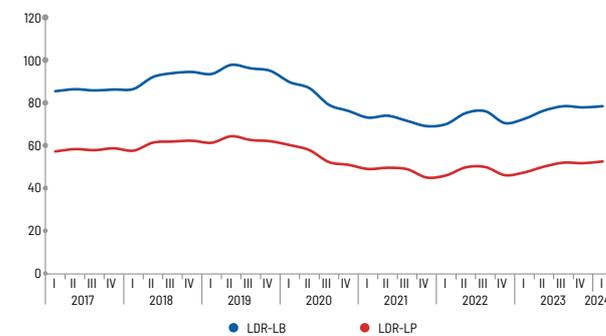
Grafik 5.10 Komposisi Kredit Berdasarkan Kepemilikan



Grafik 5.13 Sebaran Kredit di Provinsi DKI Jakarta



Grafik 5.11 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kepemilikan



Grafik 5.14 Perkembangan LDR Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek

## Risiko Kredit Bank Umum

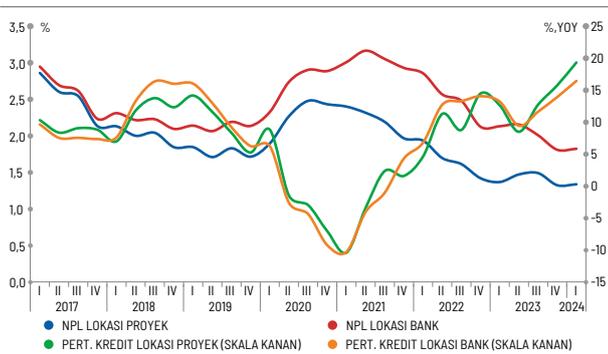
Tingkat ketahanan perbankan tetap terjaga di tengah meningkatnya penyaluran kredit. Hal ini ditunjukkan oleh tetap rendahnya rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) dan rasio *Loan at Risk* (LaR). Pada triwulan I 2024, rasio NPL kredit berdasarkan lokasi proyek (LP) adalah sebesar 1,34%, relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya 1,33%. Sejalan dengan itu, rasio NPL pada kredit berdasarkan lokasi bank (LB) juga tercatat rendah yaitu sebesar 1,83%, meningkat tipis dibandingkan triwulan sebelumnya 1,81% (Grafik 5.15). Risiko kredit yang terkendali juga terlihat dari rasio kredit berisiko atau *Loan at Risk* (LaR) menunjukkan penurunan sejalan dengan penurunan *outstanding* kredit restrukturisasi (Grafik 5.16).

Rasio NPL yang terjaga di bawah *threshold* 5% juga didukung oleh kesiapan perbankan secara internal dalam mengantisipasi potensi kenaikan risiko kredit dari *downgrade* debitur terutama debitur UMKM karena sudah tidak diperpanjang lagi program restrukturisasi kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 31 Maret 2024 menyusul telah dicabutnya status pandemi COVID-19 oleh Pemerintah pada Juni 2023 serta mempertimbangkan perekonomian Indonesia yang telah pulih dari dampak pandemi, termasuk kondisi sektor riil<sup>2</sup>. Dalam upaya mengantisipasi peningkatan risiko kredit, perbankan secara umum

sudah berjaga-jaga dengan membentuk pencadangan melalui NPL *coverage ratio* pada level yang memadai<sup>3</sup>.

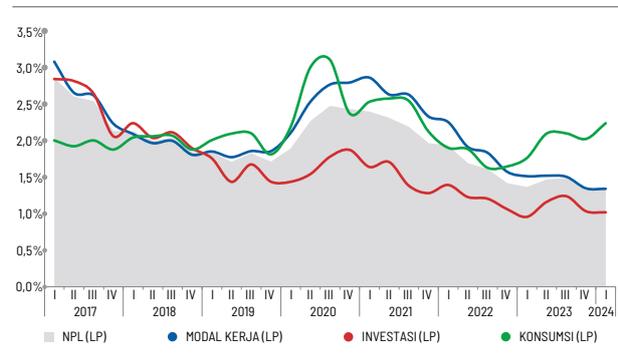
Berdasarkan jenis penggunaan, kenaikan tipis rasio NPL terjadi pada kredit Konsumsi yaitu meningkat dari 2,20% menjadi 2,24%. Sementara itu, rasio NPL pada kredit Modal Kerja dan Investasi relatif justru mengalami penurunan (Grafik 5.17). Kenaikan NPL Kredit Konsumsi sejalan dengan melambatnya pertumbuhan kredit Konsumsi pada triwulan I 2024. Jika dibandingkan dengan kualitas kredit nasional, NPL di DKI Jakarta, baik berdasarkan lokasi proyek ataupun lokasi bank, masih tercatat lebih rendah (Grafik 5.18).

Ke depan, risiko kredit perbankan diperkirakan akan tetap terjaga rendah namun perlu diwaspadai dampak lebih lanjut risiko makroekonomi terhadap penurunan kemampuan membayar korporasi dan rumah tangga. Dari sisi korporasi, risiko makroekonomi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, potensi pelemahan permintaan ekspor, serta konsolidasi fiskal yang diperkirakan dapat menahan laju pemulihan kinerja korporasi sehingga memengaruhi pendapatan dan kemampuan membayar korporasi. Adapun disisi rumah tangga, potensi tertahannya pemulihan korporasi tersebut lebih lanjut dapat memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja sehingga menekan kinerja rumah tangga dan memengaruhi kemampuan membayar rumah tangga.



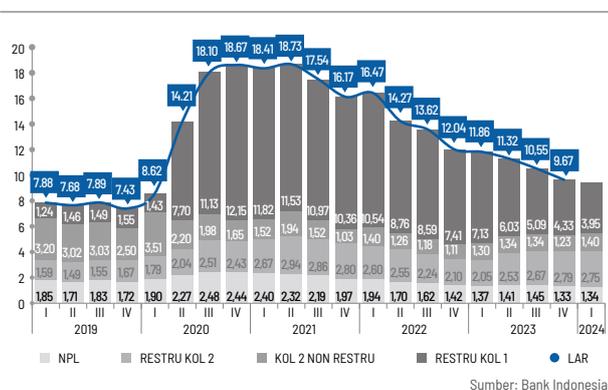
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.15 Perkembangan NPL DKI Jakarta



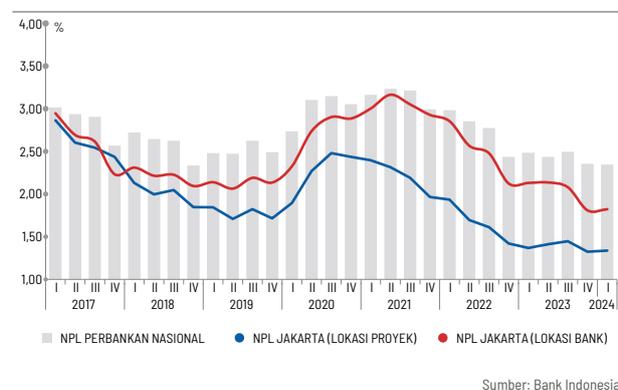
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.17 NPL di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.16 Perkembangan LaR DKI Jakarta



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.18 Perbandingan NPL di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional

2 Siaran Pers OJK No. SP-41/OJK/GKP/III/2024 perihal Pengumuman Berakhirnya Stimulus Restrukturisasi Kredit Perbankan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19

3 Kebijakan Restrukturisasi Kredit Dihentikan, BRI Konsisten Dorong UMKM Naik Kelas ([kontan.co.id](https://kontan.co.id))

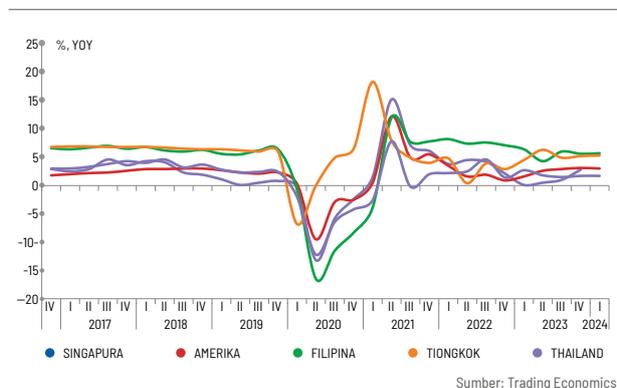
## B. PERKEMBANGAN KINERJA SEKTOR KORPORASI

### Sumber Kerentanan dan Risiko Sektor Korporasi

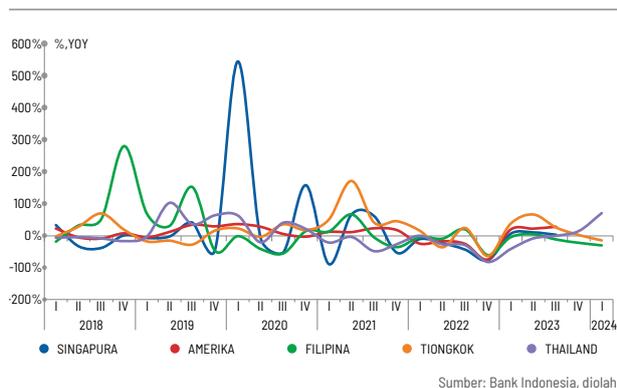
Kinerja korporasi DKI Jakarta dipengaruhi oleh perkembangan sektor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, dinamika ekonomi global memengaruhi kondisi ekonomi beberapa negara mitra dagang, sehingga memengaruhi kinerja korporasi terutama yang berorientasi ekspor. Selain itu, gangguan rantai pasok dan volatilitas harga komoditas global terdampak eskalasi geopolitik yang masih terus berlanjut berpengaruh kepada kinerja korporasi yang mengalami ketergantungan bahan baku dari impor. Keketatan likuiditas di pasar global seiring kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka panjang juga memengaruhi kinerja korporasi terutama untuk korporasi-korporasi yang memiliki utang luar negeri dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap pendanaan dari luar negeri. Sementara itu, aktivitas korporasi yang berorientasi domestik ditentukan oleh perkembangan ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, iklim investasi dan inflasi, serta berbagai kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

#### 1. Risiko perlambatan ekonomi global, ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi serta tensi geopolitik yang meluas

Pada triwulan I 2024, hampir semua negara mitra dagang utama Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 5.19). Namun ke depan, risiko terkait arah penurunan Fed Funds Rate (FFR) dan dinamika



Grafik 5.19 Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama



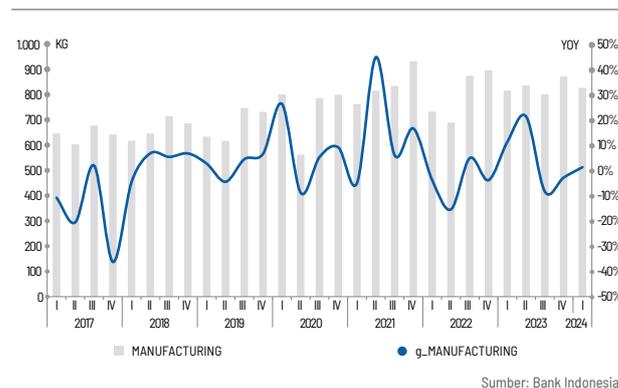
Grafik 5.20 Pertumbuhan Volume Ekspor ke Negara Tujuan Utama DKI Jakarta

ketegangan geopolitik global tetap perlu dicermati karena dapat mendorong kenaikan ketidakpastian pasar keuangan global, menekan mata uang negara berkembang, meningkatkan tekanan inflasi dan menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Prospek ekonomi global yang melambat ini perlu diwaspadai seiring dampaknya terhadap penurunan volume ekspor kepada negara mitra dagang utama. Di sisi lain, pelemahan Rupiah akan mengakibatkan peningkatan harga barang impor yang akan berdampak pula pada penurunan kinerja sektor perdagangan di Indonesia maupun DKI Jakarta (Grafik 5. 20).

Dinamika kondisi makroekonomi menjadi tantangan sendiri bagi stabilitas ekonomi dan keuangan di dalam negeri. Namun, ditengah ketidakpastian perekonomian global, kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan yang membaik. Stabilitas makroekonomi dan prospek positif ekonomi jangka menengah Indonesia mendapatkan pengakuan dari pemangku kepentingan internasional sebagaimana keputusan Fitch pada Maret 2024 mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB (satu tingkat di atas level terendah *investment grade*) dengan *outlook* stabil. Kepercayaan dunia internasional ini didukung oleh kredibilitas kebijakan yang tinggi dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kepercayaan internasional yang terjaga baik ini diharapkan memberikan sentimen positif dan mendukung perbaikan kinerja sektor usaha ke depan.

#### 2. Penurunan Volume Ekspor Manufaktur sebagai industri utama Jakarta

Tekanan volume perdagangan global yang masih terus berlangsung terdampak fragmentasi dunia dari tensi geopolitik global yang belum berakhir secara keseluruhan memengaruhi volume ekspor sektor korporasi manufaktur. Hal tersebut terlihat dari tren perkembangan volume ekspor manufaktur DKI Jakarta yang pada triwulan I 2024 yang masih belum cukup kuat meskipun sudah menunjukkan pertumbuhan yang positif 1,32% (yoy) (Grafik 5.21). Kebijakan hilirisasi industri menjadi faktor kunci kemandirian dan kemajuan ekonomi nasional ke depan guna peningkatan nilai tambah sumber daya, mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor dan dapat memperkuat volume ekspor korporasi di lapangan usaha manufaktur.



Grafik 5.21 Pertumbuhan Volume Ekspor Industri DKI Jakarta

### 3. Kegiatan investasi melanjutkan pertumbuhan yang positif namun perlu dijaga iklim investasi yang tetap kondusif pada periode pemilu dan pilkada 2024

Realisasi investasi di DKI Jakarta pada triwulan I 2024 melanjutkan pertumbuhan yang positif. Kinerja investasi yang positif secara tahunan diantaranya didukung oleh berlangsungnya percepatan pembangunan, tidak hanya proyek pemerintah namun juga proyek swasta. Investasi dari sisi nonbangunan juga tumbuh positif tercermin dari perkembangan investasi kegiatan usaha hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang diperkirakan masih tinggi dan cenderung stabil pada Tw I'24. Pertumbuhan ekonomi positif yang dialami Indonesia, tingkat inflasi yang cukup terkendali serta stabilitas keuangan yang terjaga dengan baik berpotensi mendorong kepercayaan investor asing untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pilihan investasi utama mereka. Namun dibalik potensi yang besar tersebut, perlu diwaspadai faktor-faktor yang dapat memengaruhi iklim investasi kondusif Indonesia yang salah satunya adalah dinamika politik yang meningkat seiring dengan periode politik 2024 yang semakin dekat.

#### Kinerja Korporasi - Umum

Di tengah berbagai tantangan, baik dari sisi eksternal maupun domestik, perekonomian DKI Jakarta masih melanjutkan tren perbaikan. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan positif ekonomi triwulan I 2024 didukung oleh pertumbuhan positif kredit pada semua sektor utama dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor Informasi dan Komunikasi (Grafik 5.22). Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengonfirmasi perkembangan positif kegiatan ekonomi pelaku usaha di DKI Jakarta pada triwulan I 2024 yang ditunjukkan melalui nilai saldo bersih tertimbang (SBT) yang masih berada di zona optimis (Grafik 5.23).

#### Kinerja Korporasi Nonkeuangan

Berdasarkan data terkini (data triwulan IV 2023), kinerja korporasi non-keuangan DKI Jakarta yang terdaftar di bursa (selanjutnya disebut korporasi) menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan ini ditunjukkan oleh meningkatnya penjualan dan profitabilitas korporasi terutama pada sektor-sektor utama

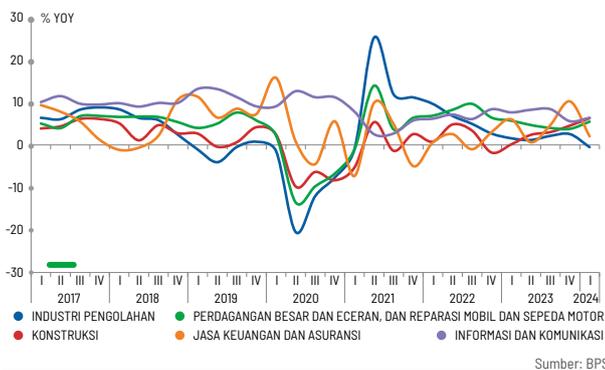
Jakarta seperti Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, dan Industri (Tabel 5.2).

Di tengah perlambatan ekonomi global dan gangguan jalur perdagangan luar negeri akibat tensi geopolitik yang meluas, kinerja penjualan korporasi mampu tumbuh positif setelah mengalami pertumbuhan yang negatif pada triwulan sebelumnya. Kinerja penjualan yang positif tersebut terutama ditopang oleh permintaan dari sisi domestik seiring meningkatnya permintaan masyarakat pada periode akhir tahun, jelang Pemilu 2024 dan bulan Ramadan. Perkembangan tersebut menyebabkan kinerja penjualan korporasi tumbuh sebesar 0,63% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat turun cukup dalam -2,60% (yoy) (Grafik 5.24).

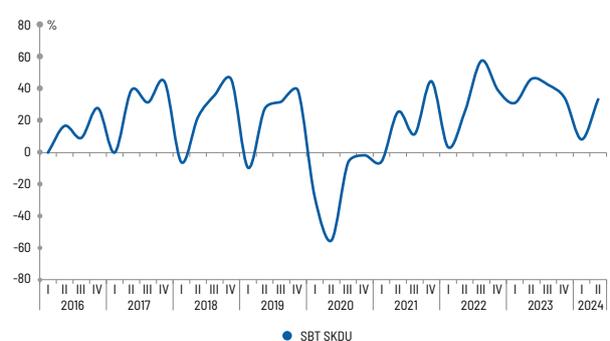
Kinerja penjualan yang meningkat memberikan dampak positif pada profitabilitas tahunan korporasi yang tercermin dari meningkatnya *return on asset* (ROA) korporasi dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu menjadi 4,75%. Pemilik modal dan investor juga mampu menerima tingkat imbal hasil yang memadai sebagaimana tercermin dari nilai *return on equity* (ROE) sebesar 10,06% meskipun sedikit dibawah rasio ROE triwulan sebelumnya sebesar 10,15% (Grafik 5.25).

Di tengah peningkatan kinerja penjualan dan profitabilitas, kinerja likuiditas korporasi juga terjaga baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *current ratio* yang meningkat menjadi 1,26 pada triwulan IV 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,24. Nilai rasio diatas 1 dan cenderung meningkat ini menunjukkan bahwa korporasi non-keuangan DKI Jakarta memiliki kondisi likuiditas yang semakin sehat (Grafik 5.26). Ditengah peningkatan penjualan, rasio *inventory turnover* korporasi masih terjaga baik menjadi 6,13 meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,22. Korporasi juga masih cukup efisien dengan mampu mengoptimalkan penjualan korporasi dari total aset yang dimiliki sehingga rasio *Asset turnover* (ATO) yang relatif stabil pada level 0,65 (Grafik 5.27).

Di tengah kondisi ketidakpastian, sektor korporasi bersikap hati-hati dalam mengelola kinerja usaha. Penawaran kredit yang cukup kuat yang disertai beragam kebijakan *pro growth* Bank Indonesia



Grafik 5.22 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Unggulan DKI Jakarta



Grafik 5.23 Perkembangan Realisasi SKDU sektor Unggulan DKI Jakarta

**Tabel 5.2** Tabel Rasio Keuangan Korporasi Nonkeuangan

NO	SEKTOR	SALES GROWTH		ROA		ROE		CURRENT RATIO	
		TW III'23	TW IV'23	TW III'23	TW IV'23	TW III'23	TW IV'23	TW III'23	TW IV'23
1	Pertanian	-20,30%	-2,43%	4,76%	1,77%	9,66%	3,45%	2,18	1,81
2	Pertambangan	-30,26%	-22,88%	15,08%	12,97%	24,57%	21,17%	2,40	1,81
3	Industri	-0,21%	0,59%	6,55%	6,65%	12,70%	12,60%	1,40	1,48
4	Listrik, Gas, dan Air	3,50%	6,84%	3,33%	4,17%	6,84%	8,26%	1,18	1,30
5	Konstruksi	3,03%	13,31%	0,21%	0,08%	0,55%	0,21%	1,30	1,22
6	Perdagangan	1,62%	3,24%	8,82%	8,41%	19,01%	17,51%	1,23	1,33
7	Pengangkutan	5,84%	3,41%	4,40%	5,02%	14,52%	15,51%	0,55	0,57
8	Jasa dunia Usaha	-11,59%	31,59%	-9,10%	-6,61%	-12,98%	-9,36%	1,21	1,23
9	Jasa Sosial	-7,85%	-16,89%	1,22%	1,36%	1,79%	1,91%	1,56	1,91
<b>Agregat</b>		<b>-2,60%</b>	<b>0,63%</b>	<b>4,69%</b>	<b>4,75%</b>	<b>10,15%</b>	<b>10,06%</b>	<b>1,24</b>	<b>1,26</b>

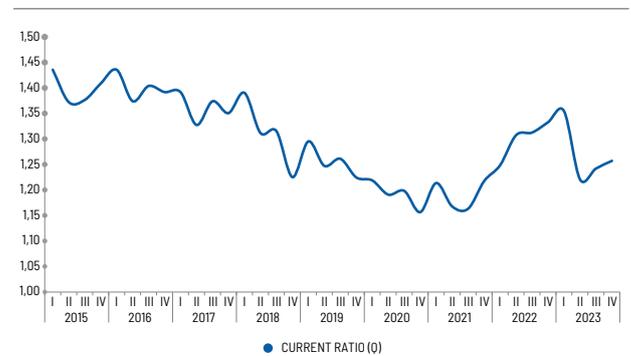
NO	SEKTOR	DER		ICR		ROE		CURRENT RATIO	
		TW III'23	TW IV'23	TW III'23	TW IV'23	TW III'23	TW IV'23	TW III'23	TW IV'23
1	Pertanian	0,69	0,70	3,92	1,19	1,36	1,34	7,69	7,44
2	Pertambangan	0,31	0,27	10,31	3,20	0,80	0,71	22,74	23,71
3	Industri	0,46	0,47	3,67	2,28	0,88	0,88	5,99	5,79
4	Listrik, Gas, dan Air	0,35	0,46	1,44	6,74	0,52	0,53	58,44	57,26
5	Konstruksi	0,96	0,96	1,71	1,33	0,22	0,23	1,45	1,52
6	Perdagangan	0,44	0,44	1,96	2,82	1,42	1,41	7,86	7,70
7	Pengangkutan	1,41	1,30	2,46	2,50	0,44	0,43	78,21	76,29
8	Jasa dunia Usaha	0,16	0,16	1,67	2,17	0,36	0,40	7,94	8,01
9	Jasa Sosial	0,28	0,25	0,92	1,30	0,36	0,34	5,23	4,98
<b>Agregat</b>		<b>0,63</b>	<b>0,62</b>	<b>2,13</b>	<b>2,12</b>	<b>0,66</b>	<b>0,65</b>	<b>6,22</b>	<b>6,13</b>

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah



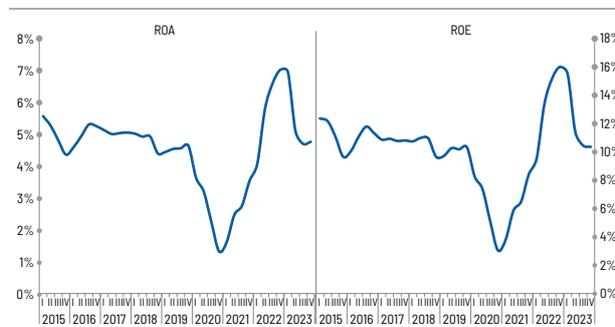
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 5.24 Penjualan Korporasi DKI Jakarta



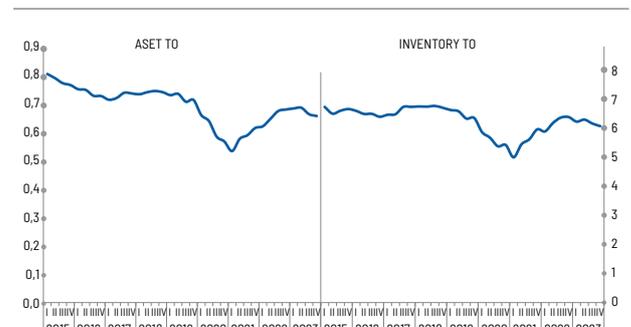
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 5.26 Likuiditas Korporasi DKI Jakarta



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 5.25 Profitabilitas Korporasi DKI Jakarta



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 5.27 Produktivitas Korporasi DKI Jakarta

mendorong sektor korporasi mulai menarik kredit sebagaimana tercermin dari rasio *leverage* sebesar 0,62 pada triwulan IV 2023. Sejalan dengan kondisi likuiditas yang masih memadai serta didukung berbagai upaya efisiensi yang dilakukan korporasi, berdampak kepada terjaganya tingkat kelayakan kredit korporasi (*creditworthiness*) yang tercermin dari rasio median *Interest Coverage Ratio* (ICR) korporasi secara agregat mencapai 2,12 kali pada triwulan IV 2023 (Grafik 5.28).

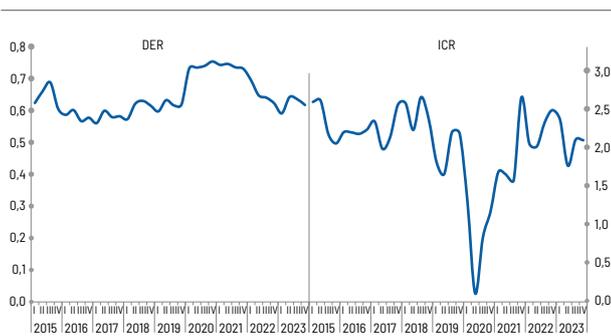
### Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi Perkreditan

Sejalan dengan perkembangan kredit bank umum, kredit korporasi di DKI Jakarta pada triwulan I 2024 mengalami pertumbuhan yang meningkat. Pertumbuhan kredit korporasi terutama didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja dan investasi. Pada triwulan I 2024, kredit modal kerja korporasi tumbuh sebesar 22,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 17,05% (yoy). Sejalan dengan itu, kredit Investasi korporasi juga meningkat menjadi 19,93% (yoy)

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 13,07% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, kredit korporasi pada triwulan I 2024 tercatat 21,13% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai sebesar 15,48% (yoy) (Grafik 5.29).

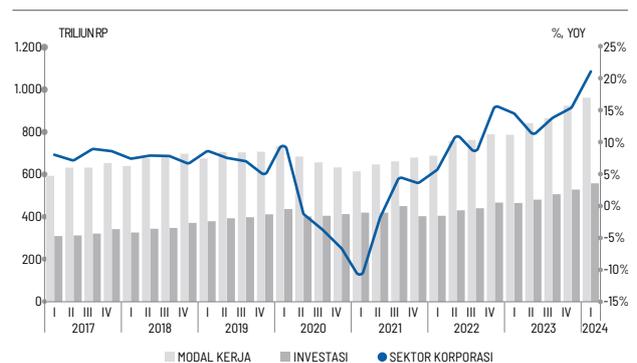
Secara sektoral, mayoritas kredit korporasi pada sektor-sektor utama Jakarta juga menunjukkan pertumbuhan. Pertumbuhan kredit korporasi terutama disumbang oleh kredit korporasi pada sektor perantara keuangan, perdagangan dan Transportasi Pergudangan Komunikasi sejalan dengan tetap kuatnya kinerja usaha pada sektor-sektor tersebut (Tabel 5.3 dan Grafik 5.30).

Dari sisi kualitas kredit, *Non-Performing Loan* (NPL) kredit korporasi terjaga di level rendah yaitu sebesar 1,34%, stabil dibandingkan dengan raso NPL bulan sebelumnya (Grafik 5.31). Kondisi ini dipengaruhi masih tetap baiknya kemampuan membayar korporasi sejalan dengan terjaganya kondisi likuiditas korporasi.



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 5.28 Kemampuan Membayar Korporasi DKI Jakarta



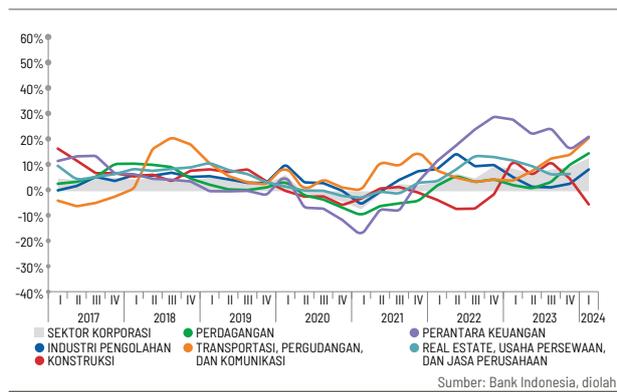
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.29 Pertumbuhan kredit Korporasi

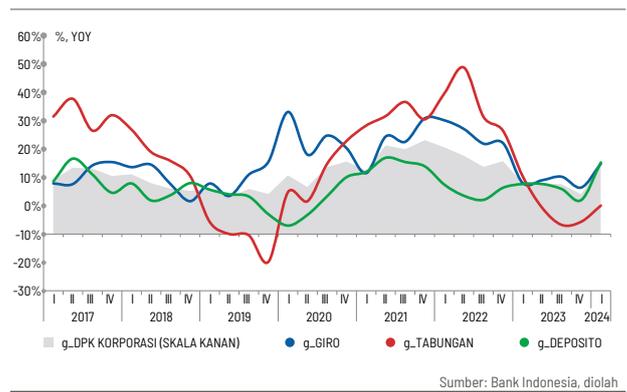
Tabel 5.3 Kredit Korporasi menurut sektor ekonomi

NO	SEKTOR EKONOMI	MAR-23			DEC-23			MAR-24		
		BAKI DEBET (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (% yoy)	BAKI DEBET (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (% yoy)	BAKI DEBET (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (% yoy)
1	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	196,28	15,64%	3,86%	226,69	15,60%	16,82%	243,83	16,04%	24,22%
2	INDUSTRI PENGOLAHAN	267,10	21,28%	9,02%	295,97	20,37%	4,75%	304,20	20,01%	13,89%
3	PERANTARA KEUANGAN	218,17	17,38%	45,75%	263,07	18,11%	26,27%	294,12	19,35%	34,81%
4	REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	175,51	13,99%	19,63%	195,84	13,48%	10,97%	195,47	12,86%	11,37%
5	TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	138,91	11,07%	6,70%	180,26	12,41%	23,12%	186,23	12,25%	34,06%
6	KONSTRUKSI	89,13	7,10%	19,75%	84,46	5,81%	8,05%	81,63	5,37%	-8,42%
7	PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	53,72	4,28%	-3,69%	54,05	3,72%	0,25%	55,50	3,65%	3,30%
8	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	29,67	2,36%	22,91%	52,68	3,63%	50,27%	67,22	4,42%	126,57%
9	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	25,35	2,02%	-2,98%	28,47	1,96%	9,90%	26,51	1,74%	4,54%
10	LISTRİK, GAS DAN AIR	26,03	2,07%	-1,07%	32,89	2,26%	18,42%	29,64	1,95%	13,89%
11	LAIN-LAIN	35,08	2,79%	23,40%	38,53	2,65%	30,39%	35,79	2,35%	2,02%
<b>Total</b>		<b>1254,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,53%</b>	<b>1452,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,48%</b>	<b>1520,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,13%</b>

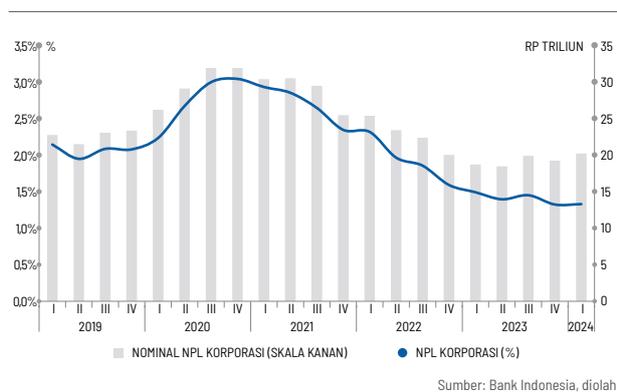
Sumber: Bank Indonesia



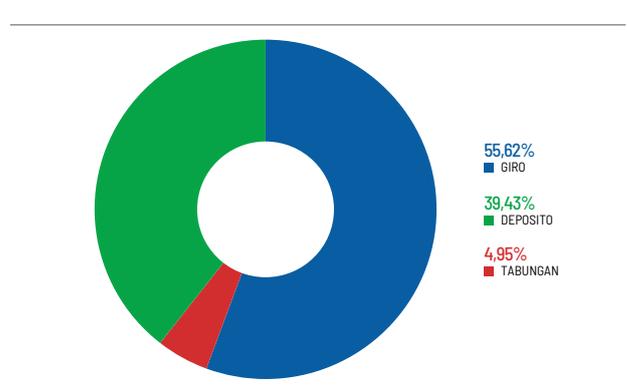
Grafik 5.30 Penyaluran Kredit pada Sektor Utama Korporasi



Grafik 5.33 Pertumbuhan Komponen DPK Korporasi



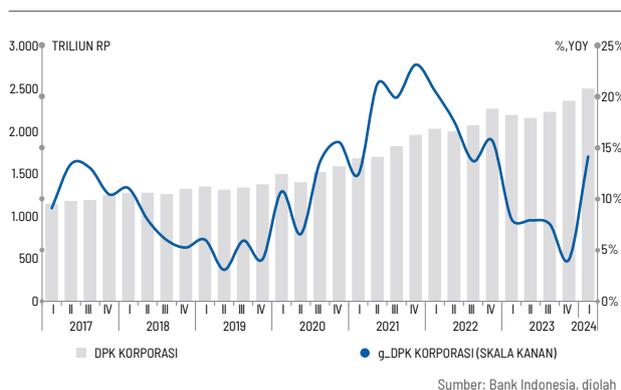
Grafik 5.31 NPL pada Sektor Korporasi



Grafik 5.34 Komposisi DPK Korporasi

### Dana Pihak Ketiga

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) korporasi tumbuh meningkat sejalan meningkatnya pertumbuhan kredit korporasi. Pada triwulan I 2024, DPK Korporasi tumbuh sebesar 14,18% (yoy) meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,09% (yoy) (Grafik 5.32). Peningkatan tersebut terjadi pada semua jenis DPK terutama disumbang oleh peningkatan Giro dan Deposito Korporasi, yaitu masing-masing tumbuh dari 6,43% (yoy) dan 2,00% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi 14,82% (yoy) dan 15,31% (yoy) pada triwulan I 2024 (Grafik 5.33). Berdasarkan komposisinya, dana korporasi di perbankan mayoritas dalam bentuk Giro (55,62%), diikuti oleh Deposito dan Tabungan yang masing-masing sebesar 39,43% dan 4,95% (Grafik 5.34).



Grafik 5.32 Perkembangan DPK Korporasi

### Eksposur Pasar Modal pada Sektor Korporasi

Pembiayaan korporasi dapat bersumber dari dana internal dan eksternal. Selama periode pandemi sektor korporasi cenderung mengandalkan pembiayaan dari dana internalnya. Namun, paska pandemi dan aktivitas perekonomian kembali normal, pembiayaan korporasi dari perbankan dan sumber-sumber eksternal lainnya seperti pasar modal kembali meningkat. Sumber dana eksternal dari pasar modal dapat berupa penerbitan obligasi, *Initial Public Offering* (IPO) dan *Right Issue*. Kinerja perekonomian domestik terjaga solid di tengah dinamika perekonomian global mampu mendorong tetap baiknya kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Berdasarkan siaran pers OJK No. SP 42/OJK/GKPB/IV/2024 IHSG tanggal 2 April 2024, pasar saham domestik sampai dengan 28 Maret 2024 melanjutkan tren penguatan. IHSG menguat 0,22 persen (ytd) ke level 7.288,81 dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp11.692 triliun atau naik 0,15 persen ytd, serta membukukan *net buy* sebesar Rp26,28 triliun (ytd) (Grafik 5.35).

Ke depan, meskipun suku bunga bank sentral di negara-negara maju diperkirakan masih bertahan di level tinggi, kinerja pasar saham dan obligasi Indonesia berpotensi tetap menarik sebagai alternatif sumber pendanaan. Potensi kenaikan pasar saham tersebut ditopang beberapa faktor. Pertama, sentimen positif terhadap fundamental makroekonomi yang solid, inflasi yang terkendali dan prakiraan



Grafik 5.35 Indeks Harga Saham Gabungan BEI

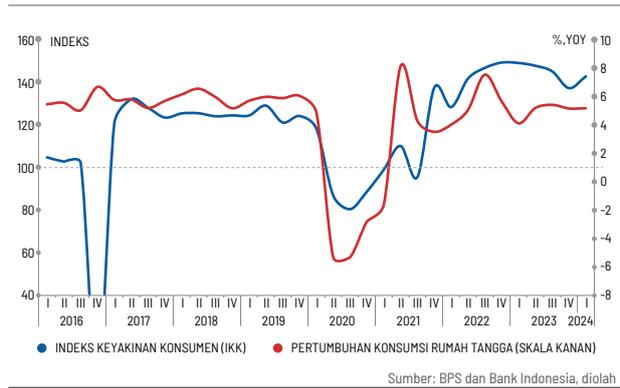
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat. Kedua, berlanjutnya reformasi sektor keuangan Indonesia seiring dengan disahkannya Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang diperkirakan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan perlindungan investor serta konsumen, mendorong efisiensi di sektor keuangan, serta semakin bervariasi instrumen keuangan. Sementara itu, perlu tetap diwaspadai risiko dari faktor geopolitik dan potensi perlambatan perdagangan yang disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Sentimen terkait citra Indonesia sebagai negara pengekspor bahan mentah masih melekat di mata investor sehingga volatilitas harga komoditas dapat menjadi risiko jangka pendek yang membayangi pergerakan bursa saham Indonesia.

### C. PERKEMBANGAN KINERJA SEKTOR RUMAH TANGGA

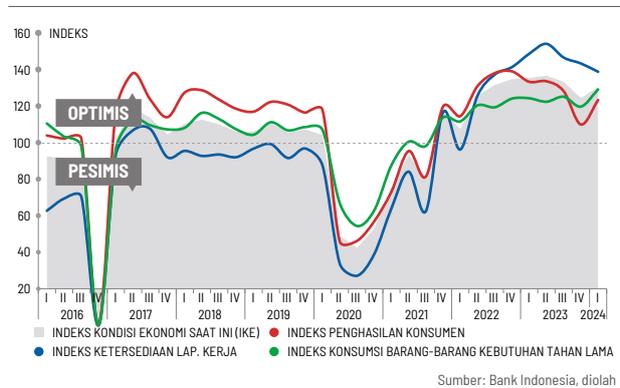
#### Sumber Kerentanan dan Risiko Sektor Rumah Tangga

Sejalan dengan perkembangan kinerja korporasi, kinerja rumah tangga pada triwulan I 2024 juga masih tumbuh solid sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat terutama dari sisi konsumsi rumah tangga. Kondisi tersebut juga tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang pada triwulan I 2024 meningkat menjadi 143,3, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 137,7 (Grafik 5.36). Sejalan dengan itu, Indeks Penghasilan Konsumen dan Indeks Konsumsi Barang-barang Kebutuhan Tahan Lama juga menunjukkan peningkatan masing-masing dari 110,2 dan 120,0 menjadi 123,6 dan 129,4. Sementara itu, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja sedikit menurun namun masih tetap terjaga tinggi di zona optimis (Grafik 5.37).

Tingkat penghasilan konsumen yang relatif terbatas khususnya pada masyarakat golongan menengah bawah berpotensi memengaruhi pola dan tingkat konsumsi serta kemampuan membayar sektor Rumah Tangga. Peningkatan potensi *spillover* risiko Rumah Tangga terhadap perbankan tercermin dari meningkatnya rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) Rumah Tangga pada triwulan I 2024 meskipun masih cukup jauh di bawah nilai ambang batas 5%. Ke depan, perlu



Grafik 5.36 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen dan Konsumsi RT



Grafik 5.37 Perkembangan Indeks Ketersediaan Lap. Kerja, Penghasilan Konsumen, dan Konsumsi Barang Tahan Lama

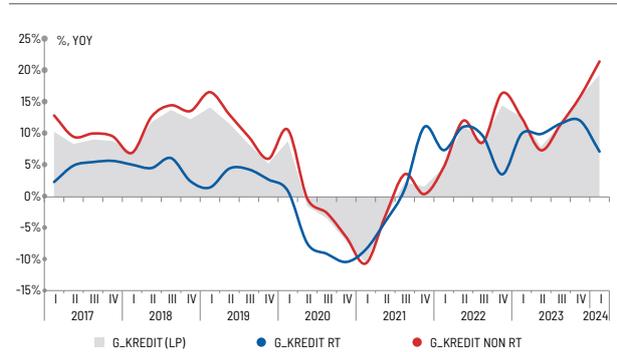
diwaspadai beberapa faktor risiko yang berpotensi semakin menekan daya beli dan mengurangi kemampuan membayar sektor Rumah Tangga. Pertama, kenaikan inflasi yang berpotensi meningkatkan alokasi pendapatan debitur untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari, seperti biaya makanan dan transportasi, sehingga mengurangi alokasi pendapatannya untuk pembayaran cicilan. Kedua, berlanjutnya tren kenaikan suku bunga sehingga meningkatkan beban bunga debitur terutama debitur dengan kredit suku bunga mengambang. Ketiga, potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang dapat memengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga.

#### Eksposur Perbankan pada Sektor Rumah Tangga Perkreditan

Pada triwulan I 2024, kredit sektor rumah tangga tumbuh positif sebesar 7,20% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 12,10% (yoy) (Grafik 5.38). Perlambatan tersebut disebabkan oleh menurunnya penyaluran kredit modal kerja dan melambatnya kredit investasi rumah tangga. Sementara itu kredit konsumsi rumah tangga masih terus meningkat dengan pertumbuhan sebesar 11,33% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 8,19% (yoy) (Grafik 5.39). Dengan perkembangan tersebut pangsa kredit Rumah Tangga terhadap total kredit, pada triwulan I 2024 sedikit menurun menjadi 15,72% (Grafik 5.40).

Tetap terjaganya pertumbuhan positif kredit rumah tangga di tengah penurunan kredit modal kerja dan perlambatan kredit konsumsi rumah tangga dikarenakan sebagian besar kredit rumah tangga digunakan untuk keperluan konsumsi (69,81%). Sehingga kenaikan kredit konsumsi rumah tangga mampu menahan perlambatan kredit rumah tangga (Grafik 5.41).

Dari sisi kualitas kredit, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) Rumah Tangga mengalami sedikit peningkatan namun masih cukup jauh dibawah threshold 5%. Pada triwulan I 2024, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) rumah tangga berada pada level 2,79%, sedikit diatas triwulan sebelumnya yang sebesar 2,66%.

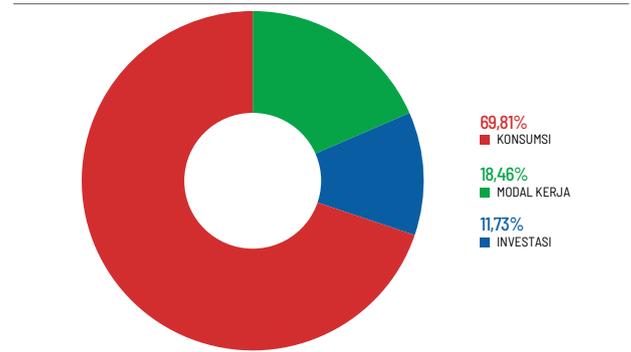


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.38 Perkembangan Kredit Rumah Tangga

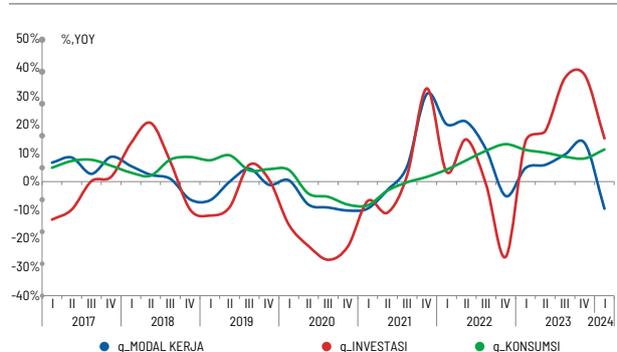
Kenaikan tipis NPL rumah tangga tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan rasio NPL pada kredit Modal Kerja rumah tangga sejalan dengan penurunan nominal kreditnya (Grafik 5.42).

Berdasarkan tujuan penyalurannya, kenaikan kredit konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2024 terutama didorong oleh kenaikan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan kredit Multiguna. Kredit Kendaraan Bermotor juga mengalami peningkatan namun pertumbuhannya sedikit melambat setelah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada triwulan sebelumnya di akhir tahun 2023 (Grafik 5.43).



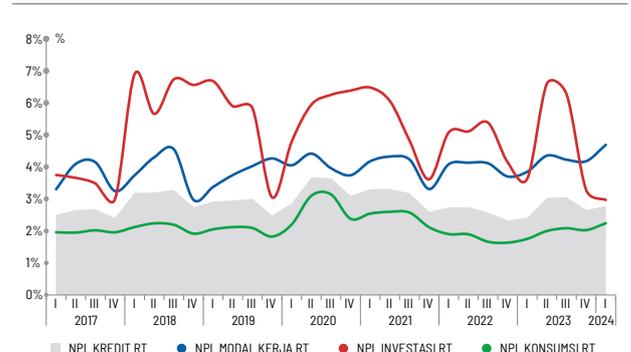
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.41 Komposisi Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga



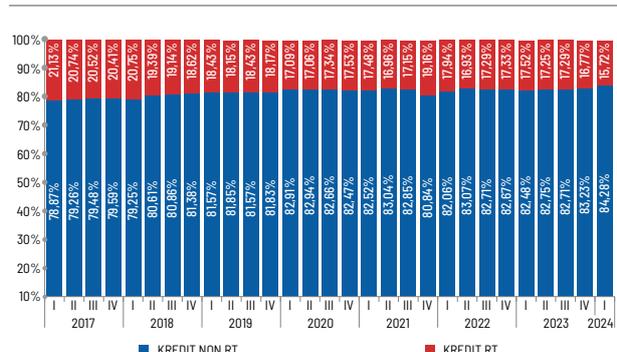
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.39 Perkembangan Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga



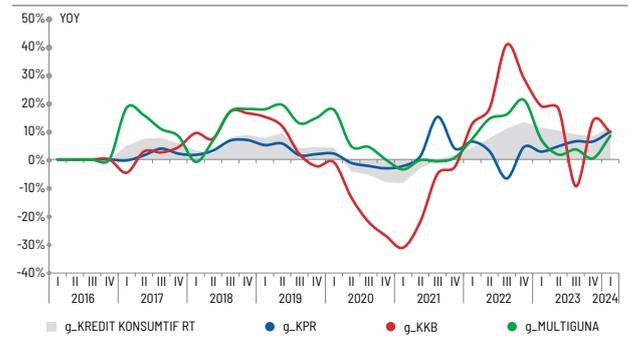
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.42 NPL Kredit Rumah Tangga



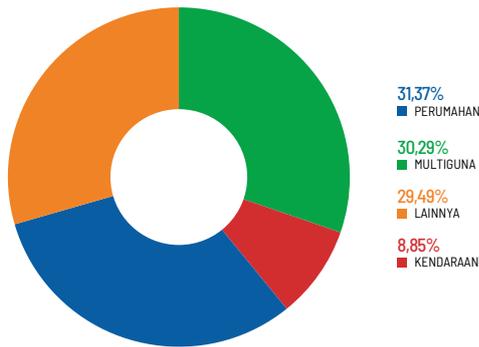
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.40 Komposisi Kredit RT dan Non RT



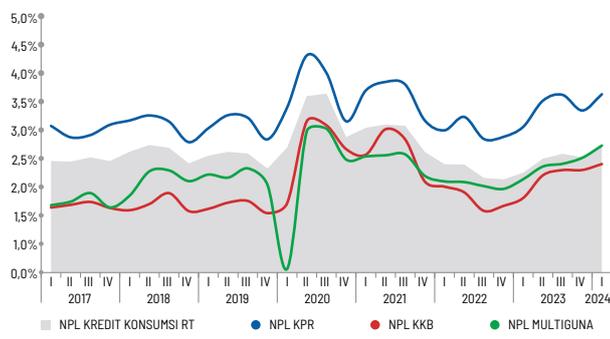
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.43 Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.44 Komposisi Kredit Konsumsi Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia, diolah

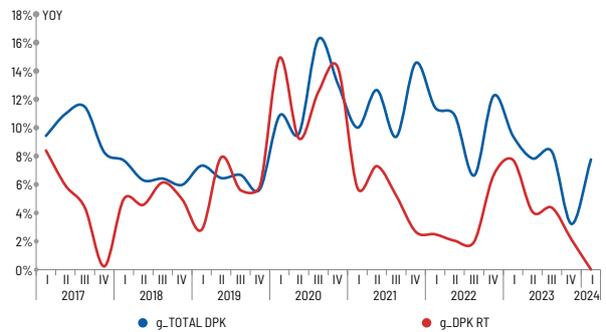
Grafik 5.45 NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga

Dibandingkan dengan kredit Multiguna dan KKB, pertumbuhan kredit KPR rumah tangga tercatat paling tinggi sebesar 9,85% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,36% (yoy). Peningkatan kredit KPR terjadi sejalan dengan keputusan pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggu Pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar hingga akhir tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada 13 Februari 2024. Berdasarkan perkembangan tersebut, pangsa kredit KPR dan Multiguna mayoritas terhadap total kredit rumah tangga masing-masing dengan pangsa sebesar 31,37% dan 30,29% (Grafik 5.44). Dari sisi risiko kredit, peningkatan penyaluran kredit konsumsi rumah tangga diikuti dengan kenaikan tipis rasio NPL-nya yaitu dari 2,03% pada triwulan IV 2023 menjadi 2,25% pada triwulan I 2024. Kenaikan rasio NPL tersebut terjadi pada semua tujuan penyaluran dengan kenaikan tertinggi pada Kredit KPR diikuti oleh kredit Multiguna dan KKB (Grafik 5.45). Meskipun mengalami peningkatan, namun rasio NPL kredit konsumsi rumah tangga tersebut masih cukup jauh di bawah *threshold* 5%.

### Dana Pihak Ketiga (DPK)

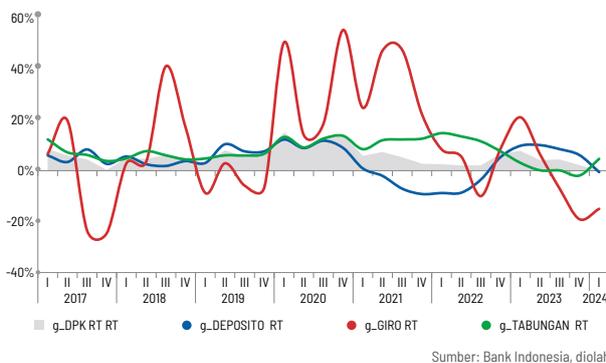
DPK rumah tangga di DKI Jakarta masih tetap tumbuh positif namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2024, DPK rumah tangga tumbuh sebesar 0,03% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK pada triwulan sebelumnya 2,14% (yoy) (Grafik 5.46). Berdasarkan jenisnya, pertumbuhan positif DPK rumah tangga ditopang oleh kenaikan tabungan rumah tangga di tengah penurunan Giro dan Deposito rumah tangga. Pada triwulan I 2024, Tabungan rumah tangga meningkat menjadi 4,58% (yoy) setelah mengalami pertumbuhan negatif pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, Giro dan Deposito rumah tangga masing-masing mengalami penurunan dengan pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -14,99% (yoy) dan -0,63% (yoy) (Grafik 5.47). Perlambatan DPK rumah tangga disinyalir dipengaruhi oleh kecenderungan rumah tangga mengalihkan sebagian dana simpanannya kepada instrumen keuangan yang memberikan imbal hasil lebih tinggi untuk memaksimalkan keuntungan. Selain itu, perlambatan DPK juga dipengaruhi oleh meningkatnya pola konsumsi Rumah tangga pada periode Ramadan jelang HBKN Idul Fitri.

Jika dilihat dari komposisinya, porsi DPK rumah tangga mencapai 20,26% dari total DPK di DKI Jakarta (Grafik 5.48). Sementara itu, pangsa DPK Rumah Tangga terhadap total DPK didominasi oleh Tabungan 13,50%, diikuti oleh Deposito dan Giro masing-masing sebesar 12,92% dan 2,84% (Grafik 5.49).



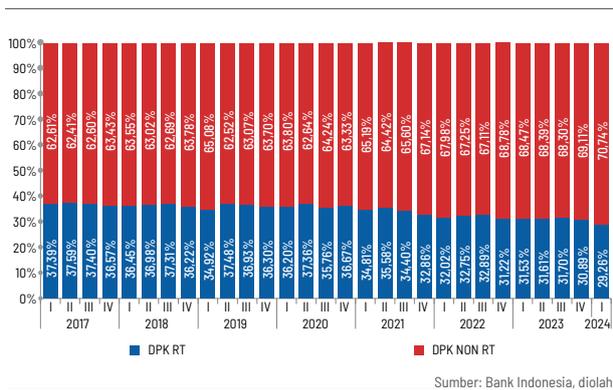
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.46 Pertumbuhan DPK Rumah Tangga

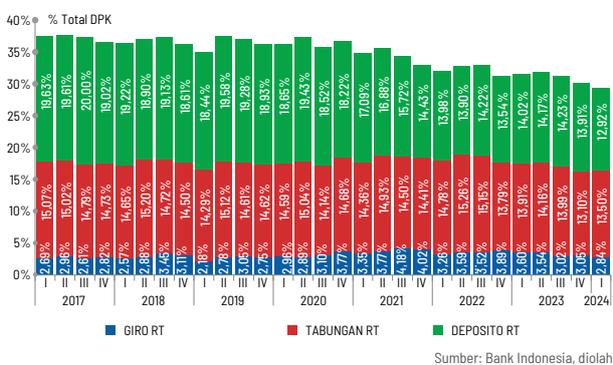


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.47 Pertumbuhan DPK per jenis Simpanan



Grafik 5.48 Komposisi DPK



Grafik 5.49 Komposisi DPK Rumah Tangga

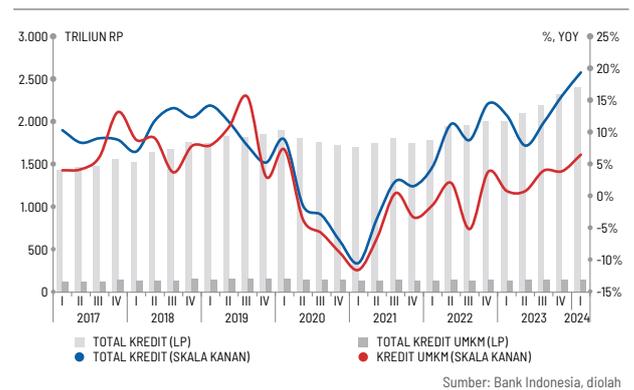
## D. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

### Akses Keuangan kepada UMKM

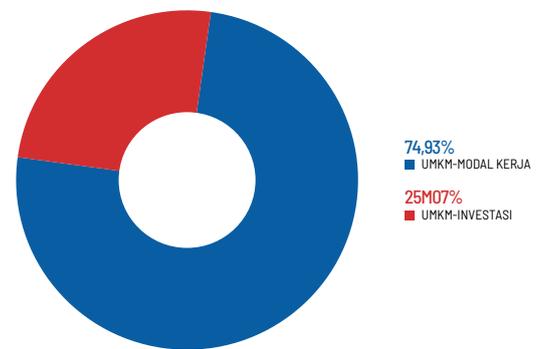
Penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setelah pandemi COVID-19 terus meningkat dan melanjutkan pertumbuhan yang positif. Pada triwulan I 2024, kredit UMKM tumbuh meningkat menjadi 6,53% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya 3,96% (yoy) (Grafik 5.50). Dilihat dari jenis penggunaannya, kredit UMKM terutama diberikan untuk kredit modal kerja dengan pangsa sebesar 74,93% dan diikuti kredit investasi sebesar 25,07% (Grafik 5.51).

Berdasarkan skala usahanya, kenaikan pertumbuhan kredit UMKM ditopang oleh peningkatan signifikan kredit UMKM skala menengah tetap kuatnya penyaluran kredit kepada UMKM skala mikro dan kecil. Pada triwulan I 2024 kredit UMKM skala menengah mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 7,47% (yoy) setelah sejak triwulan II 2020 selalu mencatatkan pertumbuhan yang negatif (Grafik 5.52).

Meskipun mengalami peningkatan kredit, namun secara keseluruhan, pangsa kredit UMKM di Jakarta masih cukup rendah yaitu sekitar 7,3% dari total kredit perbankan. Kondisi ini antara lain dipengaruhi sektor usaha di Jakarta lebih didominasi oleh sektor korporasi. Karakter Jakarta sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis menyebabkan



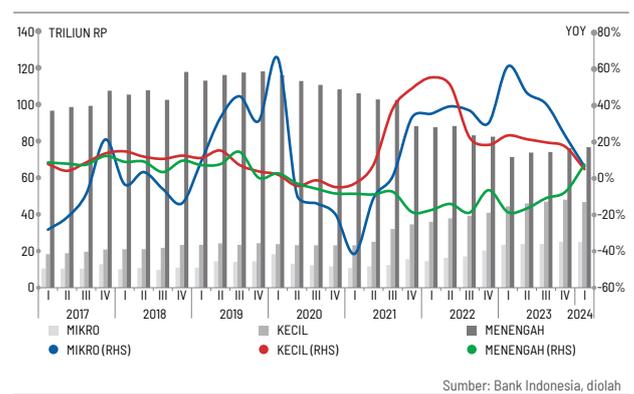
Grafik 5.50 Pertumbuhan Kredit UMKM di Jakarta



Grafik 5.51 Porsi Kredit UMKM di Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan

harga lahan dan upah tenaga kerja di Jakarta menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah disekitarnya. Berbagai faktor tersebut menyebabkan pertumbuhan kredit UMKM berdasarkan lokasi proyek di Jakarta cenderung terbatas. Secara umum, pelaku UMKM cenderung hanya memanfaatkan wilayah DKI Jakarta sebagai tempat penjualan/transaksi. Sedangkan untuk pengolahan maupun lokasi usaha lebih banyak berada di daerah penyangga ibukota, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok.

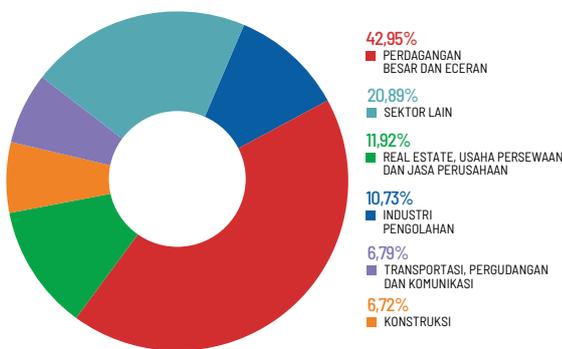
Berdasarkan lapangan usaha, penyaluran kredit UMKM lebih diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi utama di Jakarta. Sektor-sektor ekonomi yang banyak menerima pembiayaan UMKM yaitu sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa 42,95%, diikuti



Grafik 5.52 UMKM Berdasarkan Skala Usaha

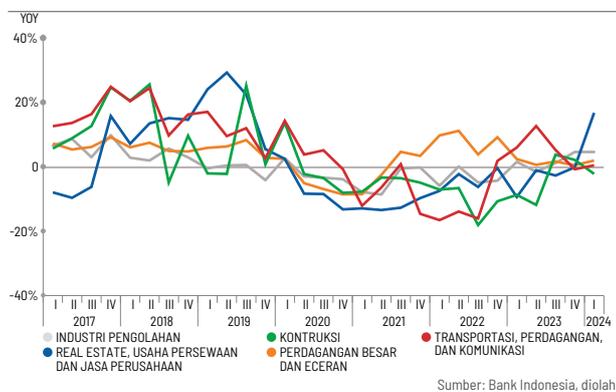
sektor lain (20,89%), sektor real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan (11,92%), industri pengolahan (10,73%), sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (6,79%) serta sektor konstruksi (6,72%) (Grafik 5.53). Dilihat dari pertumbuhannya, peningkatan kredit UMKM terjadi pada semua sektor utama kecuali Konstruksi. Dengan mempertimbangkan pangsa dan pertumbuhannya, kontributor utama pertumbuhan kredit UMKM adalah kredit kepada sektor Real estate dan Perdagangan (Grafik 5.54).

Perkembangan yang tetap positif ini mengindikasikan perbankan semakin bergairah untuk menyalurkan kredit ke sektor UMKM. Namun demikian tetap perlu diperhatikan kehati-hatian terhadap tingkat kemampuan membayar UMKM. Hal ini dikarenakan rasio kredit



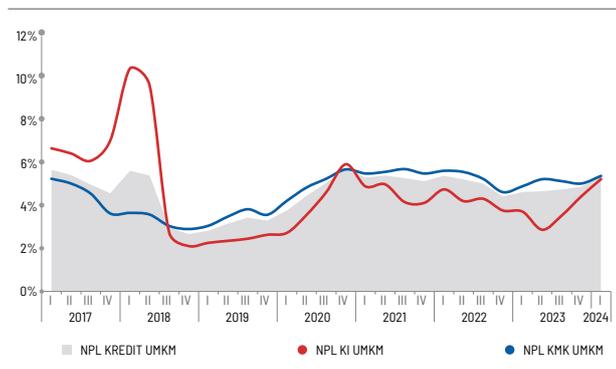
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.53 Porsi Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi



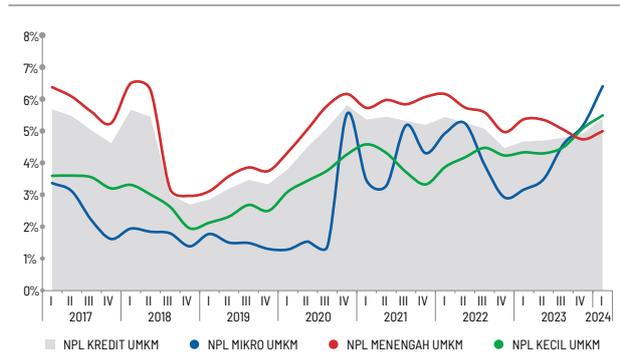
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.54 Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Utama



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.55 NPL Kredit UMKM



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.56 NPL Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha

bermasalah (NPL) UMKM cenderung meningkat seiring peningkatan nominal kreditnya, baik pada kredit modal kerja ataupun kredit investasi UMKM (Grafik 5.55). Sedangkan berdasarkan kelompok debiturnya, kenaikan risiko kredit UMKM disumbang oleh Kredit UMKM golongan Mikro dan Kecil (Grafik 5.56).

## Pengembangan UMKM

Pelaksanaan program pengembangan UMKM di Bank Indonesia dilakukan berdasarkan 3 pilar kebijakan yakni korporatisasi, pengembangan kapasitas dan akses pembiayaan. Program pengembangan UMKM oleh KPw Provinsi DKI Jakarta pada triwulan I 2024 (Januari – Maret 2024) terdiri dari beberapa kegiatan antara lain penyelenggaraan program Jagoan Wirausaha Jakarta (Jawara) dan promosi perdagangan luar negeri. Sementara, untuk program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah telah diselenggarakan sosialisasi sertifikasi halal di Kawasan PIK Pantjoran.

### 1. Jagoan Wirausaha Jakarta (Jawara)

Dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM di Jakarta guna memperkuat perekonomian di tingkat daerah serta tingginya minat UMKM untuk menjadi bagian dari UMKM Binaan KPwBI Provinsi DKI Jakarta, maka diperlukan rangkaian proses rekrutmen UMKM *Champion* yang transparan, holistik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, KPwBI DKI Jakarta melakukan rangkaian proses rekrutmen UMKM melalui program Jagoan Wirausaha Jakarta (Jawara) sebagai wadah untuk menyeleksi calon UMKM binaan.

Keunggulan rekrutmen UMKM champion melalui program Jawara adalah seluruh peserta akan mendapatkan materi pengembangan UMKM secara sistematis dan terjadwal mulai dari sisi produksi hingga ke perluasan pemasaran di level ekspor. Peserta juga bisa berkonsultasi dengan *coach* profesional sepanjang periode Jawara dan memiliki kesempatan untuk berbagi dan saling memberikan masukan antar peserta terkait pengembangan bisnis masing-masing.

Proses rekrutmen dalam program Jawara berlangsung selama satu tahun yang terdiri dari beberapa rangkaian program yang mencakup kegiatan *assessment*, *bootcamp*, *company visit* dan berbagai pelatihan lainnya terkait *mindset entrepreneurship*.

*business model canvas*, UMKM digital, UMKM ekspor. Apabila UMKM berhasil mengikuti seluruh rangkaian secara intensif dan berhasil menyelesaikan tugas serta *challenge* (antara lain kenaikan omset dan lain – lain) dari para pelatih/*coach* antara lain, maka pada akhir tahun UMKM tersebut akan mengikuti *capacity building* dan *graduation* sebagai tanda berhasilnya mengikuti program Jawa. Pada saat *launching* program Jawa di awal tahun 2024, total pendaftar program Jawa mencapai 450 (empat ratus lima puluh) UMKM yang dilanjutkan dengan 2 (dua) rangkaian seleksi yaitu seleksi administrasi dan *assessment* (*test money DNA* untuk melihat karakter seseorang dalam memandang, mengelola dan mencari uang, profil test psikometri guna untuk menggambarkan perilaku seseorang, *rise metric* guna melihat cara mencari solusi dari sebuah tantangan dan kemampuan dalam berinteraksi, dan wawancara). Setelah melewati proses seleksi tersebut, terdapat 40 (empat puluh) UMKM yang berhasil lulus seleksi, adapun UMKM tersebut merupakan UMKM dengan kategori *fashion, craft, food and beverages* dan ekonomi kreatif lainnya. Keempat puluh UMKM tersebut hingga saat ini telah mengikuti program *bootcamp* yang diselenggarakan pada 27 Februari – 1 Maret 2024 di Bogor serta didampingi oleh 3 (tiga) orang *coach* yang tersertifikasi. Adapun salah satu materi pada *bootcamp* tersebut yaitu *entrepreneur mindset, mindset* keuangan, mental blok, *leadership, hipnoterapy, games* dan *personal coaching*. Adapun *output* dari *bootcamp* tersebut para peserta dapat membangun *growth mindset* terkait wirausaha serta penguatan *bonding* dan kolaborasi antar sesama peserta sehingga bisa menjadi satu komunitas pengembangan UMKM yang solid.

## 2. Promosi Perdagangan Luar Negeri

Untuk meningkatkan perluasan akses pasar UMKM, promosi produk-produk UMKM di luar negeri terus dilakukan. Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen bersama KPwBI Provinsi DKI Jakarta memberikan fasilitasi promosi perdagangan kepada UMKM binaan KPwBI Provinsi DKI Jakarta. Pada triwulan I 2024, terdapat beberapa UMKM binaan KPwBI Provinsi DKI Jakarta yang produknya lulus kurasi untuk mengikuti kegiatan promosi perdagangan di luar negeri, seperti dalam kegiatan Foodex dan In-Store Promotion Takashimaya Nihonbashi di Jepang. Adapun UMKM orientasi ekspor yang telah berhasil lulus kurasi ke Foodex di Jepang adalah Kultiva dengan produk berupa keripik olahan. Foodex Japan merupakan *event* makanan dan minuman yang diselenggarakan setiap tahunnya. Selain itu, UMKM binaan KPwBI Provinsi DKI Jakarta yaitu Indhe dan Sancraft dengan produk di bidang tas/kerajinan juga berhasil mengikuti kegiatan promosi perdagangan pada In-Store Promotion Takashimaya Nihonbashi di Jepang. Ke depan, sinergi dalam fasilitasi UMKM untuk mengikuti promosi perdagangan dalam dan luar negeri akan terus dilakukan guna memperluas akses pasar UMKM.

## 3. Sosialisasi Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal

Untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan sertifikasi halal pelaku usaha, KPwBI Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

pada 22 Februari 2024 telah menyelenggarakan sosialisasi/edukasi terkait sertifikasi halal di Kawasan PIK Pantjoran. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman proses sertifikasi halal dan mendorong pelaku usaha agar segera mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kegiatan tersebut diikuti oleh 44 (empat puluh empat) pelaku usaha makan dan minuman yang memang berpotensi untuk disertifikasi halal. Ke depan, KPwBI Provinsi DKI Jakarta akan terus menggalakan program sertifikasi halal di beberapa kawasan kuliner dan pariwisata di Jakarta guna memenuhi target sertifikasi halal pada tahun 2026.

## E. SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

Dengan telah disahkannya UU No.21 tahun 2023 sebagai perubahan UU No.3 tahun 2022 tentang IKN dan UU No.2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, ibu kota negara akan berpindah ke Nusantara, maka ke depan Jakarta bukan lagi menjadi kota pusat pemerintahan. Sehubungan dengan kepindahan Ibu Kota tersebut, maka pengeluaran belanja Pemerintah Pusat/Kementerian dan Lembaga di Jakarta akan berkurang. Oleh karena itu diperlukan pengembangan potensi dan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta dalam rangka memperkuat peran Jakarta untuk tetap berkontribusi sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis nasional serta menjadi kota global yang berdaya saing.

Sejalan perubahan status dan visi Jakarta ke depan sebagai kota global yang berdaya saing maka pembangunan Jakarta akan diarahkan kepada pembangunan yang berkelanjutan berbasis ekonomi hijau. Eratnya keterkaitan ekonomi dan keuangan wilayah sekitar terhadap Jakarta, maka pembangunan Jakarta ke depan juga akan bersinergi dengan wilayah sekitar sebagai satu Kawasan aglomerasi. Pembangunan utamanya akan berfokus kepada perbaikan infrastruktur strategis daerah untuk mengurai berbagai permasalahan yang ada mencakup perbaikan infrastruktur strategis di bidang transportasi, pengendalian banjir, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

Pembiayaan proyek-proyek Pembangunan tersebut diindikasikan bersumber dari APBN, APBD, ataupun pinjaman daerah. Adapun pembangunan proyek dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau dinas-dinas terkait. Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan penuh baik dalam bentuk penyertaan modal ke BUMD maupun mendorong proyek untuk mendapatkan dukungan pusat, baik melalui APBN, pinjaman daerah, atau pinjaman PEN. Pembahasan strategi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek serta upaya promosi investasi untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dilakukan secara bersama-sama melalui wadah Regional Investor Relation Unit (RIRU) Provinsi DKI Jakarta yang mencakup sinergi antara Pemrov DKI Jakarta, KPwBI Provinsi DKI Jakarta, BUMD dan instansi. Ke depan, sejalan dengan perubahan status Jakarta menjadi Daerah Khusus, maka terdapat peluang sumber-sumber pembiayaan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai turun dari Undang-undang Daerah Khusus Jakarta.

## BAB 6

# SISTEM PEMBAYARAN

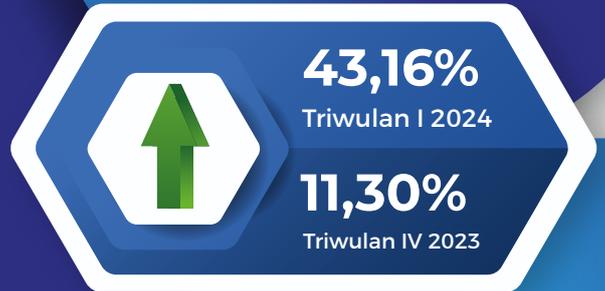
Perkembangan nilai transaksi sistem pembayaran pada triwulan I 2024 mengonfirmasi masih kuatnya pertumbuhan ekonomi Jakarta. Hal ini terindikasi dari arus kas yang mencatat *net outflow* dan transaksi nontunai BI-RTGS yang tumbuh meningkat. Selain itu, tren transaksi digital semakin berkembang, seiring peningkatan transaksi QRIS. Sementara transaksi kartu kredit dan kartu debit menurun. Dari sisi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), nilai transaksi jual dan beli valuta asing (dalam Rupiah) Penyelenggara KUPVA BB meningkat sebesar 38% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 26% (yoy); seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan. Dari sisi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR), terdapat kenaikan transaksi *incoming* (dari luar negeri ke DKI Jakarta) dan domestik (di wilayah DKI Jakarta). Sedangkan transaksi *outgoing* (dari DKI Jakarta ke luar negeri) mengalami penurunan



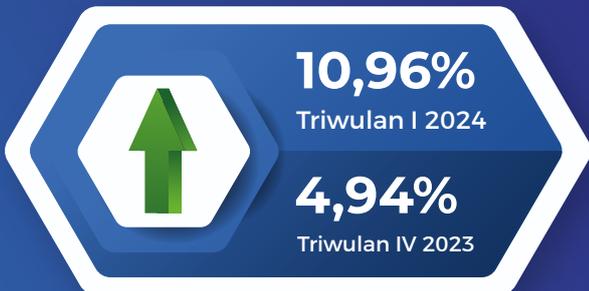
**Pertumbuhan *Inflow*  
Transaksi Uang Kartal (yoy)**



**Pertumbuhan *Outflow*  
Transaksi Uang Kartal (yoy)**



**Pertumbuhan Nilai  
Transaksi BI-RTGS (yoy)**



**Pertumbuhan Nilai  
Transaksi SKN-BI (yoy)**



## A. KONDISI UMUM

Pada triwulan I 2024, pergerakan uang masuk (*inflow*) dan uang keluar (*outflow*) di Provinsi DKI Jakarta tercatat dalam posisi *net outflow* namun, lebih rendah dari posisi *net outflow* pada triwulan sebelumnya, hal ini seiring pola musiman aktivitas triwulan I yang lebih rendah. Meskipun lebih rendah, posisi *net outflow* pada periode laporan masih sejalan dengan kinerja ekonomi yang masih tumbuh kuat, didukung daya beli dan optimisme konsumen yang terjaga, serta tingginya aktivitas pemilu 2024.

Ekonomi yang tetap tumbuh kuat juga terkonfirmasi dari pertumbuhan nilai transaksi Bank Indonesia *Real-Time Gross Settlement* (BI-RTGS) sebagai salah satu indikator instrumen sistem pembayaran nontunai masyarakat. Implementasi QRIS juga semakin gencar, dengan bertambahnya jumlah *merchant* di Provinsi DKI Jakarta yang telah mencapai 5,28 juta *merchant*. Sementara itu, nilai transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI), Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), dan transaksi *e-commerce* cenderung tertahan.

Dalam rangka menjaga kelancaran sistem pembayaran, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta terus mengawasi 318 Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB), 78 Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP-LR), dan 19 Badan Berizin pembawaan Uang Kertas Asing (BB-UKA).

## B. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

### Pengelolaan Uang Rupiah

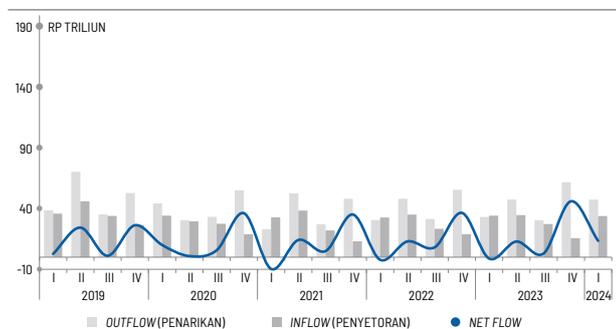
Pada Triwulan I 2024, aktivitas peredaran uang kartal di Provinsi DKI Jakarta mengalami *net outflow*. Hal ini menunjukkan jumlah aliran uang kartal yang keluar dari Bank Indonesia (*outflow*) lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah uang kartal yang masuk ke kas Bank Indonesia (*inflow*). *Net outflow* peredaran uang kartal pada periode laporan tercatat sebesar Rp13,58 triliun, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mengalami *net outflow* sebesar Rp46,21 triliun, terkait pola musiman aktivitas triwulan I yang lebih rendah (Tabel 6.1). Meskipun lebih rendah, posisi *net outflow* pada triwulan I 2024 lebih tinggi dari triwulan I 2023 dan masih sejalan dengan masih kuatnya pertumbuhan ekonomi Jakarta, utamanya tercermin pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih kuat, seiring daya beli dan optimisme konsumen yang terjaga.

Lebih rendahnya *net outflow* pada triwulan I 2024, bersumber dari nilai *outflow* yang tercatat sebesar Rp47,60 triliun atau turun sebesar 23,22% (qtq) dari triwulan sebelumnya. Di sisi lain, *inflow* tercatat sebesar Rp34,02 triliun atau naik 115,47% (qtq) dari triwulan sebelumnya. Secara tahunan, *net outflow* pada triwulan I 2024 lebih tinggi dari triwulan I 2023. Berdasarkan jenis pecahannya, *net outflow* terjadi pada hampir seluruh pecahan terutama pada pecahan 100.000 dan 50.000 sebagai nilai pecahan mayoritas yang banyak digunakan di masyarakat (Grafik 6.2).

Tabel 6.1 Perkembangan Transaksi Uang Kartal

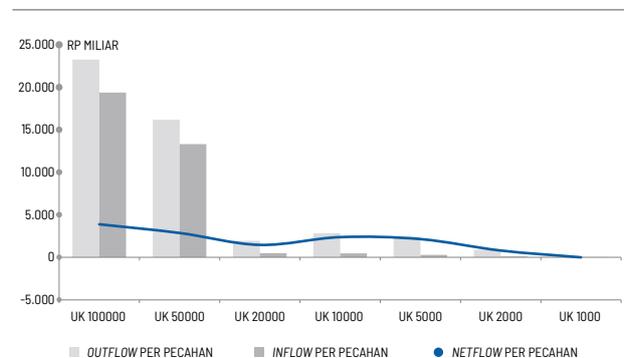
INDIKATOR (RP MILIAR)	2021				2022				2023				2024
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Penarikan / <i>Outflow</i>	23.262,44	52.752,19	27.268,94	48.370,62	30.728,45	48.319,59	31.594,94	55.707,70	33.252,42	47.711,56	30.476,99	62.000,31	47.603,55
Penyetoran / <i>Inflow</i>	32.895,37	38.486,86	22.158,98	13.048,09	32.803,23	35.262,53	23.425,89	19.014,24	34.305,48	34.729,91	27.363,28	15.787,47	34.017,71
<i>Net Flow</i>	-9.632,94	14.265,33	5.109,96	35.322,52	-2.074,77	13.057,06	8.169,05	36.693,46	-1.053,06	12.981,64	3.113,71	46.212,84	13.585,84

Sumber: Bank Indonesia



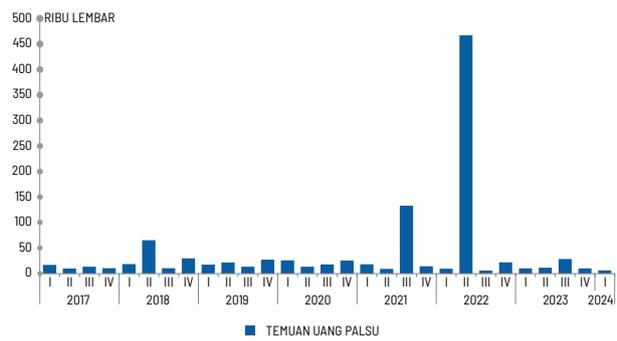
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.1 Perkembangan *Inflow*, *Outflow*, dan *Net Flow* Uang Kartal



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.2 *Inflow*, *Outflow*, dan *Net Flow* per Pecahan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.3 Perkembangan Temuan Uang yang Diragukan Keasliannya

Sementara itu, jumlah temuan uang yang diragukan keasliannya di Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan I 2024 melalui laporan dan setoran perbankan ke Bank Indonesia tercatat sebanyak 6.545 lembar atau menurun 38,00% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 10.557 lembar (Grafik 6.3). Secara tahunan, jumlah temuan uang palsu menurun sebesar 37,91% (yoy) dibandingkan triwulan I 2023. Hal ini sejalan dengan program KPwBI Provinsi DKI Jakarta yang terus melakukan edukasi dan sosialisasi keaslian uang dan kampanye Cinta, Bangga dan Paham Rupiah (CBP). Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada ketika melakukan kegiatan penukaran atau penarikan uang sehingga, dapat meminimalkan penyebaran uang yang diragukan keasliannya. Lebih lanjut, semakin luasnya peredaran uang tahun emisi (TE) 2022 dengan fitur pengaman yang lebih canggih juga mendukung penurunan pada temuan uang yang diragukan keasliannya.

### Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Nilai transaksi BI RTGS juga mengalami peningkatan, sejalan dengan masih kuatnya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan I 2024. Nilai transaksi BI-RTGS pada periode laporan tercatat sebesar Rp7,44 triliun atau tumbuh 10,96% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 4,94% (yoy) (Grafik 6.4). Dari sisi volume, transaksi BI-RTGS tercatat sebanyak 1,06 juta transaksi atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,20% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 1,20% (yoy) (Grafik 6.5).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.4 Perkembangan Nilai Transaksi RTGS

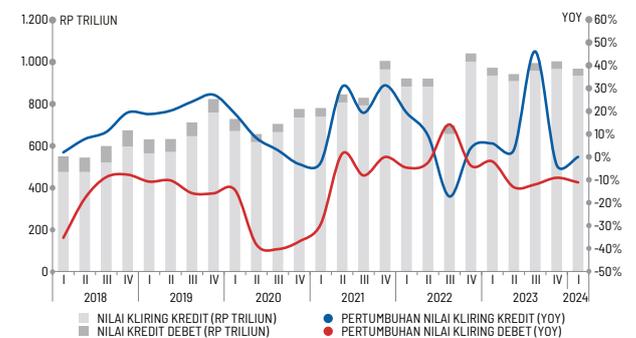


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.5 Perkembangan Volume Transaksi RTGS

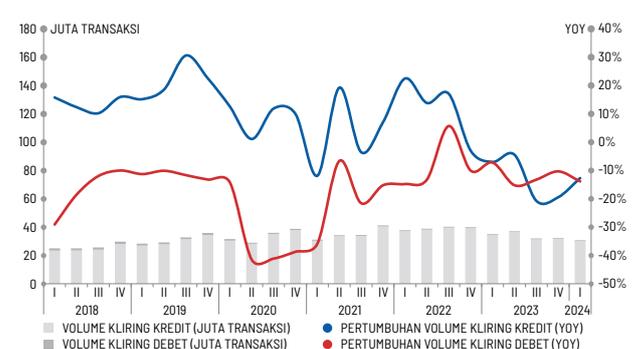
### Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada Triwulan I 2024 mengalami penurunan. Nilai transaksi SKNBI dengan kliring kredit pada periode pelaporan tercatat sebesar Rp932,27 triliun atau menurun sebesar 3,33% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp964,42 triliun (Grafik 6.6). Semakin meluasnya pemanfaatan BI-FAST turut memengaruhi volume kliring kredit yang menurun sebesar 4,66% (qtq) yaitu dari 31,56 juta lembar menjadi 30,09 juta lembar pada triwulan I 2024. Selain itu, nilai transaksi kliring debit mengalami penurunan sebesar 13,90% (qtq) atau menurun dari Rp35,90 triliun menjadi Rp33,59 triliun. Demikian pula dengan volume transaksi kliring debit menurun dari 0,57 juta lembar menjadi 0,52 juta lembar (Grafik 6.7).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.6 Perkembangan Nilai Transaksi SKNBI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

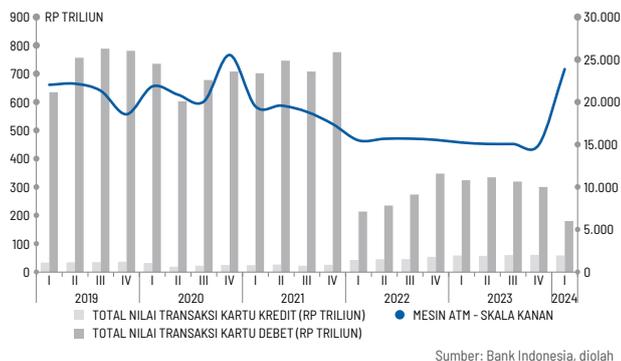
Grafik 6.7 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI

## Instrumen Pembayaran Nontunai

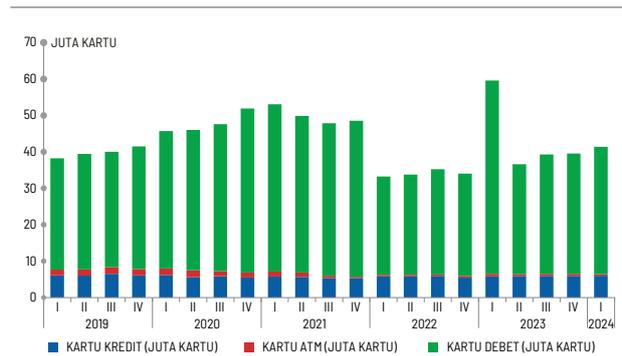
Pada triwulan I 2024, **transaksi pada alat pembayaran menggunakan kartu kredit dan kartu debit mengalami penurunan**. Nilai transaksi kartu debit pada periode pelaporan tercatat mengalami penurunan sebesar 40,08% (qtq) atau turun dari Rp300,99 triliun pada triwulan IV 2023 menjadi Rp180,34 triliun pada triwulan I 2024. Selain itu, nilai transaksi kartu kredit pada periode pelaporan tercatat turun sebesar 3,63% (qtq) dari Rp60,81 triliun pada triwulan IV 2023 menjadi Rp58.61 triliun pada triwulan I 2024 (Grafik 6.8). Penurunan nilai transaksi kartu kredit dan kartu debit diimbangi dengan peningkatan tren transaksi digital yang juga cukup berkembang.

**Transaksi pembayaran nontunai melalui e-commerce pada Triwulan I 2024 mengalami penurunan.** Hal ini terlihat juga jadi nilai transaksi e-commerce pada periode berjalan tercatat menurun sebesar 9,15% (qtq) dari Rp24,45 triliun menjadi Rp22,22 triliun. Adapun, metode pembayaran transaksi e-commerce didominasi oleh transfer bank (43%), disusul oleh e-money (22%), diikuti oleh kartu kredit/debit online dan kredit tanpa kartu masing-masing sebesar 15% dan 10%.

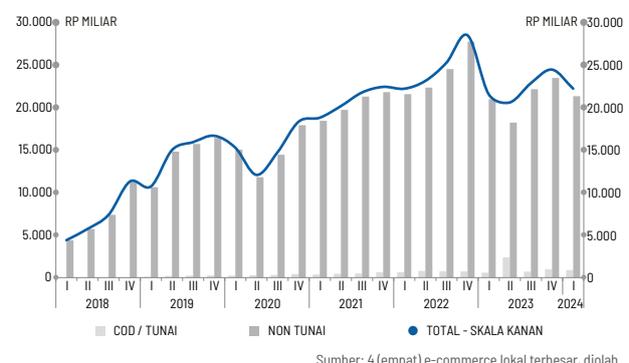
**Dalam rangka meningkatkan penggunaan transaksi pembayaran secara nontunai di masyarakat, Bank Indonesia terus mendorong perluasan penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) pada pasar dan pusat perbelanjaan.** Jumlah merchant QRIS di Jakarta pada Triwulan I 2024 tercatat sebanyak 5,28 juta merchant atau naik 2,47% (qtq), dibanding triwulan sebelumnya yang sebanyak 5,15 juta merchant (Grafik 6.12). Berdasarkan wilayahnya, jumlah merchant QRIS tertinggi terdapat pada Kota Administratif Jakarta Selatan dengan porsi 42,90%, penambahan jumlah merchant QRIS terbanyak juga terdapat pada Kota Administratif Jakarta Selatan dengan total penambahan sebanyak 34.834 merchant (Grafik 6.12). Lebih lanjut, berdasarkan jenis usahanya, jumlah merchant QRIS tertinggi didominasi oleh usaha mikro sebesar 36,14% (Grafik 6.13). Adapun, penambahan jumlah merchant QRIS tertinggi tercatat pada usaha reguler, yaitu sebanyak 49.351 merchant. Hal ini mengindikasikan semakin meluasnya minat pelaku usaha dalam pemanfaatan QRIS sebagai salah satu alat pembayaran nontunai.



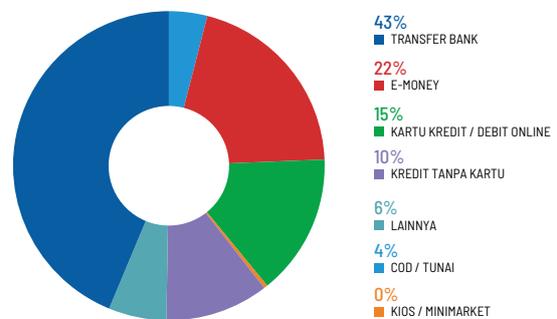
Grafik 6.8 Perkembangan Nilai Transaksi Kartu Kredit dan Debit serta Jumlah Mesin ATM



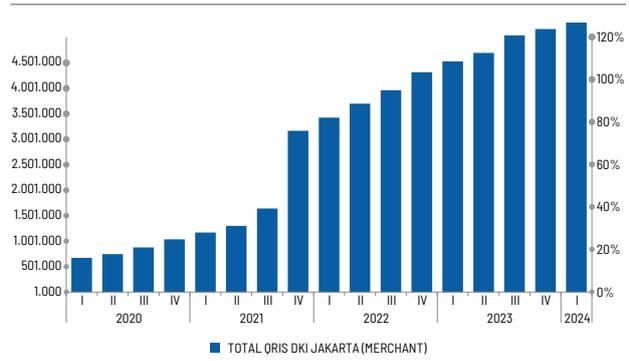
Grafik 6.9 Perkembangan Jumlah Kartu Kredit, Debit dan ATM



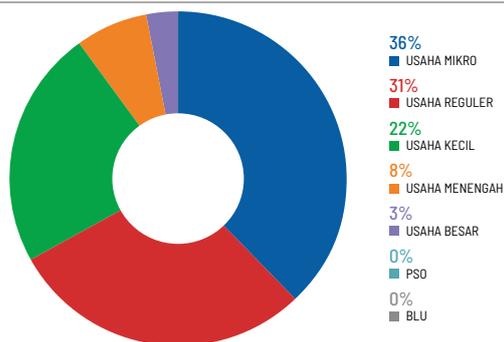
Grafik 6.10 Perkembangan Transaksi E-commerce Berdasarkan Metode Pembayaran



Grafik 6.11 Pangsa Transaksi E-commerce Berdasarkan Metode Pembayaran

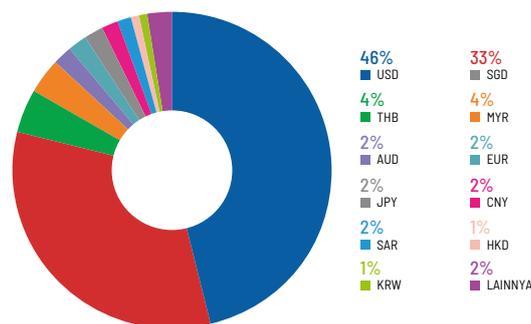


Grafik 6.12 Perkembangan Merchant QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.13 Pangsa Merchant QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.15 Market Share Valuta Asing

### C. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

#### Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Pada Triwulan I 2024, nilai transaksi Penyelenggara KUPVA BB mengalami peningkatan. Nilai transaksi jual dan beli valuta asing (dalam Rupiah) Penyelenggara KUPVA BB pada pelaporan mencapai Rp105,8 Triliun, terdiri atas transaksi beli sebesar Rp52,72 triliun dan transaksi jual sebesar Rp53,08 Triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 38% (yoy). Hal ini sejalan dengan nilai transaksi jual beli valuta asing (dalam Rupiah) Penyelenggara KUPVA BB pada triwulan sebelumnya yang juga mengalami peningkatan sebesar 26% (yoy) (Grafik 6.14).

Peningkatan jumlah wisatawan di awal tahun 2024 yang diikuti dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia secara global menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan transaksi valuta asing. Pada Triwulan I 2024, terdapat 317 KUPVA BB (Kantor Pusat) yang telah diberikan izin operasional dan diawasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta (Tabel 6.2). Industri KUPVA BB saat ini banyak beroperasi di wilayah Jakarta Pusat (29,86%) dan Jakarta Selatan (28,47%). Adapun *market share* valuta asing yang ditransaksikan di wilayah pengawasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh mata uang USD dan

Tabel 6.2 Persebaran KUPVA BB

NO	WILAYAH	KP	KC	JUMLAH
1	DKI Jakarta	288	83	369
2	Bekasi	12	5	17
3	Bogor	6	9	15
4	Depok	7	1	8
5	Karawang	3	1	4
6	Tangerang	1	19	20
7	Pulau Bali		2	2
8	Pulau Jawa (lainnya)		31	31
9	Pulau Kalimantan	1		1
10	Pulau Sumatera		12	12
TOTAL		317	170	487

Sumber: Bank Indonesia, diolah

SGD dengan persentase masing-masing sebesar 45% dan 36% (Grafik 6.15)

#### Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR)

Berdasarkan data Laporan Transfer Dana Bukan Bank, perkembangan transaksi transfer dana yang dijalankan oleh PJP LR pada Triwulan I 2024 cenderung bervariasi (Tabel 6.3). Kenaikan transaksi terjadi pada transaksi *incoming* (dari luar negeri ke DKI Jakarta) dan domestik (di



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.14 Perkembangan Transaksi KUPVA BB

wilayah DKI Jakarta), sedangkan transaksi *outgoing* (dari DKI Jakarta ke luar negeri) mengalami penurunan sebagai berikut:

- Nilai transaksi *outgoing* di wilayah kerja KPwBI DKI Jakarta pada triwulan I 2024 mencapai Rp10,04 triliun atau mengalami perlambatan sebesar 15,20% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,54% (yoy). Sementara itu, frekuensi transaksi *outgoing* tercatat sebanyak 463.604 transaksi atau berkontraksi 22,86% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 29,51% (yoy).
- Nilai transaksi *incoming* tercatat sebesar Rp21,68 triliun atau tumbuh sebesar 46,62% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 35,46% (yoy). Adapun frekuensi transaksi tercatat sebanyak 3,59 juta atau turun sebesar 2,62% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh

sebesar 23,24% (yoy).

- Nilai transaksi domestik tercatat sebesar Rp101,89 triliun atau tumbuh sebesar 42,74% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 36,75% (yoy). Adapun frekuensi transaksi tercatat sebanyak 62,06 juta transaksi atau tumbuh sebesar 22,00% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 26,88% (yoy).

Secara keseluruhan terjadi peningkatan nilai dan frekuensi transaksi *outgoing*, *incoming*, dan domestik transfer dana yang dijalankan PJP LR yaitu, nilai transaksi tumbuh sebesar Rp133,62 triliun atau sebesar 36,33% (yoy) dan frekuensi meningkat sebanyak 66,11 juta transaksi atau sebesar 19,87% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

**Tabel 6.3** Perkembangan Transaksi PJP LR

PERIODE	OUTGOING		INCOMING		DOMESTIC		
	FREKUENSI (ribu Vol)	NILAI (miliar Rp)	FREKUENSI (ribu Vol)	NILAI (miliar Rp)	FREKUENSI (ribu Vol)	NILAI (miliar Rp)	
TW I 2020	Jan-20	19.244	876.029.558.924	2.790.747	2.448.962.056.681	2.318.460	3.652.836.612.761
	Feb-20	17.820	705.196.274.574	464.055	2.541.422.928.345	3.207.777	4.268.574.298.242
	Mar-20	14.973	786.786.445.415	513.070	3.249.878.679.624	3.187.842	4.291.224.204.144
	<b>Total</b>	<b>52.037</b>	<b>2.368.012.278.913</b>	<b>3.767.872</b>	<b>8.240.263.664.650</b>	<b>8.714.079</b>	<b>12.212.635.115.147</b>
TW II 2020	Apr-20	9.843	451.330.534.267	518.556	3.109.213.840.919	1.835.884	3.035.059.526.763
	May-20	11.646	317.617.797.609	638.902	3.272.985.284.693	2.190.258	3.100.375.671.350
	Jun-20	16.362	609.234.172.893	592.505	3.021.071.820.858	2.547.826	3.469.218.209.499
	<b>Total</b>	<b>37.851</b>	<b>1.378.182.504.769</b>	<b>1.749.963</b>	<b>9.403.270.946.470</b>	<b>6.573.968</b>	<b>9.604.653.407.612</b>
TW III 2020	Jul-20	17.307	776.735.132.076	625.951	3.578.380.589.317	3.196.653	4.498.767.441.505
	Aug-20	16.536	682.778.854.093	562.361	3.331.395.275.865	3.745.893	4.536.278.891.917
	Sep-20	17.272	872.519.689.320	570.496	3.371.000.771.677	4.273.546	5.311.898.312.574
	<b>Total</b>	<b>51.115</b>	<b>2.332.033.675.489</b>	<b>1.758.808</b>	<b>10.280.776.636.859</b>	<b>11.216.092</b>	<b>14.346.944.645.996</b>
TW IV 2020	Oct-20	17.695	970.727.059.198	593.571	3.281.780.541.285	4.997.412	6.184.066.710.486
	Nov-20	20.811	1.382.025.507.414	531.845	2.885.258.608.907	5.429.305	7.050.762.370.538
	Dec-20	23.083	1.275.443.128.213	598.304	3.018.815.956.838	5.639.375	6.988.830.657.280
	<b>Total</b>	<b>61.589</b>	<b>3.628.195.694.825</b>	<b>1.723.720</b>	<b>9.185.855.107.030</b>	<b>16.066.082</b>	<b>20.223.659.738.304</b>
TW I 2021	Jan-21	21.726	1.741.457.787.387	602.773	2.991.156.931.488	6.924.591	11.536.770.574.232
	Feb-21	20.941	1.721.643.886.343	636.155	3.206.717.228.676	7.181.263	11.198.616.289.229
	Mar-21	24.788	1.800.355.972.601	748.668	4.200.335.445.525	8.056.932	13.050.057.206.091
	<b>Total</b>	<b>67.455</b>	<b>5.263.457.646.331</b>	<b>1.987.596</b>	<b>10.398.209.605.689</b>	<b>22.162.776</b>	<b>35.785.444.069.552</b>
TW II 2021	Apr-21	23.526	1.910.947.591.495	782.361	4.380.193.932.569	8.443.134	14.649.820.451.794
	May-21	25.291	2.129.640.509.196	801.262	4.023.213.606.203	8.859.710	15.498.808.588.234
	Jun-21	27.811	1.597.292.074.810	689.981	3.858.043.970.924	9.572.630	15.464.282.991.151
	<b>Total</b>	<b>76.628</b>	<b>5.637.880.175.501</b>	<b>2.273.604</b>	<b>12.261.451.509.696</b>	<b>26.875.474</b>	<b>45.612.912.031.179</b>
TW III 2021	Jul-21	27.544	1.557.649.197.078	748.349	4.028.836.392.802	10.946.079	17.343.385.085.306
	Aug-21	32.709	1.882.464.840.771	732.673	3.673.710.587.218	11.546.029	18.240.033.185.328
	Sep-21	37.379	2.395.543.528.447	695.051	3.792.521.359.819	10.721.645	17.863.854.189.666
	<b>Total</b>	<b>97.632</b>	<b>5.835.657.566.296</b>	<b>2.176.073</b>	<b>11.495.068.339.839</b>	<b>33.213.753</b>	<b>53.447.272.460.300</b>
TW IV 2021	Oct-21	44.692	1.665.458.149.146	865.278	4.678.048.147.998	11.901.324	19.718.417.463.247
	Nov-21	47.330	2.280.183.690.703	860.062	4.337.538.438.064	12.296.639	19.772.832.790.543
	Dec-21	51.347	2.354.809.539.298	899.734	4.562.790.327.433	13.864.975	21.998.721.000.286
	<b>Total</b>	<b>143.369</b>	<b>6.300.451.379.147</b>	<b>2.625.074</b>	<b>13.578.376.913.495</b>	<b>38.062.938</b>	<b>61.489.971.254.076</b>
TW I 2022	Jan-22	51.628	2.701.112.895.750	856.897	4.449.009.613.453	13.945.338	21.276.650.265.317
	Feb-22	50.467	2.174.429.338.961	763.251	3.913.050.656.759	13.261.702	18.698.420.551.277
	Mar-22	61.305	2.498.231.799.915	864.253	4.510.919.780.009	15.911.984	23.232.489.225.313
	<b>Total</b>	<b>163.400</b>	<b>7.373.774.034.626</b>	<b>2.484.401</b>	<b>12.872.980.050.221</b>	<b>43.119.024</b>	<b>63.207.560.041.907</b>
TW II 2022	Apr-22	60.384	3.612.733.838.880	960.426	5.091.901.296.134	17.379.120	25.894.326.976.935
	May-22	103.895	2.910.275.109.260	960.208	3.568.568.025.155	14.786.905	22.095.641.826.505
	Jun-22	112.629	2.526.485.373.078	993.800	4.071.142.999.492	16.869.809	24.098.078.056.629
	<b>Total</b>	<b>276.908</b>	<b>9.049.494.321.218</b>	<b>2.914.434</b>	<b>12.731.612.320.781</b>	<b>49.035.834</b>	<b>72.088.046.860.069</b>

PERIODE	OUTGOING		INCOMING		DOMESTIC		
	FREKUENSI (ribu Vol)	NILAI (miliar Rp)	FREKUENSI (ribu Vol)	NILAI (miliar Rp)	FREKUENSI (ribu Vol)	NILAI (miliar Rp)	
TW III 2022	Jul-22	337.911	3.273.993.931.950	1.045.343	4.674.318.696.750	18.116.128	25.518.115.462.080
	Aug-22	336.824	3.213.384.141.909	809.921	3.475.043.980.438	17.553.090	24.691.222.695.268
	Sep-22	358.458	3.476.017.082.373	821.254	3.610.053.172.188	16.916.743	22.772.172.389.235
	<b>Total</b>	<b>1.033.193</b>	<b>9.963.395.156.232</b>	<b>2.676.518</b>	<b>11.759.415.849.376</b>	<b>52.585.961</b>	<b>72.981.510.546.583</b>
TW IV 2022	Oct-22	347.348	3.209.904.766.888	826.067	3.498.815.511.210	16.657.239	21.432.734.318.000
	Nov-22	349.029	3.270.207.410.868	1.030.146	4.660.248.534.081	16.617.865	21.771.323.623.705
	Dec-22	175.900	2.849.529.906.824	1.089.837	4.964.763.505.699	17.728.054	25.553.442.712.594
	<b>Total</b>	<b>872.277</b>	<b>9.329.642.084.380</b>	<b>2.946.050</b>	<b>13.123.827.550.990</b>	<b>51.003.158</b>	<b>68.757.500.654.299</b>
TW I 2023	Jan-23	206.853	3.031.663.147.712	1.060.915	4.172.178.454.812	17.166.451	23.422.773.401.867
	Feb-23	188.141	2.541.796.523.358	1.255.634	4.984.718.627.496	15.713.344	21.636.054.827.967
	Mar-23	206.014	6.271.350.309.317	1.370.890	5.632.361.765.112	17.986.604	26.324.340.424.361
	<b>Total</b>	<b>601.008</b>	<b>11.844.809.980.387</b>	<b>3.687.439</b>	<b>14.789.258.847.420</b>	<b>50.866.399</b>	<b>71.383.168.654.195</b>
TW II 2023	Apr-23	206.505	2.669.338.138.416	1.227.373	4.676.310.240.207	17.799.845	25.530.062.603.041
	May-23	245.253	3.156.441.613.325	1.324.557	5.389.577.591.989	17.560.216	24.951.878.726.113
	Jun-23	247.246	2.675.347.301.006	1.458.598	5.900.609.310.299	20.042.400	31.990.595.585.855
	<b>Total</b>	<b>699.004</b>	<b>8.501.127.052.747</b>	<b>4.010.528</b>	<b>15.966.497.142.495</b>	<b>55.402.461</b>	<b>82.472.536.915.009</b>
TW III 2023	Jul-23	245.468	2.672.778.528.424	1.234.758	5.567.750.963.697	18.217.682	25.701.541.146.742
	Aug-23	272.700	2.986.632.796.251	1.208.366	5.387.603.973.108	18.961.370	24.235.934.246.395
	Sep-23	281.232	2.964.115.516.896	1.181.297	5.265.620.629.852	18.037.861	25.875.297.213.086
	<b>Total</b>	<b>799.400</b>	<b>8.623.526.841.571</b>	<b>3.624.421</b>	<b>16.220.975.566.657</b>	<b>55.216.913</b>	<b>75.812.772.606.223</b>
TW IV 2023	Oct-23	297.665	3.341.174.508.381	1.344.927	6.122.309.658.091	23.441.197	30.412.963.804.944
	Nov-23	158.796	3.113.258.356.874	1.076.976	5.502.165.624.171	20.364.548	30.652.789.833.843
	Dec-23	158.421	3.299.192.281.008	1.208.815	6.152.900.385.938	20.906.792	32.960.977.317.490
	<b>Total</b>	<b>614.882</b>	<b>9.753.625.146.263</b>	<b>3.630.718</b>	<b>17.777.375.668.200</b>	<b>64.712.537</b>	<b>94.026.730.956.277</b>
TW I 2024	Jan-24	164.853	3.542.320.689.096	1.149.198	6.546.289.317.870	20.134.309	33.308.830.591.428
	Feb-24	146.838	3.155.098.647.522	1.122.486	7.069.174.073.388	19.490.424	33.262.462.144.272
	Mar-24	151.913	3.347.482.549.612	1.319.088	8.068.088.794.892	22.434.290	35.324.096.189.978
	<b>Total</b>	<b>463.604</b>	<b>10.044.901.886.230</b>	<b>3.590.772</b>	<b>21.683.552.186.150</b>	<b>62.059.023</b>	<b>101.895.388.925.678</b>
<b>Grand Total</b>	<b>6.111.352</b>	<b>117.228.167.424.924</b>	<b>47.627.991</b>	<b>221.768.767.906.018</b>	<b>646.886.482</b>	<b>955.348.708.882.406</b>	



### BOKS 3

## Digitalisasi Sistem Pembayaran Sektor Transportasi Jakarta

Membangun Jakarta sebagai kota global dan mempertahankan modernitas Jakarta sebagai kota cerdas adalah visi jangka panjang Jakarta menjadi pusat perdagangan, kegiatan layanan jasa dan keuangan, serta kegiatan bisnis nasional dan global pasca pemindahan Ibu Kota Negara. Walaupun Jakarta telah menjadi barometer sebagai kota maju secara nasional, masih terdapat beberapa tantangan untuk penguatan daya saing Jakarta di antara kota global dunia. Salah satunya, Jakarta dalam proses berbenah dalam meningkatkan kualitas mobilitas Masyarakat, utamanya dalam pembangunan infrastruktur transportasi, jalur pedestrian dan terintegrasi antarmoda, serta pemanfaatan teknologi pada transportasi umum.

Dalam rangka meningkatkan pengguna transportasi umum yang berdampak pada penurunan tingkat kemacetan dan emisi karbon di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengoptimalkan digitalisasi transportasi melalui Program Elektronifikasi Integrasi Pembayaran Transportasi Jakarta (EIPTJ). Program ini berfokus pada peningkatan infrastruktur pelayanan transportasi umum terintegrasi yang diiringi dengan implementasi sistem pembayaran berbasis digital di beberapa aspek mobilisasi masyarakat antara lain integrasi multimoda transportasi publik, *ride hailing* serta mekanisme *park and ride*.



Sumber: TomTom Traffic Index 2023

Gambar B3.1 Posisi TomTom Traffic Index Jakarta

	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
12:00 AM	16 min 30 s	14 min 40 s	14 min 50 s	15 min	15 min 10 s	15 min 10 s	15 min 50 s
	15 min 30 s	14 min 20 s	14 min 20 s	14 min 30 s	14 min 30 s	14 min 30 s	15 min
02:00 AM	14 min 40 s	13 min 40 s	13 min 40 s	13 min 50 s	13 min 50 s	13 min 50 s	14 min 10 s
	14 min	13 min	13 min 10 s	13 min 10 s	13 min 20 s	13 min 10 s	13 min 40 s
04:00 AM	13 min 20 s	12 min 20 s	12 min 40 s	13 min 10 s			
	13 min 30 s	13 min 40 s	13 min 40 s	13 min 30 s	13 min 40 s	13 min 30 s	13 min
06:00 AM	14 min 50 s	18 min 40 s	18 min 40 s	18 min 20 s	18 min 30 s	18 min 10 s	14 min 10 s
	15 min 30 s	23 min 30 s	23 min 30 s	23 min	22 min 40 s	22 min	15 min 30 s
08:00 AM	16 min 20 s	27 min 20 s	27 min 30 s	27 min 20 s	26 min 10 s	24 min 20 s	16 min 50 s
	17 min 40 s	25 min 10 s	26 min 10 s	25 min 40 s	24 min 40 s	22 min 40 s	18 min 20 s
10:00 AM	18 min 10 s	24 min	25 min 20 s	25 min 10 s	24 min 20 s	23 min 20 s	20 min 10 s
	18 min 50 s	23 min 50 s	25 min 10 s	25 min 20 s	24 min 40 s	23 min 50 s	21 min 50 s
12:00 PM	19 min 40 s	23 min 40 s	24 min 50 s	25 min 10 s	24 min 50 s	21 min 20 s	22 min 50 s
	20 min 20 s	23 min 40 s	24 min 50 s	25 min 10 s	25 min	24 min 10 s	24 min
02:00 PM	20 min 20 s	24 min 10 s	25 min 40 s	26 min 10 s	25 min 40 s	26 min 40 s	25 min 10 s
	20 min 30 s	24 min 30 s	26 min	26 min 30 s	25 min 50 s	27 min 20 s	25 min 40 s
04:00 PM	20 min 40 s	26 min 40 s	27 min 40 s	28 min 20 s	27 min 20 s	28 min 30 s	25 min 50 s
	20 min 30 s	31 min 10 s	32 min 10 s	32 min 50 s	31 min 20 s	33 min 20 s	25 min 10 s
06:00 PM	20 min 30 s	31 min	32 min 30 s	33 min	31 min 20 s	33 min 40 s	24 min 20 s
	20 min	26 min 30 s	28 min 10 s	28 min 40 s	27 min 10 s	29 min 40 s	23 min
08:00 PM	19 min 40 s	20 min 50 s	22 min 20 s	22 min 50 s	22 min	24 min 10 s	21 min 30 s
	19 min 10 s	18 min 40 s	19 min 40 s	20 min 10 s	19 min 50 s	22 min	21 min 50 s
10:00 PM	18 min 20 s	18 min	18 min 40 s	19 min	18 min 50 s	21 min	21 min 40 s
	16 min 10 s	16 min 10 s	16 min 30 s	16 min 40 s	16 min 30 s	18 min	18 min 40 s

Sumber: East Ventures

Gambar B3.2 Waktu Tempuh Perjalanan di Jakarta Berdasarkan Jam Operasional

Dalam mengoptimalkan transportasi layanan publik berbasis digital, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan sistem terintegrasi yang menghubungkan multimoda transportasi dalam satu aplikasi *e-ticketing* Jaklingko. Jaklingko merupakan sistem terpadu yang mendukung kebijakan peningkatan penggunaan angkutan umum massal dan pembatasan kendaraan bermotor perseorangan (Pergub DKI No. 68/2021). Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat memesan tiket transportasi publik dengan mekanisme *Mobility as a Service (MAAS)*, dimana memungkinkan pengguna untuk menikmati tarif terintegrasi dari beberapa multimoda antara lain MRT Jakarta, TransJakarta, LRT Jakarta, dan KRL *Commuterline*. Lebih lanjut, Jaklingko juga memfasilitasi pengguna dengan mekanisme *First Mile-Last Mile*, yang memudahkan pengguna dalam memesan kendaraan *ride hailing* untuk penjemputan dari domisili ke stasiun terdekat dan dari stasiun tujuan ke destinasi akhir. Saat ini Jaklingko telah bekerjasama dengan aplikasi Grab untuk penyediaan layanan terintegrasi antara mekanisme MAAS dan *First Mile-Last Mile*. Kenyamanan integrasi layanan publik ini juga diimbangi dengan optimalnya pemanfaatan kanal pembayaran digital dalam satu aplikasi, Jaklingko telah menyediakan beberapa kanal pembayaran nontunai meliputi QRIS, Uang Elektronik (UE), dan

**225 h**  
time spent driving  
**117 h** due to congestion

45 x  Approximately 45 books

**969 kg**  
CO<sub>2</sub> emitted

**270 kg** due to congestion

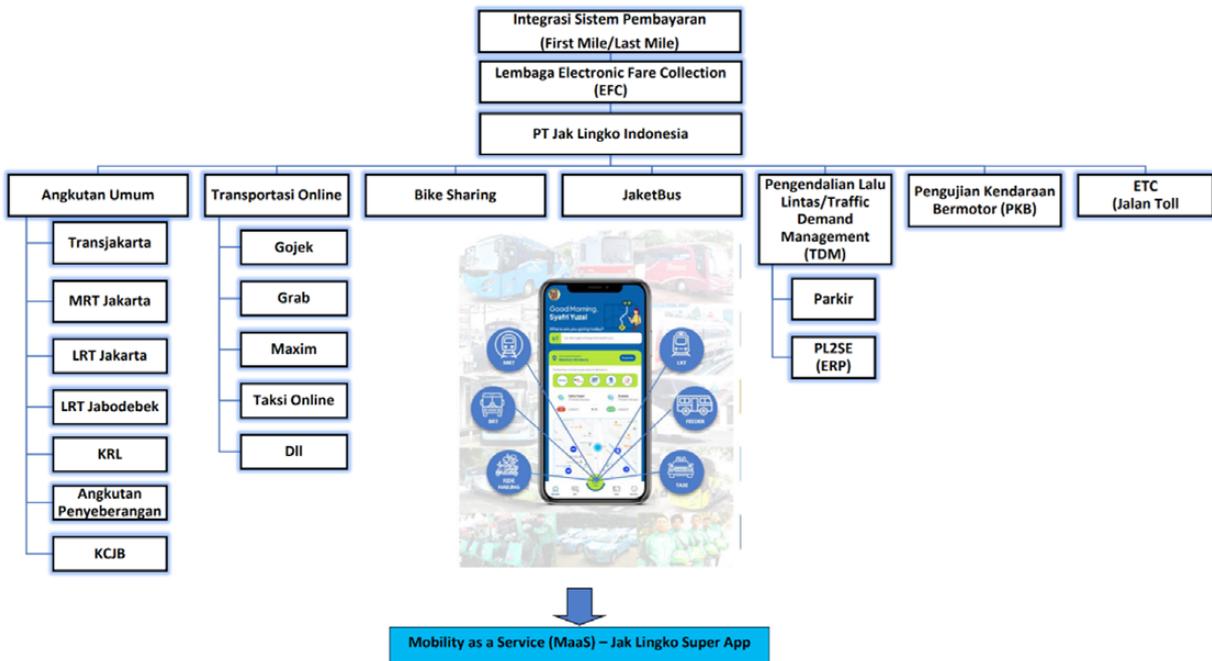
97 x  97 trees grown over a year to absorb

Sumber: East Ventures

Gambar B3.3 Total Waktu dan Produksi Emisi Mengendara di Jakarta 2023

**BOKS 3**

Digitalisasi Sistem Pembayaran Sektor Transportasi Jakarta



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, 2023

Gambar B3.4 Skema Perluasan Elektronifikasi Integrasi Pembayaran Transportasi Jakarta (EIPTJ)

Mobile Banking-Virtual Account. Sinergitas antara aplikasi *e-ticketing* dan kanal pembayaran nontunai ini mengantarkan Jaklingko mampu melaksanakan perluasan Elektronifikasi Integrasi Pembayaran Transportasi di Provinsi DKI Jakarta.

Sejalan dengan mendorong penggunaan transportasi publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong penggunaan parkir di

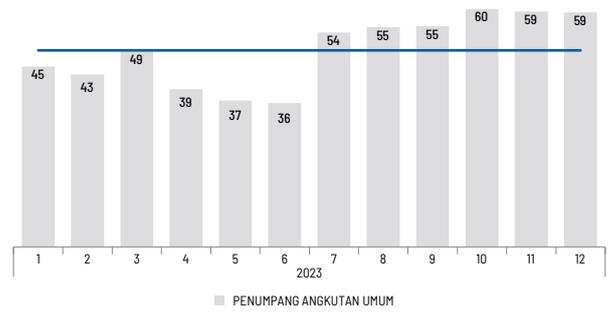
titik-titik stasiun yang berdekatan dengan batas luar wilayah Jakarta dengan interoperabilitas sistem pembayaran yang handal atau mekanisme *Park and Ride*. Mekanisme ini bertujuan untuk menurunkan jumlah kendaraan BodeTABEK yang masuk ke Jakarta. Beberapa yang menjadi daerah pengembangan meliputi Stasiun MRT Lebak Bulus, Ragunan, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulo Gebang, South Quarter, Terminal Pinang Ranti, PGC Cililitan, Kalideres.



Gambar B3.5 Skema Mobility as a Service, First Mile-Last Mile

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, Jakarta terus berinovasi untuk mengembangkan digitalisasi dalam layanan transportasi publik kepada masyarakat. Salah satu yang terus dikembangkan adalah *Account Based Ticketing* (ABT), yang memungkinkan pemberian layanan yang unik sesuai profil pengguna, karena satu akun melekat dengan satu pengguna. Beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan yaitu: (1) *Easy to Go*, yang memungkinkan pengguna aplikasi Jaklingko *in-out* hanya dengan QR token tanpa harus memasukkan titik berangkat maupun tujuan; (2) *Period Pass*, merupakan mekanisme langganan dengan paket tarif yang lebih hemat pada aplikasi Jaklingko, yang dapat mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik secara berkelanjutan; (3) Subsidi Golongan Khusus, yang diterapkan pada akun penerima subsidi yang terverifikasi berdasarkan Pergub No. 133 tahun 188, sehingga lebih tepat sasaran. Ke depan, penerapan ABT, akan memungkinkan penerapan tarif secara berkeadilan sesuai dengan profil pengguna, a.l. terkait jarak, domisili, dan tingkat pendapatan. Subsidi tarif transportasi Jakarta, selain untuk penduduk Jakarta, juga turut dirasakan manfaatnya oleh penduduk Bodetabek. Dalam rangka penguatan sinergi aglomerasi Jabodetabek, perlu peningkatan sinergi integrasi transportasi dan keseimbangan partisipasi beban subsidi tarif transportasi dari pemerintah daerah di kawasan aglomerasi, guna semakin meningkatkan penggunaan transportasi umum, sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi udara, untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Pengembangan digitalisasi transportasi di Jakarta telah berdampak pada akseptansi masyarakat dalam menggunakan transportasi publik yang terus meningkat, sebagaimana hasil *Urban Mobility Readiness Index* Jakarta pada tahun 2023 berada pada posisi ke-49. Hal ini tergambarkan melalui tingginya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik, sepanjang tahun 2023 mencatat jumlah pengguna transportasi umum (KRL commuterline, LRT, Transjakarta, dan MRT) sebanyak 591 juta. Lebih lanjut, kinerja transportasi publik Jakarta juga berdampak pada penurunan emisi CO<sub>2</sub> yang dihasilkan dari kendaraan pribadi sebagaimana hasil *sustainable mobility index* Jakarta menduduki posisi ke-58 pada tahun 2023.



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, 2023

Grafik B3.1 Perkembangan Penumpang Angkutan Umum Jakarta (juta)

# Jakarta

<b>Urban Mobility Readiness Index</b>	<b>Sustainable Mobility</b>	<b>Public Transit</b>
49/65	58/65	37/65
<b>Population (million)</b>	22.5	
<b>Population density (people per km<sup>2</sup>)</b>	6,346	
<b>GDP per capita (US\$)</b>	22,520	
<b>Surface area (km<sup>2</sup>)</b>	3,546	

Sumber: OliverWyman, 2023

Gambar B3.6 Urban Mobility Readiness Index Jakarta

## BAB 7

# KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN

Seiring dengan kinerja ekonomi yang tetap kuat, serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode Februari 2024 mengalami kenaikan, diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Berdasarkan status pekerjaan utama, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dari sisi sektoral, peningkatan serapan tenaga kerja terutama terjadi LU Perdagangan Besar dan Eceran Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, LU Jasa Lainnya.

Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta mengalami penurunan menjadi sebesar 4,44% pada Maret 2024, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 4,69%. Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada Maret 2023 berada pada level 9,36%. Menurunnya tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian DKI Jakarta dan pengurangan jumlah pengangguran. Selain itu, gencarnya program bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi turut berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin.



### Tingkat Kesempatan Kerja



**93,97%**

Februari 2024

**92,43%**

Februari 2023

### Tingkat Pengangguran Terbuka



**6,03%**

Februari 2024

**7,57%**

Februari 2023

### Upah Minimum Provinsi (UMP)



**Rp5.067.381**

2024

**Rp4.901.798**

2023

### Indeks Penghasilan Konsumen



**123,62%**

Triwulan I 2024

**110,19%**

Triwulan IV 2023

### Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja



**139,10%**

Triwulan I 2024

**143,71%**

Triwulan IV 2023

## A. KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan per Februari 2024, angka penduduk bekerja di DKI Jakarta tercatat sebanyak 5,10 juta orang, meningkat sebesar 5,13% (yoy) dari periode sama tahun sebelumnya (Grafik 7.1 dan Tabel 7.1). Dari sisi serapan tenaga kerja, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) tercatat sebesar 93,97%, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya (92,43%) (Grafik 7.2).

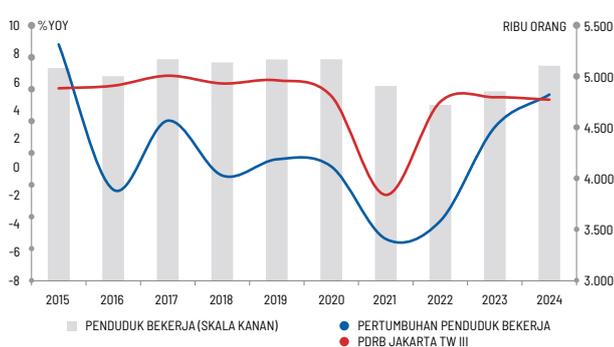
Kondisi pekerja di Jakarta didominasi oleh pekerja penuh yaitu penduduk yang bekerja dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu dengan pangsa sebesar 79,07%. Sementara itu, sisanya merupakan pekerja tidak penuh yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dengan pangsa sebesar 20,93%. Pekerja tidak penuh dikelompokkan berdasarkan dua kategori, yaitu Tingkat Setengah Pengangguran (TSP) dan Pekerja Paruh Waktu (Grafik 7.3). Dibandingkan Februari 2023, TSP mengalami kenaikan, yakni 15,18% menjadi 15,99%. Sejalan dengan TSP, pekerja paruh waktu juga mengalami peningkatan dari 2,73% menjadi 4,94% dari total penduduk bekerja di DKI Jakarta.

Sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta, yakni sebanyak 63,94% dari total pekerja dan sisanya

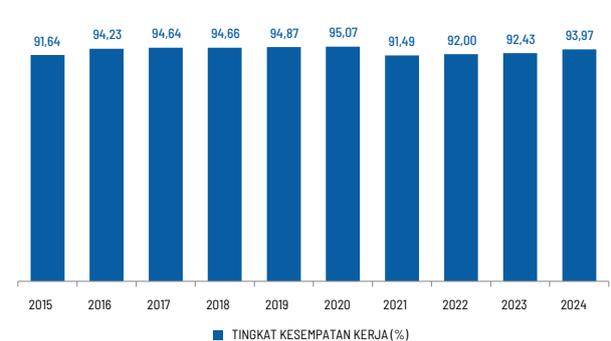
sebanyak 36,06% bekerja pada sektor informal. Jumlah pekerja sektor formal pada Februari 2024 tumbuh sebesar 3,07% (yoy), melambat dibandingkan periode Februari 2023 sebesar 6,12% (yoy). Sementara itu, jumlah pekerja sektor informal tumbuh sebesar 9,00% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi 2,79% (yoy) (Grafik 7.4).

Ditinjau dari status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yang termasuk dalam kategori pekerja sektor formal masih mendominasi total penduduk bekerja di DKI Jakarta, yakni lebih dari 2,9 juta orang. Sementara itu, status berusaha sendiri yang termasuk dalam kategori pekerja sektor informal menempati urutan kedua, yakni lebih dari 1,1 juta orang (Tabel 7.2).

Berdasarkan tingkat pendidikan, penyerapan tenaga kerja dari lulusan SMA mendominasi penduduk bekerja pada periode laporan. Jumlah tenaga kerja yang menamatkan pendidikan hingga tamat SMA memiliki pangsa sebesar 26,39% terhadap total penduduk bekerja dan tercatat tumbuh sebesar 11,20% (yoy) mencatat pertumbuhan positif tertinggi. Peringkat kedua diduduki oleh tenaga kerja lulusan SMK dengan pangsa sebesar 23,58%. Distribusi penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Februari 2023.



Grafik 7.1 Pertumbuhan Jumlah Orang Bekerja dan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

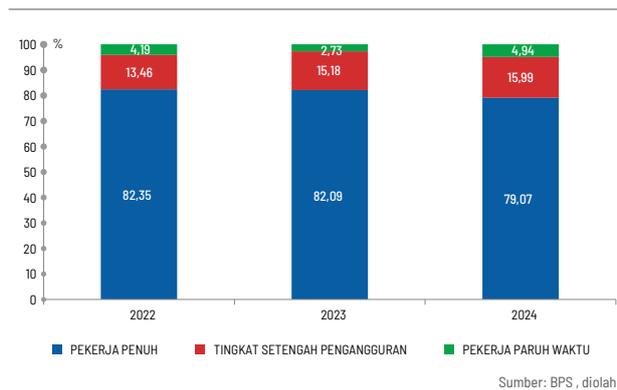


Grafik 7.2 Persentase Penyerapan Suplai Tenaga Kerja

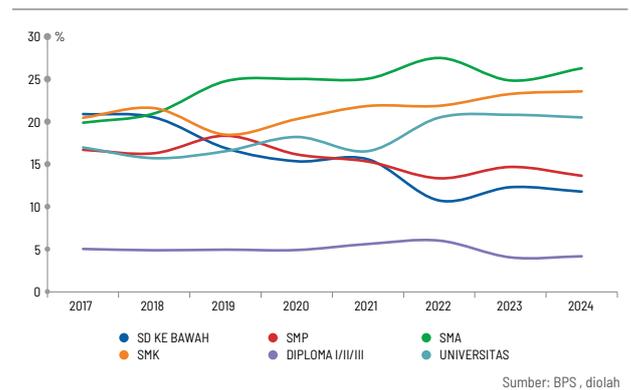
Tabel 7.1 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan

KEADAAN KETENAGAKERJAAN	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI										
Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	7.837,20	7.884,02	7.930,26	8.126,12	8.004,78	8.199,69	8.239,83	8.266,36	8.245,33	8.327,00	8.332,26	8.322,91	8.339,08
Angkatan Kerja (ribu orang)	5.429,20	5.041,62	5.447,51	5.192,35	5.438,99	5.232,03	5.365,77	5.177,31	5.134,13	5.252,40	5.255,24	5.427,23	5.434,37
Bekerja (ribu orang)	5.139,08	4.726,78	5.167,92	4.852,95	5.170,67	4.659,25	4.909,17	4.737,42	4.723,54	4.875,10	4.857,62	5.072,74	5.106,78
Pengangguran (ribu orang)	290,12	314,84	279,59	339,40	268,32	572,78	456,60	439,90	410,59	377,29	397,62	354,49	327,59
Bukan Angkatan Kerja (ribu orang)	2.408,00	2.842,40	2.482,75	2.933,77	2.565,78	2.967,66	2.874,05	3.089,04	3.111,20	3.074,61	3.077,02	2.895,68	2.904,71
Pekerja Sektor Formal (ribu orang)	3.451,80	3.300,10	3.381,35	3.331,72	3.509,49	2.878,42	3.146,80	2.924,71	2.985,37	3.077,31	3.167,99	3.234,64	3.265,17
Pekerja Sektor Informal (ribu orang)	1.687,29	1.426,68	1.786,57	1.521,23	1.661,18	1.780,83	1.762,38	1.812,71	1.738,17	1.797,80	1.689,63	1.838,10	1.841,61
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,27	63,95	68,69	63,90	67,95	63,81	65,12	62,63	62,27	63,08	63,07	65,21	65,17
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	94,66	93,76	94,87	93,46	95,07	89,05	91,49	91,50	92,00	92,82	92,43	93,47	93,97
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,34	6,24	5,13	6,54	4,93	10,95	8,51	8,50	8,00	7,18	7,57	6,53	6,03

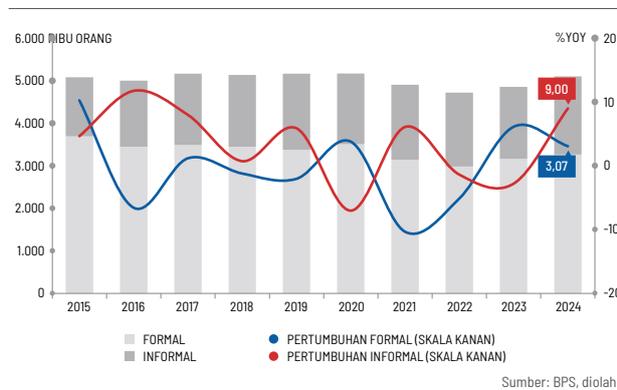
Sumber: BPS, diolah



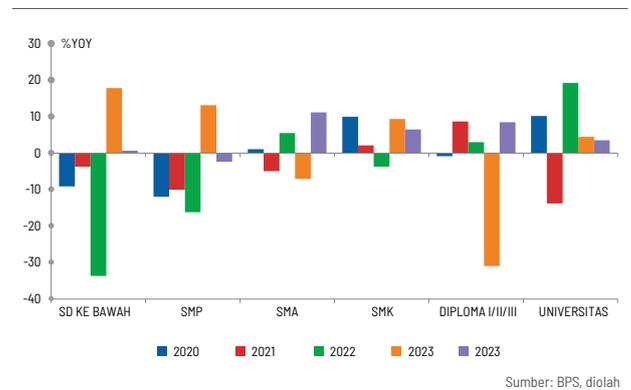
Grafik 7.3 Proporsi Penduduk Bekerja Berdasarkan Jam Kerja



Grafik 7.5 Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik 7.4 Proporsi dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Grafik 7.6 Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan

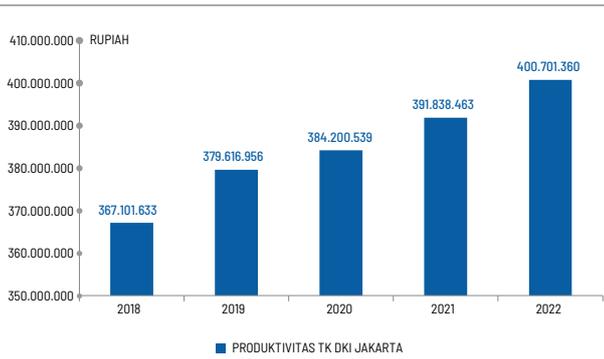
Tabel 7.2 Perkembangan Status Pekerjaan Utama

STATUS PEKERJAAN UTAMA (ribu orang)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI										
<b>Pekerja Sektor Formal</b>	3.451,80	3.300,10	3.381,35	3.331,72	3.509,49	2.878,42	3.146,80	2.924,71	2.985,37	3.077,31	3.167,99	3.234,64	3.265,17
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	191,45	195,40	226,63	182,54	252,49	152,65	203,20	151,53	186,23	154,15	269,38	186,11	306,94
Buruh/karyawan/pegawai	3.290,19	3.105,68	3.157,96	3.149,18	3.274,00	2.725,78	2.943,60	2.773,22	2.799,15	2.923,16	2.898,61	3.048,53	2.958,23
<b>Pekerja Sektor Informal</b>	1.687,29	1.426,68	1.786,57	1.521,23	1.661,18	1.780,83	1.762,38	1.812,71	1.738,17	1.797,80	1.689,63	1.838,10	1.841,61
Berusaha sendiri	933,70	925,70	1.163,75	1.039,46	1.129,09	1.136,33	1.112,88	1.111,80	1.080,50	1.183,10	1.084,94	1.162,88	1.115,36
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	275,05	218,62	224,32	213,64	227,02	241,51	254,75	253,86	249,18	195,35	253,32	248,45	343,32
Pekerja bebas pertanian	-	2,58	3,04	0,35	2,19	0,23	0,10	0,88	3,62	2,49	-	1,55	-
Pekerja bebas non pertanian	174,32	89,07	66,12	98,46	75,69	150,29	135,26	191,32	126,84	174,41	90,72	140,26	121,92
Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga	303,55	188,69	328,63	169,33	227,97	252,47	259,39	254,81	278,04	242,45	260,65	284,95	261,01

Sumber: BPS, diolah

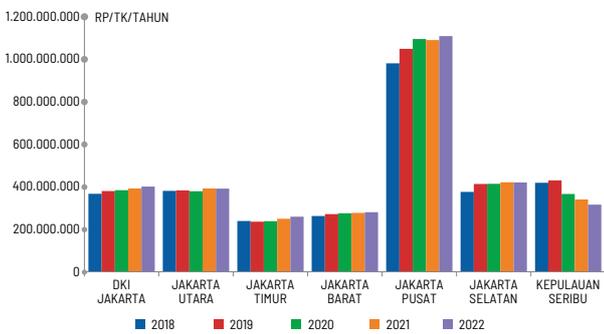
Lebih lanjut, tingkat pendidikan tenaga kerja yang membaik tersebut turut mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja di DKI Jakarta. Pada tahun 2022, produktivitas tenaga kerja DKI Jakarta tercatat sebesar Rp400,7 juta/TK/tahun, meningkat dibandingkan 4 tahun sebelumnya (Grafik 7.7). Secara spasial, produktivitas tertinggi di DKI Jakarta terjadi di Jakarta Pusat (Grafik 7.8).

Dari sisi lapangan usaha (LU), penyerapan tenaga kerja terbesar terdapat pada LU Perdagangan Besar dan Eceran sejalan dengan pertumbuhan positif sektor tersebut. Pangsa serapan tenaga kerja pada LU Perdagangan Besar dan Eceran mencapai 23,45% terhadap total penduduk bekerja Februari 2024. Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum (13,40%), LU Transportasi dan Pergudangan (11,96%), LU Industri Pengolahan (10,77%), LU Jasa Lainnya (9,58%) (Grafik 7.9 dan 7.10).



Sumber: Disnakertrans DKI Jakarta

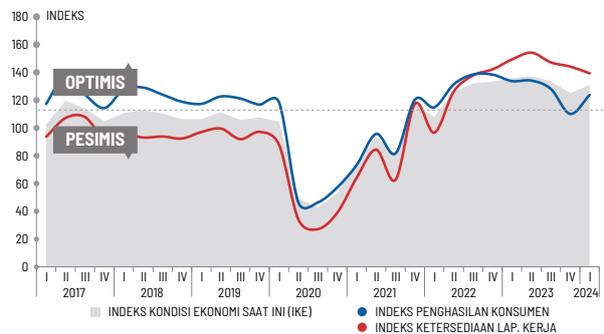
Grafik 7.7 Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta (Rp/TK/Tahun)



Sumber: Disnakertrans DKI Jakarta

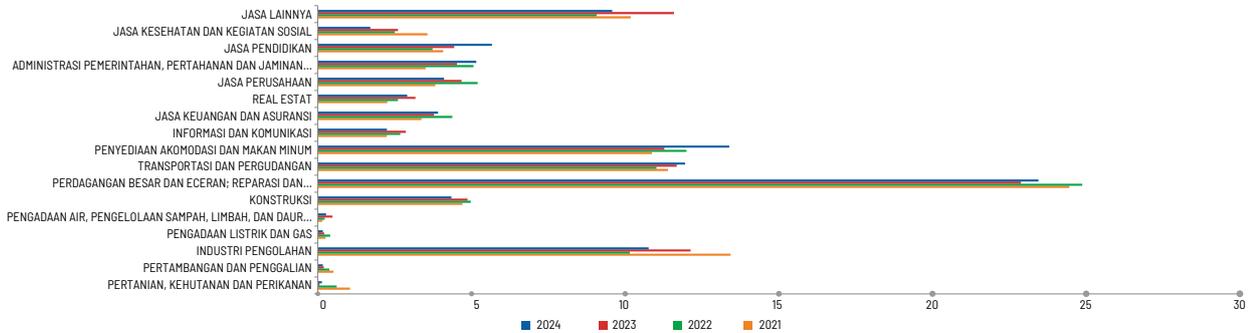
Grafik 7.8 Produktivitas TK Regional Provinsi DKI Jakarta (Rp/TK/Tahun)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Februari 2024 tercatat mencapai 6,03%, menunjukkan penurunan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,57%. Kondisi ini sejalan dengan hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) berada di atas batas level optimis pada triwulan I 2024 dan mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 7.11). Meskipun membaik, level TPT di DKI Jakarta masih lebih tinggi dibandingkan Nasional dan berada di posisi ketiga tertinggi di wilayah Jawa setelah Banten dan Jawa Barat (Grafik 7.12).



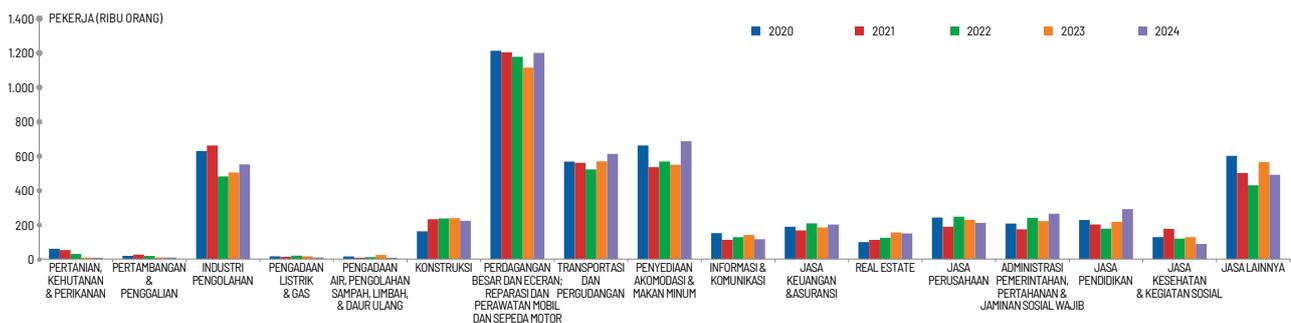
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 7.11 Indeks Kondisi Ekonomi, Penghasilan, dan Ketersediaan Lapangan Kerja



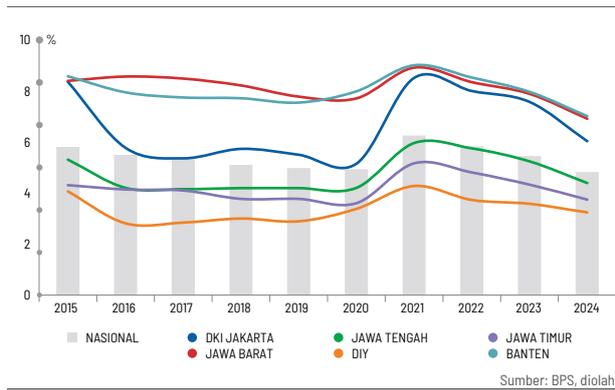
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.9 Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.10 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja



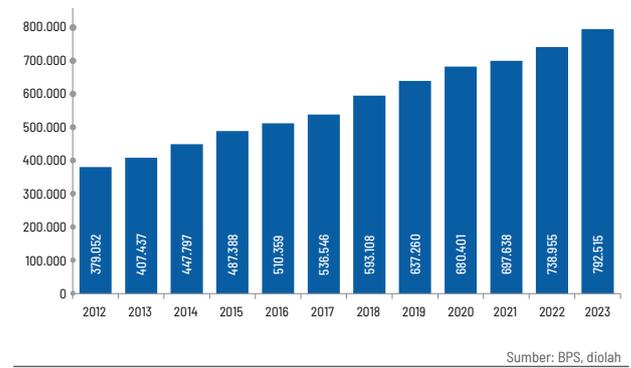
Sumber: BPS, diolah  
Grafik 7.12 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta

## B. KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta mengalami penurunan. Berdasarkan data Maret 2023, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta tercatat sebesar 4,44%, menurun dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 4,69% (Tabel 7.3). Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada Maret 2023 berada pada level 9,36% (Grafik 7.13). Menurunnya tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2023 dan pengurangan jumlah pengangguran (Grafik 7.14). Selain itu, gencarnya program bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Provinsi turut berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin.

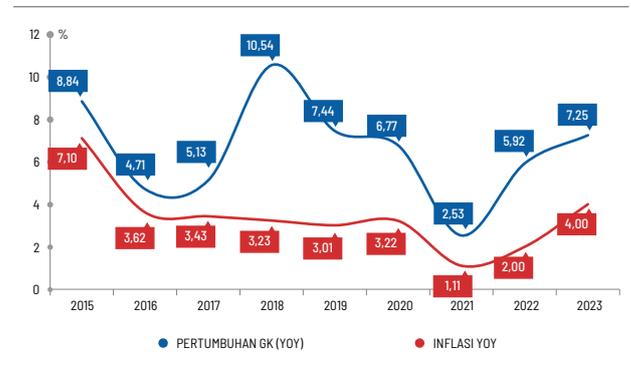
Angka Garis Kemiskinan (GK) terus mengalami kenaikan. Angka GK Provinsi DKI Jakarta pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp792.515 per kapita per bulan atau mengalami peningkatan sebesar 7,25% (yoy) dari angka GK Maret 2022 yang tercatat Rp738.955 per kapita per bulan (Grafik 7.15 dan Grafik 7.16). Pertumbuhan angka GK tersebut didorong oleh peningkatan pertumbuhan baik dari sisi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) (7,95%, yoy) maupun Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) (5,71%, yoy) (Grafik 7.17).



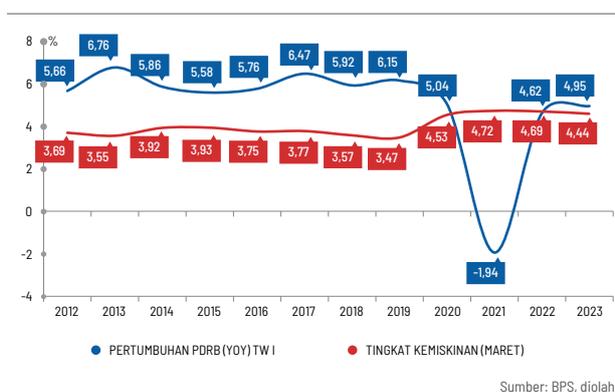
Sumber: BPS, diolah  
Grafik 7.15 Garis Kemiskinan DKI Jakarta



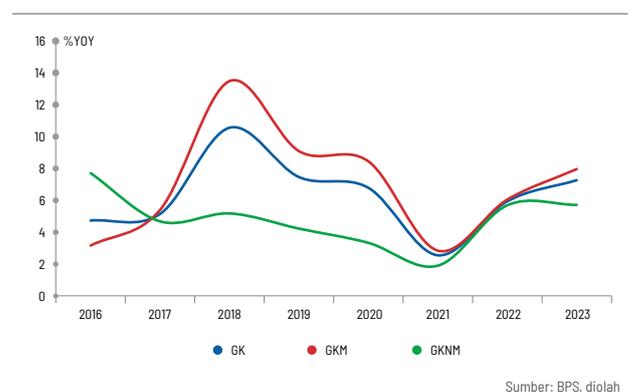
Sumber: BPS, diolah  
Grafik 7.13 Tingkat Kemiskinan Jakarta dan Nasional



Sumber: BPS, diolah  
Grafik 7.16 Pertumbuhan Garis Kemiskinan dan Inflasi IHK Jakarta



Sumber: BPS, diolah  
Grafik 7.14 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta

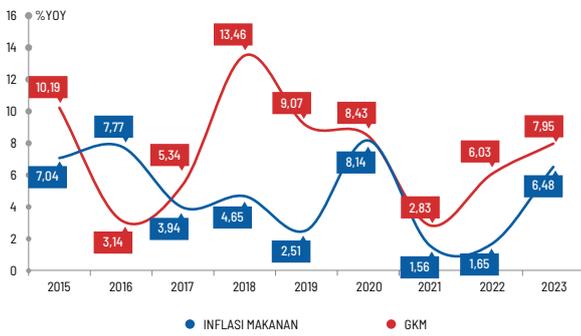


Sumber: BPS, diolah  
Grafik 7.17 Pertumbuhan Garis Kemiskinan dan Komponennya

Dari sisi komoditas, peningkatan GK DKI Jakarta lebih dipengaruhi oleh komoditas makanan, yakni mencapai 69,23% pada Maret 2023 (Grafik 7.19).

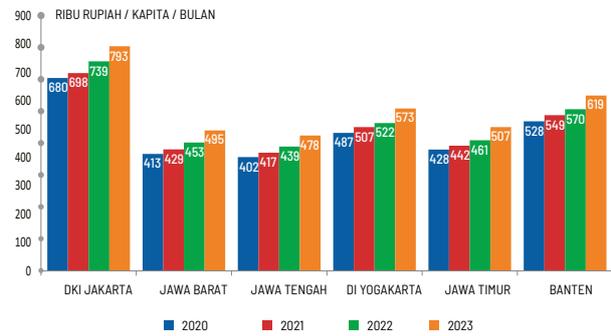
Dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling rendah namun dengan Garis Kemiskinan yang paling tinggi (Grafik 7.20 dan Grafik 7.21). Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan DKI Jakarta periode Maret 2023 juga menurun masing-masing sebesar 0,18 dan 0,70, lebih rendah dibandingkan Maret 2022 yang masing-masing sebesar 0,19 dan 0,77 (Grafik 7.22).

Sementara itu, tingkat kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta pada Triwulan I 2024 dalam tingkatan yang baik, hal ini didukung oleh keyakinan dan ekspektasi masyarakat yang masih optimis terhadap kondisi ekonomi. Berdasarkan hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa indeks keyakinan konsumen (IKK), indeks ekspektasi konsumen (IEK) dan indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) berada di atas batas level optimis pada triwulan I 2024 dan mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 7.23). Kenaikan IKE utamanya disebabkan oleh kenaikan indeks penghasilan konsumen dari 110,19 menjadi 123,62 dan indeks keyakinan konsumen tercatat sebesar 143,3, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (137,7). Berdasarkan komponen pembentuknya, Indeks kondisi



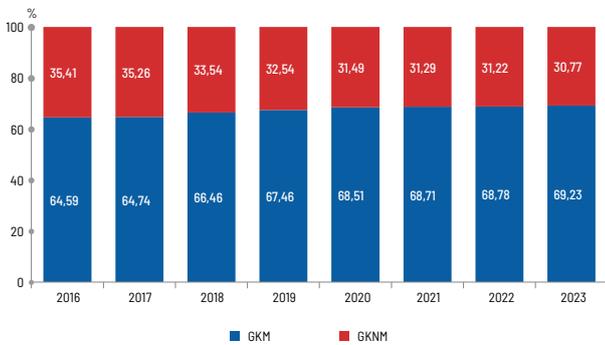
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.18 Pertumbuhan Garis Kemiskinan Makanan dan Inflasi Subkelompok Makanan



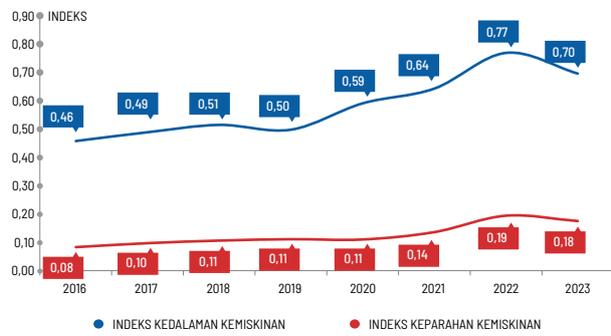
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.21 Garis Kemiskinan Provinsi di Jawa



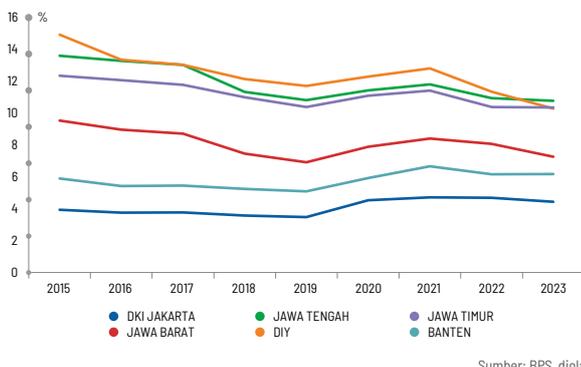
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.19 Porsi Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan



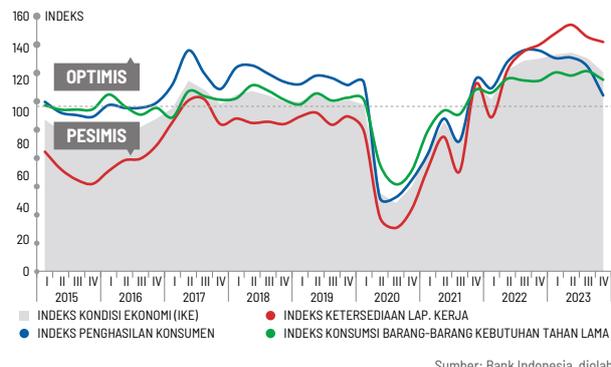
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.22 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.20 Tingkat Kemiskinan Provinsi di Jawa



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 7.23 Indeks Kondisi Ekonomi, Penghasilan, dan Ketersediaan Lapangan Kerja

ekonomi saat ini pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 130,7 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (124,6). Lebih lanjut, indeks ekspektasi konsumen juga mengalami peningkatan dari 150,9 di triwulan sebelumnya menjadi 155,9 pada triwulan I 2024.

Meskipun tingkat kemiskinan menurun, ketimpangan di DKI Jakarta pada periode Maret 2023 mengalami peningkatan. *Gap* antara pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas semakin tinggi. Pada periode pencatatan, indeks Rasio Gini DKI Jakarta tercatat 0,431. Indeks tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya (0,423) (Grafik 7.24). Indeks tersebut juga di atas capaian nasional yang sebesar 0,388, yang memiliki nilai sama dari periode sama tahun sebelumnya (0,381). Dari sisi nilai indeks, ketimpangan di DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang, melihat nilainya berada pada rentang 0,4-0,5. Namun demikian, naiknya angka ini juga patut menjadi perhatian karena berarti bahwa semakin banyak penduduk yang pengeluarannya masuk ke kelompok 40 persen terbawah.

Ketimpangan pada kelompok pengeluaran terendah lebih tinggi dibandingkan kelompok pengeluaran atas. Proporsi jumlah pendapatan penduduk pada kelompok 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk, yakni sebesar 16,99% pada Maret 2023 (Grafik 7.25). Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode sama tahun

sebelumnya yakni sebesar 16,60%. Sebaliknya, kontribusi pengeluaran kelompok 20 persen teratas menurun dari 50,18% menjadi 48,59%. Apabila fokus penanganan kemiskinan dapat lebih ditujukan untuk mendorong peningkatan alokasi pendapatan kepada 40% masyarakat berpendapatan rendah, maka perbaikan kondisi ketimpangan pendapatan dapat perlahan membaik.

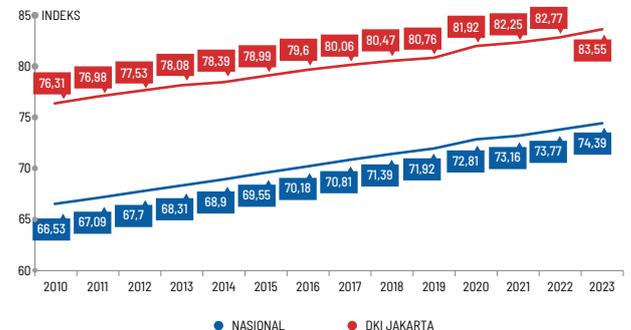
Dampak positif dari peningkatan alokasi pendapatan ini secara tidak langsung dapat berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2023, IPM DKI Jakarta kembali mengalami kenaikan. IPM DKI Jakarta tercatat tumbuh 0,94% (yoy) (Grafik 7.26). Pembangunan manusia di DKI Jakarta terus mengalami kemajuan. Pada 2020 lalu, IPM DKI Jakarta adalah sebesar 81,92 dan telah masuk dalam kategori yang “sangat tinggi” (IPM  $\geq$  80). Angka ini kemudian mengalami peningkatan pada 2021 menjadi 82,25 dan kembali meningkat menjadi 82,77 pada 2022. IPM 2023 kembali mencatatkan peningkatan menjadi 83,55. Secara keseluruhan, pada periode 2020-2023 rata-rata peningkatan adalah sebesar 0,85% setiap tahunnya. IPM DKI Jakarta jauh melampaui angka rata-rata IPM Indonesia yang hanya mencapai 74,39 (Grafik 7.27).

Pencapaian pembangunan manusia di seluruh kota DKI Jakarta juga memiliki tingkat perkembangan manusia yang berstatus “sangat tinggi” (IPM  $\geq$  80). Jakarta Selatan memiliki IPM tertinggi di Provinsi



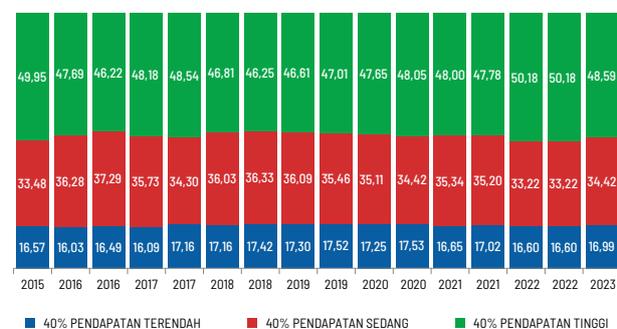
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.24 Rasio Gini Jakarta dan Nasional



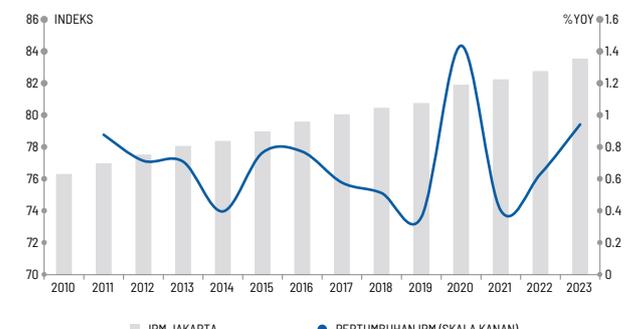
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.26 IPM Jakarta dan Nasional



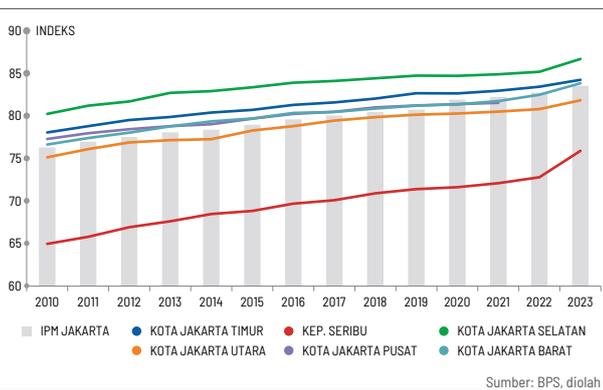
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.25 Distribusi Pendapatan DKI Jakarta



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.27 Pertumbuhan IPM DKI Jakarta



Grafik 7.28 IPM Kabupaten/Kota di DKI Jakarta

DKI Jakarta, yaitu 86,71, diikuti oleh Jakarta Timur dengan IPM 84,26, Jakarta Barat dengan IPM 83,85, Jakarta Pusat dengan IPM 83,29, dan Jakarta Utara dengan IPM 81,85. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Seribu masih memiliki tingkat perkembangan manusia yang berstatus "tinggi" ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ), dengan IPM sebesar 75,91 (Grafik 7.28).

### C. INDEKS KETIMPANGAN GENDER

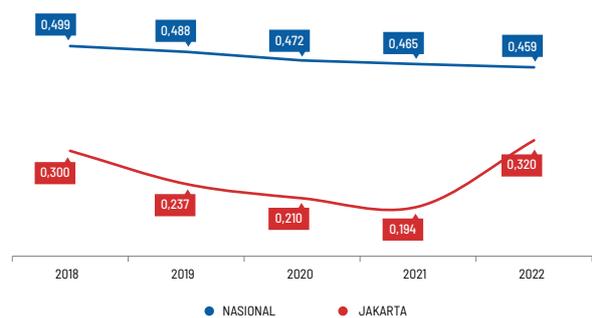
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan penerapan Indeks Ketidakesetaraan Gender yang diterapkan baik secara nasional maupun daerah, menggambarkan tingkat pembangunan manusia yang belum mencapai potensi optimal karena disparitas antara perempuan dan laki-laki dalam aspek-aspek seperti kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Pencapaian IKG akan mencapai titik optimal apabila kesehatan reproduksi perempuan terjaga dengan baik dan adilnya pemberdayaan serta partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pasar tenaga kerja. Indikator yang digunakan dalam mengukur IKG mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, aspek kesehatan reproduksi melibatkan Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia < 20 tahun (MHPK20). Kedua, aspek pemberdayaan Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA dan Persentase anggota legislative. Ketiga, dalam dimensi pasar tenaga kerja, indikator mencakup Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Ketimpangan gender di Jakarta mengalami tren penurunan selama periode 2019 hingga 2021. Namun, terjadi peningkatan pada tahun 2022 sebelum akhirnya kembali menurun pada tahun 2023. Penurunan ketimpangan gender ini terutama disebabkan oleh berkurangnya ketimpangan dalam pasar tenaga kerja. Tercatat bahwa tingkat ketimpangan terendah terjadi pada tahun 2021 dengan angka 0,194, sementara puncak ketimpangan tercapai pada tahun 2022 dengan

angka 0,320 (Grafik 7.29). Selama periode 2018-2023, pencapaian IKG DKI Jakarta selalu berada di bawah rata-rata nasional. Ketimpangan gender di DKI Jakarta relatif lebih baik daripada rata-rata nasional, seiring dengan semakin berkurangnya ketidakesetaraan gender yang mencerminkan perbaikan kesetaraan.

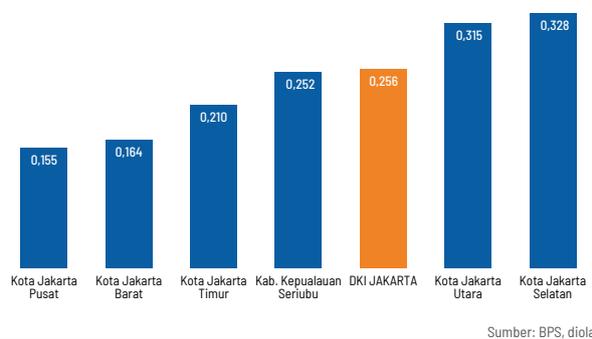
Dalam periode 2019-2023, terjadi perbaikan capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di tingkat kabupaten dan kota. Pada tahun 2023, Kota Jakarta Pusat mencapai tingkat ketimpangan gender terendah dengan nilai 0,155. Pencapaian ini diikuti oleh Kota Jakarta Barat dengan nilai 0,164, Kota Jakarta Timur dengan nilai 0,210, Kabupaten Kepulauan Seribu dengan nilai 0,252, Kota Jakarta Utara dengan nilai 0,315, dan Kota Jakarta Selatan dengan nilai 0,328.

Sementara itu, bila dibandingkan antara provinsi-provinsi, nilai IKG Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 0,256 (Grafik 7.30) menempatkan provinsi tersebut pada peringkat kedua ketiga, setelah Bali yang mencapai 0,239. Penurunan nilai IKG yang semakin rendah mencerminkan pencapaian dalam kesetaraan gender, dan hal tersebut berlaku pula sebaliknya.



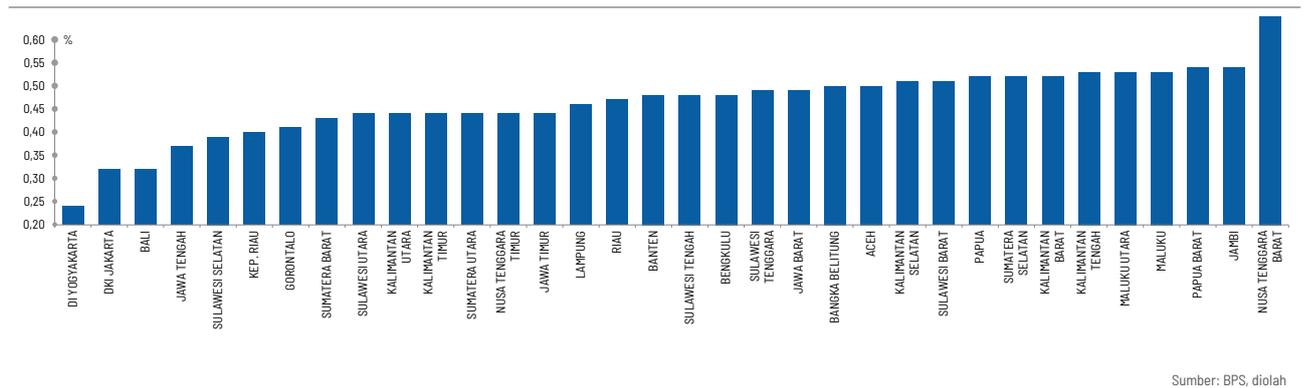
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.29 IKG Jakarta dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.30 IKG DKI Jakarta Menurut Kab/Kota



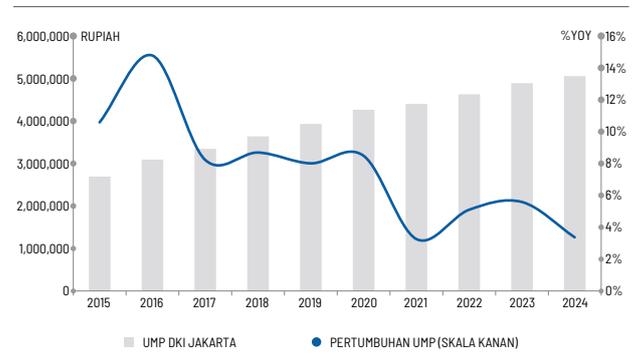
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.31 IKG Menurut Provinsi

## D. UPAH TENAGA KERJA

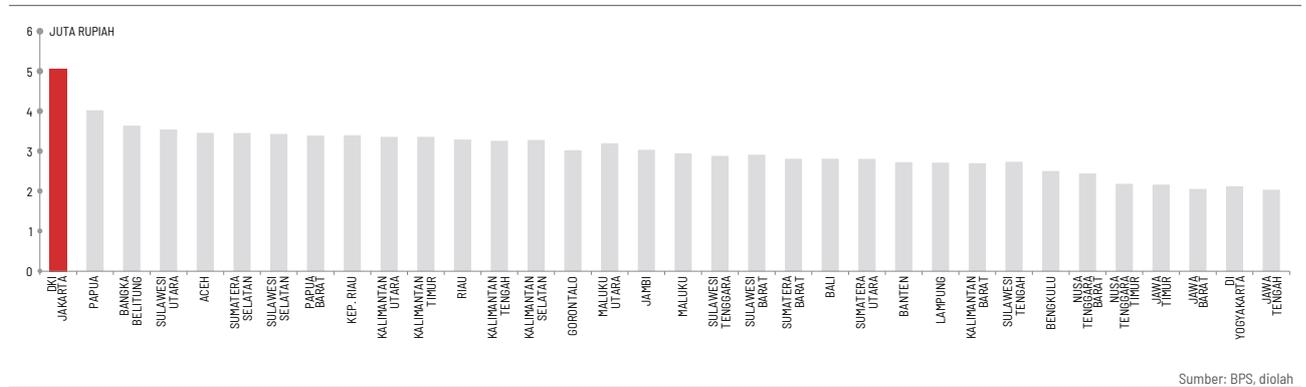
Pada tahun 2024, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta kembali mengalami kenaikan. UMP DKI Jakarta telah ditetapkan sebesar Rp5.067.381, meningkat 3,38% dibandingkan tahun 2023 (Rp4.901.798) (Grafik 7.31). Ketetapan tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur (Keppub) DKI Jakarta 818/2023 tentang UMP Jakarta 2024 tanggal 21 November 2023.

UMP DKI Jakarta untuk tahun 2024 menduduki peringkat tertinggi di antara provinsi-provinsi di Indonesia.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.32 Perkembangan UMP DKI Jakarta



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.33 UMP Provinsi di Indonesia

## BAB 8

# PROSPEK PEREKONOMIAN

Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Jakarta diperkirakan meningkat pada kisaran 4,8-5,6% (yoy) sejalan dengan masih kuatnya optimisme konsumen, semakin tingginya aktivitas MICE dan event di Jakarta, berlangsungnya pemilu, serta berlanjutnya pembangunan proyek strategis Pemerintah. Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi Jakarta pada 2024 didorong oleh membaiknya konsumsi rumah tangga seiring dengan terjaganya daya beli serta meningkatnya aktivitas MICE dan event; membaiknya konsumsi Pemerintah sejalan dengan perbaikan postur APBN dan APBD, serta meningkatnya kinerja investasi sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek strategis Pemerintah. Di sisi lain, kinerja ekspor diperkirakan masih akan tertahan sejalan dengan meluasnya tensi geopolitik dan pembatasan kuota ekspor di beberapa negara. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada 2024 akan ditopang oleh pertumbuhan positif 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Namun demikian, beberapa risiko yang perlu dicermati yang dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu tertahannya perekonomian global, meluasnya tensi geopolitik, dan keberlanjutan stance moneter ketat AS (higher for longer).

Dari sisi harga, inflasi DKI Jakarta pada 2024 diperkirakan akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi yang semakin rendah sebesar  $2,5\pm 1\%$  (yoy). Perkiraan tersebut terutama didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif pasca berlangsungnya el-nino pada 2023 yang juga didukung oleh penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).



**Proyeksi Ekonomi Global  
WEO IMF (yoy)**

**3,2%**

Tahun 2024, yoy

**2,9%**

Tahun 2023, yoy

**Proyeksi Pertumbuhan Volume  
Perdagangan Dunia WEO IMF (yoy)**

**3,0%**

Tahun 2024, yoy

**3,5%**

Tahun 2023, yoy

**Proyeksi Pertumbuhan  
Ekonomi DKI Jakarta (yoy)**

**4,8% - 5,6%**

Tahun 2024, yoy

**Proyeksi Inflasi IHK  
DKI Jakarta**

**2,5% ± 1%**

Tahun 2024, yoy

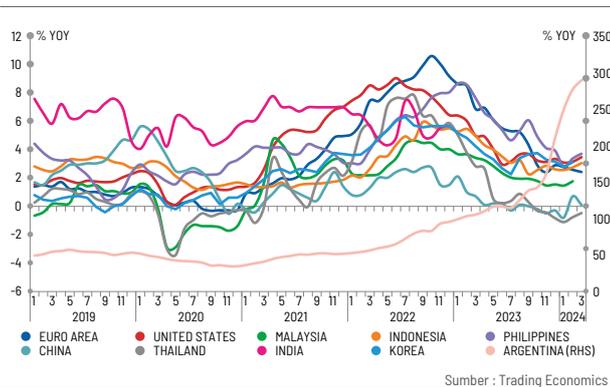
## A. PROSPEK PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

### Prospek Perekonomian Global

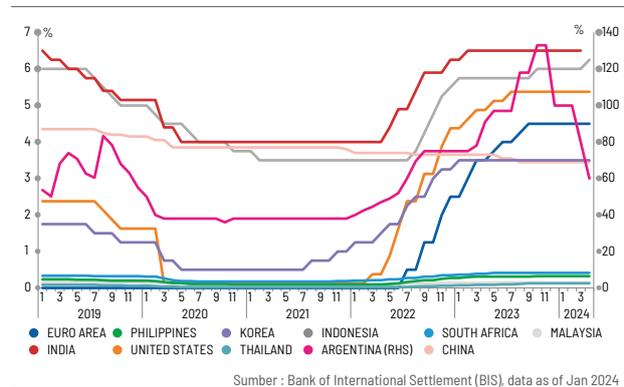
Pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. Ekonomi global diprakirakan tumbuh sebesar 3,2% pada 2024 (WEO IMF), lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang sebesar 3,1%. Perbaikan terutama ditopang prospek pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan pertumbuhan beberapa negara berkembang yang tetap kuat ditopang oleh perbaikan permintaan domestik. Dari sisi inflasi, sejalan dengan masih tingginya pertumbuhan ekonomi AS, inflasi AS pada April 2024 tetap tinggi meskipun menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun demikian, proses disinflasi terus berlanjut dan diharapkan dapat menghasilkan pelonggaran kebijakan moneter yang lebih luas di berbagai negara (Grafik 8.1 dan 8.2). pelonggaran kebijakan moneter di berbagai negara kemudian diharapkan dapat mendorong tingkat penghasilan dan permintaan domestik sehingga dapat membantu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, berbagai eskalasi ketegangan geopolitik antara lain konflik di Gaza dan Israel yang terus meningkat lebih jauh ke wilayah yang lebih luas, konflik berkelanjutan di Laut Merah dan perang

yang sedang berlangsung di Ukraina diprakirakan dapat mengganggu rantai pasokan, meningkatkan harga komoditas pangan dan energi, serta menahan laju penurunan inflasi global.

Perekonomian Amerika Serikat (AS) pada 2024 diprakirakan tumbuh meningkat, lebih baik dibandingkan proyeksi sebelumnya. Kondisi tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan konsumsi RT yang lebih kuat dibandingkan perkiraan sebelumnya. Konsumsi RT yang tumbuh kuat sejalan dengan tren penurunan inflasi inti AS yang disebabkan oleh meredanya inflasi jasa dan perumahan. Tumbuh kuatnya konsumsi RT juga didorong oleh pasar tenaga kerja yang kuat didukung oleh pertumbuhan upah riil yang positif serta tingkat pengangguran yang masih akan rendah sehingga mendorong penghasilan. Sejalan dengan inflasi yang mulai menurun, kebijakan moneter diprakirakan akan melonggar pada paruh kedua 2024 setelah inflasi diperkirakan turun mendekati target 2%. Sementara itu, defisit anggaran diperkirakan akan tetap besar dengan pengetatan kebijakan fiskal yang moderat pada tahun 2024 setelah ekspansi fiskal yang tidak terduga pada tahun 2023. Defisit anggaran yang besar dan tingginya utang meningkatkan risiko fiskal AS. Meskipun pertumbuhan ekonomi AS diproyeksikan lebih baik dibandingkan prakiraan sebelumnya, namun ketegangan yang meningkat di Timur Tengah berpotensi mendorong harga energi



Grafik 8.1 Laju Inflasi Negara-Negara di Dunia



Grafik 8.2 Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral di Dunia

Tabel 8.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen (yoy))

	REALISASI					WEO IMF		WORLD BANK		OECD		
	2019	2020	2021	2022	2023	JAN-24	APR-24	JUN-23	JAN-24	NOV-23	MAY-24	
						2024	2024	2024	2024	2024	2024	
Dunia	2,8	-3,2	5,9	3,5	3,2	3,1	3,2	3,1	2,4	2,4	2,7	3,1
Negara Maju	1,6	-4,3	5,3	2,6	1,6	1,5	1,7	1,2	1,2			
Amerika Serikat	2,2	-2,8	5,9	2,1	2,5	2,1	2,7	0,8	1,6	1,5	2,6	
Kawasan Euro	1,3	-6,1	5,3	3,3	0,4	0,9	0,8	1,3	0,7	0,9	0,7	
Jepang	0,3	-4,3	2,2	1,0	1,9	0,9	0,9	0,7	0,9	1,0	0,5	
Negara Berkembang	3,6	-1,5	6,7	4,1	4,3	4,1	4,2	3,9	3,9			
Tiongkok	5,8	2,2	8,1	3,0	5,2	4,6	4,6	4,6	4,5	4,7	4,9	
India	4,7	-6,6	8,7	7,2	7,8	6,5	6,8	6,4	6,4	6,1	6,6	
Volume Perdagangan Dunia	1,0	-8,2	10,1	5,2	0,3	3,3	3,0	2,8	2,3			
Harga Minyak (USD)		42,3	70,4	39,2	-16,4	-2,3	-2,5	82,0	81,0			

Sumber: World Economic Outlook (WEO) IMF, World Bank, OECD

meningkat sehingga berisiko akan kembali meningkatkan inflasi AS dan lebih lanjut akan menahan pertumbuhan ekonomi AS. Selain itu, adanya risiko keberlanjutan fiskal AS berpotensi memberikan dampak pada pengetatan kondisi keuangan baik AS maupun global sehingga menyebabkan tertahannya pertumbuhan sektor swasta.

Di Kawasan Euro (EA), pertumbuhan ekonomi pada 2024 diperkirakan tumbuh lebih baik meskipun masih lemah. Masih lemahnya pertumbuhan ekonomi EA pada 2024 terutama bersumber dari masih lemahnya kinerja konsumsi RT dan ekspor. Ketegangan geopolitik yang meningkat mendorong semakin tingginya ketidakpastian sehingga mempengaruhi optimisme dan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan. Selain itu, meningkatnya ketegangan geopolitik juga memberikan dampak pada masih lemahnya kinerja ekspor barang di tengah meningkatnya ekspor jasa. Di sisi lain, tekanan inflasi akibat meredanya harga energi mulai menurun sehingga diharapkan dapat mendorong konsumsi RT tumbuh lebih tinggi. Dari sisi fiskal, kebijakan fiskal EA akan tetap ketat selama 2024 dengan dukungan fiskal difokuskan untuk meredam dampak biaya energi yang tinggi, pemberian insentif fiskal untuk reformasi struktural serta investasi untuk memastikan keamanan energi dan mempercepat transisi hijau.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Jepang pada 2024 diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan produksi dan kinerja ekspor sejalan dengan adanya permasalahan kualitas dan keamanan pada industri otomotif. Menurunnya ekspor khususnya ekspor barang juga disebabkan oleh lemahnya permintaan dari negara utama tujuan ekspor Jepang seperti Asia dan Kawasan Euro (EA). Sementara itu, ekspor Jasa juga masih lemah dipengaruhi oleh masih rendahnya jumlah wisatawan Tiongkok meskipun total jumlah wisatawan yang datang ke Jepang sudah melampaui level pra-pandemi. Di sisi lain, kinerja investasi khususnya investasi swasta diperkirakan meningkat didukung oleh penghasilan swasta yang meningkat serta meningkatnya rencana investasi ke depan.

Di Tiongkok, pertumbuhan ekonomi pada 2024 diperkirakan melambat sejalan dengan masih berlanjutnya penurunan kinerja sektor *real estate* dan perumahan. Perlambatan juga dipengaruhi oleh tertahannya pertumbuhan konsumsi RT yang dipengaruhi oleh munculnya kebiasaan untuk menabung/melakukan penghematan pascapandemi. Selain itu, kinerja ekspor juga masih lemah sejalan dengan masih lemahnya permintaan. Meskipun demikian, kinerja investasi khususnya pada sektor infrastruktur dan manufaktur masih tumbuh stabil dan moderat. Pemulihan impor pariwisata yang lemah juga berdampak positif pada tertahannya pertumbuhan impor sehingga mendorong surplus transaksi berjalan. Pemulihan ekonomi Tiongkok diperkirakan juga akan ditopang oleh kebijakan makroekonomi yang mendukung termasuk stimulus fiskal yang cukup besar pada 2024 untuk mendorong permintaan domestik.

Perekonomian India pada 2024 diperkirakan masih tetap tumbuh tinggi meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian yang masih tetap tumbuh tinggi diperkirakan bersumber dari masih kuatnya permintaan domestik serta pertumbuhan investasi terutama pada sektor transportasi, energi dan jasa didukung oleh meningkatnya kepercayaan bisnis di India. Permintaan *real estate* dari pihak swasta juga diperkirakan masih akan tumbuh kuat. Namun demikian, berlanjutnya konflik di Timur Tengah dan konflik di Laut Merah diperkirakan akan menahan perdagangan India.

### Prospek Perekonomian Nasional

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan berada dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy) (Grafik 8.2). Prospek ini didukung permintaan domestik yang tetap kuat dari konsumsi rumah tangga, meningkatnya investasi terutama investasi bangunan ditopang oleh berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) di sejumlah daerah dan berkembangnya properti swasta sebagai dampak positif dari insentif Pemerintah. Meskipun demikian, konsumsi rumah tangga dan investasi nonbangunan perlu terus didorong untuk mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, kinerja ekspor barang belum kuat dipengaruhi oleh penurunan ekspor komoditas sejalan dengan harga komoditas yang turun dan permintaan dari mitra dagang utama, seperti Tiongkok, yang masih lemah. Berlanjutnya perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional juga ditopang oleh kuatnya kinerja berbagai lapangan usaha seperti sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Konstruksi. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah tetap baik, didukung oleh permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih baik pada 2024 didukung oleh keyakinan konsumen yang tetap optimis terhadap perbaikan kondisi ekonomi ke depan serta dampak positif pengaruh dari pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak. Inflasi yang diperkirakan tetap terkendali juga diperkirakan akan memberikan dampak positif pada terjaganya daya beli masyarakat. Tumbuh positifnya konsumsi rumah tangga juga tercermin pada perkembangan penjualan eceran, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur, dan ekspektasi penghasilan yang tetap baik.

Dukungan fiskal untuk mendukung perekonomian masih kuat. Pada 2024, arsitektur kebijakan fiskal diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga

dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada tahun 2024.

Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan negara tahun 2024 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Hal ini ditempuh antara lain dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Adapun belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, belanja negara tahun 2024 akan berada pada rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB. Berdasarkan hal tersebut, keseimbangan primer APBN terus diupayakan bergerak menuju positif. Defisit APBN direncanakan tetap berada di bawah 3%, berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB dan rasio utang dijaga dalam batas manageable di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB.

Dalam rangka terus memperkuat ketahanan fiskal, kebijakan pembiayaan tahun 2024 diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden dan berkesinambungan. Hal tersebut ditempuh antara lain dengan mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF, antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan fiscal buffer yang andal dan efisien, menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan 3/3 fiskal, moneter, dan sektor keuangan, meningkatkan akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan meningkat juga didorong oleh peningkatan kinerja investasi pada 2024. Penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) serta masuknya investasi asing untuk mendorong proyek *green investment* diperkirakan akan mendorong kinerja investasi. Dari sisi nonbangunan, kegiatan investasi diperkirakan akan sedikit tertahan sejalan dengan *wait and see* investor pada periode pemilu sehingga perlu terus didorong agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kinerja ekspor pada tahun 2024 diperkirakan mengalami perbaikan sejalan dengan proyeksi perekonomian global yang lebih baik di tengah ekonomi Tiongkok yang diperkirakan tertahan. Ekspor jasa juga diperkirakan akan terus membaik di 2024. Adanya pelaksanaan berbagai *event* skala internasional diperkirakan akan mendorong kinerja ekspor jasa pada 2024.

Tabel 8.2 Proyeksi PDB Nasional

	2021	2022	2023				2023	2024*
			I	II	III	IV		
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>3,70</b>	<b>5,31</b>	<b>5,04</b>	<b>5,17</b>	<b>4,94</b>	<b>5,04</b>	<b>5,05</b>	<b>4,7-5,5</b>
Konsumsi Swasta	2,01	4,94	4,57	5,30	5,08	4,78	4,93	4,7-5,5
Konsumsi Pemerintah	4,24	-4,51	3,34	10,57	-3,76	2,81	2,95	3,6-4,4
Investasi	3,80	3,87	2,11	4,63	5,77	5,02	4,40	5,1-5,9
Ekspor	17,95	16,28	11,94	-2,97	-4,26	1,64	1,32	0,3-1,1
Impor	24,87	14,75	3,69	-3,06	-6,18	-0,15	-1,65	-1,0-2,0

Sumber : BPS dan Proyeksi Bank Indonesia,  
\*Angka Sementara

Kinerja impor pada tahun 2024 masih akan tumbuh positif dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tetap positifnya kinerja impor ditopang oleh impor barang konsumsi dan bahan baku sejalan dengan masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan perbaikan kinerja ekspor. Impor barang modal juga diperkirakan meningkat, seiring dengan berlanjutnya pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi nasional di 2024 akan ditopang sejumlah sektor yang diperkirakan akan tumbuh kuat, seperti Pertambangan dan Penggalian dan Konstruksi ditopang oleh anggaran belanja negara serta berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah.

Dari sisi harga, inflasi pada tahun 2024 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1%. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, *imported inflation* yang terkendali sejalan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi *Volatile Food* (VF) diperkirakan juga kembali menurun seiring peningkatan produksi akibat masuknya musim panen dan dukungan sinergi pengendalian inflasi TPIP dan TPID melalui GNPIP di berbagai daerah. Inflasi *administered prices* juga diperkirakan akan rendah dengan potensi penyesuaian harga energi *administered prices* yang lebih minimal. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan moneter *pro stability* dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan Pemerintah Pusat-Daerah sehingga inflasi tahun 2024 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%.

## B. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI JAKARTA

Pada 2024, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya pada batas bawah kisaran 4,8-5,6% (yoy). Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi Jakarta pada 2024 ditopang oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat sejalan dengan kenaikan penghasilan (UMP dan gaji ASN) serta terkendalinya laju inflasi. Meningkatnya

aktivitas MICE dan *event* baik skala nasional maupun internasional di Jakarta juga turut mendorong konsumsi RT tumbuh meningkat. Konsumsi Pemerintah juga diperkirakan tumbuh positif setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi, sejalan dengan perbaikan postur APBN dan APBD serta kenaikan belanja untuk mendukung pemilu. Adapun kinerja investasi juga diperkirakan masih akan tumbuh meningkat didorong terutama oleh masih masuknya investasi untuk berbagai pembangunan proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta yang bersifat multitalahun. Di sisi lain, kinerja ekspor diperkirakan tumbuh melambat dipengaruhi terutama oleh dinamika perkembangan ekonomi global pada 2024.

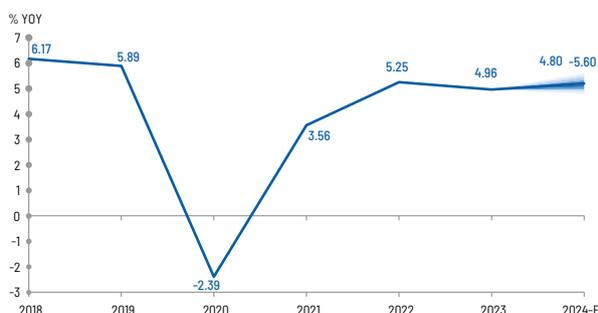
Dari sisi lapangan usaha, 3 (tiga) sektor utama Jakarta yaitu sektor perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi diperkirakan tumbuh lebih baik dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2024. Selain itu, sektor akmamin juga diperkirakan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2024 sejalan dengan berlangsungnya beberapa event (konser musik dan olahraga) skala internasional yang diselenggarakan di Jakarta antara lain Event musik : Bruno Mars, Jonas Brothers, Ed Sheeran dan Event Olahraga : Indonesia International Open 2024, Jakarta International Marathon 2024, Asian Riffle/Pistol Championship 2024, dan UFC 2024. LU konstruksi juga diperkirakan tumbuh lebih baik sejalan dengan masih berlanjutnya pembangunan proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta. Sementara itu, 2 (dua) LU utama lainnya yaitu infokom dan jasa keuangan diperkirakan tumbuh melambat pada 2024.

Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh meningkat. Kondisi tersebut terindikasi dari beberapa indikator ekonomi seperti proyeksi penjualan mobil oleh Gaikindo pada tahun 2024 yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, penyaluran kredit konsumsi yang masih tumbuh tinggi, serta indeks ekspektasi konsumen yang meningkat. Kondisi tersebut juga didukung oleh meningkatnya penghasilan masyarakat sejalan dengan adanya kenaikan UMP Jakarta sebesar 3,38% dan kenaikan gaji ASN sebesar 8% serta berlanjutnya kebijakan pemberlakukan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 0% untuk mobil listrik. Semakin meningkatnya penyelenggaraan berbagai kegiatan MICE dan *event* skala nasional dan

internasional pada 2024, termasuk MICE dalam rangka mendukung aktivitas pemilu juga diperkirakan akan mendorong peningkatan konsumsi RT. Berdasarkan data terkini, terdapat 19 konser musik yang sudah terjadwal akan dilaksanakan di DKI Jakarta. Jumlah ini kemungkinan besar akan terus bertambah sampai dengan akhir tahun 2024. Beberapa konser musik khususnya skala internasional yang akan dilaksanakan di DKI Jakarta pada 2024 yaitu Bruno Mars, Jonas Brother Concert, dan The 38th Golden Disc Awards. Untuk *event* olahraga terdapat 9 event olahraga yang saat ini sudah terjadwal dilaksanakan di DKI Jakarta, dengan mayoritas berskala internasional, yaitu antara lain Indonesia Master 2024 (Super 500), Jakarta International Marathon, dan Indonesia International Open 2024. Sama halnya dengan konser musik dan event olahraga, kegiatan MICE di DKI Jakarta yang sudah terjadwal sampai dengan saat ini berjumlah masing-masing sebesar 299 event untuk pameran dan 1822 event untuk konferensi. Jumlah tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan jumlah pameran dan konferensi di 2023.

Setelah tumbuh negatif pada tahun 2023, konsumsi Pemerintah pada 2024 diperkirakan tumbuh positif. Kondisi tersebut sejalan dengan perbaikan postur belanja APBD dan APBN serta meningkatnya belanja antara lain belanja pegawai sejalan dengan kenaikan gaji ASN dan belanja barang dan jasa serta bantuan sosial untuk mendukung aktivitas pemilu dan pilkada serentak. Meningkatnya belanja modal dalam rangka akselerasi pembangunan berbagai proyek strategis Pemerintah sebelum pergantian kepemimpinan juga diperkirakan akan mendorong konsumsi Pemerintah pada 2024. Kinerja konsumsi Pemerintah juga diperkirakan didukung oleh defisit APBN Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar 2,29% (dibawah 3%) terhadap PDB atau secara nominal sebesar Rp522,8 triliun. Dari sisi APBD, konsumsi Pemerintah pada 2024 juga diperkirakan akan ditopang oleh pagu belanja operasi APBD DKI Jakarta terutama pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta rencana penyerapan anggaran belanja yang lebih optimis untuk minimalisasi SILPA.

Adapun kinerja investasi pada tahun 2024 diperkirakan juga akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya kinerja investasi terutama didorong oleh investasi bangunan sejalan dengan masih berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis Pemerintah dan swasta. Masih berlanjutnya proyek strategis Pemerintah multitalahun di DKI Jakarta seperti NCICD (pelaksanaan proyek pada 2022-2028), MRT fase II, III, dan IV, LRT Jakarta, *Transit Oriented Development* (TOD) serta berbagai proyek *green economy* dan *renewable energy* seperti infrastruktur EV, *waste management*, dan *green commercial/industrial zone* diperkirakan akan mendorong kinerja investasi pada tahun 2024. Selain itu, adanya proyek strategis baru di Jakarta yang masuk dalam daftar PSN 2024 yaitu pengembangan PIK 2 dengan total investasi sebesar Rp 40 Triliun juga diperkirakan akan mendorong kinerja investasi Jakarta pada 2024.



Sumber : BPS (diolah), Proyeksi BI

Grafik 8.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2024

Di sisi lain, kinerja ekspor pada 2024 diprakirakan tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Melambatnya kinerja ekspor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perlambatan ekonomi dan resesi di beberapa negara tujuan ekspor Jakarta, meluasnya ketegangan geopolitik termasuk konflik di Laut Merah, berhentinya produksi dan ekspor ke beberapa negara tertentu akibat permasalahan keamanan dan kualitas serta pembatasan kuota ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor. Melambatnya kinerja ekspor lebih lanjut diprakirakan akan tertahan oleh ekspor jasa yang masih tetap tumbuh tinggi didorong oleh meningkatnya kunjungan wisman ke DKI Jakarta, baik untuk tujuan *leisure* maupun bisnis sejalan dengan berlangsungnya berbagai kegiatan MICE dan *event* (musik dan olahraga) baik skala domestik maupun internasional di 2024.

Berbeda dengan kinerja ekspor yang melambat, kinerja impor DKI Jakarta pada tahun 2024 diprakirakan tumbuh meningkat bersumber dari meningkatnya seluruh komponen impor baik impor barang konsumsi, barang modal, dan bahan baku sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik, meningkatnya investasi serta membaiknya kinerja ekspor.

Dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 masih akan ditopang oleh kinerja lapangan usaha utama seperti LU Perdagangan, LU Industri pengolahan, dan LU Konstruksi.

Pada 2024, LU perdagangan diprakirakan tumbuh meningkat sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga yang didorong oleh kenaikan UMP dan gaji ASN pada 2024. Kondisi ini juga terindikasi dari proyeksi penjualan mobil Gaikindo pada 2024 yang juga diprakirakan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Selain itu, faktor lainnya yang mendorong kinerja LU Perdagangan yaitu semakin masifnya pelaksanaan MICE dan *event* skala internasional di DKI Jakarta, termasuk MICE dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak pada 2024.

Dari sisi LU Industri Pengolahan, kinerja industri pengolahan pada 2024 diprakirakan tumbuh meningkat yang terutama didorong untuk pemenuhan permintaan domestik. Beberapa jenis industri yang diprakirakan akan tumbuh meningkat yaitu industri makan dan minum, industri tekstil, dan industri kimia. Di sisi lain, kinerja industri pengolahan yang lebih baik diprakirakan akan tertahan sejalan dengan penurunan kinerja industri terutama industri otomotif sejalan dengan penurunan kinerja ekspor akibat adanya permasalahan kualitas dan keamanan serta pembatasan kuota ekspor.

LU Konstruksi pada 2024 diprakirakan juga akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya LU konstruksi terutama didorong oleh masih berlanjutnya pembangunan beberapa proyek strategis Pemerintah di DKI Jakarta yang bersifat multitalun yaitu antara lain NCICD, 6 ruas jalan tol dalam kota, MRT, LRT Jakarta serta kawasan TOD. Selain itu, juga terdapat proyek pembangunan

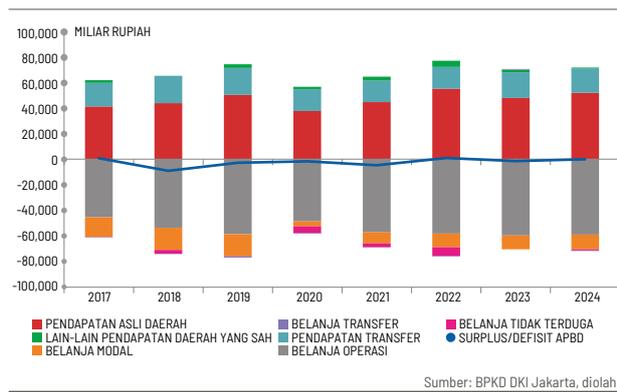
jaringan jalan tol JORR 2 yang ditargetkan selesai pada tahun 2024 dan akan melengkapi struktur jaringan jalan tol di wilayah Jabodetabek.

Sementara itu LU utama lainnya seperti LU Infokom juga diprakirakan masih mencatatkan pertumbuhan yang positif didorong oleh tingginya produksi film dan permintaan film di berbagai kanal (bioskop, dan beberapa aplikasi *mobile streaming*) sehingga diprakirakan akan mendorong pertumbuhan LU Infokom. Selain itu, meningkatnya penggunaan paket data pada periode pemilu dan pilkada serentak juga diprakirakan akan mendorong pertumbuhan LU infokom. Pertumbuhan LU Infokom juga didorong oleh meningkatnya preferensi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi digital sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang terus berlangsung. LU Transportasi dan Pergudangan juga diprakirakan tumbuh meningkat, didorong oleh kinerja transportasi logistik dalam mendukung kegiatan perdagangan *online* serta meningkatnya transportasi penumpang sejalan dengan mobilitas yang semakin meningkat di tengah melambatnya transportasi barang untuk ekspor. Adapun lapangan usaha lainnya juga diprakirakan masih akan tetap tumbuh positif pada tahun 2024 seperti LU Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman seiring meningkatnya konsumsi masyarakat serta pelaksanaan *event* dan MICE skala internasional, LU Jasa Perusahaan seiring dengan pelaksanaan berbagai *event* sehingga meningkatkan kinerja *event organizer/EO*, LU Jasa Keuangan seiring dengan intermediasi perbankan yang diprakirakan masih tetap kuat terutama dipengaruhi oleh masih tingginya penyaluran kredit, dan LU lainnya.

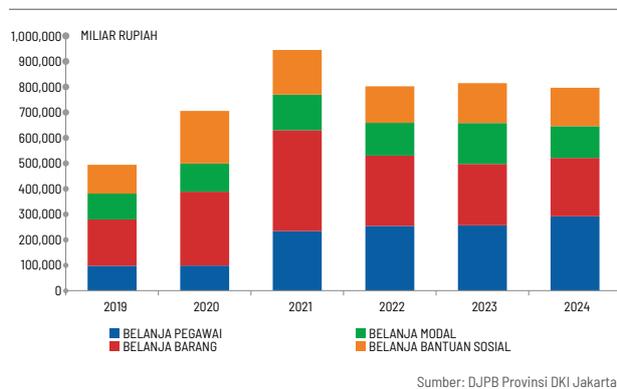
### Prospek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Belanja Kementerian Negara / Lembaga (K/L) di Provinsi DKI Jakarta 2024

Pada 2024, pagu anggaran APBD DKI Jakarta meningkat sebesar 2,71% dari Rp 79,56 Triliun menjadi Rp 81,72 Triliun. Dari sisi pendapatan, pagu RAPBD DKI Jakarta 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,52% dibandingkan APBD-P 2023 dari Rp 70,66 Triliun menjadi Rp 72,45 Triliun. Kenaikan pagu RAPBD DKI Jakarta 2024 dari sisi pendapatan bersumber dari kenaikan komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tumbuh mencapai 50,77%. Sementara itu komponen pajak dan retribusi juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 8,17% dan 7,53%. Kenaikan pagu pendapatan dalam RAPBD DKI Jakarta 2024 diprakirakan akan mendorong belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2024.

Dari sisi belanja, pagu RAPBD DKI Jakarta 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,63% dibandingkan APBD-P 2023 dari Rp 72,14 Triliun menjadi Rp 72,60 Triliun. Berdasarkan komponennya, kenaikan pagu RAPBD DKI Jakarta 2024 terutama bersumber dari kenaikan komponen belanja tidak terduga yang naik mencapai 83,88%, sejalan dengan berlangsungnya periode pemilu 2024. Selain itu komponen belanja pegawai serta belanja barang dan jasa juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 6,85% dan 0,24% sejalan dengan naiknya gaji ASN di 2024 serta meningkatnya belanja barang dan jasa untuk



Grafik 8.4 Perkembangan Pagu APBD DKI Jakarta 2024



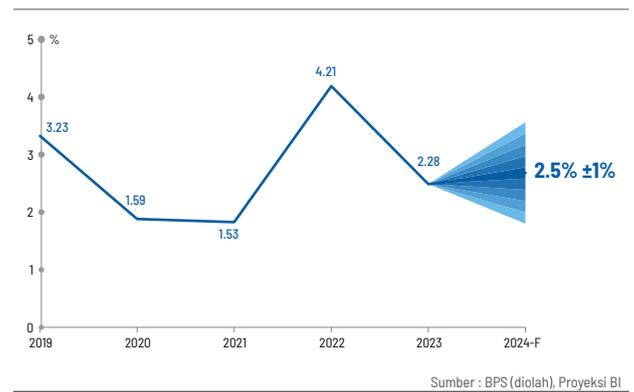
Grafik 8.5 Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta 2024

aktivitas pemilu. Di sisi lain, belanja subsidi, hibah, dan bansos turun masing-masing sebesar 5,16%; 10,82%; dan 30,02%. Penurunan pada belanja bansos terutama disebabkan karena adanya evaluasi/perbaikan data penerima bansos untuk optimalisasi penerimaan bansos yang lebih tepat sasaran di 2024.

Sementara itu, pagu anggaran belanja Pemerintah Pusat melalui APBN di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 mengalami penurunan. Pagu belanja Pemerintah Pusat melalui APBN ditetapkan sebesar Rp1.589,33 Triliun atau turun 6,58% (yoy) dibandingkan belanja Pemerintah Pusat melalui APBN-P tahun 2023 yang sebesar Rp1.701,32 Triliun. Adapun penurunan total pagu tersebut terutama bersumber dari penurunan Belanja Modal (-22,80% yoy), diikuti oleh Belanja Barang (-4,60%) dan Belanja Bantuan Sosial (-3,44%) di tengah peningkatan Belanja Pegawai yang mencapai 13,67% (yoy) (Grafik 8.8).

### Prospek Inflasi Jakarta

Pada 2024, inflasi Jakarta diperkirakan masih akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi yang semakin rendah pada kisaran 2,5±1% (yoy) (Grafik 8.6). Prakiraan tersebut terutama didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif pasca berlangsungnya el-nino pada 2023 yang juga didukung oleh penguatan program pengendalian inflasi melalui GNPIP. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai risiko yang diperkirakan akan mendorong peningkatan inflasi pada 2024 yaitu :



Grafik 8.6 Proyeksi Inflasi DKI Jakarta 2024

1. Semakin meluasnya tensi geopolitik sehingga berdampak pada volatilitas harga energi dan pangan global;
2. Meningkatnya harga bahan pangan untuk mendukung aktivitas pilkada serentak;
3. Meningkatnya harga sewa rumah dan kontrak rumah akibat semakin meningkatnya permintaan;
4. Pergeseran musim tanam dan musim panen diperkirakan akan mempengaruhi kenaikan harga pangan;
5. Rencana kenaikan berbagai layanan publik; serta
6. Meningkatnya harga emas global sehingga mendorong kenaikan pada harga emas perhiasan;

Terkendalinya laju inflasi di DKI Jakarta pada 2024 tidak terlepas dari dukungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jakarta untuk menjaga kestabilan inflasi melalui 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain berupa pasar murah dan program pangan bersubsidi berkolaborasi dengan BUMD Pangan, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), penyelenggaraan *talkshow* untuk menjaga ekspektasi masyarakat serta melakukan *Capacity Building* TPID. Selain itu, untuk menjaga stabilitas harga pangan, Bank Indonesia bersama dengan TPIP dan TPID Provinsi DKI Jakarta juga secara konsisten melaksanakan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dilakukan melalui Operasi Pasar, hilirisasi pangan dan diversifikasi produk olahan, penyaluran alsintan dan saprodi untuk peningkatan produksi pangan, fasilitasi distribusi pangan, penguatan infrastruktur digitalisasi informasi pangan, dan penguatan koordinasi dan komunikasi melalui *High Level Meeting* TPID.

### Faktor Risiko Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Berbagai risiko yang muncul pada 2024 yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi global, meluasnya ketegangan geopolitik, serta masih berlanjutnya kebijakan moneter ketat bank sentral negara-negara di dunia memberikan potensi risiko menahan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2024. Di samping itu, dari sisi domestik, juga terdapat berbagai tantangan yang dapat berdampak terhadap

perekonomian Jakarta dan perlu untuk diwaspadai, baik yang bersifat struktural maupun siklikal. Tantangan struktural bersumber dari daya dukung Jakarta seperti ketersediaan lahan, tingkat upah minimum, ketersediaan air yang semakin terbatas, serta masalah struktural lainnya seperti kemacetan, ketimpangan sosial, dan polusi udara. Sementara itu, tantangan yang bersifat siklikal bersumber dari transisi perpindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Oleh karena itu, untuk dapat semakin memperkuat daya tahan perekonomian Jakarta di tengah berbagai tantangan yang terutama bersumber dari eksternal, serta dalam rangka meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global, perlu dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui :

1. Mendorong kegiatan MICE dan *event* (musik, olahraga, dan lainnya) di Jakarta, serta *urban tourism* yang dibagi menjadi 8 kategori yaitu wisata rekreasi (Ancol, TMII), sejarah (Kampung Tugu, Kampung Marunda), belanja (Pasar Barang Antik di Jl. Surabaya), olahraga (Aquatic Centre, Jakarta Velodrome), religi (Masjid Istiqlal, Gereja Katedral), alam dan air (Muara Angke, Pulau Seribu), alam terbuka (Urban Forest Cipete), dan MICE (Balai Sidang Jakarta Convention Centre);
2. Mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor potensial yaitu sektor perdagangan (*hub ecommerce*), sektor informasi komunikasi (ekosistem digital dan *start up*), sektor keuangan (*regional financial center*), sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (MICE dan Urban), sektor jasa pendidikan, serta sektor jasa kesehatan; termasuk UMKM go digital dan go ekspor;
3. Mendorong iklim investasi melalui optimalisasi sektor prioritas melalui kemudahan iklim investasi;
4. Percepatan program sinkronisasi (pengelolaan sampah, penanganan banjir, infrastruktur, air minum, dan energi) Jabodetabekpunjur melalui kawasan aglomerasi;
5. Mendorong digitalisasi pemda dan masyarakat, melalui: (i) Inklusi dan resiliensi SP Non Tunai (terutama QRIS) terutama di beberapa sektor potensial (pariwisata, kesehatan dan pendidikan); (ii) Peningkatan literasi digital melalui edukasi publik dan kampanye QRIS a.l Jakarta Kreatif Festival, QRIS Fun Zumba dan QRIS Jelajah Indonesia; serta (iii) Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) dalam mempertahankan status Pemda Digital dan peningkatan Indeks ETPD dengan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi melalui QRIS, akselerasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah serta Sinergi dan Kolaborasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Sementara itu terkait inflasi, inflasi berpotensi kembali meningkat apabila harga komoditas pangan dan energi global kembali meningkat dan tidak dapat diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, penguatan sinergi pengendalian inflasi Jakarta bersama dengan TPIP dan TPID juga terus didorong melalui :

1. Penguatan strategi 4K dalam inflasi pangan, salah satunya dengan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) utamanya metode *on farm* dengan mitra daerah produsen;
2. Menimbang kembali rencana penyesuaian tarif layanan publik a.l. dengan memperhatikan besaran dan waktu yang tepat hingga komunikasi kebijakan yang efektif kepada masyarakat;
3. Sinergi pengendalian inflasi dengan Bodetabek utamanya melalui rapat koordinasi, penguatan KAD, hingga penguatan pertukaran data dan informasi; serta (iv) monitoring potensi dan dampak rambatan global.

Di samping itu, penguatan ekosistem digital juga perlu untuk terus didorong yang tidak hanya terkait dengan transaksi Pemerintah Daerah, digitalisasi transportasi, serta digitalisasi bantuan sosial namun juga menasar pada sektor ekonomi potensial seperti pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Pengembangan UMKM juga akan terus didorong dan diarahkan untuk menjadi pemasok sektor-sektor ekonomi yang produktif seperti industri dan pariwisata melalui pengembangan kapasitas dan pembiayaan. Di sisi lain, dalam rangka upaya stabilisasi harga, UMKM dapat dikembangkan dengan berfokus untuk mendukung kerja sama antar daerah dalam rangka menjaga pasokan bahan pangan. Inovasi juga perlu diperkuat dalam mengakselerasi perkembangan digitalisasi UMKM melalui program pengembangan UMKM digital dan UMKM ekspor. Lebih lanjut, inovasi kebijakan dan program juga diperlukan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta ekonomi dan keuangan hijau, baik untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan.

**Tabel 8.3** Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta 2024

JENIS RISIKO	JALUR TRANSMISI	PROBABILITAS	KETERAMGAM
<b>Pertumbuhan ekonomi</b>			
Proses transisi perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) tidak berjalan dengan lancar	Menahan kinerja konsumsi Pemerintah dan investasi	Moderat	Menahan pertumbuhan ekonomi
Pembangunan proyek strategis Pemerintah yang mundur dari timeline	Menahan kinerja investasi dan konsumsi Pemerintah	Moderat	Menahan pertumbuhan ekonomi
Perlambatan ekonomi yang lebih dalam pada negara tujuan ekspor dan impor	Menahan kinerja konsumsi RT, ekspor dan investasi	High	Menahan pertumbuhan ekonomi
Berlanjutnya pembatasan kuota ekspor di beberapa negara	Menahan kinerja ekspor	High	Menahan pertumbuhan ekonomi
Konflik antar negara terus berlanjut/tensi geopolitik terus meningkat	Menahan kinerja ekspor dan impor	High	Menahan pertumbuhan ekonomi
<b>Inflasi</b>			
Kembali meningkatnya harga emas	Kenaikan inflasi inti	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Meningkatnya harga berbagai bahan pangan didorong oleh meningkatnya permintaan dalam rangka mendukung pilkada serentak	Kenaikan inflasi pangan	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Meningkatnya harga sewa rumah dan kontrak rumah seiring dengan meningkatnya permintaan	Kenaikan inflasi inti	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Kembali meningkatnya harga minyak dunia sejalan dengan tensi geopolitik yang masih berlanjut	Kenaikan harga energi	High	Meningkatkan tekanan inflasi
Realisasi kebijakan Pemerintah : kenaikan tarif air PAM, kenaikan tarif jalan tol, kenaikan tarif Trans Jakarta, kembali diberlakukannya beberapa retribusi (retribusi sewa rumah dan parkir)	Kenaikan tarif air PAM, tarif jalan tol, tarif angkutan, tarif sewa rumah dan kontrak rumah	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Bergesernya musim tanam dan panen pasca berlangsungnya el-nino sehingga akan mempengaruhi produksi pangan	Kenaikan harga bahan pangan strategis khususnya komoditas beras	High	Meningkatkan tekanan inflasi

# Tim Penyusun

## **PENGARAH**

Arlyana Abubakar

## **PENANGGUNG JAWAB**

Sahminan

## **KOORDINATOR PENYUSUN**

Muhamad Shiroth

## **TIM PENULIS**

Reska Prasetya

Dewa Ayu Komang Bintari Dewi

Muhamad Rifki Maulana

Andi Nahla Malika Nurilah

Binar Tyas Aini

Dhia Atika Anggraini

Alhamdi Alfi Fajri

Alfonsus Aristo Wibowo

Herada Kiptane Arga

Chendy Dea Andriany

## **KONTRIBUTOR**

Divisi Implementasi KEKDA Provinsi

Divisi Perizinan dan Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran

Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran

Fungsi Data Statistik Ekonomi dan Keuangan

## **KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 42 – Jakarta – 10410

No. Telp. 62-21-35110321



Halaman ini sengaja dikosongkan



## KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 42  
Jakarta - 10410



SCAN HERE

Google

LPP BI DKI JAKARTA

Ebook dapat diunduh melalui menu pencarian  
google atau pindai QR code atau tautan berikut:

[bit.ly/LPP-DKI](https://bit.ly/LPP-DKI)

